



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

RPJMD

KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2021-2026



**DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG
MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA**



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membayangkan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
14. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
 - a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
 - c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, serta kabupaten/kota yang berbatasan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah Kabupaten, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRW; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah Kabupaten yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi :

- BAB I. PENDAHULUAN**
Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Memuat gambaran secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada perumusan ke dalam sub bab.
- BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**
Memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
- BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP

Berisi kata-kata penutup RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB IV ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan perencanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan perencanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2021


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR //
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT: (11/302/2021).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun.

Penyusunan Dokumen RPJMD ini merupakan bagian dari proses penyusunan RPJMD sesuai amanat ketentuan pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Ruang lingkup penyusunan RPJMD ini mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan dokumen RPJMD ini dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.

Kontribusi berupa masukan saran, ide dan pemikiran dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen RPJMD ini. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berperan aktif dari awal penyusunan dokumen ini sampai pada tahap penetapan dengan Peraturan Daerah, semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda.

Tasikmalaya, Desember 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-11

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan
RPJMN Tahun 2020-2024 I-12

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 I-14

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan
RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 I-16

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan
RTRW Kabupaten Tasikmalaya..... I-18

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten
Tasikmalaya I-18

1.4. Maksud dan Tujuan I-19

1.5. Sistematika Penulisan RPJMD I-20

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Aspek Geografis dan Demografi II-2

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi..... II-2

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis..... II-4

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah..... II-18

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana..... II-20

2.1.5. Kondisi Demografi..... II-34

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-44

2.2.1. Fokus Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi II-45

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-55

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II-78

2.3. Aspek Pelayanan Umum..... II-81

2.3.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II-81

2.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-95

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan II-113

2.3.4. Urusan Pemerintahan Penunjang II-120

2.4. Aspek Daya Saing..... II-132

2.4.1. Iklim Investasi..... II-132

2.4.2. Prasarana Wilayah/Infrastruktur..... II-133

2.4.3. Sumber Daya Manusia (SDM)	II-135
2.5.Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan	II-135
2.6.Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021	II-165
2.7.Pandemi Covid-19	II-170
2.8.Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-175
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1.Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya	III-3
3.1.1.1. Pendapatan Daerah	III-7
3.1.1.2. Belanja Daerah	III-14
3.1.1.3. Pembiayaan	III-18
3.1.2. Neraca Daerah	III-21
3.2.Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-28
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-34
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-35
3.3.Kerangka Pendanaan.....	III-41
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-41
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-47
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	IV-2
4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	IV-9
4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-20
4.1.4. Urusan Penunjang.....	IV-23
4.1.5. Permasalahan Berdasarkan Pengintegrasian Dokumen KLHS	IV-24
4.2. Isu Strategis	IV-32
4.2.1. Isu Internasional.....	IV-32
4.2.1.1. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs).....	IV-32
4.2.1.2. Revolusi Industri 4.0	IV-34
4.2.2. Isu Nasional.....	IV-35
4.2.2.1. Isu Strategis Dalam Kajian RPJMN.....	IV-35
4.2.2.2. Covid-19 dan Kebijakan Pemerintahan tentang New Normal ..	IV-39
4.2.3. Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	IV-41
4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya	IV-42
4.2.4.1. Telaahan terhadap RPJP Kab. Tasikmalaya Tahun 2005-2025.	IV-42
4.2.5. Telaahan RPJMD Daerah Lain	IV-61
4.2.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	IV-64
4.2.7. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya	IV-75
BAB V VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1

5.1.Visi..... V-1

5.2.Misi V-7

5.3.Tujuan dan Sasaran..... V-9

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH..... VI-1

6.1.Strategi dan Arah Kebijakan..... VI-1

6.2.Program Pembangunan Daerah..... VI-14

6.3.Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial..... VI-74

6.3.1. Rencana Struktur Ruang..... VI-74

6.3.1.1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan..... VI-75

6.3.1.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana..... VI-84

6.3.1.2.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat VI-84

6.3.1.2.2 Sistem Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan VI-88

6.3.1.2.3 Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan VI-90

6.3.1.2.4 Rencana Sistem Jaringan Kereta Api..... VI-93

6.3.1.2.5 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut VI-94

6.3.1.2.6 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya VI-94

6.3.2. Rencana Pola Ruang..... VI-104

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH..... VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAHVIII-1

8.1 Indikator Makro Pembangunan VIII-3

8.2 Indikator Kinerja Utama VIII-4

8.3 Indikator Kinerja Daerah VIII-7

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Pedoman Transisi..... IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya	II-3
Tabel 2.2	Sebaran Ketinggian Perkecamatan di Kabupaten Tasikmalaya ..	II-5
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	II-11
Tabel 2.4	Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013	II-12
Tabel 2.5	Curah Hujan per Kecamatan	II-14
Tabel 2.6	Tata Guna Lahan di Kabupaten Tasikmalaya	II-16
Tabel 2.7	Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya	II-21
Tabel 2.8	Resiko Bencana Banjir perkecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-22
Tabel 2.9	Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-24
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-25
Tabel 2.11	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-26
Tabel 2.12	Potensi Bahaya Gempa bumi Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-26
Tabel 2.13	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-28
Tabel 2.14	Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-29
Tabel 2.15	Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Galunggung per-Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-30
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-31
Tabel 2.17	Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-33
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.19	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-38
Tabel 2.20	PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.21	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020 Kabupaten Tasikmalaya	II-47
Tabel 2.22	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020 Kabupaten Tasikmalaya	II-49

Tabel 2.23	Rekapitulasi DTKS Per Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-62
Tabel 2.24	Perkembangan Urusan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-80
Tabel 2.25	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-81
Tabel 2.26	Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.27	Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.28	Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-88
Tabel 2.29	Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.30	Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.32	Hasil Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-94
Tabel 2.33	Indikator Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.34	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.35	Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2.36	Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-99
Tabel 2.37	Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.38	Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.39	Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.40	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.41	Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.42	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	

	Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-107
Tabel 2.43	Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-108
Tabel 2.44	Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-110
Tabel 2.45	Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-111
Tabel 2.46	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-111
Tabel 2.47	Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2.48	Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-113
Tabel 2.49	Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-113
Tabel 2.50	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-114
Tabel 2.51	Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-117
Tabel 2.52	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-118
Tabel 2.53	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-119
Tabel 2.54	Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-120
Tabel 2.55	Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-122
Tabel 2.56	Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-123
Tabel 2.57	Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-125
Tabel 2.58	Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-127
Tabel 2.59	Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-128
Tabel 2.60	Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-131
Tabel 2.61	Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-132
Tabel 2.62	Indikator Kinerja yang menjadi parameter Iklim Investasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-133

Tabel 2.63	Prasarana Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-133
Tabel 2.64	Beberapa Fasilitas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2020	II-134
Tabel 2.65	<i>Dependency Ratio</i> Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020...	II-135
Tabel 2.66	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-136
Tabel 2.67	Sandingan Ketercapaian Indikator Makro antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tasikmalaya.....	II-164
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya	II-166
Tabel 2.69	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.....	II-176
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	III-4
Tabel 3.2	Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	III-9
Tabel 3.3	Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2016	III-13
Tabel 3.4	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2016.....	III-13
Tabel 3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	III-16
Tabel 3.6	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	III-20
Tabel 3.7	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tasikmalaya	III-22
Tabel 3.8	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	III-24
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	III-34
Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	III-37
Tabel 3.11	Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	III-38
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	III-40
Tabel 3.13	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Tasikmalaya	III-43

Tabel 3.14	Proyeksi dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2021-2026	III-45
Tabel 3.15	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026	III-48
Tabel 3.16	Prioritas Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	III-51
Tabel 4.1	Analisis Masalah terhadap Capaian TPB pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Tahun 2021-2026 di Kabupaten Tasikmalaya	IV-28
Tabel 4.2	Identifikasi RPJMD Daerah Lain	IV-62
Tabel 4.3	Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 1 tentang Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	IV-66
Tabel 4.4	Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 3 tentang Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	IV-69
Tabel 4.5	Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 6 tentang Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.....	IV-70
Tabel 4.6	Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 11 tentang Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.....	IV-72
Tabel 4.7	Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 15 tentang Ekosistem Darat	IV-74
Tabel 4.8	Sinkronisasi Isu Strategis Pembangunan Daerah Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kab. Tasikmalaya.....	IV-92
Tabel 5.1	Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	V-4
Tabel 5.2	Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	V-8
Tabel 5.3	Visi, Misi, dan Tujuan.....	V-11
Tabel 5.4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-12
Tabel 5.5	Keterkaitan Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	V-14
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.....	VI-12
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	VI-15
Tabel 6.4	Rencana Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya	VI-79
Tabel 6.5	Jaringan Jalan Nasional yang Melintasi Wilayah Kab. Tasikmalaya	VI-84
Tabel 6.6	Rencana Jaringan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya	VI-86
Tabel 6.7	Rencana Pengembangan Terminal Penumpang	

	di Kabupaten Tasikmalaya.....	VI-89
Tabel 6.8	Rencana Pengembangan Jaringan Trayek	VI-90
Tabel 6.9	Konsep dan Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.....	VI-95
Tabel 6.10	Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	VI-107
Tabel 6.11	Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Tasikmalaya.....	VI-108
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	VII-5
Tabel 8.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	VIII-3
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	VIII-5
Tabel 8.3	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	VIII-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan
Lainya..... I-12

Gambar 2.1 Sistematika Gambaran Umum Daerah II-1

Gambar 2.2 Peta Kabupaten Tasikmalaya II-3

Gambar 2.3 Peta Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya..... II-6

Gambar 2.4 Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya II-7

Gambar 2.5 Proporsi Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya..... II-8

Gambar 2.6 Peta Klimatologi Kabupaten Tasikmalaya II-14

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Wilayah II-18

Gambar 2.8 Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya II-23

Gambar 2.9 Peta Sebaran Bencana Gunung Api Galunggung II-31

Gambar 2.10 Peta Sebaran Longsor Kabupaten Tasikmalaya II-33

Gambar 2.11 Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya..... II-34

Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020..... II-35

Gambar 2.13 Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 II-36

Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016-2020 II-38

Gambar 2.15 Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km2 Menurut Kecamatan di
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 II-40

Gambar 2.16 Sex Ratio Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2020 II-41

Gambar 2.17 *Dependency Ratio* Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 II-42

Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2015-2020 II-51

Gambar 2.19 Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020..... II-53

Gambar 2.20 Gini Ratio Tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 . II-55

Gambar 2.21 Garis Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020..... II-58

Gambar 2.22 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2020 II-59

Gambar 2.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 II-60

Gambar 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016-2020 II-64

Gambar 2.25 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.. II-65

Gambar 2.26 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016-2020 II-67

Gambar 2.27 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016-2020 II-68

Gambar 2.28 Pengeluaran per Kapita (Rp, 000) Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2020 II-70

Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-74
Gambar 2.30 Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Tasikmalaya	II-77
Gambar 2.31 Ketercapaian Indikator per TPB Kabupaten Tasikmalaya	II-78
Gambar 2.32 Grafik Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-80
Gambar 2.33 Jumlah Kasus Pandemi Covid-19 Tingkat Global, Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kab. Tasikmalaya	II-171
Gambar 2.34 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-173
Gambar 2.35 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-174
Gambar 3.1 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	III-12
Gambar 3.2 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	III-14
Gambar 3.3 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	III-18
Gambar 3.4 Proporsi Belanja Langsung Terhadap Total Pengeluaran Tahun 2016-2020	III-35
Gambar 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Prov. Jabar dan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	IV-87
Gambar 6.1 Peta Rencana Struktur Ruang	VI-104
Gambar 6.2 Peta Rencana Pola Ruang	VI-106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat: 1) arah kebijakan keuangan daerah, 2) strategi pembangunan daerah, 3) kebijakan umum, dan 4) program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan. RPJMD juga dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sementara itu Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. Selain itu, muatan RPJMD juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, dimana Kabupaten Tasikmalaya termasuk salah satu dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, telah menetapkan pasangan H. Ade Sugianto, S.IP dan H. Cecep Nurul Yakin S.Pd., M.AP. sebagai Bupati Tasikmalaya dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih.

Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat. Pelantikan dilaksanakan pada Senin 26 April 2021 di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil. Pelantikan tersebut merupakan pelantikan gelombang kedua hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang melantik dua kepala daerah dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya, pelantikan tidak bisa dilakukan bersamaan kepala daerah terpilih lain karena ada gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Pada Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penentuan tahun periodisasi RPJMD hasil pilkada serentak tahun 2020 mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Sehingga periodisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah Tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025 yang merupakan fase keempat atau fase terakhir yaitu tahun 2021-2025. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Tasikmalaya di tahun berkenaan.

Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan RPJMD Pasal 41 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada tanggal 27 April 2021. Proses ini merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan daerah.

Rancangan Awal RPJMD ini kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik pada tanggal 27 Mei 2021 yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), seluruh Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya untuk memperoleh kesepakatan. Dokumen Rancangan Awal RPJMD disampaikan kepada DPRD pada tanggal 4 Juni 2021 sesuai dengan Surat Bupati Tasikmalaya Nomor P/1502/RC.03.02/Bapp/V/2021, selanjutnya pembahasan Rancangan Awal RPJMD oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan sampai dengan tanggal 17 Juni 2021, dan BAPPEDA dihadirkan pada pembahasan bersama pada tanggal 14 dan 15 Juni 2021. Pada Tanggal 18 Juni 2021 melalui surat Nomor 172/1811/DPRD, DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan undangan pelaksanaan rapat paripurna kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 namun tidak jadi dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa apabila dalam waktu 10 hari sejak diterima oleh DPRD belum tercapai kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Dalam proses selanjutnya, Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk

memperoleh masukan. Pelaksanaan konsultasi atas Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Juni 2021. Rancangan Awal RPJMD juga disampaikan kepada semua perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari Perangkat Daerah. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh Perangkat Daerah menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJMD pada tanggal 28 Juli 2021.

Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD dimulai tanggal 29 Juli sampai dengan 19 Agustus 2021. Tahap ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD.

Rancangan Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD ini adalah ditetapkan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Dari sisi tahapan waktu pelaksanaan, RPJMD secara lebih operasional akan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD diturunkan menjadi target tahunan dalam RKPD, berikut program, kegiatan dan sub kegiatan untuk merealisasikannya.

Dari sisi pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan, RPJMD dijabarkan pada dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang disebut dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Semua target capaian dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang ada pada dokumen RPJMD, seluruhnya terbagi secara lebih terperinci ke dalam dokumen

Renstra sesuai dengan kewenangan dan urusan yang ditangani oleh masing-masing Perangkat Daerah. Renstra diturunkan dalam dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

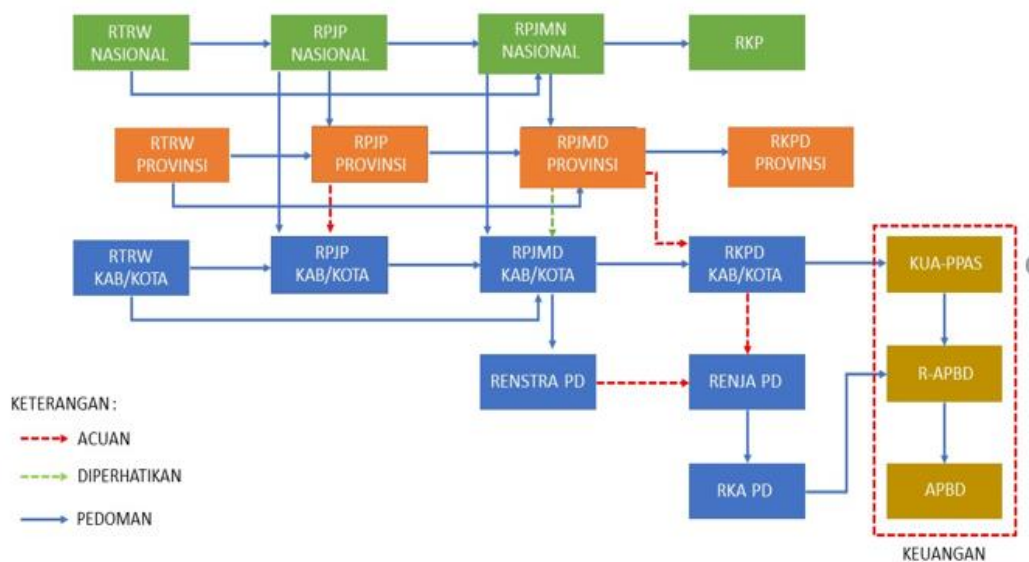
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
36. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya
Sumber : Hasil Analisis, 2021

Selain dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain, dokumen RPJMD juga terkait dengan dokumen anggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
- b. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
- c. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa visi pembangunan Indonesia pada tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pada dokumen RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Secara spesifik, Kabupaten Tasikmalaya disebutkan masuk ke dalam koridor pemerataan bersama sembilan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Arah Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan panduan (*guidance*) bagi perumusan arah Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang dituangkan dalam dokumen RPJMD, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perumusan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMD.

Penyelarasan RPJMD 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2025 bertujuan untuk:

1. Menjamin konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD;
2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional;
3. Optimalisasi tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang berorientasi pada hasil;
5. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah;
6. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal inilah maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tasikmalaya juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menyatakan bahwa visi pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 telah menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pembangunan Provinsi seiring dengan perubahan RPJMD Propinsi Jawa Barat 2018-2023 yang diakibatkan dari adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk terjadinya kejadian luar biasa wabah Covid-19.

Kesesuaian antara dokumen RPJMD kabupaten/kota dengan dengan RPJMD provinsi juga diamanatkan dalam Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN,

kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD, tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Penyelarasan substansi materi Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMD daerah kabupaten/kota sekitar dilakukan selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan juga dimaksudkan agar tercipta harmonisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian integral dari pembangunan provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025, RPJMD fase ke-4 diprioritaskan pada terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Pada fase ke-4 ini pembangunan daerah menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Indikatornya adalah: 1) tercapainya Indeks Pembangunan manusia (IPM) sebesar 80,05 point (berdasarkan metode perhitungan lama), 2) laju pertumbuhan ekonomi 5 - 6 persen, 3) proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk sebesar 7 %, dengan jumlah penduduk sebesar 1.910.874 jiwa dan 5) rata-rata pertumbuhan penduduk 0.88%.

Mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya, maka target-target indikator pembangunan, strategi, kebijakan, program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada target indikator pembangunan dan program prioritas dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025.

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarlaku, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Kemudian ditegaskan kembali pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul Pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya Pasal 269 dan Pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Tasikmalaya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 secara kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, Provinsi maupun kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan RTRW yang ditetapkan dalam indikasi program utama dan kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang dan pola ruang.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya

Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 juga mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Regulasi tersebut mengamanatkan pencapaian poin-poin turunan dari tujuan dan sasaran global dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* sampai dengan tahun 2030. KLHS-RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

KLHS-RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB meliputi isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. KLHS-RPJMD menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD). Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari kajian pada dokumen KLHS RPJMD dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan elemen lainnya) untuk membuat kebijakan pembangunan selama lima tahun yang dapat diimplementasikan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih. Maka Tujuan dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Melaksanakan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025 fase keempat atau fase terakhir yaitu tahun 2021-2025.
2. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam waktu lima tahun kedepan.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD), dan perencanaan penganggarnya.

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun.
6. Memberikan tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan RPJMD

Penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Materi muatan bab I terdiri atas:

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal, termasuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Materi muatan bab II terdiri atas:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan yang fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara yang fokus pada kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan yang fokus pada urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Materi muatan bab III terdiri atas :

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya

3.1.2 Neraca Daerah

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.2 Analisis Pembiayaan

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Materi muatan bab IV terdiri atas :

4.1. Permasalahan Pembangunan

Bagian ini memuat permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

4.2. Isu Strategis

Bagian ini memuat isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan paling prioritas untuk

diselesaikan maupun isu dari dunia international, nasional maupun regional.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disertai dengan tujuan dan sasarannya. Materi muatan bab V terdiri atas:

5.1. Visi

Pada bagian ini diuraikan mengenai visi Kepala Daerah terpilih beserta dengan penjelasannya.

5.2. Misi

Pada bagian ini diuraikan mengenai Misi yang merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini diuraikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Materi muatan bab VI terdiri atas:

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.2. Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

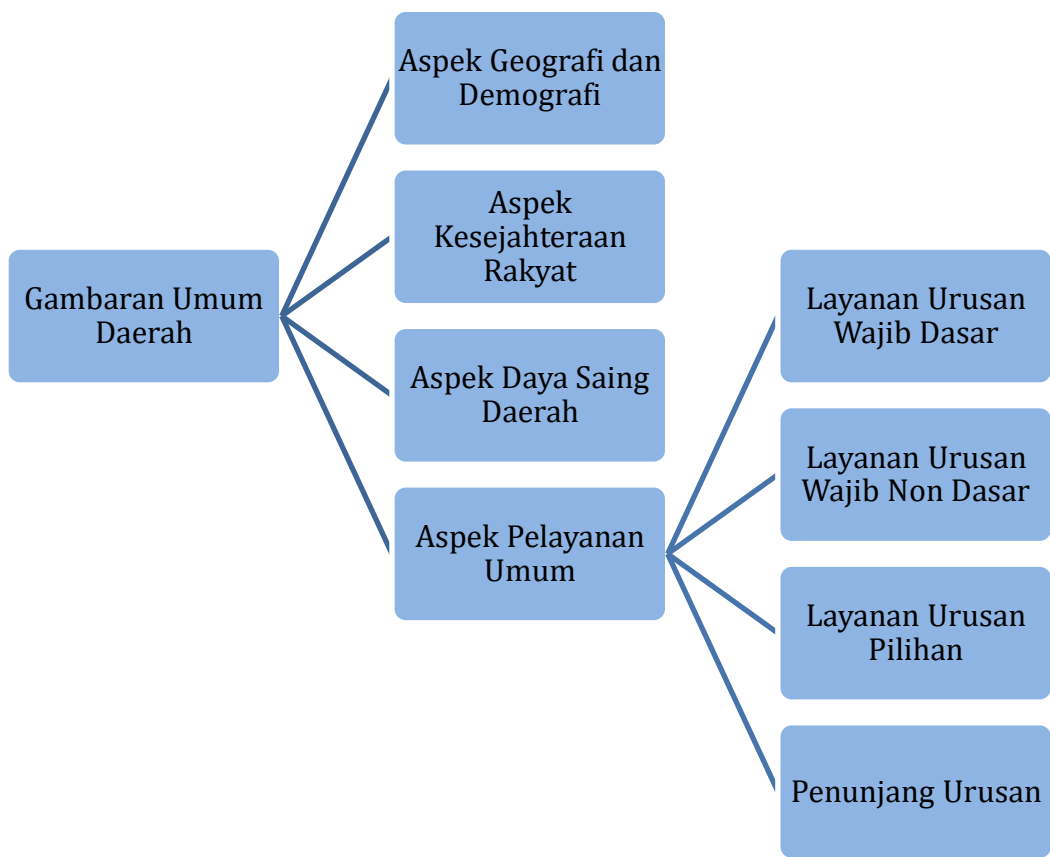
Berisi kata-kata penutup RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Materi muatan bab IX terdiri atas:

9.1. Pedoman Transisi

9.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi umum daerah Kabupaten Tasikmalaya digambarkan melalui empat aspek yaitu: 1) aspek geografi dan demografi, 2) aspek kesejahteraan rakyat, 3) aspek pelayanan umum dan 4) aspek daya saing daerah sebagaimana diskemakan pada Gambar 2.1. Keempat aspek ini menggambarkan secara umum kondisi daerah Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu juga digunakan sebagai salah satu dasar analisis dalam perumusan isu strategis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.1.
Sistematika Gambaran Umum Daerah
*Sumber : Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026*

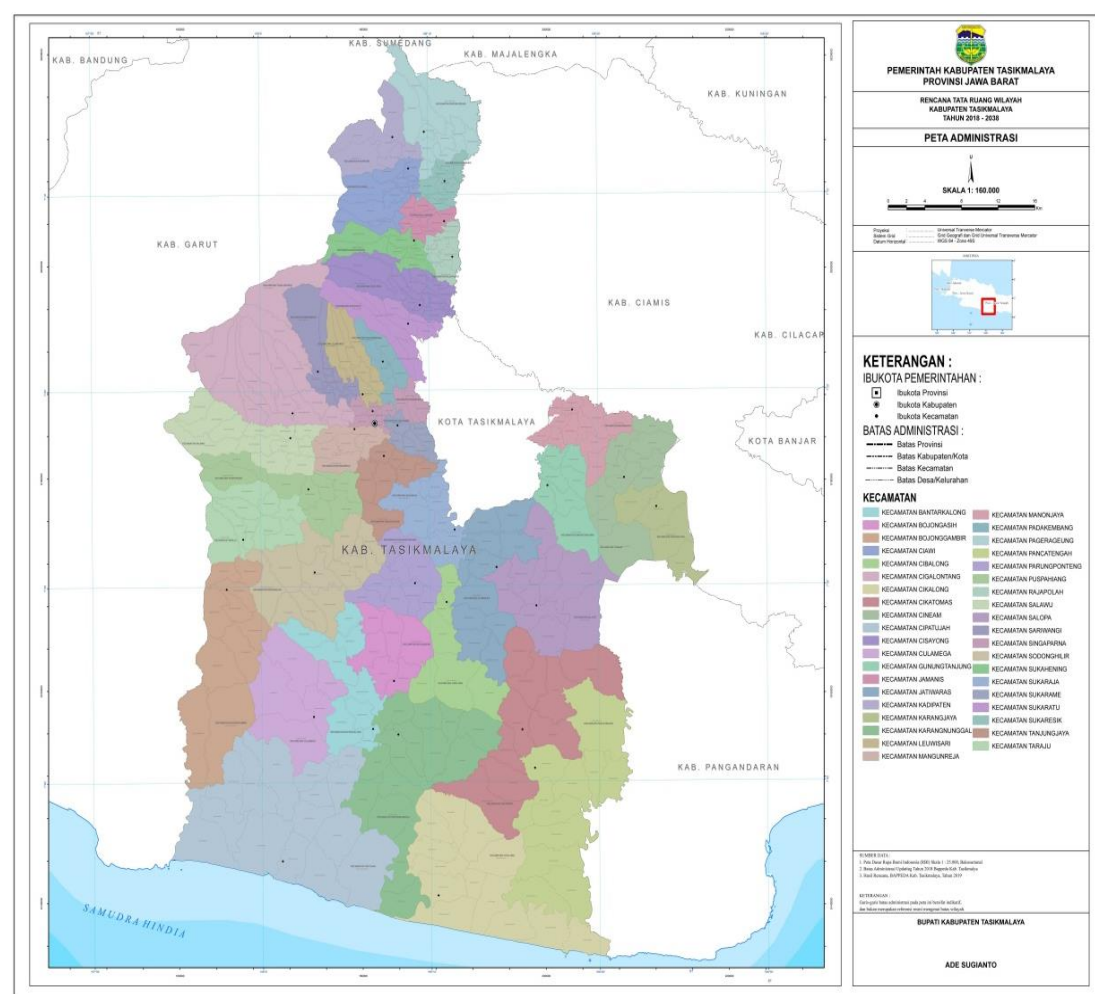
2.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 270.678 Ha. Secara geografis berbatasan dengan wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut

Kabupaten Tasikmalaya secara historis tercatat lahir sebagai wilayah pemerintahan sejak tanggal 21 Agustus 1111 M berbentuk kerajaan Galunggung (Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab Tasikmalaya, 2021). Kemudian mengalami pasang surut dengan menjadi bagian dari Kerajaan Pajajaran dan kemudian Kerajaan Mataram lalu dibawah pemerintah Kolonial Belanda. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya secara definitif menjadi Daerah Tingkat II melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 Desa. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2.
Peta Kabupaten Tasikmalaya
Sumber : Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Luas wilayah administratif dan Jumlah Desa pada 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Hektar	Presentase	
1	Kecamatan Bantarkalong	6.415,23	2,37	8
2	Kecamatan Bojongasih	5.186,45	1,92	6
3	Kecamatan Bojonggambir	12.682,30	4,69	10
4	Kecamatan Ciawi	4.458,17	1,65	11
5	Kecamatan Cibalong	6.174,26	2,28	6
6	Kecamatan Cigalontang	14.567,21	5,38	16
7	Kecamatan Cikalong	16.086,96	5,94	13
8	Kecamatan Cikatomas	14.221,17	5,25	9
9	Kecamatan Cineam	7.413,41	2,74	10
10	Kecamatan Cipatujah	24.199,04	8,94	15
11	Kecamatan Cisayong	5.032,34	1,86	13

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Hektar	Presentase	
12	Kecamatan Culamega	8.629,00	3,19	5
13	Kecamatan Gunungtanjung	4.777,82	1,77	7
14	Kecamatan Jamanis	1.597,86	0,59	8
15	Kecamatan Jatiwaras	8.906,05	3,29	11
16	Kecamatan Kadipaten	4.305,49	1,59	6
17	Kecamatan Karangjaya	4.597,76	1,70	4
18	Kecamatan Karangnunggal	15.325,97	5,66	14
19	Kecamatan Leuwisari	3.116,95	1,15	7
20	Kecamatan Mangunreja	2.671,81	0,99	6
21	Kecamatan Manonjaya	4.343,59	1,60	12
22	Kecamatan Padakembang	1.955,38	0,72	5
23	Kecamatan Pagerageung	6.430,35	2,38	10
24	Kecamatan Pancatengah	16.211,30	5,99	11
25	Kecamatan Parungponteng	5.049,56	1,87	8
26	Kecamatan Puspahiang	5.765,26	2,13	8
27	Kecamatan Rajapolah	1.634,00	0,60	8
28	Kecamatan Salawu	7.027,39	2,60	12
29	Kecamatan Salopa	10.500,68	3,88	9
30	Kecamatan Sariwangi	3.855,15	1,42	8
31	Kecamatan Singaparna	2.010,71	0,74	10
32	Kecamatan Sodonghilir	10.152,74	3,75	12
33	Kecamatan Sukahening	2.891,34	1,07	7
34	Kecamatan Sukaraja	4.648,20	1,72	8
35	Kecamatan Sukarame	1.617,04	0,60	6
36	Kecamatan Sukaratu	4.272,12	1,58	8
37	Kecamatan Sukaresik	1.736,99	0,64	8
38	Kecamatan Tanjungjaya	3.910,88	1,44	7
39	Kecamatan Taraju	6.298,64	2,33	9
40	Pulau Batukolotok	0,41	0,0002	
41	Pulau Nusamanuk	0,68	0,0003	
Luas Total Wilayah		270.677,66	100,00	351

Sumber : Draft Revisi RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Kecamatan terluas wilayahnya yaitu Kecamatan Cipatujah (24.199,04 hektar), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Jamanis (1.597,86 hektar).

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Tasikmalaya terletak di antara 7°02’29” dan 7°49’08” Lintang Selatan serta 107°54’10” dan 108°25’42” Bujur Timur. Kondisi Geografis Kabupaten Tasikmalaya di

gambarkan dengan: 1) Topografi dan Kemiringan Lereng; 2) Geologi; 3) Hidrologi; 4) Klimatologi; dan 5) Penggunaan Lahan.

a. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu: bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000–2.500 meter dpl dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl. Deskripsi lebih rinci pada Tabel 2.2 yang kemudian dipetakan pada Gambar 2.3.

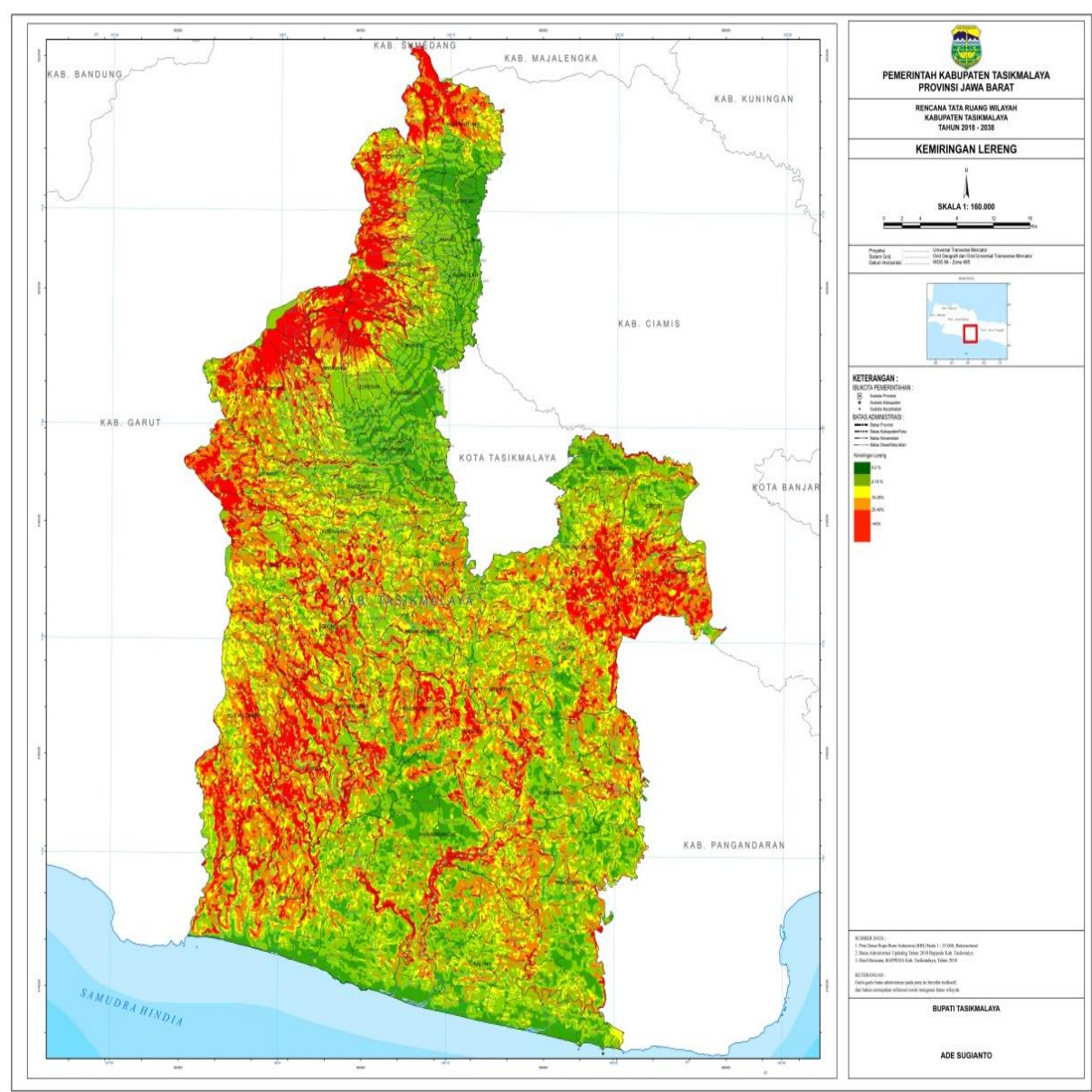
Tabel 2.2.

Sebaran Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Ketinggian (m dpl)	Sebaran (Kecamatan)
1	0 – 500	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras. Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Pancatengah, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju.
2	500 – 1.000	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras. Kadipaten, Karangjaya, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju.

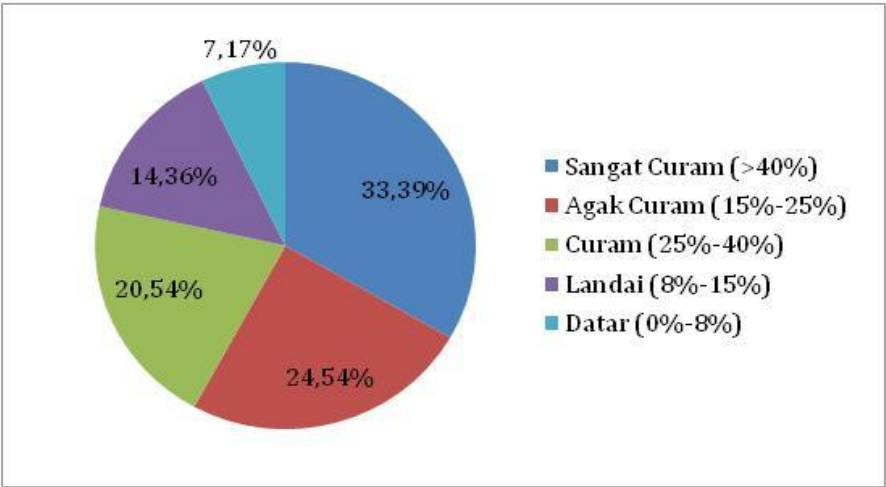
No	Ketinggian (m dpl)	Sebaran (Kecamatan)
3	1.000 – .500	Ciawi, Cigalontang, Cineam, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Puspahiang, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sukahening, Sukaratu, dan Taraju.
4	1.500 – 2.000	Ciawi, Cigalontang, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu.
5	2.000 -2.500	Cigalontang, Cisayong, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu.

Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041



Gambar 2.3.
Peta Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Secara proporsional persentase kemiringan lahan diilustrasikan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5.
Proporsi Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Kemiringan di Kabupaten Tasikmalaya dominan pada ketinggian landai antara 0-2 % dengan luas wilayah 89.049,241 ha tersebar di Kecamatan Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwsari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Pancatengah, Parungponteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singgaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju, untuk ketinggian >40% dengan luas wilayah 3.766,328 Ha.

Berdasarkan peta kelerengan, diketahui fisiografi dan bentuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (Plain system), Sistem Perbukitan (*Hilly System*) dan Sistem Vulkanik (*Volcanik System*). Sebagian besar daerah terdiri dari fisiografi Vulkanik. Bentuk wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit, kecuali di kecamatan-kecamatan bagian utara, berbukit sampai bergunung.

b. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1. Geologi Landscape Depresi

Daerah ini terisi oleh material-material vulkanis akibat munculnya vulkanis Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Galunggung Cakrabuana.

2. Geologi Landscape Pegunungan Lipatan dan Patahan Batuan di daerah ini berbeda-beda, baik dari jenis maupun sifatnya dan dapat di bedakan ke dalam dua golongan, yaitu:
 - a. Golongan pertama : Batuan Kapur
 - b. Golongan kedua : Batuan Pasir Laut
3. Geologi Landscape dataran Pantai Selatan

Material ini terdiri dari batuan pasir liat, batuan kapur dan sedimen pasir pantai yang kadang-kadang dalam bentuk rawa pantai.

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan, yaitu:

1. Satuan Vulkanik Berelief Tinggi
Sebagian besar batuannya terbentuk dari hasil erupsi vulkanik dan berpola aliran radier. Hampir seluruh anak sungai dari satuan ini ditampung oleh aliran Sungai Ciwulan. Satuan ini membentang seperti tapak kuda yang melingkar dan terbuka ke arah Selatan.
2. Satuan Perbukitan Sedimen
Satuan ini tersebar berelief tinggi dan sedang dengan batuan yang berupa sedimen klastika, berpola aliran dentritik dan hampir paralel. Daerah satuan ini dialiri oleh sungai yang agak besar sebanyak lima buah dan hampir paralel ke arah Selatan menempati bagian tengah dari tapak kuda satuan perbukitan vulkanik.
3. Satuan Kara Berelief Sedang
Satuan ini terdiri dari batu gamping, secara keseluruhan berpola aliran dentritik dan beberapa sungai ada yang mengalir di bawah permukaan tanah. Satuan ini menyebar di bagian bawah permukaan tanah dalam lingkaran dari satuan perbukitan sedimen terlipat.
4. Satuan Peneplain

Satuan ini terdiri dari batuan vulkanik dan sedimen klastika yang berumur paling tua yang terdapat di Tasikmalaya, mempunyai relief rendah, berpola aliran hampir paralel menuju sungai yang menampungnya.

Berdasarkan formasi batuannya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 4 (empat) formasi, yaitu :

1. Formasi Jampang

Batuannya terdiri atas erupsi vulkanik dan bersisipan dengan batuan pasir, batu gamping batu lanau, dan batu lempung serta beberapa batuan di atasnya yang terereksikan. Formasi ini berumur miosen bawah, mempunyai anggota bentang dengan batuan berkomposisi Tuf Asam bersisipan Batuan Gamping.

2. Formasi Pamutuan

Formasi ini yang terdapat hanya anggotanya, yaitu Kalkarenit yang berbentuk batu gamping klasik berselingan dengan napal dan berumur Miosen Tengah.

3. Formasi Halang

Formasi ini terdiri dari batu pasir, batu lempung dengan sisipan batu pasir gampingan, batu gamping pasiran, breksi, konglomerat, bagian bawah dominan batu pasir litik ke arah atas dominan napalan.

4. Formasi Bentang

Formasi ini terdiri atas batu pasir tufan, batu pasir gampingan dengan sisipan breksi tif, konglomerat, batu pasir, batu lempung, tufan berlapis baik. Sukaraja termasuk dalam formasi ini, batuannya berupa batu gamping terumbu berselingan dengan batu gamping pasiran.

c. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya digambarkan dengan kondisi: 1) sungai, 2) mata air, 3) dan situ.

1) Sungai

Kabupaten Tasikmalaya terdapat 6 daerah aliran sungai besar atau sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Pola aliran daerah aliran

sungai umumnya berpola radial, karena lebih dipengaruhi dominansi vulkanik. Pada daerah tektonik pola aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular), tergantung pada bentuk dan arah proses tektonik yang terjadi. Secara rinci kondisi Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tasikmalaya dijelaskan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama DAS	Wilayah Aliran Sungai	Luas Das (Ha)	Panjang Anak Sungai (km)	Debit (m ³ /det)
1	Cipangukusan	Bojonggambir, Cipatujah, Culamega	11.107,6	S. Cibalanak ; 0,83 S. Cikaenang ; 2,36 S. Cipangukusan ; 3,92	1,69
2	Cilangla	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Cipatujah, Karangnunggal, Sodonghilir, Taraju	40.610	S. Cibeureum ; 0,56 S. Cicadas ; 1,6 S. Cilangla ; 10,32 S. Cipalu ; 2,63	19,65
3	Cimedang	Cikalong, Cikatomas, Pancatengah, Salopa	44.770,82	Ci Kondang ; 0,81 S. Cibongas ; 1,3 S. Cicantigi ; 0,49 S. Cigugur ; 0,02 S. Ciharuman ; 1,16 S. Cikembang ; 4,64 S. Cikondang ; 7,44 S. Cimedang ; 5,24 S. Citoe ; 3,66 S. Ciwalen ; 0,89	16,97
4	Cipanyeurang	Cipatujah, Culamega,	4.571,35	S. Cibalanak ; 0,83 S. Cikaengan ; 2,36 S. Cipangukusan ; 3,92	1,77
5	Cipatujah	Bojonggambir, Cipatujah, Culamega	16.294	S. Cibalanak ; 0,83 S. Cikaenang ; 2,36 S. Cipangukusan ; 3,92 S. Cipalu ; 1,95 S. Cipayeurang ; 0,03 S. Cipatujah ; 4,75	4,34
6	Citanduy	Ciawi, Cineam, Cisayong, Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, Manonjaya, Pagerageung, Rajapolah, Salopa, Sukaratu, Sukaresik	49.718	S. Cihapitan ; 0,66 S. Cikembang ; 2,8 S. Cipajajaran ; 0,33 S. Ciseel ; 2,5 S. Citanduy	29,66
7	Ciwulan	Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas,	104.000	S. Cigembor ; 2,08 S. Cikunir ; 1,82 S. Cikunten ; 3,13	29,46

No	Nama DAS	Wilayah Aliran Sungai	Luas Das (Ha)	Panjang Anak Sungai (km)	Debit (m ³ /det)
		Jatiwaras, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang, Parungponteng, Puspahiang, Salawu, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Tanjungjaya		S. Cilonggan ; 4,83 S. Cimawate ; 9,2 S. Cimerah ; 2,08 S. Ciwulan ; 23,15	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, 2020

2) Mata Air

Mata air di Kabupaten Tasikmalaya terdapat di Kecamatan Leuwisari, Sariwangi, Parungponteng, Puspahiang, Sodonghilir, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cisayong, Sukahening, Sukaresik dan Pagerageung. Mata air tersebut merupakan sumber air dalam tanah yang dimanfaatkan sebagai air baku / air minum masyarakat.

3) Situ

Situ di Kabupaten Tasikmalaya dimanfaatkan diantaranya untuk sektor pertanian dan pariwisata. Lokasi situ, luas dan pemanfaatannya dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Nama Situ, Lokasi dan Luas Situ di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013

No	Nama Situ	Desa – Kecamatan	Luas (ha)	Pemanfaatan
1	Sanghyang	Cibalanarik – Sukaraja	10,25	Irigasi
2	Cigaleuh	Kalapagenep – Cikalong	2,00	Sawah
3	Cilangla	Taraju – Taraju	10,00	Wisata
4	Galuh Taruna	Cibuniasih – Pancatengah	2,00	Sawah
5	Gede Pancatengah	Mekarsari – Pancatengah	1,00	Sawah
6	Denuh	Cikuya – Bantarkalong	1,20	Sawah
7	Citilu	Pasirhaur – Ciawi	0,76	Sawah
8	Karkil	Tobangjaya – Cipatujah	1,75	Pengairan

No	Nama Situ	Desa – Kecamatan	Luas (ha)	Pemanfaatan
9	Oblok	Mandalajaya – Cikalong	4,50	Sawah
10	Batu Hawu	Cikupa - Karangnunggal	3,00	Sawah
11	Labuan Bulan	Girikencana – Karangnunggal	2,50	Sawah
12	Asta	Girikencana – Parungponteng	0,50	Sawah/Irigasi
13	Cigagak	Sukapada – Pagerageung	0,25	Sawah
14	Sarbeni	Ciwarak – Jatiwaras	1,00	Sawah/Irigasi
15	Ciburial	Sukapada – Pagerageung	2,00	Sawah
16	Garunggang	Rajadatu – Cineam	2,00	Sawah
17	Cilameta	Ciampanan – Cineam	2,00	Sawah/Irigasi

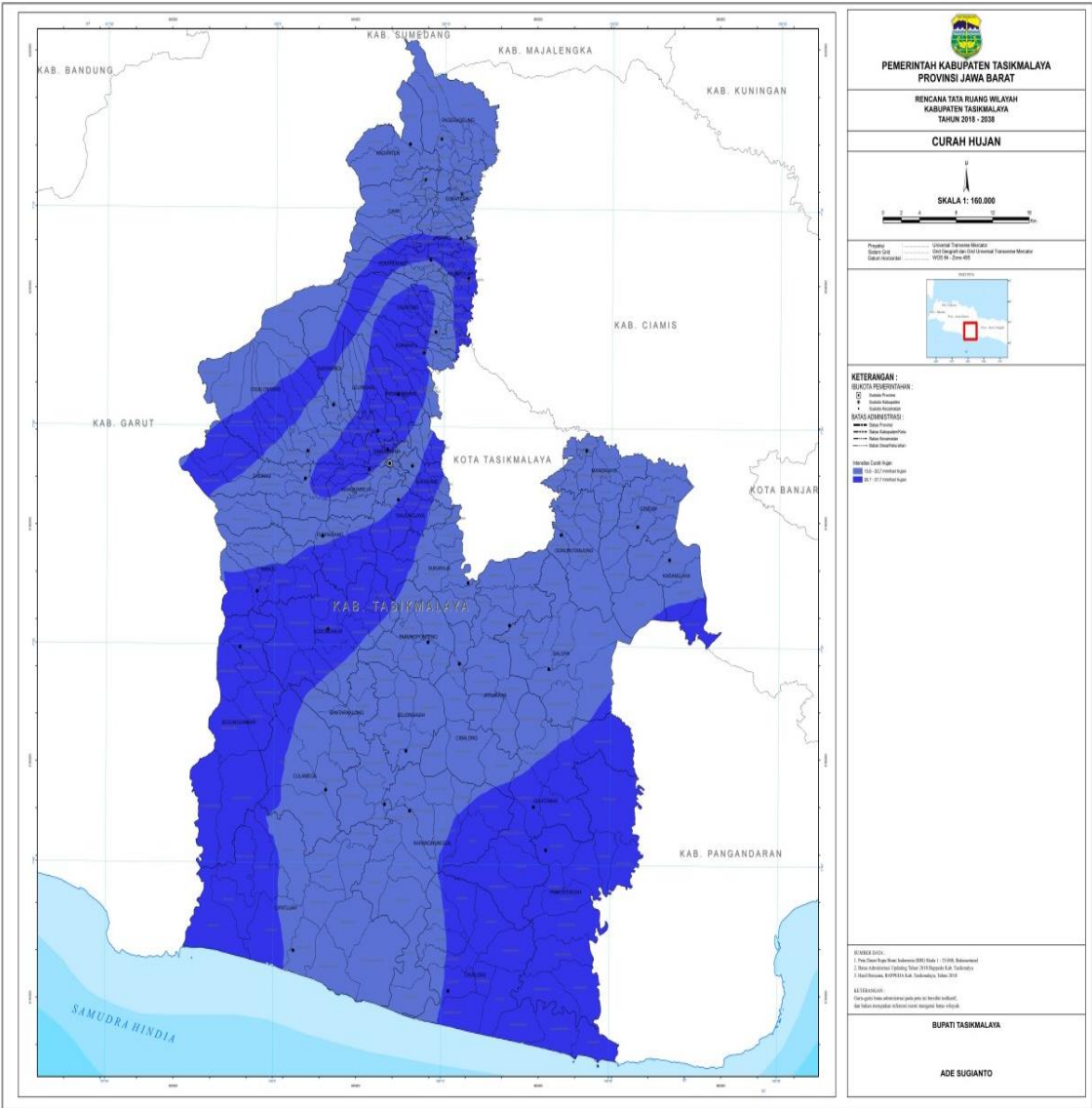
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, 2020

d. Klimatologi

Kabupaten Tasikmalaya beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 34°C dengan kelembaban 50 % pada dataran rendah. Sedangkan pada dataran tinggi temperatur berkisar 18° - 22° C dengan kelembaban berkisar antara 61 % - 73 %. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Juni-September.

Berdasarkan peta klimatologi Kabupaten Tasikmalaya (Gambar 2.6) dapat diuraikan kondisi curah hujan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

- 1) Wilayah dengan curah hujan antara 2500-3000 mm/tahun meliputi Kecamatan Sukaraja, Cibalong, Salopa, Pagerageung, Ciawi, dan Jamanis.
- 2) Wilayah dengan curah hujan antara 3000-3500 mm/thn meliputi: Kecamatan Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Salopa, Sodonghilir, Cineam, dan Manonjaya.
- 3) Wilayah dengan curah hujan 3500-4000 mm/thn meliputi Bojonggambir, Sodonghilir, Singaparna, Cisayong, Rajapolah, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, sebagian Pagerageung.
- 4) Wilayah dengan curah hujan diatas 4000 mm/thn adalah Kecamatan Taraju, Salawu, Cigalontang, Leuwisari, dan Cisayong.



Gambar 2.6.
Peta Klimatologi Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Selanjutnya data rata-rata curah hujan di Kabupaten Tasikmalaya pada setiap kecamatan dirinci pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Curah Hujan per Kecamatan

Kecamatan	Curah Hujan
Bantarkalong	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Bojongasih	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Bojonggambir	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Ciawi	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cibalong	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan

Kecamatan	Curah Hujan
Cigalontang	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cikalong	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cikatomas	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cineam	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cipatujah	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Cisayong	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Culamega	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Gunungtanjung	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Jamanis	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Jatiwaras	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Kadipaten	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Karangjaya	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Karangnunggal	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Leuwisari	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Mangunreja	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Manonjaya	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Padakembang	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Pagerageung	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Pancatengah	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Parungponteng	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Puspahiang	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Rajapolah	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Salawu	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Salopa	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sariwangi	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Singaparna	13,6 - 20,7 mm/hari hujan

Kecamatan	Curah Hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sodonghilir	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sukahening	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sukaraja	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sukarame	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sukaratu	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Sukaresik	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
Tanjungjaya	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan
Taraju	13,6 - 20,7 mm/hari hujan
	20,7 - 27,7 mm/hari hujan

Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tasikmalaya di dominasi oleh kebun campuran (131.579,89 Ha), sawah (54.775,02 Ha) dan hutan (46.024,32 Ha). Sedangkan luas permukiman di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 21.006,11 Ha. Rincian Tata Guna Lahan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Tata Guna Lahan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Lahan	Luas (Ha)
1	Kebun Campuran	131.579,89
2	Ladang	10.632,95
3	Permukiman	21.006,11
4	Sawah	54.775,02
5	Sungai	2.033,63
6	Tambak / Empang	1.097,94
7	Belukar	3.254,81
8	Jalan	449,67
9	Hutan	46.024,32
10	Pasir Pantai	262,36
11	Danau	13,55
	Jumlah	271.130,26

Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041

Dalam ketentuan Penataan Ruang, ruang terbagi kedalam Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung.

1) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

- Kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi : pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura.
- Kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan.
- Kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan.
- Kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan untuk industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat dan industri lainnya.
- Kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan untuk semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya.
- Kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan untuk permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.
- Kawasan budidaya lainnya.

2) Kawasan Lindung

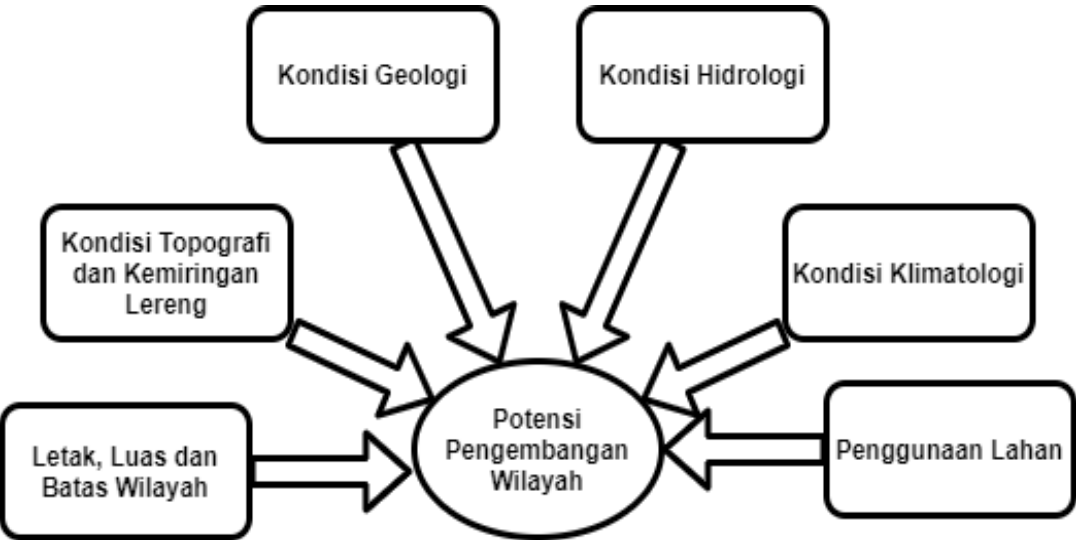
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi : kawasan bergambut dan kawasan resapan air.

- Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- Kawasan rawan bencana meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- Kawasan lindung lainnya.

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Gambaran Umum daerah sebagaimana dijelaskan pada subbagian sebelumnya dan diskemakan pada Gambar 2.1 kemudian dijadikan sebagai kerangka pemikiran (*logical Framework*) dalam mengidentifikasi potensi Pengembangan Wilayah (Gambar 2.7)



Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan/Wilayah
Sumber : Diolah Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis diantaranya :

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Kabupaten

Kawasan strategis nasional adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi dari sudut Pertahanan dan Keamanan. Kawasan strategis ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
- 2) Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem, dan/atau Kawasan industri sistem pertahanan.
- 3) Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan yang berada di Pulau Nusa Manuk Kecamatan Cikalong.

b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

- 1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. KSK di Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:
 - a) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - (1) KSK Perkotaan Singaparna;
 - (2) KSK Perkotaan Ciawi;
 - (3) KSK Perkotaan Manonjaya;
 - (4) KSK Perkotaan Karangnunggal;
 - (5) KSK Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah;
 - (6) KSK Industri Manufaktur Cisayong dan Sukaratu;
 - (7) KSK Wisata Pantai Karangtawulan; dan
 - (8) KSK Wisata Alam Gunung Galunggung;
 - (9) KSK Agrobisnis Pasir Batang.
 - b) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:

- (1) KSK Kampung Naga;
 - (2) KSK Wisata Ziarah Pamijahan;
 - (3) KSK Pesantren Suryalaya;
 - (4) KSK Pesantren Miftahul Huda;
 - (5) KSK Pesantren Cipasung dan
 - (6) KSK Pesantren Sukamanah.
- c) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/teknologi tinggi, meliputi:
- (1) KSK Geothermal Karaha Bodas berada di Kecamatan Kadipaten;
 - (2) KSK Batu Mulia Jasper berada di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah;
 - (3) KSK Plasma Nutfah Sirah Cimunjul berada di Kecamatan Cipatujah;
 - (4) KSK kawasan pertambangan yang berada di Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikalong; dan Kecamatan Karangnunggal;
 - (5) KSK Kawasan Pesisir berada di Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Karangnunggal, dan Kecamatan Cikalong.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

a. Potensi Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Diantara faktor pemicu terjadi bencana adalah kondisi wilayah seperti kondisi topografi dan curah hujan. Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi yang beragam. Dataran bergelombang lemah sampai bergelombang kuat di daerah selatan sampai tengah. Wilayah utara topografinya berupa perbukitan sampai pegunungan. Selain itu rata-rata curah hujan kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 3.442 mm.

Dengan kondisi wilayah dengan kondisi wilayah demikian maka Kabupaten Tasikmalaya dinilai memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi.

Sebagai daerah yang memiliki potensi bencana alam tinggi, maka analisis resiko bencana menjadi perhatian khusus pemerintah Daerah dalam penyusunan penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RTRW dan KLHS.

Pada tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan Pengkajian Resiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Kajian tersebut menganalisis tiga komponen Tingkat Resiko Bencana yaitu: 1) bahaya, 2) kerentanan dan 3) kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameter masing-masing.

Komponen Bahaya ditentukan melalui Analisis Probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian). Komponen Kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu: 1) Kerenatanan Sosial (penduduk terpapar), 2) Kerentanan Ekonomi (kerugian lahan produktif), 3) kerentanan pisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan 4) Kerentanan Lingkungan (kerusakan lingkungan). Komponen terakhir yaitu Kapasitas ditentukan dengan menggunakan 2 parameter yaitu, Ketahanan daerah (sektor Pemerintah) dan Kesiapsiagaan Masyarakat (sektor masyarakat). Kajian resiko bencana tersebut juga bertujuan untuk mengetahui luas dan Index bahaya. Hasil Kajian Potensi Bencana Kabupaten Tasikmalaya tersebut secara rinci dirangkum Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

1. Banjir	6. Kebakaran Hutan Dan Lahan
2. Banjir Bandang	7. Kekeringan
3. Cuaca Ekstrim	8. Letusan Gunung api
4. Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	9. Tanah Longsor
5. Gempa bumi	10. Tsunami

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Deskripsi rinci mengenai ke-sepuluh jenis bencana alam di Kabupaten Tasikmalaya dielaborasi pada subbagian selanjutnya.

1. Bencana Banjir

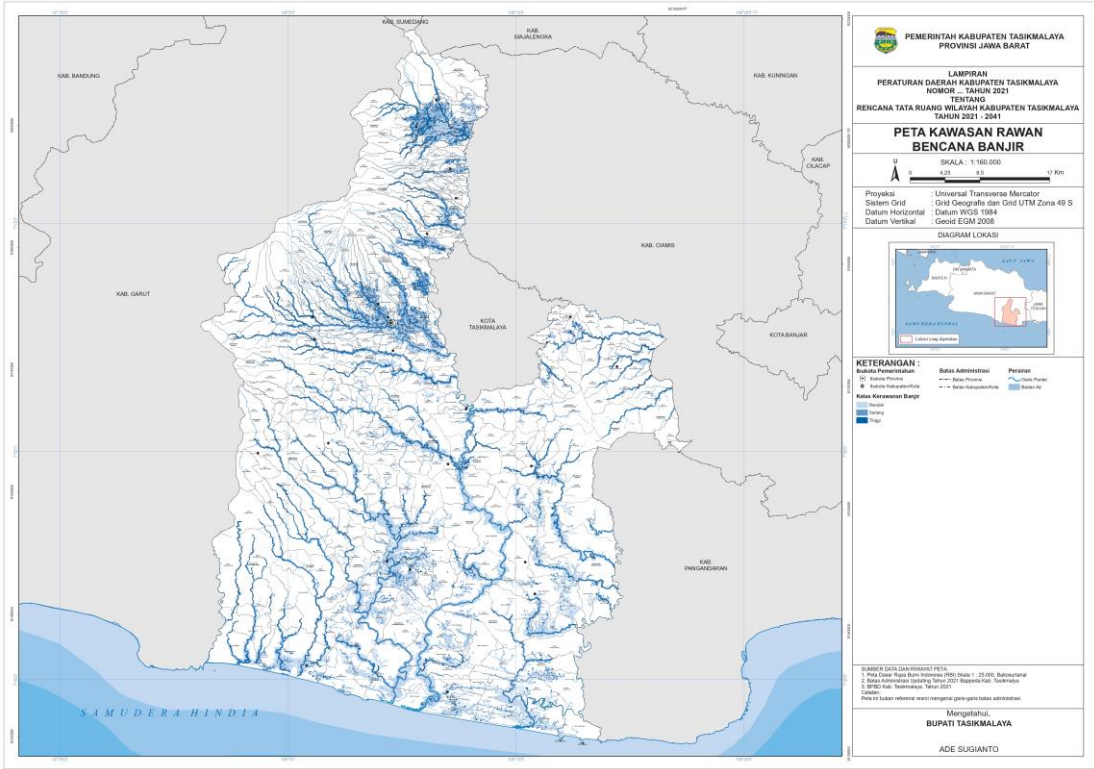
Berdasarkan hasil kajian, potensi bahaya banjir di kabupaten Tasikmalaya diperkirakan berdampak bagi Kawasan seluas 53.154 Ha yang lokasinya tersebar pada 39 kecamatan. Kategori bencana terdiri dari kelas BAHAYA RENDAH (11 Kecamatan), kelas BAHAYA SEDANG (3 Kecamatan), dan kelas BAHAYA TINGGI (25 Kecamatan). Secara khusus Kecamatan Sukaresik dan kecamatan Cipatujah tercatat sebagai wilayah yang sering mengalami bencana banjir terparah. Tabel 2.8. merinci deskripsi resiko bencana banjir di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.8.
Resiko Bencana Banjir per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Resiko (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	897,21	232,06	300,53	1.429,80	Rendah
2	Bojongasih	593,88	139,22	190,45	923,55	Rendah
3	Bojonggambir	268,45	180,88	630,57	1.079,90	Tinggi
4	Ciawi	241,68	278,48	331,81	851,97	Tinggi
5	Cibalong	852,38	181,35	197,17	1.230,91	Rendah
6	Cigalontang	525,60	369,01	888,35	1.782,97	Tinggi
7	Cikalong	2.566,53	657,77	544,29	3.768,59	Rendah
8	Cikatomas	1.763,41	430,98	417,87	2.612,26	Rendah
9	Cineam	380,89	202,60	346,03	929,52	Tinggi
10	Cipatujah	3.756,50	1.070,21	1.292,07	6.118,78	Tinggi
11	Cisayong	429,13	371,82	376,93	1.177,88	Tinggi
12	Culamega	359,54	150,27	344,94	854,75	Tinggi
13	Gunungtanjung	192,76	55,84	84,41	333,01	Tinggi
14	Jamanis	159,48	144,14	122,82	426,44	Tinggi
15	Jatiwaras	709,01	214,40	258,77	1.182,18	Rendah
16	Kadipaten	177,04	177,13	284,09	638,26	Tinggi
17	Karangjaya	135,32	68,36	182,28	385,96	Tinggi
18	Karangnunggal	3.092,53	838,88	651,23	4.582,64	Rendah
19	Leuwisari	230,76	244,68	167,41	642,85	Tinggi
20	Mangunreja	356,73	122,64	107,38	586,76	Rendah
21	Manonjaya	208,67	104,16	173,94	486,77	Tinggi
22	Padakembang	341,84	418,10	436,81	1.196,75	Tinggi
23	Pegerageung	643,57	340,17	206,62	1.190,36	Tinggi
24	Pancatengah	3.138,09	834,84	868,62	4.841,55	Rendah
25	Parungponteng	568,75	167,41	184,26	920,42	Rendah
26	Puspahiang	165,21	45,75	106,78	317,74	Tinggi
27	Rajapolah	174,22	100,26	81,75	356,23	Tinggi

No.	Kecamatan	Luas Resiko (Ha)			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
28	Salawu	233,54	151,59	249,73	634,86	Tinggi
29	Salopa	740,15	235,79	451,15	1.427,10	Tinggi
30	Sariwangi	424,82	303,75	318,99	1.047,56	Tinggi
31	Singaparna	562,24	472,16	259,12	1.293,52	Tinggi
32	Sodonghilir	548,34	199,56	364,66	1.112,56	Tinggi
33	Sukahening	56,61	88,64	181,76	327,01	Tinggi
34	Sukaraja	518,74	112,38	136,99	768,11	Rendah
35	Sukarame	917,68	584,67	361,97	1.864,32	Sedang
36	Sukaratu	541,33	637,40	399,96	1.578,68	Sedang
37	Sukaresik	367,24	310,35	284,96	962,54	Tinggi
38	Tanjungjaya	708,31	163,15	230,71	1.102,17	Tinggi
39	Taraju	63,13	47,75	77,50	186,56	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		28.609,47	11.448,63	13.095,68	53.153,78	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.8

Peta Sebaran Bencana Banjir Kabupaten Tasikmalaya

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2041

2. Banjir bandang

Resiko banjir bandang di Kabupaten Tasikmalaya dibagi ke dalam tiga parameter yaitu: Rendah, Sedang dan Tinggi. Deskripsi luas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dirinci pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Luas Bahaya dan Kelas Bahaya Banjir Bandang
per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	7,19	56,86	159,06	223,11	Tinggi
2	Bojongasih	11,36	69,30	192,21	272,87	Tinggi
3	Bojonggambir	4,96	59,04	290,83	354,83	Tinggi
4	Ciawi	17,81	161,74	298,77	478,32	Tinggi
5	Cibalong	4,77	49,35	190,05	244,17	Tinggi
6	Cigalontang	3,21	65,58	276,91	345,70	Tinggi
7	Cikalong	3,13	31,66	303,93	338,71	Tinggi
8	Cikatomas	2,51	43,11	167,67	213,30	Tinggi
9	Cineam	-	22,91	79,39	102,30	Tinggi
10	Cipatujah	6,67	39,47	239,34	285,48	Tinggi
11	Cisayong	39,05	195,44	475,03	709,52	Tinggi
12	Culamega	0,69	40,08	187,10	227,87	Tinggi
13	Gunungtanjung	-	4,17	26,34	30,51	Tinggi
14	Jamanis	19,70	93,08	165,70	278,48	Tinggi
15	Jatiwaras	1,68	48,24	159,72	209,64	Tinggi
16	Kadipaten	0,95	20,30	67,59	88,84	Tinggi
17	Karangjaya	1,80	10,84	58,42	71,07	Tinggi
18	Karangnunggal	13,26	76,11	407,61	496,99	Tinggi
19	Mangunreja	3,51	16,94	57,23	77,69	Tinggi
20	Manonjaya	0,87	34,86	78,32	114,06	Tinggi
21	Pagerageung	5,33	59,45	176,52	241,30	Tinggi
22	Pancatengah	1,55	55,39	302,96	359,89	Tinggi
23	Parungponteng	-	16,14	48,75	64,89	Tinggi
24	Puspahiang	0,39	12,93	44,31	57,63	Tinggi
25	Rajapolah	4,71	50,75	136,57	192,03	Tinggi
26	Salawu	3,69	50,39	136,28	190,37	Tinggi
27	Salopa	6,89	62,72	287,27	356,88	Tinggi
28	Sariwangi	7,44	53,99	102,77	164,20	Tinggi
29	Singaparna	2,36	12,42	44,17	58,94	Tinggi
30	Sodonghilir	6,10	91,00	216,74	313,84	Tinggi
31	Sukahening	7,34	55,73	129,02	192,10	Tinggi
32	Sukaraja	4,22	21,54	87,64	113,40	Tinggi
33	Sukarame	-	14,04	66,47	80,51	Tinggi
34	Sukaratu	15,97	104,77	268,14	388,88	Tinggi
35	Sukaresik	15,10	65,54	108,59	189,23	Tinggi
36	Tanjung Jaya	2,73	21,88	83,59	108,20	Tinggi
37	Taraju	4,83	33,59	160,88	199,30	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

3. Bencana Cuaca Ekstrim

Potensi Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tasikmalaya umumnya termasuk kategori sedang dan tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	-	20,04	610,66	630,69	Tinggi
2	Bojongasih	-	26,29	583,46	609,75	Tinggi
3	Bojonggambir	-	178,71	82,79	261,51	Tinggi
4	Ciawi	-	66,63	1.550,52	1.617,15	Tinggi
5	Cibalong	-	99,55	1.044,92	1.144,47	Tinggi
6	Cigalontang	-	6,77	479,09	485,86	Tinggi
7	Cikalong	-	1.981,96	5.175,43	7.157,39	Tinggi
8	Cikatomas	-	260,27	3.203,00	3.463,27	Tinggi
9	Cineam	-	95,04	2.302,93	2.397,97	Tinggi
10	Cipatujah	-	2.773,83	6.805,25	9.579,08	Tinggi
11	Cisayong	-	68,34	4.124,85	4.193,19	Tinggi
12	Gunungtanjung	-	37,96	756,67	794,63	Tinggi
13	Jamanis	-	46,47	2.073,18	2.119,66	Tinggi
14	Jatiwaras	-	34,09	1.470,31	1.504,40	Tinggi
15	Kadipaten	-	4,33	493,46	497,79	Tinggi
16	Karangnunggal	-	618,99	6.974,52	7.593,51	Tinggi
17	Leuwisari	-	572,28	3.292,70	3.864,98	Tinggi
18	Mangunreja	-	46,91	944,82	991,73	Tinggi
19	Manonjaya	-	126,17	2.706,99	2.833,16	Tinggi
20	Padakembang	-	111,86	3.142,56	3.254,43	Tinggi
21	Pagerageung	-	59,04	1.872,37	1.931,41	Tinggi
22	Pancatengah	-	1.239,53	9.006,68	10.246,21	Tinggi
23	Parungponteng	-	-	14,66	14,66	Tinggi
24	Puspahiang	-	2,82	166,51	169,33	Tinggi
25	Rajapolah	-	57,09	2.078,27	2.135,37	Tinggi
26	Salawu	-	17,64	353,92	371,56	Tinggi
27	Salopa	-	271,66	1.354,38	1.626,04	Tinggi
28	Sariwangi	-	366,12	2.212,07	2.578,18	Tinggi
29	Singaparna	-	124,53	2.314,72	2.439,25	Tinggi
30	Sodonghilir	-	-	10,35	10,35	Tinggi
31	Sukahening	-	45,22	805,69	850,91	Tinggi
32	Sukaraja	-	80,84	1.206,71	1.287,56	Tinggi
33	Sukarame	-	114,35	2.596,59	2.710,94	Tinggi
34	Sukaratu	-	98,12	3.631,89	3.730,01	Tinggi
35	Sukaresik	-	175,00	1.415,02	1.590,02	Tinggi
36	Tanjung Jaya	-	114,98	1.365,14	1.480,12	Tinggi
37	Taraju	-	54,51	90,76	145,27	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		-	9.997,95	78.313,86	88.311,81	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

4. Bencana Gelombang Ekstrim Abrasi

Potensi Bencana Gelombang Ekstrim Abrasi di Kabupaten Tasikmalaya tinggi dengan perkiraan luas 857,09 Ha. Potensi becana ini ada di tiga kecamatan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	-	-	322,14	322,14	Tinggi
2	Cipatujah	-	-	473,50	473,50	Tinggi
3	Karangnunggal	-	-	61,46	61,46	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		-	-	857,09	857,09	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

5. Bencana Gempa Bumi

Potensi bahaya gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya diperkirakan dapat berdampak seluas 270.882 ha. Rincian potensi luas bencana gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12.
Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	4.024,04	1.698,63	260,33	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	2.897,55	820,52	139,93	3.858,00	Rendah
3	Bojonggambir	13.382,96	3.546,04	-	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	3.914,50	554,57	62,92	4.532,00	Sedang
5	Cibalong	4.217,65	1.619,12	21,23	5.858,00	Rendah
6	Cigalontang	9.170,02	2.690,38	114,59	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	3.297,90	9.151,91	1.516,19	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	8.050,54	4.936,27	281,19	13.268,00	Sedang
9	Cineam	7.700,88	178,12	-	7.879,00	Rendah
10	Cipatujah	9.006,43	12.830,26	2.830,30	24.667,00	Tinggi
11	Cisayong	3.467,15	2.472,85	-	5.940,00	Sedang
12	Culamega	5.455,17	1.376,83	-	6.832,00	Rendah
13	Gunungtanjung	2.656,42	974,58	-	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	1.589,39	533,29	5,32	2.128,00	Sedang

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
15	Jatiwaras	5.858,98	1.434,00	44,02	7.337,00	Rendah
16	Kadipaten	4.281,91	276,69	20,40	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	4.637,24	152,76	-	4.790,00	Rendah
18	Karangnunggal	3.816,91	7.724,04	2.092,05	13.633,00	Sedang
19	Leuwisari	1.741,98	3.486,33	97,69	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	522,27	1.466,37	3,36	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	2.502,02	1.438,98	-	3.941,00	Sedang
22	Padakembang	662,39	2.997,51	111,10	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	5.851,30	815,93	6,77	6.674,00	Sedang
24	Pancatengah	6.287,41	12.693,85	1.203,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	3.265,58	1.430,87	30,55	4.727,00	Sedang
26	Puspahiang	2.960,13	529,87	-	3.490,00	Rendah
27	Rajapolah	748,11	1.396,89	-	2.145,00	Sedang
28	Salawu	4.164,43	885,57	-	5.050,00	Sedang
29	Salopa	10.214,74	1.950,64	10,62	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	2.327,29	2.068,88	569,83	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.919,36	562,64	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	7.172,42	2.138,58	-	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	2.816,27	25,73	-	2.842,00	Rendah
34	Sukaraja	3.038,18	1.269,82	-	4.308,00	Rendah
35	Sukarame	113,77	2.137,55	712,68	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	2.486,26	3.049,58	177,16	5.713,00	Sedang
37	Sukaresik	627,67	1.141,70	10,63	1.780,00	Sedang
38	Tanjung Jaya	1.869,60	1.799,40	-	3.669,00	Sedang
39	Taraju	3.900,65	1.684,35	-	5.585,00	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		160.698,15	99.298,61	10.885,24	270.882,00	Tinggi

Sumber: *Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023*

6. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tasikmalaya diperhitungkan dapat mencapai luasan 44.953,18 ha yang meliputi 33 kecamatan. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tasikmalaya dirinci pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	393,82	-	-	393,82	Rendah
2	Bojongasih	853,34	37,07	-	890,41	Rendah
3	Bojonggambir	1.787,40	124,44	-	1.911,84	Sedang
4	Ciawi	1.477,47	5,99	-	1.483,46	Rendah
5	Cibalong	1.318,26	-	-	1.318,26	Rendah
6	Cigalontang	4.747,20	-	-	4.747,20	Rendah
7	Cikalong	247,08	774,03	-	1.021,11	Sedang
8	Cikatomas	1.208,83	77,55	-	1.286,37	Rendah
9	Cineam	1.810,28	214,32	-	2.024,60	Sedang
10	Cipatujah	2.458,95	3.330,46	-	5.789,41	Sedang
11	Cisayong	777,11	-	-	777,11	Rendah
12	Culamega	1.604,42	258,62	-	1.863,04	Rendah
13	Gunungtanjung	343,38	-	-	343,38	Rendah
14	Jatiwaras	493,36	231,99	-	725,35	Sedang
15	Kadipaten	806,08	341,48	-	1.147,56	Sedang
16	Karangjaya	1.628,30	196,67	-	1.824,96	Sedang
17	Karangnunggal	489,41	274,02	-	763,43	Sedang
18	Leuwisari	1.941,54	-	-	1.941,54	Rendah
19	Manonjaya	45,57	-	-	45,57	Rendah
20	Padakembang	345,18	-	-	345,18	Rendah
21	Pagerageung	1.003,55	232,94	-	1.236,49	Rendah
22	Pancatengah	1.324,70	479,42	-	1.804,12	Sedang
23	Parungponteng	437,01	18,49	-	455,51	Rendah
24	Puspahiang	435,05	-	-	435,05	Rendah
25	Salawu	1.037,93	-	-	1.037,93	Rendah
26	Salopa	1.384,00	503,74	-	1.887,75	Sedang
27	Sariwangi	2.409,78	-	-	2.409,78	Rendah
28	Sodonghilir	738,12	-	-	738,12	Rendah
29	Sukahening	1.269,40	7,89	-	1.277,29	Rendah
30	Sukaraja	148,25	294,25	-	442,50	Sedang
31	Sukaratu	1.366,10	-	-	1.366,10	Rendah
32	Tanjung Jaya	-	44,07	-	44,07	Sedang
33	Taraju	592,40	582,48	-	1.174,88	Sedang
Kabupaten Tasikmalaya		36.923,23	8.029,94	-	44.953,18	Sedang

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

7. Bencana Kekeringan

Potensi bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya dianalisis dengan parameter kekeringan meteorologis. Hasil analisis bahaya kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya dirinci pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14.
Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	654,90	4.771,28	556,82	5.983,00	Sedang
2	Bojongasih	-	3.269,74	588,26	3.858,00	Sedang
3	Bojonggambir	15.164,70	-	1.764,30	16.929,00	Rendah
4	Ciawi	214,72	3.135,67	1.181,62	4.532,00	Tinggi
5	Cibalong	-	5.176,33	681,67	5.858,00	Sedang
6	Cigalontang	8.917,73	1.244,15	1.813,12	11.975,00	Sedang
7	Cikalong	-	12.773,06	1.192,94	13.966,00	Sedang
8	Cikatomas	-	11.639,54	1.628,46	13.268,00	Sedang
9	Cineam	-	5.679,97	2.199,03	7.879,00	Sedang
10	Cipatujah	5.571,95	17.105,08	1.989,97	24.667,00	Sedang
11	Cisayong	158,57	3.714,79	2.066,65	5.940,00	Tinggi
12	Culamega	2.062,21	4.136,09	633,70	6.832,00	Sedang
13	Gunungtanjung	-	2.477,61	1.153,39	3.631,00	Sedang
14	Jamanis	-	1.329,27	798,73	2.128,00	Tinggi
15	Jatiwaras	-	6.108,07	1.228,93	7.337,00	Sedang
16	Kadipaten	26,24	3.889,10	663,66	4.579,00	Sedang
17	Karangjaya	-	3.736,13	1.053,87	4.790,00	Sedang
18	Karangnunggal	-	12.505,04	1.127,96	13.633,00	Sedang
19	Leuwisari	2.285,63	1.853,51	1.186,87	5.326,00	Sedang
20	Mangunreja	71,24	1.347,98	572,78	1.992,00	Sedang
21	Manonjaya	-	2.248,39	1.692,61	3.941,00	Tinggi
22	Padakembang	229,99	2.234,42	1.306,58	3.771,00	Sedang
23	Pagerageung	256,13	5.290,38	1.127,49	6.674,00	Tinggi
24	Pancatengah	41,39	16.645,86	3.497,74	20.185,00	Sedang
25	Parungponteng	-	3.742,71	984,29	4.727,00	Sedang
26	Puspahiang	1.472,48	1.553,79	463,73	3.490,00	Sedang
27	Rajapolah	-	1.101,76	1.043,24	2.145,00	Tinggi
28	Salawu	4.055,10	52,85	942,06	5.050,00	Tinggi
29	Salopa	-	10.013,87	2.162,13	12.176,00	Sedang
30	Sariwangi	3.907,59	364,29	694,11	4.966,00	Tinggi
31	Singaparna	-	1.769,23	712,77	2.482,00	Tinggi
32	Sodonghilir	4.371,17	3.194,49	1.745,34	9.311,00	Sedang
33	Sukahening	193,30	1.963,61	685,10	2.842,00	Sedang
34	Sukaraja	-	3.388,41	919,59	4.308,00	Sedang
35	Sukarame	-	2.151,97	812,03	2.964,00	Tinggi
36	Sukaratu	1.091,52	3.320,53	1.300,95	5.713,00	Tinggi

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
37	Sukaresik	-	932,79	847,21	1.780,00	Tinggi
38	Tanjung Jaya	-	2.940,53	728,47	3.669,00	Sedang
39	Taraju	4.240,94	64,37	1.279,69	5.585,00	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		54.987,50	168.866,64	47.027,86	270.882,00	Tinggi

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Secara keseluruhan bencana kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi luas bahaya dengan total 270.882 Ha yang tersebar pada 2 kecamatan kelas bahaya RENDAH, 25 kecamatan kelas bahaya SEDANG, dan 12 kecamatan kelas bahaya TINGGI.

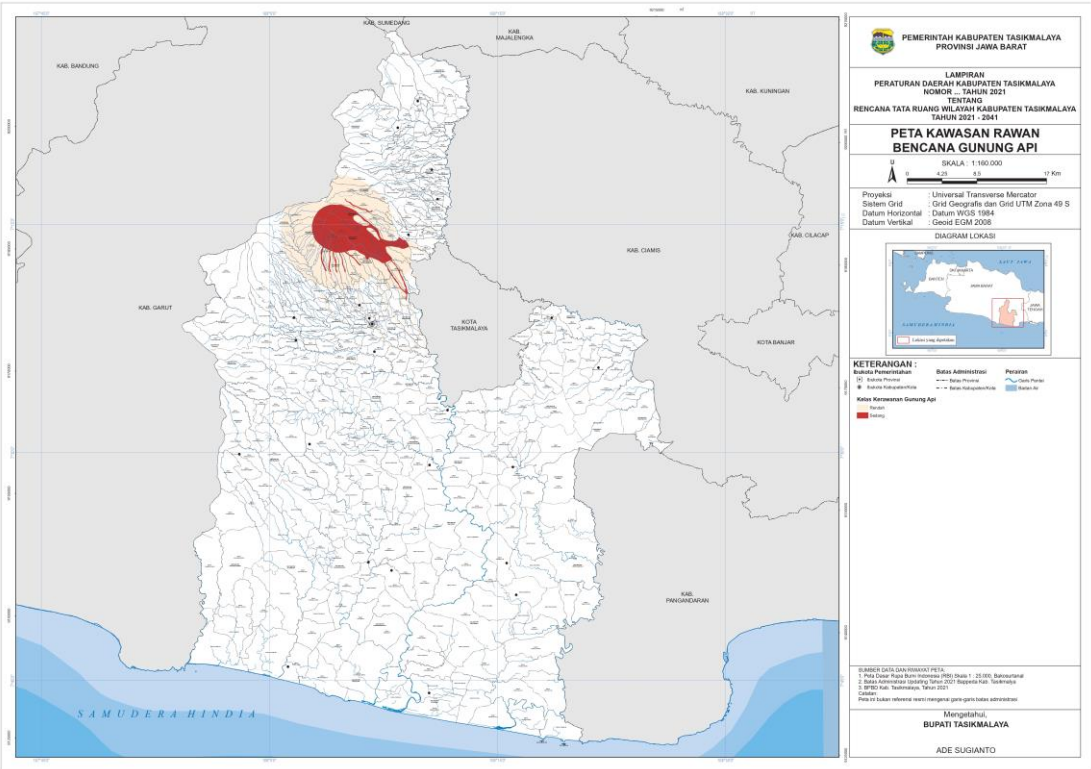
8. Bencana Letusan Gunung Api Galunggung

Bencana letusan gunung api Galunggung diperhitungkan berpotensi memberikan dampak kepada 12 Kecamatan dengan cakupan luas total 18.238,42 Ha. Rincian potensi bahaya letusan gunung api Galunggung dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Potensi Bahaya Letusan Gunungapi Galunggung
per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cigalontang	1.448,20	149,90	-	1.598,10	Rendah
2	Cisayong	1.092,88	116,12	-	1.209,00	Sedang
3	Leuwisari	2.502,28	962,40	-	3.464,68	Rendah
4	Mangunreja	38,15	-	-	38,15	Rendah
5	Padakembang	2.223,23	537,50	-	2.760,73	Rendah
6	Sariwangi	2.396,36	810,28	-	3.206,64	Rendah
7	Singaparna	342,78	10,46	-	353,24	Rendah
8	Sukahening	441,04	-	-	441,04	Rendah
9	Sukaraja	14,03	-	-	14,03	Rendah
10	Sukarame	451,90	-	-	451,90	Rendah
11	Sukaratu	1.968,06	2.646,60	-	4.614,66	Sedang
12	Tanjung Jaya	86,24	-	-	86,24	Rendah
Kabupaten Tasikmalaya		13.005,16	5.233,26	-	18.238,42	Sedang

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



Gambar 2.9
Peta Sebaran Bencana Letusan Gunung Api Galunggung
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2041

9. Bencana Tanah Longsor

Tasikmalaya berpotensi mengalami bencana longsor di 38 kecamatan dengan perkiraan luas total 164.326,91 hektar. Rincian luas bahaya tanah longsor dan kelas bahaya per kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan pada Tabel 2.16.

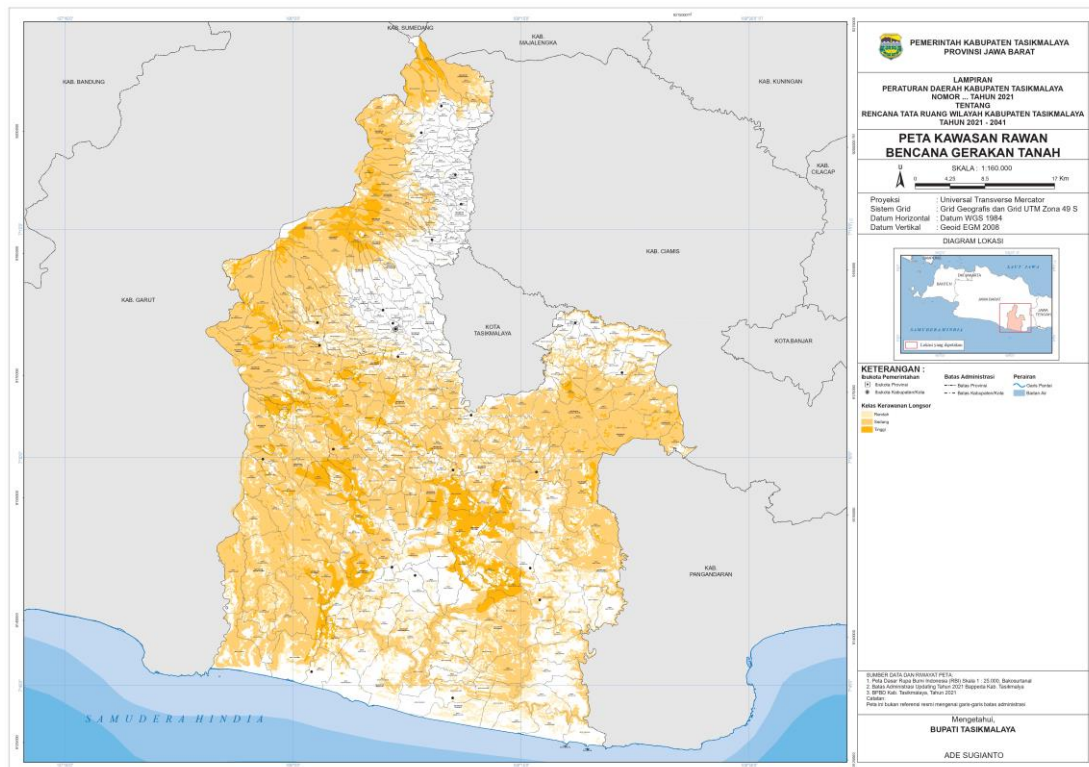
Tabel 2.16.
Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Redang	Sedang	Tinggi		
1	Bantarkalong	574,41	2.576,24	1.584,31	4.734,96	Tinggi
2	Bojongasih	315,59	2.349,32	384,50	3.049,41	Sedang
3	Bojonggambir	1.411,49	12.631,84	855,03	14.898,36	Sedang
4	Ciawi	172,62	2.322,02	246,32	2.740,96	Sedang
5	Cibalong	241,09	1.798,88	2.251,78	4.291,75	Tinggi
6	Cigalontang	38,19	8.491,42	1.319,66	9.849,28	Sedang
7	Cikalong	2.450,54	4.282,91	12,53	6.745,98	Sedang
8	Cikatomas	1.399,74	6.649,22	1.108,77	9.157,73	Tinggi
9	Cineam	77,04	4.854,63	213,88	5.145,55	Sedang
10	Cipatujah	3.054,62	9.923,87	983,32	13.961,80	Sedang
11	Cisayong	149,82	1.111,07	180,53	1.441,42	Sedang

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Redang	Sedang	Tinggi		
12	Culamega	589,37	4.738,01	780,37	6.107,76	Sedang
13	Gunungtanjung	216,36	2.288,93	246,50	2.751,79	Sedang
14	Jamanis	12,86	-	-	12,86	Rendah
15	Jatiwaras	161,99	4.145,87	796,87	5.104,74	Tinggi
16	Kadipaten	317,74	2.848,97	327,69	3.494,40	Sedang
17	Karangjaya	16,10	3.879,73	246,49	4.142,32	Sedang
18	Karangnunggal	1.553,70	2.791,57	1.208,11	5.553,38	Tinggi
19	Leuwisari	92,48	1.011,87	387,03	1.491,38	Sedang
20	Mangunreja	56,62	774,15	176,32	1.007,09	Sedang
21	Manonjaya	194,91	920,28	42,36	1.157,55	Sedang
22	Padakembang	136,39	232,75	31,56	400,69	Sedang
23	Pagerageung	625,19	3.169,12	654,30	4.448,61	Sedang
24	Pancatengah	3.807,42	5.601,01	51,76	9.460,20	Sedang
25	Parungponteng	119,12	2.923,95	211,36	3.254,42	Sedang
26	Puspahiang	25,80	2.632,97	387,49	3.046,26	Tinggi
27	Rajapolah	4,34	-	-	4,34	Rendah
28	Salawu	15,05	3.666,68	571,04	4.252,78	Sedang
29	Salopa	61,10	8.809,84	834,21	9.705,16	Sedang
30	Sariwangi	146,36	1.732,67	467,38	2.346,41	Sedang
31	Singaparna	79,00	39,24	-	118,24	Sedang
32	Sodonghilir	385,11	5.225,45	2.012,84	7.623,39	Tinggi
33	Sukahening	235,29	1.216,39	150,19	1.601,86	Sedang
34	Sukaraja	405,68	2.445,62	-	2.851,30	Sedang
35	Sukarame	285,76	-	-	285,76	Rendah
36	Sukaratu	231,92	983,83	565,34	1.781,08	Sedang
37	Tanjung Jaya	265,03	1.669,84	119,05	2.053,92	Sedang
38	Taraju	8,29	2.902,83	1.340,91	4.252,04	Tinggi
Kabupaten Tasikmalaya		19.934,13	123.642,98	20.749,80	164.326,91	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil analisis bahaya diketahui bahwa Kecamatan Cigalontang mempunyai kelas bahaya tanah longsor TINGGI dan Kecamatan Sodonghilir dan Kecamatan Sukahening yang berada pada kelas SEDANG mengalami bencana tanah longsor sebanyak 5 kejadian dalam tahun 2018 (data BPBD Kabupaten Tasikmalaya). Kejadian bencana tanah longsor disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan ketidakmampuan tanah menahan beban sehingga menyebabkan gerakan tanah/longsor.



Gambar 2.10
Peta Sebaran Bencana Longsor Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2041

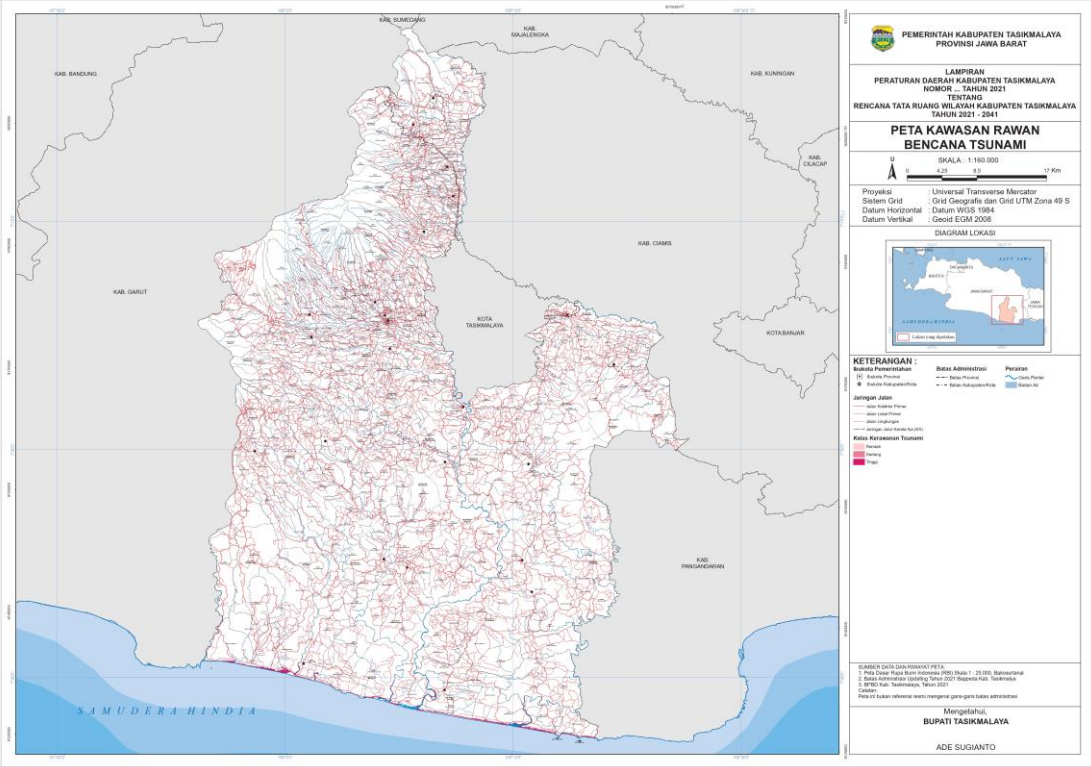
10. Bencana Tsunami

Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki wilayah pantai selatan Laut Jawa sekaligus merupakan lempeng bumi yang aktif bergerak menimbulkan gempa tektonik di laut, mengakibatkan Kabupaten Tasikmalaya berpotensi mengalami bencana Tsunami. Potensi bencana tsunami diperkirakan memberikan dampak kepada 3 kecamatan dengan cakupan luas 694,73 hektar. Deskripsi lebih rinci potensi bahaya Tsunami di Kabupaten Tasikmalaya pada Tabel 2.17 dan dipetakan pada Gambar 2.8.

Tabel 2.17.
Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Cikalong	21,75	17,23	281,54	320,52	Tinggi
2	Cipatujah	5,66	16,69	280,04	302,40	Tinggi
3	Karangnunggal	2,59	7,12	62,10	71,81	Tinggi
Kabupaten		30,00	41,04	623,69	694,73	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023



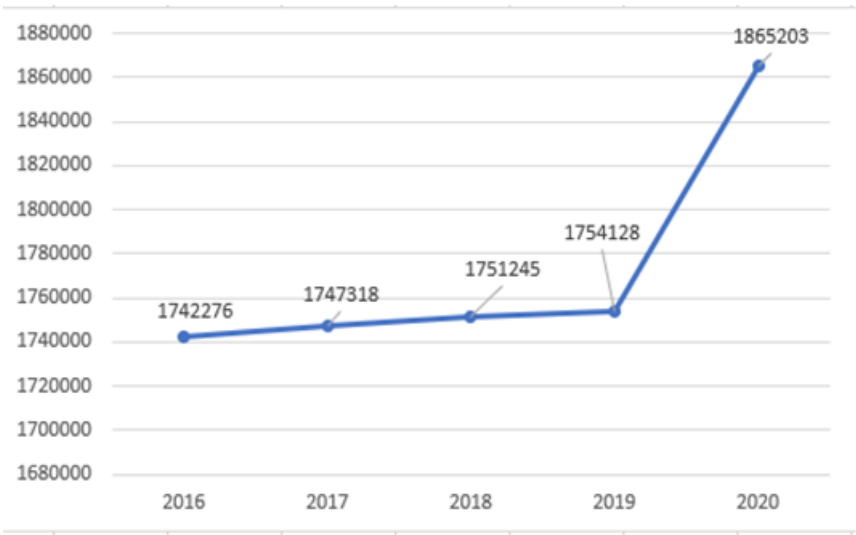
Gambar 2.11
Peta Sebaran Bencana Tsunami Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2041

2.1.5. Kondisi Demografi

Kondisi kependudukan Kabupaten Tasikmalaya digambarkan dengan indikator: 1) jumlah penduduk, 2) laju pertumbuhan penduduk, 3) distribusi dan kepadatan penduduk, 3) *sex ratio*, dan 4) *dependency ratio*.

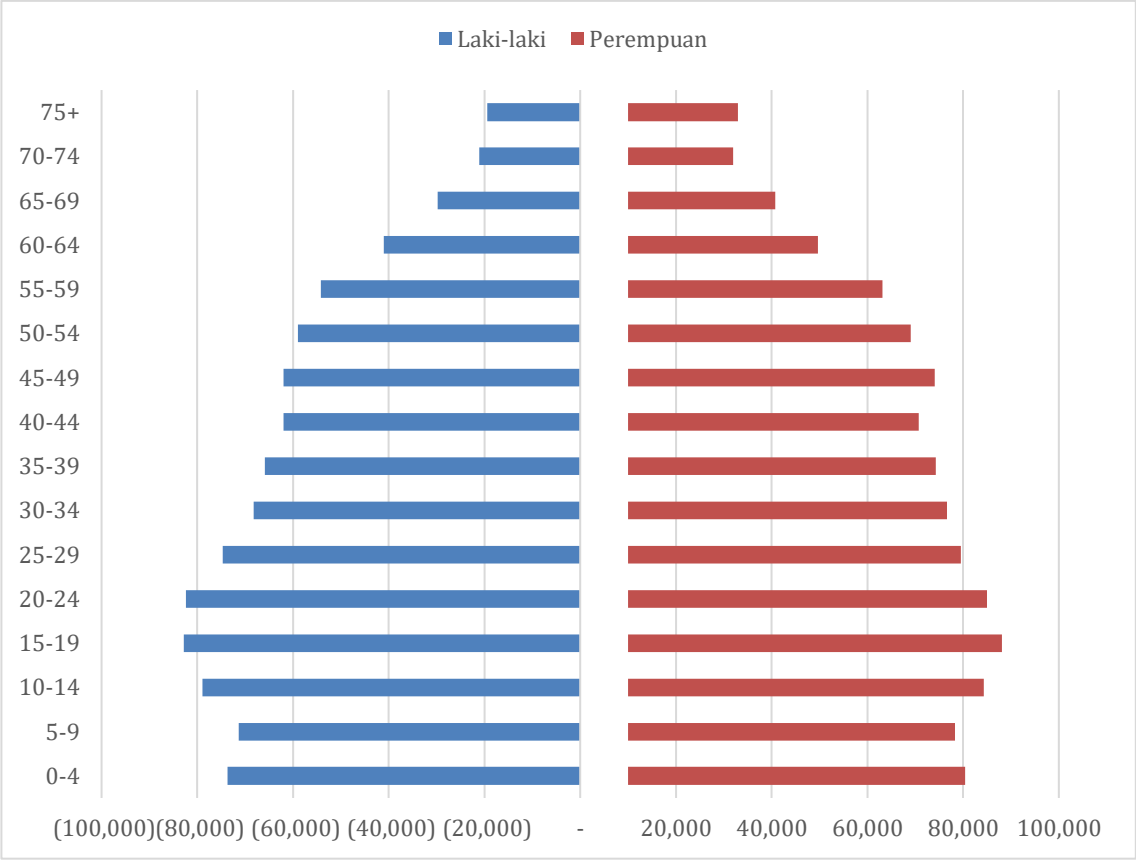
a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 berdasarkan Hasil Sensus penduduk 2020 yang dilaksanakan BPS Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebanyak 1.865.203 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 946.090 jiwa penduduk laki – laki dan 919.113 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 penduduk Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan sebesar 0,29 persen.



Gambar 2.12.
Jumlah Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (berbagi tahun)

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Tasikmalaya dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya. Piramida penduduk selama tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya didominasi usia 15-19 tahun dan usia 20-24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Tasikmalaya adalah usia produktif. Dengan demikian angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya dapat dinilai masih cukup baik. Grafik piramida penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dideskripsikan pada Gabar 2.10.



Gambar 2.13.
Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021)

Secara historis, data jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 – 2020 berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel berikut 2.18.

Tabel 2.18.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
0-4		147.360	157.301	161.378	144.093
5-9		157.098	162.881	167.186	139.723
10-14		159.580	170.383	174.972	153.235
15-19	35.558	138.411	147.190	151.043	160.841
20-24	60.223	113.072	116.786	119.555	157.284
25-29	82.924	113.547	118.093	120.877	144.192
30-34	81.427	112.716	120.078	122.918	134.907
35-39	96.220	131.306	135.135	138.390	130.115

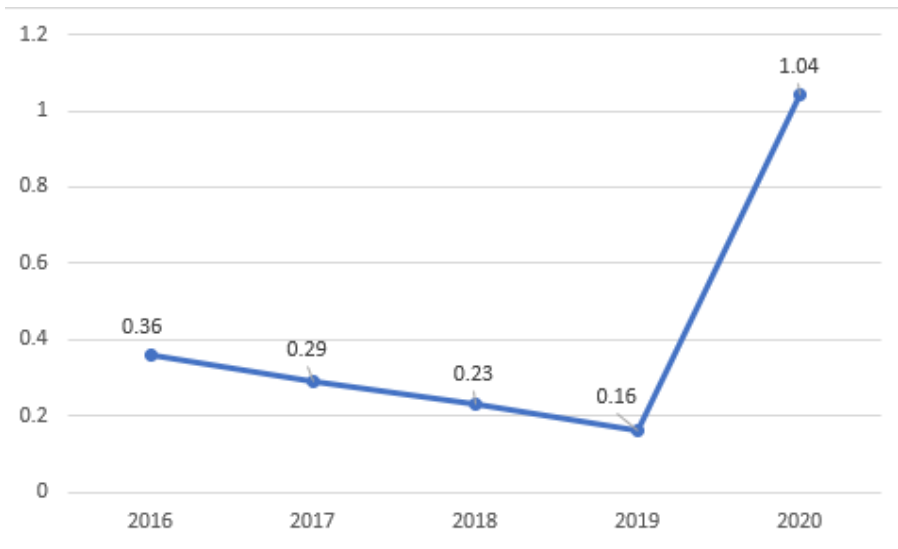
Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
40-44	99.981	133.675	131.835	135.211	122.715
45-49	92.719	130.101	123.128	126.440	126.081
50-54	81.712	106.781	98.869	101.537	118.048
55-59	62.775	87.881	78.536	80.693	107.274
60-64	48.838	76.692	191.080	196.298	80.687
65-69	49.585	54.713			60.542
70-74		38.586			43.055
75+		45.799			42.411

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 1,04% mengalami peningkatan dari 0,16% pada tahun 2019.

Pertumbuhan tersebut di satu sisi merupakan dampak positif karena meningkatnya Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 76,11 Point jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 75,71 Point. Namun di sisi lain terjadi karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kependudukan tidak sesuai target yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebanyak 348.307 orang, masih terdapat 102.869 orang belum mengikuti atau menjadi peserta KB dengan berbagai penyebab termasuk dampak Pandemi COVID-19.



Gambar 2.14.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (berbagi tahun)

c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

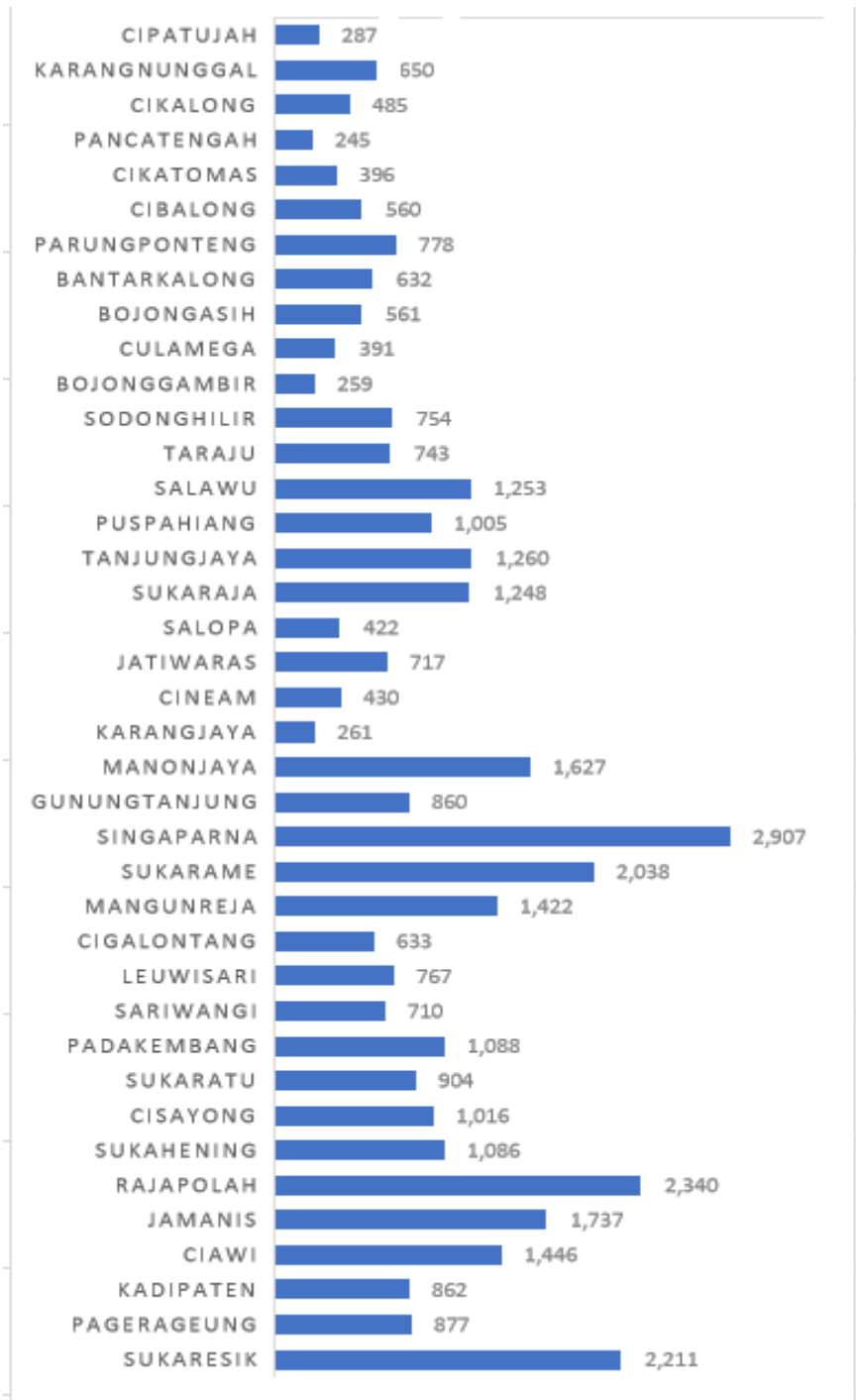
Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Distribusi dan kepadatan penduduk Kabupaten Tasikmalaya menurut kecamatan disajikan pada tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/km ²
1	Cipatujah	3.80	287
2	Karangnunggal	4.75	650
3	Cikalong	3.64	485
4	Pancatengah	2.65	245
5	Cikatomas	2.82	396
6	Cibalong	1.76	560
7	Parungponteng	1.97	778
8	Bantarkalong	2.03	632
9	Bojongasih	1.16	561
10	Culamega	1.43	391
11	Bojonggambir	2.35	259
12	Sodonghilir	3.77	754
13	Taraju	2.23	743
14	Salawu	3.39	1,253
15	Puspahiang	1.88	1,005
16	Tanjungjaya	2.48	1,260
17	Sukaraja	2.88	1,248
18	Salopa	2.75	422

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/km ²
19	Jatiwaras	2.82	717
20	Cineam	1.81	430
21	Karangjaya	0.67	261
22	Manonjaya	3.44	1,627
23	Gunungtanjung	1.67	860
24	Singaparna	3.87	2,907
25	Sukarame	2.18	2,038
26	Mangunreja	2.26	1,422
27	Cigalontang	4.07	633
28	Leuwisari	2.19	767
29	Sariwangi	1.89	710
30	Padakembang	2.20	1,088
31	Sukaratu	2.77	904
32	Cisayong	3.23	1,016
33	Sukahening	1.65	1,086
34	Rajapolah	2.69	2,340
35	Jamanis	1.98	1,737
36	Ciawi	3.51	1,446
37	Kadipaten	2.12	862
38	Pagerageung	3.14	877
39	Sukaresik	2.11	2,211
Tasikmalaya		100.00	689

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021)

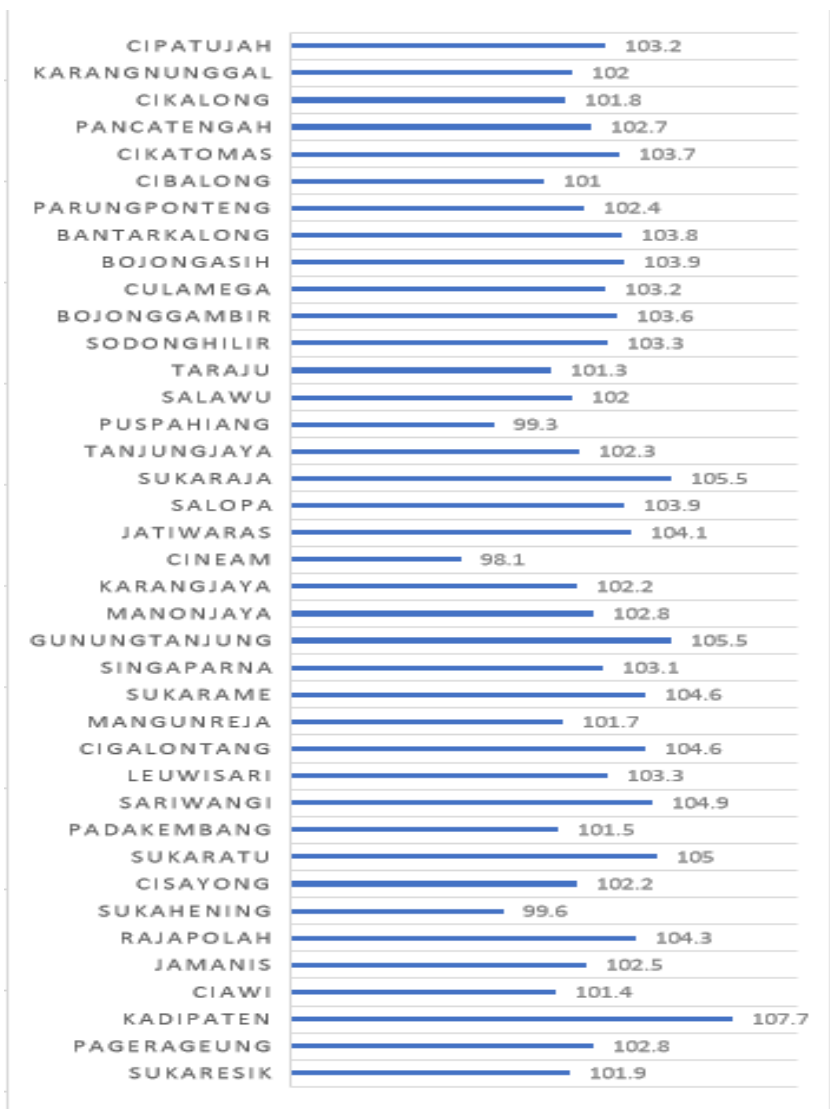


Gambar 2.15.
Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021, diolah)

d. Sex Ratio

Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender. Sex

ratio Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 102,9. Artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 103 orang penduduk laki-laki. Pada tahun 2020 data *Sex Ratio* menurut kecamatan dari BPS sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.13.



Gambar 2.16.
Sex Ratio Menurut Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021, diolah)

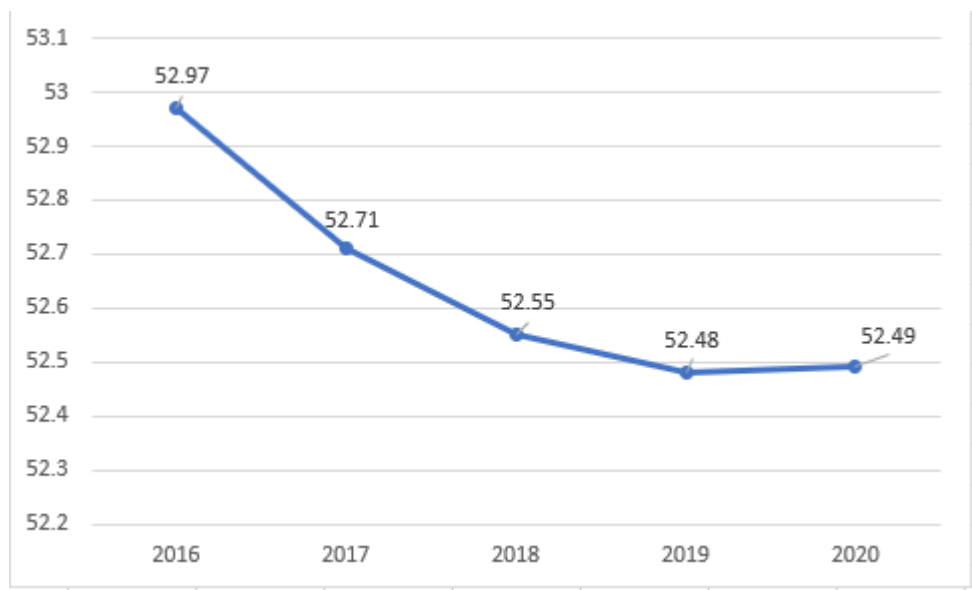
e. Rasio Kebergantungan (*Dependency Ratio*)

Dependency Ratio atau Rasio Ketergantungan, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15 –64 tahun). Angka Rasio Ketergantungan

ini menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Pada saat angka rasio ketergantungan rendah penduduk usia produktif hanya menanggung sedikit penduduk usia non-produktif. *Dependency Ratio* Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 berdasarkan data BPS Kabupaten Tasikmalaya sebesar 52.49 persen, meningkat dari 52,48 persen pada tahun 2019. Peningkatan persentase ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja dan dianggap produktif mempunyai tanggungan masing-masing sebanyak 52-53 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif.

Gambar 2.14 menunjukkan bahwa *dependency ratio* Kabupaten Tasikmalaya semakin menurun setiap tahunnya dan menuju angka ideal yaitu dibawah nilai 50 sehingga pertumbuhan ekonomi sesuai corak perekonomian Kabupaten Tasikmalaya sangat penting untuk terus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya *Demographic Burden*.



Gambar 2.17.
Dependency Ratio
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Pusat (2021, diolah)

Angka dependensi rasio Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu indikator bahwa kabupaten Tasikmalaya dalam kondisi mendapatkan bonus demografi.

Bonus Demografi merupakan salah satu perubahan dinamika demografi yang terjadi karena adanya perubahan struktur penduduk menurut umur. Fenomena transisi demografi ini terjadi karena karena berkurangnya angka kelahiran yang dibarengi oleh tingginya angka kematian dalam jangka panjang.

Pada saat terjadi penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang, akan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk berusia muda (< 15 tahun). akan tetapi di satu sisi jumlah penduduk usia produktif (15 –64 tahun) akan meningkat secara drastis sebagai akibat angka kelahiran yang tinggi di masa lalu.

Disisi lain jumlah penduduk dengan umur di atas 64 tahun akan meningkat secara perlahan dan kemudian meningkat cepat akibat terjadinya peningkatan usia harapan hidup. Pada saat jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 tahun) ini lah yang disebut dengan kondisi Bonus Demografi (Rusli, Toersilaningsih, Meirida, Kurniawan, dan Setiawan, 2015) dalam (Yusmarni, 2016).

Bonus Demografi pada dasarnya merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara dinamika kependudukan dengan ekonomi. Semakin sedikit jumlah usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Idealnya pertumbuhan ekonomi secara dimaksimalkan terjadi pada saat rasio ketergantungan berada di bawah angka 50. Kondisi ini juga disebut sebagai *the window of opportunity* (jendela kesempatan) (KOMINFO, 2015)).

Adioetomo (2005) menyatakan bahwa perubahan dinamika demografi dimana tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja akan mempengaruhi *Gross Domestic Product* per kapita sebuah negara yang juga akan berdampak terhadap:

- 1) Jumlah penduduk usia kerja yang yang tinggi dan dapat diserap oleh pasar kerja akan meningkatkan total output
- 2) Akan meningkatkan tabungan masyarakat
- 3) Tersedianya sumber daya manusia dalam proses pembangunan ekonomi

Kondisi ini hanya akan terjadi sehingga bonus demografi betul-betul dapat dimanfaatkan jika sebuah negara memenuhi beberapa prasyarat, yaitu:

- 1) Pertambahan penduduk usia kerja dibarengi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari segi kesehatan maupun pendidikan dan keterampilan serta peningkatan *soft skill* sehingga mereka memiliki daya saing secara global.
- 2) Penduduk usia kerja dapat diserap oleh pasar kerja yang tersedia
- 3) Tersedianya cukup lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Jika prasyarat di atas tidak dapat terpenuhi yang akan terjadi adalah kebalikan dari bonus demografi (*Demographic Dividend*) yaitu beban demografi (*Demographic Burden*). Dimana banyaknya jumlah penduduk produktif yang tidak dapat terserap oleh pasar kerja akan menjadi beban ekonomi sebuah Negara.

Pada kondisi ini tingkat pengangguran akan tinggi, sehingga penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja. Transisi struktur usia berdampak pada *dependency ratio* atau beban ketergantungan. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan fokus kepada tiga aspek yaitu: 1) pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, 2) kesejahteraan sosial, dan 3) aktivitas seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Secara teoritis, kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari struktur, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi daerah tersebut. Struktur ekonomi diukur dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Persentase perubahan PDRB setiap tahunnya kemudian menjadi indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di daerah tersebut. Sedangkan pemerataan ekonomi suatu daerah dihitung dengan indeks gini (*gini ratio*) pada daerah tersebut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu daerah selama satu periode (satu tahun). PDRB dihitung dalam satuan rupiah. Untuk mengoreksi nilai PDRB yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan faktor kenaikan harga-harga pada tahun sebelumnya (inflasi) dilakukan dengan menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2020 mencapai Rp. 37.446.145.350.000,- Sedangkan PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2020 (ADHK) pada Tahun 2020 mencapai Rp. 24.346.362.630.000,- atau mengalami kontraksi sebesar -0,98 % dari tahun sebelumnya. Secara historis PDRB Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan ADHB dan ADHK dalam periode 2016-2020 disajikan pada tabel 2.20.

Tabel 2.20.
PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB	27.995.996,40	30.532.533,10	33.970.204,20	37.218.870,70	37.446.145,35
PDRB ADHK	20.824.796,90	22.063.288,10	23.319.913,60	24.586.988,50	24.346.362,63

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021, diolah)

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu perhitungan menurut lapangan usaha, dan menurut pengeluaran. PDRB menurut lapangan usaha menggambarkan struktur ekonomi menurut lapangan usaha masyarakatnya, sedangkan PDRB menurut pengeluaran menggambarkan struktur ekonomi menurut jenis pengeluaran seperti konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. PDRB menurut lapangan usaha diuraikan pada Tabel 2.20.

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020 Kabupaten Tasikmalaya

No	Lapangan Usaha/Industry	2016		2017		2018		2019		2020	
		Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%
1	2	5	6	4	7	8	9	10	11		
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.395.906,3	35,51	7.780.414,2	35,59	8.031.420,9	34,48	8.156.659,9	33,17	8.136.218,40	33,42
B	Pertambangan dan Penggalian	59.689,3	0,29	59.833,5	0,27	61.885,0	0,27	61.381,9	0,25	61.797,17	0,25
C	Industri Pengolahan	1.553.066,6	7,46	1.655.409,5	7,57	1.817.901,1	7,80	1.988.538,0	8,09	1.947.221,09	8,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.577,7	0,07	16.164,2	0,07	16.966,5	0,07	17.418,4	0,07	16.450,41	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.837,1	0,02	4.143,4	0,02	4.556,8	0,02	4.958,3	0,02	5.486,23	0,02
F	Konstruksi	1.778.411,8	8,54	1.917.813,9	8,77	2.063.533,9	8,86	2.238.211,8	9,10	2.117.752,27	8,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.334.846,5	20,82	4.481.936,1	20,50	4.698.019,3	20,17	5.040.109,9	20,50	4.665.390,13	19,16
H	Transportasi dan Pergudangan	683.914,0	3,28	728.269,5	3,33	769.533,9	3,30	824.814,6	3,35	814.744,71	3,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288.256,8	1,38	313.381,4	1,43	314.401,8	1,35	375.002,3	1,53	366.390,83	1,50
J	Informasi dan Komunikasi	918.454,1	4,41	1.034.660,3	4,73	1.137.838,6	4,88	1.263.356,3	5,14	1.593.617,03	6,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	655.216,3	3,15	681.892,7	3,12	715.331,6	3,07	737.165,3	3,00	742.907,13	3,05

No	Lapangan Usaha/Industry	2016		2017		2018		2019		2020	
		Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%
1	2	5	6	4	7	8	9	10	11		
L	Real Estat	293.890,6	1,41	323.177,2	1,48	356.030,2	1,53	390.649,0	1,59	394.884,99	1,62
M,N	Jasa Perusahaan	90.692,1	0,44	99.692,1	0,46	108.844,8	0,47	118.906,2	0,48	101.097,17	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	953.458,2	4,58	962.100,7	4,40	980.438,9	4,21	1.014.261,4	4,13	961.503,67	3,95
P	Jasa Pendidikan	1.316.201,8	6,32	1.457.047,0	6,66	1.604.208,7	6,89	1.692.358,9	6,88	1.774.067,10	7,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.232,5	0,67	158.033,8	0,72	175.575,5	0,75	192.874,9	0,78	185.776,75	0,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	343.145,2	1,65	189.318,6	0,87	436.426,1	1,87	470.294,4	1,91	461.057,57	1,89
	Produk Domestik Bruto	20.824.796,8	100,00	22.063.288,1	100,00	23.319.913,6	100,00	24.586.988,5	100,00	24.346.362,63	-0,98

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

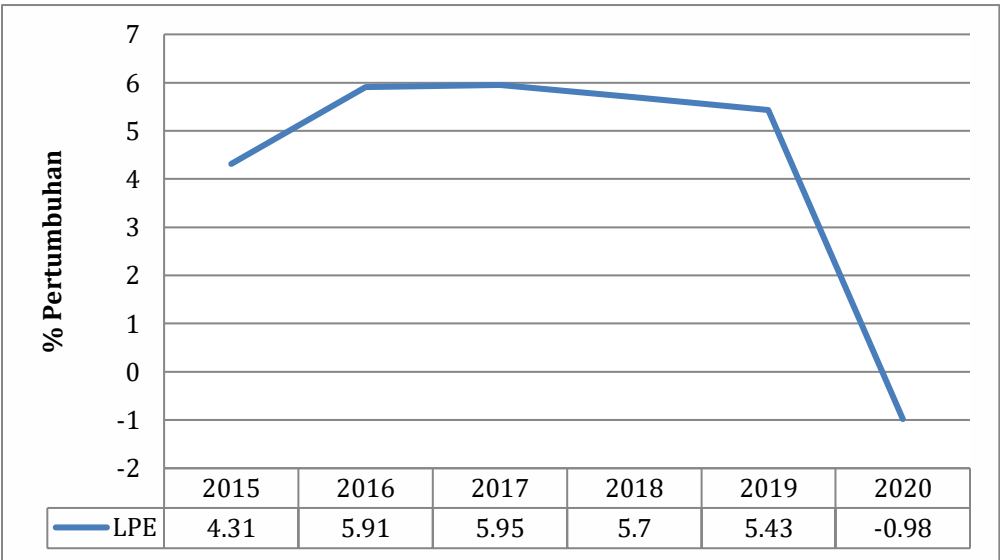
Tabel 2.22.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah),
2016 - 2020 Kabupaten Tasikmalaya

No	Lapangan Usaha/Industry	2016		2017		2018		2019		2020	
		Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%
1	2	5	6	4	7	8	9	10	11		
A	Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	10.737.030,9	38,35	11.607.072,6	38,02	12.938.947,6	38,09	13.950.996,4	37,48	14.186.388,56	37,88
B	Pertambangan dan Penggalian	76.415,2	0,27	75.002,9	0,25	78.160,0	0,23	79.701,4	0,21	80.763,93	0,22
C	Industri Pengolahan	2.076.015,7	7,42	2.267.374,7	7,43	2.566.499,2	7,56	2.869.308,4	7,71	2.851.224,60	7,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.538,0	0,07	22.146,3	0,07	23.505,6	0,07	24.489,1	0,07	23.003,35	0,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang	4.801,2	0,02	5.677,0	0,02	6.811,9	0,02	7.737,3	0,02	8.611,27	0,02
F	Konstruksi	2.168.282,5	7,74	2.407.673,7	7,89	2.734.803,7	8,05	3.052.205,4	8,20	2.900.236,78	7,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.662.606,6	20,23	6.027.643,3	19,74	6.523.937,2	19,20	7.221.032,0	19,40	6.807.282,20	18,18
H	Transfortasi dan Pergudangan	1.204.693,4	4,30	1.321.635,9	4,33	1.461.111,0	4,30	1.570.728,5	4,21	1.580.485,68	4,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.707,8	1,25	395.521,8	1,30	451.275,3	1,33	515.788,2	1,39	535.914,80	1,43
J	Informasi dan Komunikasi	906.954,2	3,24	1.040.403,8	3,41	1.134.141,4	3,34	1.251.808,9	3,36	1.578.190,63	4,21

No	Lapangan Usaha/Industry	2016		2017		2018		2019		2020	
		Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%	Juta (Rp.)	%
1	2	5	6	4	7	8	9	10	11		
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	864.188,7	3,09	947.079,9	3,10	1.057.418,0	3,11	1.123.309,9	3,02	1.143.498,03	3,05
L	Real Estat	347.620,2	1,24	387.481,8	1,27	439.231,4	1,29	486.626,4	1,31	494.656,13	1,32
M,N	Jasa Perusahaan	115.777,5	0,41	129.595,1	0,42	149.162,4	0,44	183.885,5	0,49	162.316,75	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.315.917,8	4,70	1.378.676,9	4,52	1.492.615,5	4,39	1.553.668,7	4,17	1.480.536,91	3,95
P	Jasa Pendidikan	1.572.528,1	5,62	1.834.886,5	6,04	2.115.858,9	6,23	2.436.983,4	6,55	2.729.163,01	7,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161.907,6	0,58	189.101,4	0,62	218.539,5	0,64	643.115,5	0,66	244.647,33	0,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	412.011,0	1,47	486.559,5	1,59	578.185,9	1,70	643.115,5	1,73	639.225,40	1,71
	Produk Domestik Bruto	27.994.996,4	100	30.532.533,1	100	33.970.204,2	100	37.218.870,5	100	37.446.145,35	100

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Perubahan angka PDRB pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (*Year on Year/YoY*) pada suatu daerah merupakan indikator perkembangan ekonomi daerah tersebut. Laju Perkembangan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2020 digambarkan pada Gambar 2.15



Gambar 2.18.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2015 – 2020

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021, diolah)

Gambar 2.15 menggambarkan bahwa periode 2015-2016 LPE Kabupaten Tasikmalaya tumbuh secara signifikan dari 4,31 % menjadi 5,91 %. Tetapi periode 2016-2020 pertumbuhan ekonominya mengalami pelambatan sehingga pada tahun 2019 pertumbuhannya hanya 5,43%.

Pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Tasikmalaya mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif 0,98 seiring dengan terjadinya resesi ekonomi nasional sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19.

b. Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan indikator kecenderungan meningkatnya harga secara umum dan terus menerus. Angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya diperhitungkan sama dengan inflasi Kota Tasikmalaya, karena berada dalam satu radar perhitungan.

Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu :

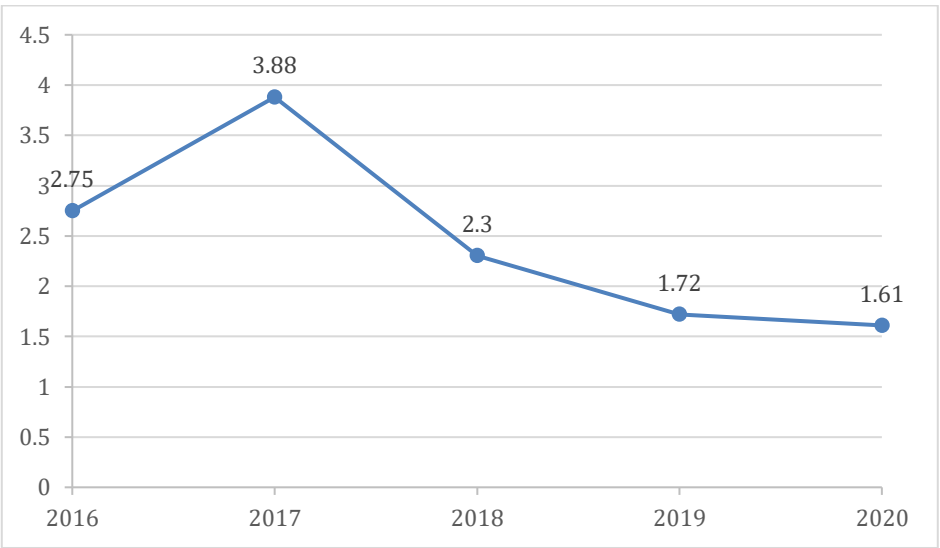
- 1) Kelompok Bahan Makanan;
- 2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau;
- 3) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar;
- 4) Kelompok Sandang;
- 5) Kelompok Kesehatan;
- 6) Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga;
- 7) Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) **Inflasi Ringan**, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang/jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan.
- 2) **Inflasi Sedang**, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% – 30% per tahun.
- 3) **Inflasi Berat**, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% – 100% per tahun.

- 4) **Inflasi Sangat Berat** (*Hyperinflation*), yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada tingkat inflasi Kota Tasikmalaya. Tahun 2020 tingkat inflasi Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 1,61 % (yoy). Tekanan inflasi terutama berasal dari bahan makanan. Untuk melihat perkembangan inflasi Kota Tasikmalaya/ Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana terlihat pada Gambar 2.16.



Gambar 2.19.
Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS, Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2021

Secara umum inflasi di Kota/Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan atau *creeping inflation* karena kurang dari 10% setahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara atau daerah berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi.

Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Inflasi sendiri tidak selalu menjadi sesuatu yang negatif bagi perekonomian sebuah

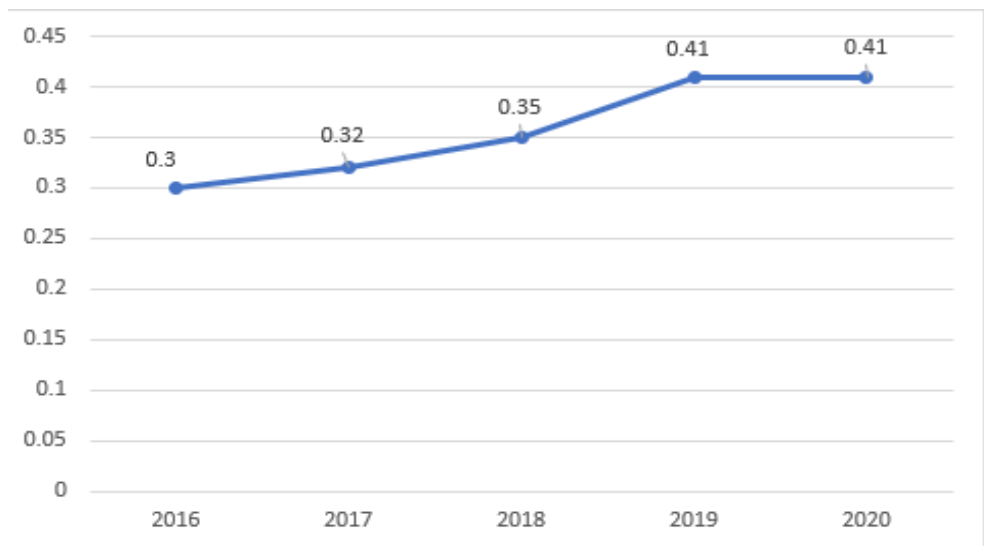
negara, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat persentase inflasi. Justru jika tidak ada tingkat inflasi maka tidak ada juga pergerakan positif dalam perekonomian, dimana sama sekali tidak terjadi perubahan harga. Karena itulah, inflasi sebenarnya merupakan sesuatu yang dibutuhkan selama berada dalam tingkat yang sesuai dengan jangkauan kemampuan negara atau inflasi moderat. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (*hiperinflasi*), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

c. Indeks Ketimpangan Ekonomi (Gini Ratio)

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori Gini Ratio adalah:

- a) $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
- b) $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan
- c) $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.

Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 mengacu pada capaian angka Provinsi Jawa Barat tahun 2020, karena telah menjadi Indeks Gini Provinsi. Tahun 2019-2020 Indeks Gini Kabupaten Tasikmalaya berada pada kategori sedang, yaitu 0,41 Poin. Diproyeksikan dengan terjadinya penurunan trend, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan trend penurunan angka kemiskinan, sampai akhir tahun RPJMD tahun 2016-2021, Gini Rasio Kabupaten Tasikmalaya akan terus menurun dan mencapai kategori ketimpangan rendah.



Gambar 2.20.
Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS, Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka, berbagai tahun

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Aspek Kesejahteraan Sosial difokuskan kepada indikator kemiskinan (meliputi garis kemiskinan, angka kemiskinan, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan) dan Indeks Pengembangan Manusia (IPM)

a. Indikator Kemiskinan

Hasibuan et.al. (2019) menyatakan salah satu karakteristik kemiskinan Indonesia yaitu kemiskinan di daerah pedesaan. Dimana sebagian besar penduduk miskin terdapat pada daerah pedesaan. Berdasarkan data BPS tahun 2017 menyebutkan bahwa kemiskinan di pedesaan sebesar 16,31%, sedangkan kemiskinan perkotaan sebesar 10,27%. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan tersebut karena sebagian besar penduduk desa bekerja disektor pertanian, umumnya sebagai buruh tani dan buruh kasar, sehingga pendapatan masyarakat sangat rendah. Menurut Kotze (dalam Hikmat, 2004) mengemukakan rata-rata masyarakat miskin menetap di wilayah yang terisolasi seperti pedesaan.

BAPPENAS (2018) menyatakan bahwa dalam tataran konsep, terdapat beberapa kelompok pandangan yang mengidentifikasi

penyebab kemiskinan terutama di wilayah pedesaan. Konsep ini akan memperkaya pembahasan evaluasi penyebab kemiskinan khususnya pada wilayah dengan kemiskinan tinggi. Beberapa pandangan penyebab kemiskinan antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, adalah kelompok pandangan ekonomi politik. Kelompok ini berpendapat bahwa munculnya kemiskinan pedesaan merupakan hasil dari proses pengkonsentrasian kekayaan dan kekuasaan. Proses tersebut terjadi melalui tiga tingkatan, yaitu: a) tingkat global, munculnya kemiskinan merupakan akibat hubungan pertukaran yang eksploitatif dan tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin sehingga negara miskin akan tetap menjadi miskin, meskipun tetap memperoleh manfaat dari investasi modal; b) tingkat nasional, kemiskinan pedesaan muncul sebagai akibat dari ulah beberapa kelompok kepentingan terutama kelompok kepentingan perkotaan, seperti kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk desa; dan c) tingkat lokal, kemiskinan pedesaan muncul sebagai akibat dari ulah para elit lokal yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, pelepas uang (*money lenders*), dan birokrat yang terus mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan mereka.

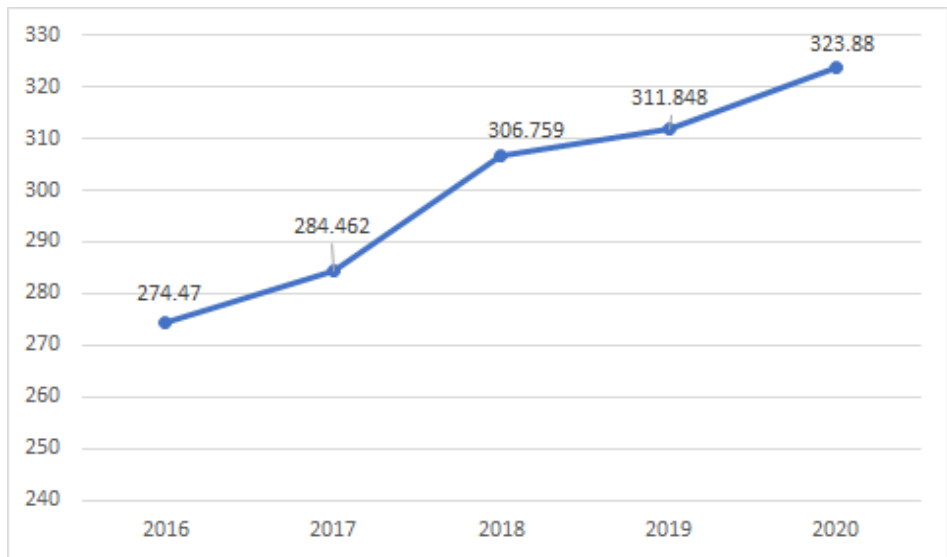
Kedua, adalah kelompok pandangan ekologi. Kelompok ini melihat kemiskinan di pedesaan sebagai akibat dari pertumbuhan dan tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya dan lingkungan. Adanya tekanan penduduk menyebabkan usaha pertanian menjadi semakin sempit. Hal ini mengakibatkan upah riil turun dan jumlah pengangguran meningkat. Sebagian tenaga kerja terpaksa harus bermigrasi ke daerah perkotaan dan lingkungan marginal. Selain itu, para ahli ekologi fisik juga melihat karakteristik fisik dari kelompok miskin seperti kurang gizi, kondisi lingkungan yang tidak sehat, perumahan yang kurang layak, lingkungan yang kurang nyaman, dan kondisi iklim yang tidak menentu menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan (Chambers, 1983).

Instrumen otonomi daerah yang menonjol adalah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan lebih banyak sumber daya keuangan pada kabupaten/kota. Salah satu

tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sidik, 2005:1). Diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan percepatan pembangunan dengan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang bersifat lokal spesifik dapat ditangani dengan cepat dan tuntas oleh pemerintah daerah.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

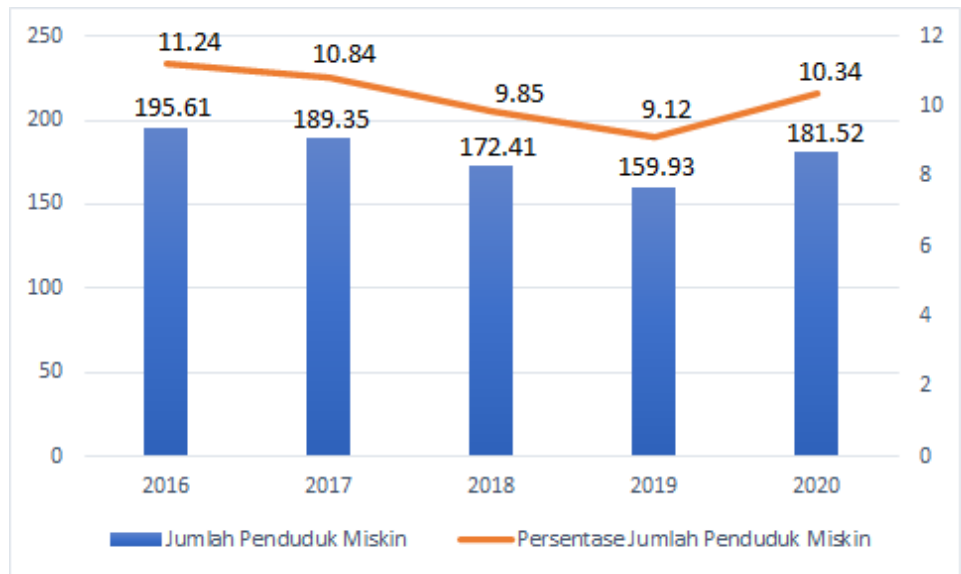
Suatu penduduk dikatakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.



Gambar 2.21.
Garis Kemiskinan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021)

Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin (p0) Kabupaten Tasikmalaya selama periode tahun 2016-2019 secara signifikan mengalami penurunan, hal ini berarti bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tetapi dengan terjadinya Pandemi Covid-19 selama tahun 2020 persentase penduduk miskin menjadi 10,34% atau berjumlah 181.52 (000) meningkat dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 9,2 %.

Untuk melihat perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.19



Gambar 2.22.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021)

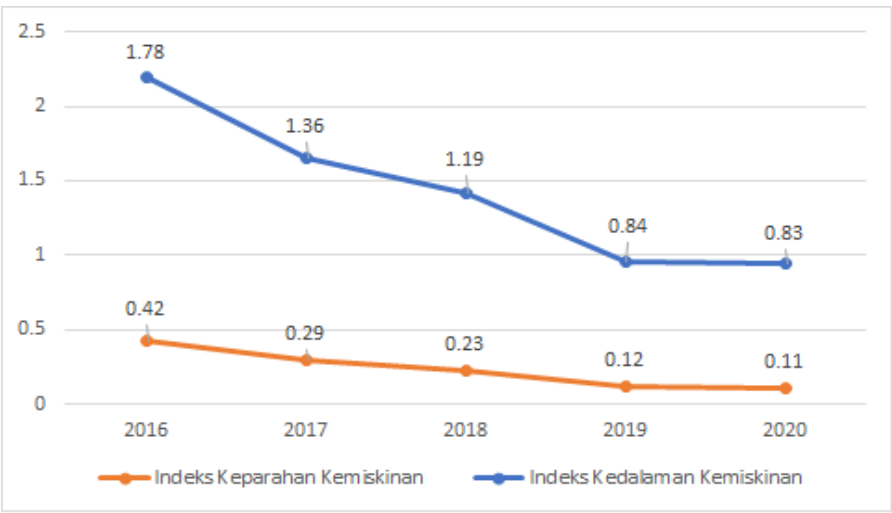
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis

kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan. Pada tahun 2020, PI tercatat 0,83 menurun dari 0,84 pada tahun 2019. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0.12 pada tahun 2019 menjadi 0.11 pada tahun 2020 (Gambar 2.20).



Gambar 2.23.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021)

Untuk penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dibutuhkan data terpadu yang menjadi dasar

kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin. Pembangunan satu basis data terpadu untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial/penanganan kemiskinan di Indonesia diawali dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Data Terpadu hasil PSE 2005 ini digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dilaksanakan mulai tahun 2007 dengan lokasi sebagai *pilot project* di 7 Provinsi dengan sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 500.000 RTSM. Kemudian setiap tiga tahun data tersebut dilakukan update dengan nama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

Mulai tahun 2016 pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2017 dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang digunakan untuk mengelola data Terpadu yang diberi nama data program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DT-PPFM dan OTM) serta data Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Pangan meliputi Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sistem ini masih terus dikembangkan secara bertahap sehingga semua Data dan Program PFM dan OTM baik yang ada di tingkat pusat mau pun daerah terintegrasi dengan aplikasi SIKS-NG termasuk data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang juga dikelola oleh Pusdatin Kesos.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 menetapkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. Pada Tahun 2021 Kementerian Sosial meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan NIK bekerjasama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk melihat perkembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23.
Rekapitulasi DTKS Per Kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Kode Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah RUTA	Jumlah ART
1	Cipatujah	010	243	1.060	1.935	3.397	9.178	27.777
2	Karangnunggal	020	280	1.219	1.874	3.382	9.376	27.148
3	Cikalong	030	149	809	1.548	3.456	8.623	25.025
4	Pancatengah	040	247	940	1.561	2.773	7.096	21.883
5	Cikatomas	050	249	919	1.787	3.159	7.998	23.907
6	Cibalong	060	106	654	1.097	1.528	4.201	13.384
7	Parungponteng	061	193	863	1.377	1.992	5.334	16.440
8	Bantarkalong	070	246	837	950	1.328	4.170	12.924
9	Bojongasih	071	96	389	784	1.122	3.019	9.025
10	Culamega	072	115	580	923	1.310	3.681	11.367
11	Bojonggambir	080	254	1.203	1.926	2.359	6.843	21.797
12	Sodonghilir	090	652	2.018	2.601	2.999	9.982	33.081
13	Taraju	100	286	1.080	1.448	1.802	5.427	17.916
14	Salawu	110	255	1.172	2.002	2.763	7.624	23.934
15	Puspahiang	111	231	774	1.221	1.880	5.023	14.630
16	Tanjungjaya	120	422	1.289	1.734	2.428	6.924	24.368
17	Sukaraja	130	320	1.277	1.763	2.668	7.384	25.935
18	Salopa	140	624	1.834	1.949	2.618	8.322	29.456
19	Jatiwaras	141	575	1.435	1.856	2.651	7.905	27.259
20	Cineam	150	71	439	961	2.250	5.421	14.431
21	Karangjaya	151	23	95	249	868	1.898	5.180
22	Manonjaya	160	262	1.114	1.599	2.497	7.163	24.024
23	Gunungtanjung	161	195	755	1.125	1.743	4.801	16.150
24	Singaparna	190	198	598	956	1.705	4.445	17.931
25	Sukarame	191	278	493	821	1.499	4.226	15.964
26	Mangunreja	192	190	756	1.138	1.604	4.523	14.837
27	Cigalontang	200	461	1.939	2.684	3.396	10.484	35.319
28	Leuwisari	210	192	545	898	1.338	3.867	13.952
29	Sariwangi	211	133	660	1.068	1.726	4.893	17.215
30	Padakembang	212	201	515	838	1.355	3.685	13.342
31	Sukaratu	221	174	607	937	1.494	4.137	15.360
32	Cisayong	230	187	663	1.015	1.934	5.559	18.071
33	Sukahening	231	164	447	926	1.833	4.823	14.280
34	Rajapolah	240	142	573	1.149	1.992	5.336	19.427
35	Jamanis	250	217	641	1.037	1.852	5.138	18.900
36	Ciawi	260	363	1.133	1.712	2.843	8.048	27.640
37	Kadipaten	261	700	841	1.105	1.476	4.895	20.856

No.	Kecamatan	Kode Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah RUTA	Jumlah ART
38	Pagerageung	270	305	952	1.349	2.096	6.069	20.711
39	Sukaresik	271	219	803	1.162	1.952	5.646	20.697
Grand Total			10.218	34.921	53.065	83.068	233.168	771.544

*) Data diambil berdasarkan SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2020

Arti Desil DTKS

Desil adalah kelompok per-sepuluhannya sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil.

Desil 1 : Rumah tangga dalam kelompok kondisi 10% terendah (sangat miskin)

Desil 2 : Rumah tangga dalam kelompok kondisi 10-20% terendah (miskin)

Desil 3 : Rumah tangga dalam kondisi 20-30% terendah (hampir miskin)

Desil 4 : Rumah tangga dalam kelompok kondisi 30-40% terendah (rentan miskin)

Desil >4 : Rumah tangga dalam kondisi mampu – sangat mampu

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Hubungannya dengan Kemiskinan

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Progamme-UNDP*). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

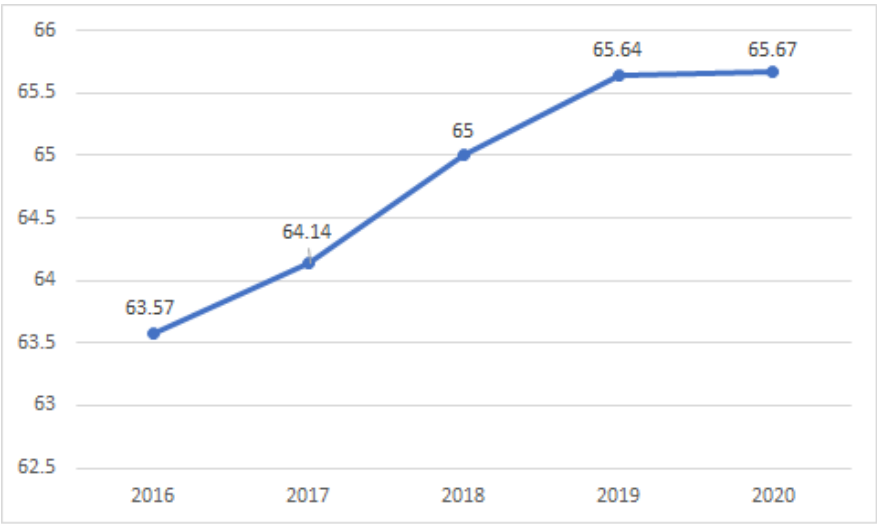
IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), dan Standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan

data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Secara umum, IPM Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 mencapai 65.67, meningkat 0.03 dibanding tahun 2019 dengan capaian 65.64. Dalam periode RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021, IPM Kabupaten Tasikmalaya termasuk kategori sedang Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- IPM <60 : IPM rendah
- $60 \leq \text{IPM} < 70$: IPM sedang
- $70 \leq \text{IPM} < 80$: IPM tinggi
- $\text{IPM} \geq 80$: IPM sangat tinggi

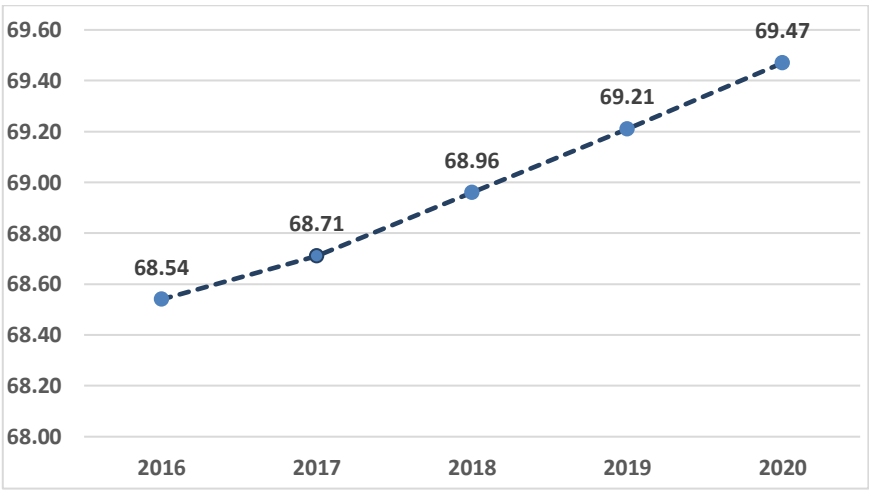


Gambar 2.24.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2020)

Angka Harapan Hidup Saat Lahir-AHH (*Life Expectancy-e₀*)
Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Secara umum, AHH Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir

mengalami peningkatan. AHH Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 mencapai 69.47 tahun, meningkat dibanding tahun 2019 dengan capaian 69.21 tahun.

Angka Harapan Hidup Saat Lahir berhubungan erat dengan pembangunan bidang kesehatan. Kesehatan didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental, serta sosial, dan bukan hanya sekadar bebas dari penyakit dan kelemahan fisik (Callahan, 1973). Kesehatan juga merupakan inti dari kesejahteraan dan hal ini merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas sebagai inti makna pembangunan. Apabila dilihat lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih prima dan produktif sehingga akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi (Todaro dan Smith, 2012).



Gambar 2.25.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2020)

Olavaria-Gambi (2003) dalam Sunarya (2018) menyatakan bahwa peningkatan di bidang kesehatan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Strauss dan Thomas (1998) berpendapat bahwa ada keterkaitan kuat antara kesehatan dengan kemiskinan. Kesehatan individu menentukan produktivitas sehingga semakin rendah tingkat kesehatan, semakin besar kemungkinan individu untuk terjebak dalam kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan cukup penting dalam mengentaskan kemiskinan (Arsyad, 1999). Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Wardhana *et. al.* (2018) dalam Indikator Kesehatan, Sosial dan Angka Harapan Hidup di Indonesia menyatakan angka harapan hidup yaitu umur anak yang baru lahir secara rata-rata yang akan hidup sampai tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan standar suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

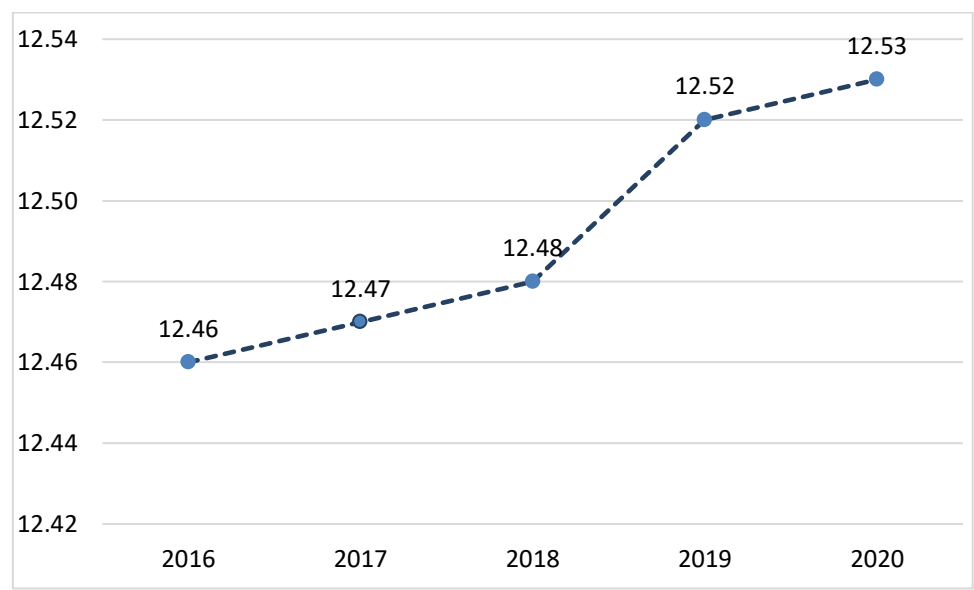
Banyak hal yang dapat mempengaruhi penurunan angka harapan hidup dan tingkat kesehatan seperti pengaruh faktor sosial. Penelitian Halicioglu (2011), bahwa faktor-faktor sosial ekonomi akan mempengaruhi angka harapan hidup menjadi menurun seperti pendapatan, pengeluaran kesehatan yang sangat minim, kurang tersedia makanan dan obat-obatan. Gaya hidup merupakan faktor sosial yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dll.

Dampak sosial dan ekonomi merupakan tantangan pemerintah daerah untuk menanggulangi efek negatif. Peran alokasi anggaran dan program kesehatan menjadi aktor untuk meningkatkan pembangunan SDM di Indonesia.

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling -EYS*). HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. HLS pada tahun 2020 meningkat dibanding

tahun 2019. Pada tahun 2020, HLS mencapai 12.53 tahun atau meningkat 0.01 tahun dibanding tahun 2019 dengan capaian 12.52 tahun.

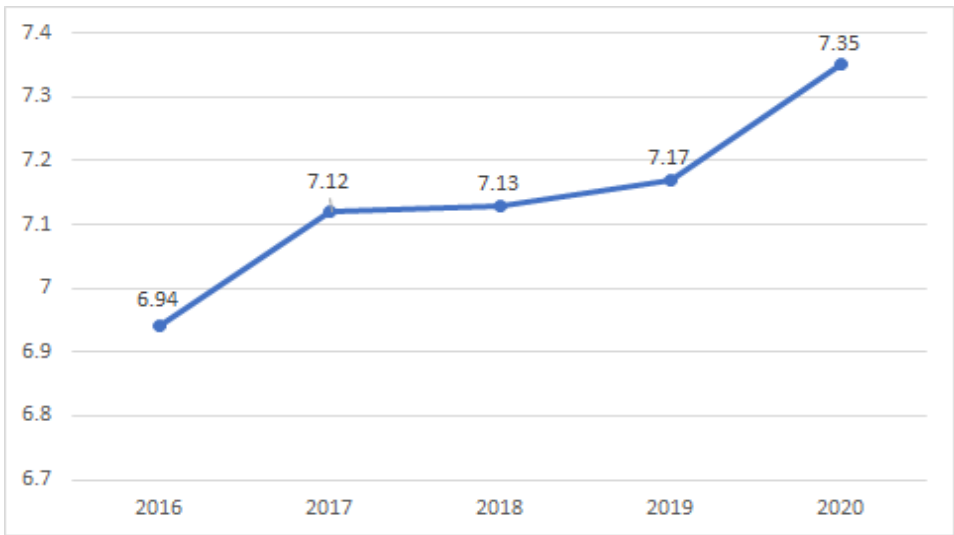


Gambar 2.26.
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2020)

Rata-rata Lama Sekolah-RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*). Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Rata-rata lama sekolah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi jumlah persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Semakin tinggi capaian angka rata-rata lama sekolahnya maka bisa diprediksi jumlah penduduk miskinnya relatif kecil. Peningkatan keahlian atau pendidikan akan membuat orang lebih mudah mencari pekerjaan atau lebih banyak pilihan pekerjaan. Saputra (2011) menyatakan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia.

RLS Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan 0.18 tahun dibanding tahun 2019. Pada tahun 2020, RLS mencapai 7.35 tahun atau meningkat 0.18 tahun dibanding tahun 2019 dengan capaian 7.17 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu mengenyam pendidikan sampai kelas 7 atau kelas 1 SMP.



Gambar 2.27.
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2020)

Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan.

Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan

memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004). Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian Rizal (2006) dengan judul *Is Basic Education Level of Labor have a role in Reducing Poverty in Indonesia?* Menyimpulkan bahwa:

- 1) Jenjang pendidikan dasar tenaga kerja tidak cukup berperan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, tetapi justru berperan menambah tingkat kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan nasional Wajar Dikdas 9 tahun tidak cukup dalam konteks menanggulangi kemiskinan.
- 2) Secara nasional, pendidikan dapat berperan mengurangi kemiskinan apabila jenjang pendidikan tenaga kerja di atas sembilan tahun, yaitu mulai dari jenjang pendidikan menengah ke atas; dan semakin tingginya tingkat pendidikan tenaga kerja, semakin besar pula perannya dalam mengurangi kemiskinan.

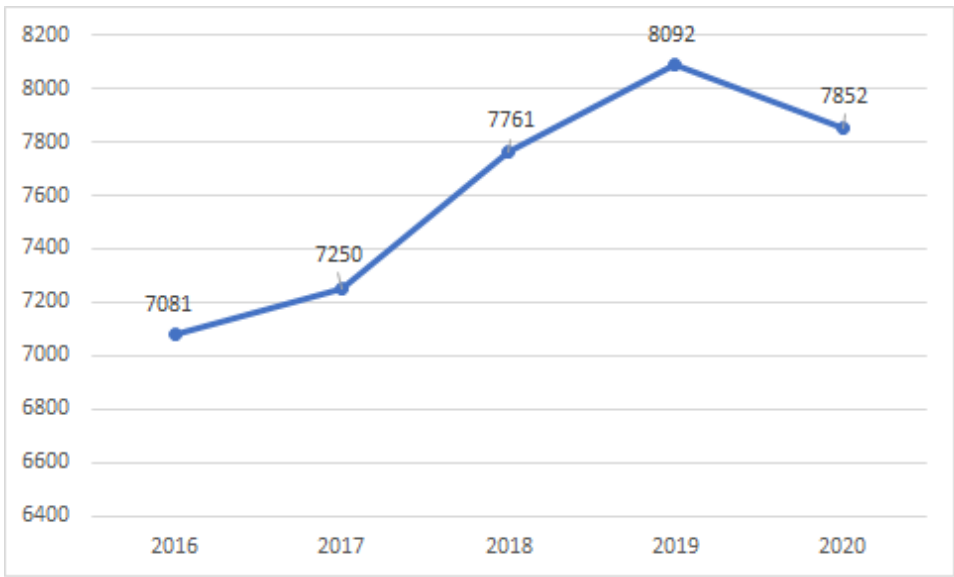
Oleh karena itu, paradigma wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun digeser menjadi hak belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Hal ini menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP.

Dengan pergeseran paradigma tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara. Pergeseran paradigma tersebut relatif terlambat, karena baru dilakukan pada awal tahun 2009, sementara target ketuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun juga ditargetkan pada akhir tahun 2009. (Handayani, 2012)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*-

PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan.

Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Pengeluaran per kapita Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Pada tahun 2020 mencapai Rp7.852.000,00 per tahun atau menurun dari tahun 2019 dengan capaian Rp8.092.000,00 per tahun.



Gambar 2.28.
Pengeluaran per Kapita (Rp, 000)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2020)

Amalia dan Mahmudionon (2017) menjelaskan tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang diterima oleh petani akibat risiko gagal panen, modal yang besar, produksi yang rendah dan sistem harga pasar yang tidak dapat diprediksi. Faktor lain karena kurangnya keberlanjutan pekerjaan petani karena bekerja secara musiman. Dalam pengertian sempit, kemiskinan adalah ketidakcukupan uang dan barang untuk melanjutkan hidup seseorang. Rendahnya pendapatan menjadi salah satu indikator rendahnya akses ekonomi petani gurem dengan keterbatasan lahan

untuk produksi. Pendapatan menjadi faktor ukuran ketahanan pangan dengan melihat kemampuan beli rumah tangga dalam mengakses pangan. Selain pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga juga menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga. Proporsi pengeluaran pangan yang semakin tinggi akan membuat rumah tangga menjadi tidak sejahtera. Hal ini sejalan dengan penelitian Agbola (2014) yang menyebutkan bahwa total pendapatan, dan besar pengeluaran pangan akan memiliki hubungan dengan status ketahanan pangan rumah tangga petani berlahan kecil di Nigeria, Afrika.

BPS Kabupaten Tasikmalaya (2020) mengemukakan “Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun” merupakan tujuan pertama dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik yang mengacu pada konsep PBB adalah bergantung pada pendapatan dan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Hal ini dapat dilihat dari besarnya rata-rata pengeluaran masyarakat. Secara umum pengeluaran dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu 40% pengeluaran terendah, 40% pengeluaran menengah dan 20% pengeluaran tertinggi. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 di wilayah provinsi Jawa Barat. Rata-rata pengeluaran Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.836.214, berada di peringkat kedua terbawah setelah Kabupaten Cianjur yang menempati posisi terbawah dengan nilai rata-rata pengeluaran sebesar Rp815.801,00. Berikutnya adalah Kabupaten Garut dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp838.488,00.

Statistik rata-rata pengeluaran tersebut di atas berbanding lurus dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai masing-masing wilayah. Sedangkan berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok 40% terbawah adalah sebesar Rp442.341,00 dan kelompok 40% menengah sebesar Rp777.858,00, sedangkan kelompok 20% teratas sebesar Rp1.737.698,00.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa secara agregat kelompok 40% menengah hampir mencapai dua kali lipat kelompok 40%

terbawah, begitu pula dengan kelompok 20% teratas hampir mencapai angka empat kali lipat dari kelompok 40% terbawah. Hal ini mengindikasikan di Kabupaten Tasikmalaya terjadi adanya kesenjangan pendapatan cukup signifikan diantara penduduk.

Pola konsumsi ketiga kelompok berbanding lurus dengan tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin bergeser pola konsumsinya yang semula pada pengeluaran konsumsi makanan berganti ke pengeluaran konsumsi non makanan, hal ini terlihat pada kelompok 40% terbawah sebagian besarnya digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan (72,8%), lalu kelompok 40% menengah sebesar 68,3% sedangkan kelompok 20% teratas hanya sebesar 49,4%. Peningkatan pendapatan secara ekonomi cenderung merubah kebiasaan penduduk yang awalnya lebih mengutamakan konsumsi makanan bergeser menjadi konsumsi non makanan.

Bila dikaji lebih rinci akan terlihat perubahan pola konsumsi penduduk pada komoditas yang biasanya dikonsumsi bergeser ke komoditas lainnya berbanding lurus dengan perubahan kelompok pengeluaran. Konsumsi padi-padian pada kelompok 40% terbawah sangat tinggi mencapai 16,4%, lalu kelompok 40% menengah menurun sebesar 10,5% sedangkan kelompok 20% teratas hanya sebesar 4,7%. Sedangkan konsumsi untuk komoditas perumahan, aneka barang dan jasa serta barang tahan lama berbanding terbalik, Kondisi ini terlihat dimana pada kelompok 40% terbawah lebih konsumsi pada komoditas perumahan rendah mencapai 15,96%, Aneka barang dan jasa sebesar 6,63 dan barang tahan lama sebesar 0,91%, lalu kelompok 40% menengah meningkat sedikit pada konsumsi perumahan sebesar 17,38%, Aneka barang dan jasa sebesar 7,59% dan barang tahan lama sebesar 1,45% sedangkan kelompok 20% teratas meningkat signifikan pada konsumsi perumahan sebesar 22,62%, Aneka barang dan jasa sebesar 11,28% dan barang tahan lama sebesar 3,87%. Kondisi menandakan bahwa terjadinya peningkatan pendapatan penduduk Kabupaten Tasikmalaya cenderung digunakan untuk mengkonsumsi pada komoditas perumahan, aneka barang dan jasa serta barang tahan lama.

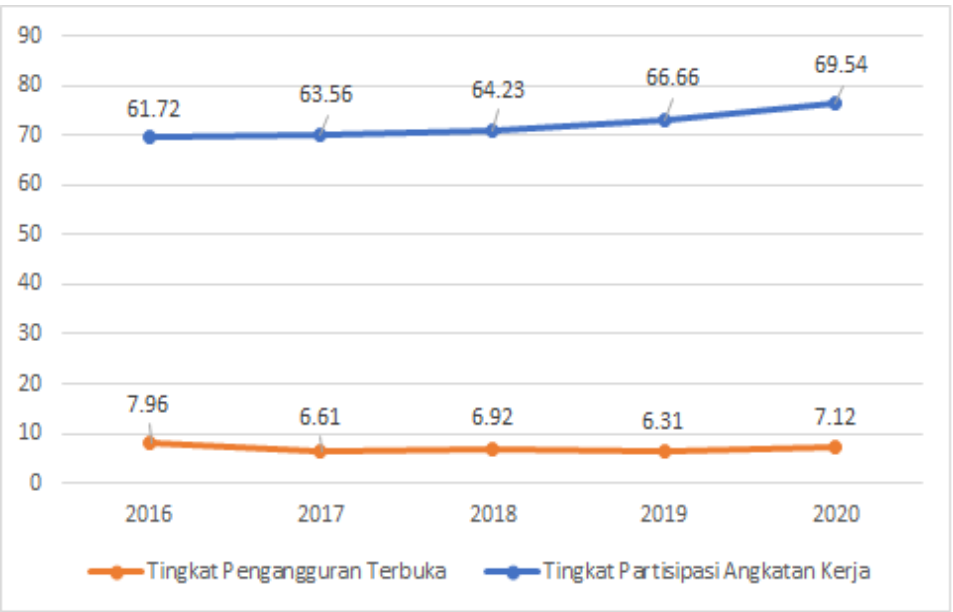
e. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh *International Labour Organization (ILO)*. Pada dasarnya ILO tidak memberikan batasan usia tertentu dalam penentuan batas minimum dari usia kerja. Hal ini disebabkan tiap negara memiliki karakteristik dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda sehingga masing-masing negara juga memiliki batas minimum yang berbeda dalam menyatakan pada usia berapa penduduknya dikatakan telah memasuki usia kerja. BPS menggunakan batasan usia kerja 15 tahun agar relevan dengan data-data yang disajikan oleh ILO dan World Bank sehingga data yang dihasilkan bisa diukur perbandingannya dengan negara lain.

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan (*supply*) dan aspek kebutuhan/permintaan (*demand*). Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terpenuhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Apabila kondisi normal yang diharapkan tersebut belum dapat tercapai, maka akan terjadi pengangguran. Masalah pengangguran masih menjadi salah satu titik berat dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Persoalan menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, namun mencakup karakteristik ketenagakerjaan lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja terhadap angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Secara umum, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan pada tahun 2020 mencapai 7,12%, dibanding tahun 2019 sebesar 6,31%, dan menurun signifikan 4 tahun sebelumnya dari tahun 2016 sebesar 7,96%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. TPAK

Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 mencapai 69,54%, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 66,46%, dan meningkat signifikan dibanding tahun 2016 sebesar 61,72%.



Gambar 2.29.
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2020)

Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah faktor pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang memadai. Sementara dari sisi ketersediaan juga memperlihatkan masih bervariasinya kualitas pendidikan penduduk usia kerja sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai, serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori angkatan kerja.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mengurangi pengangguran. Salah satu upaya yang dilakukan oleh adalah mendorong para pencari kerja untuk menjalankan usaha mandiri dengan menggelar berbagai pelatihan kerja mandiri. Pelatihan tersebut digelar untuk menjalankan usaha meningkatkan motivasi, pengetahuan, keterampilan dan jiwa wirausaha masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka membentuk kelompok rintisan kerja/usaha mandiri.

1. Tinjauan Khusus *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Dunia telah mengakhiri lima belas tahun agenda pembangunan global, *Millennium Development Goals* (MDGs) pada September 2015. Pada rangkaian agenda *United Nations General Assembly* (UN-GA) ke-70, tepat pada tanggal 25 September 2015 para pemimpin dunia menyepakati tujuan pembangunan global yang baru dengan nama “*Sustainable Development Goals*” (SDG's). Agenda ini memuat 17 tujuan yang hendak dicapai sampai tahun 2030. Tujuan SDG's jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan MDG's. Dari delapan tujuan MDG's, cukup banyak indikator pembangunan global yang membaik.

Di berbagai negara, indikator pembangunan mulai kemiskinan, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan keadilan gender menunjukkan perbaikan. Namun, beberapa tujuan MDG's juga masih belum menunjukkan capaian yang memuaskan. Dengan demikian, SDG's kita harapkan akan mampu menjawab kompleksitas permasalahan manusia dalam pembangunan, sehingga kita benar-benar tidak meninggalkan seorangpun dalam kegiatan pembangunan (*leaveno onebehind*). Berikut disajikan analisa SDG's yang bersumber dari Seri Menyongsong SDG's: Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat /oleh Arief Anshory Yusuf, *et. al.* (2018).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai proses mengarus-utamakan SDG's pada RPJM dan RPJP. Selain itu pelibatan dari berbagai aktor strategis non-pemerintah seperti akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDG's di Indonesia. Peran akademisi menjadi penting dalam pencapaian TPB di tahun 2030, dengan antara lain melalui proses edukasi pemimpin di masa yang akan datang yang akan menjadi aktor TPB, Menyediakan ilmu pengetahuan melalui riset dan inovasi untuk membantu pencapaian TPB.

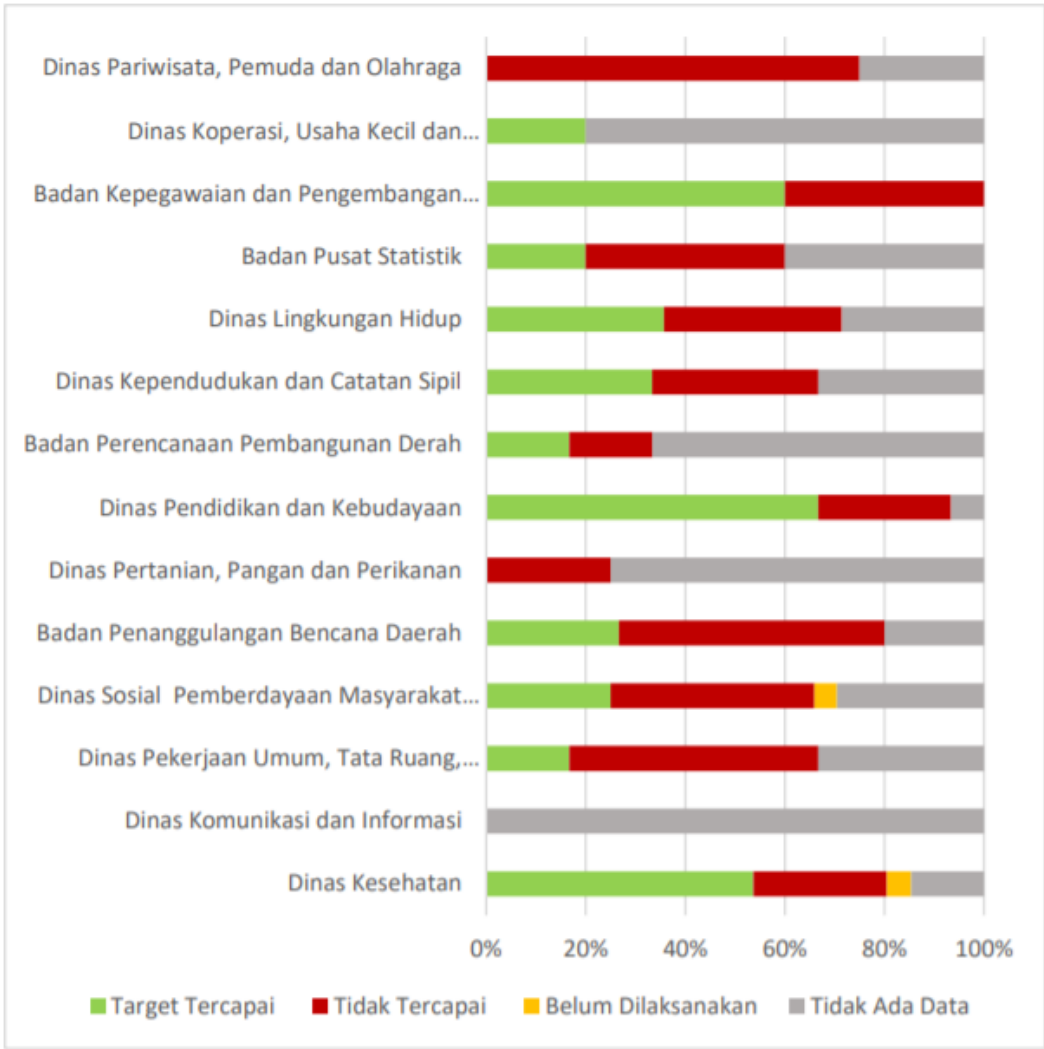
Pengembangan TPB pada level pemerintah daerah diatur pada Perpres 59 tahun 2017 dimana disebutkan bahwa tugas daerah dalam TPB adalah:

a. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) oleh Gubernur untuk 5

tahunan bersama-sama dengan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah meluncurkan Rencana Aksi Daerah SDG's pada tahun 2017.

- b. Mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 tahunan ditetapkan dengan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan, terdapat 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten, jumlah indikator yang relevan terhadap kondisi wilayah Kabupaten Tasikmalaya sejumlah 214 indikator. Indikator tersebut dibagi ke dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola. Setiap indikator yang terdapat pada TPB dibagi menjadi ke dalam klasifikasi ketercapaian yang berbeda yaitu telah mencapai target, belum mencapai target, butuh peningkatan, butuh penurunan, dan tidak ada data. Berikut ini merupakan hasil analisis ketercapaian indikator TPB Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.30.
Ketercapaian Indikator TPB Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Perangkat Daerah (%)

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Keterangan :

- : Indikator tercapai, merupakan indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target
- : Indikator tidak tercapai, merupakan indikator yang telah dilaksanakan dan tidak mencapai target
- : Indikator yang belum dilaksanakan
- : Indikator tidak ada data

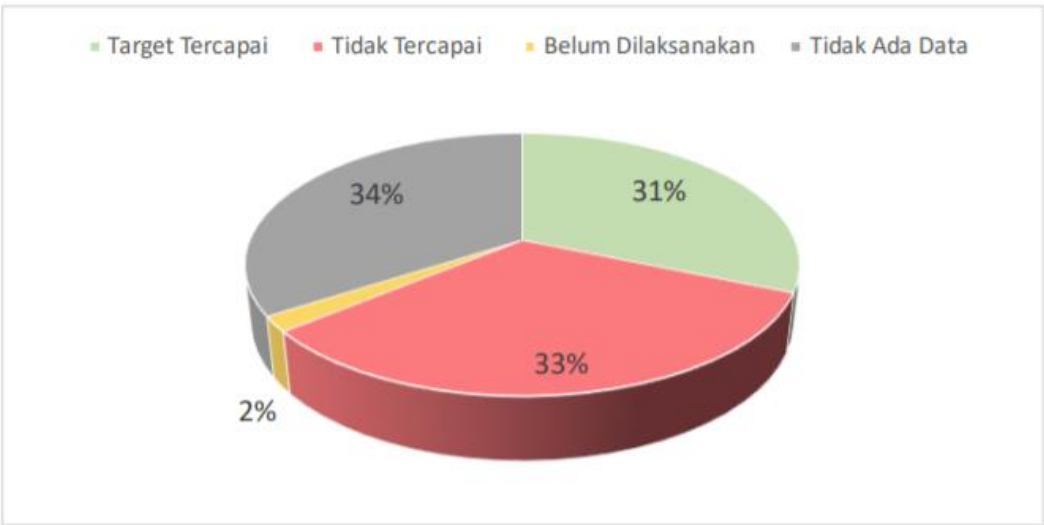
Untuk indikator belum dilaksanakan, dapat terjadi karena:

1. Beberapa indikator SDGs tidak terkait dengan indikator kinerja perangkat daerah;
2. Beberapa indikator SDGs adalah indikator baru, yang belum pernah dilaksanakan perangkat daerah;

- 3. Pengumpulan dan pencapaian target SDGs belum menjadi perhatian sebagian perangkat daerah.

Untuk indikator tidak ada data, dapat terjadi karena:

- 1. Beberapa data sebenarnya ada, tapi tidak terdokumentasi dengan baik;
- 2. Beberapa indikator SDGs selama ini belum dilakukan pengumpulan datanya;
- 3. Beberapa perangkat daerah terlambat dalam penyampaian data SDGs, sesuai waktu yang disepakati Pokja KLHS.



Gambar 2.31.
Ketercapaian Indikator per TPB Kabupaten Tasikmalaya (%)
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil analisis ketercapaian indikator TPB di atas, indikator telah mencapai target 31% dengan jumlah 67 indikator. Indikator yang dilaksanakan dan belum tercapai 33% dengan jumlah 70 indikator. Indikator yang belum dilaksanakan 2 dengan jumlah 4 indikator dan indikator yang tidak ada data 34% dengan jumlah 73 indikator.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah

ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan Bahasa Sunda di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah.

Kebudayaan Tasikmalaya yang telah terbentuk selama ribuan tahun menampilkan corak khas yang menunjukkan adanya akulturasi budaya yang kuat. Hal itu didasari oleh lokasi Tasikmalaya yang strategis, dan disinggahi banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga sejak dulu Tasikmalaya sudah menjadi pusat peradaban yang penuh warna dengan percampuran bahasa, adat istiadat, dan keyakinan. Meskipun secara umum kebudayaan Tasikmalaya lebih didominasi oleh Sunda religius, tetapi kebudayaan seperti Jawa dan Melayu juga berkembang cukup baik di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang percampuran berbagai kebudayaan yang berbeda seperti itu pada akhirnya menjadikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai masyarakat religius, egaliter, demokratis dan toleran. Semua jenis kebudayaan dan seni berkembang tanpa ada gejolak, baik yang berasal dari Sunda, Jawa ataupun Melayu.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak keragaman budaya tradisional dan ritus adat yang berkaitan erat dengan latar belakang budayanya sebagai masyarakat religius agraris. Dengan kondisi alam Kabupaten Tasikmalaya yang subur dan banyak dipergunakan menjadi pertanian, budaya agraris dengan pengaruh keyakinan Sunda Buhun berkembang luas di berbagai pelosok Kabupaten Tasikmalaya.

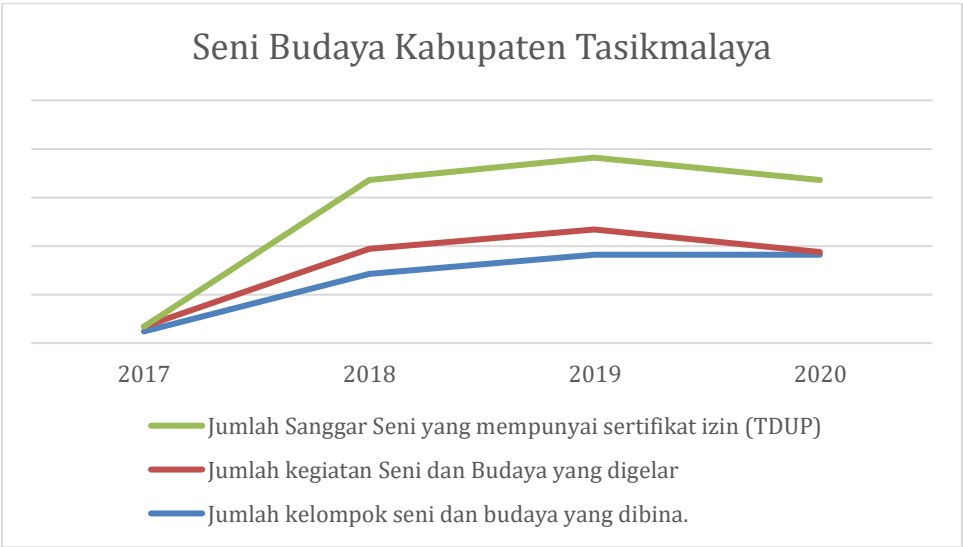
Kesenian yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya meliputi seni tari, seni teater, seni sastra, seni musik, seni film, seni rupa dan seni media. Kesenian tersebut diantaranya adalah Terbang Sejak, Calung Renteng, Angklung Sered, Seni Kaulinan Pagarageungan, Aseuk Hatong, Lodong Gejlig, Rarangken Huma, Angklung Landung, Angklung Rendeng, Angklung Betot, Calung Tarawangsa dan Rarangken Sawah. Jumlah seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.24.
Perkembangan Urusan Seni Budaya Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020

IKU PERANGKAT DAERAH	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina.	Lembaga	N/A	12	71	91	91
Jumlah kegiatan Seni dan Budaya yang digelar	Even	N/A	5	26	26	3
Jumlah Sanggar Seni yang mempunyai sertifikat izin (TDUP)	Sanggar	N/A	0	71	74	74

Sumber : LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Perkembangan Seni Budaya di Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.32.
Grafik Perkembangan Seni Budaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
 Sumber : Sumber : LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan pembinaan generasi muda yang dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka, Pramuka, dan penyelenggaraan upacara bendera.

Pembinaan olahraga di Kabupaten Tasikmalaya juga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi kegiatan lomba gerak

jalan, lomba senam dan kegiatan senam masal. Urusan wajib sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

Atlet merupakan profesi yang menekuni dan berkompetisi pada satu atau lebih bidang olahraga, yang menggunakan kekuatan, ketangguhan, atau kecepatan fisik di dalamnya. Dalam beberapa cabang olahraga tertentu, atlet harus mempunyai kemampuan fisik yang lebih tinggi dari rata-rata orang biasa. Seorang atlet harus berlatih untuk meningkatkan keahlian, kekuatan, dan ketangguhan diri untuk bersaing memenangkan kompetisi. Jumlah atlet yang berprestasi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Jumlah Atlet Berprestasi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	28	32	40	66	2

Sumber : LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi warga negara. Dalam perspektif HAM, negara/Pemerintah Daerah merupakan pemangku kewajiban yang memiliki kewajiban sekaligus kewenangan untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan Pendidikan. Sebagai pemangku hak, masyarakat/warga negara berhak untuk menuntut pemenuhan hak tersebut, termasuk upaya-upaya yang dilakukan negara/Pemerintah Daerah melalui berbagai saluran yang tersedia.

Sedemikian strategisnya Pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan Pendidikan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ditempatkan sebagai salah satu layanan dasar, karena pemenuhan urusan Pendidikan akan menjadi fundamen pemenuhan kerja-kerja pembangunan pada sektor lainnya. Karena sangat strategis, maka keberhasilan pembangunan pendidikan digunakan untuk mengukur Keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, yang salah satunya dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Pendidikan sebagai salah satu program prioritas pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 guna mencapai misi mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, berahlaqul karimah dan berkualitas, dipedomani dan diimplementasikan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 untuk menjawab permasalahan-permasalahan bidang pendidikan yang menjadi isu Kabupaten Tasikmalaya.

Indikator kinerja urusan pendidikan berjumlah 20 (dua puluh) indikator, untuk melihat gambaran capaian indikator kinerja urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	59,25	76,11	66,56	78,60	75,69
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	%	105,49	104,85	105,33	101,09	100,39
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	%	97,76	96,76	98,61	95,70	93,65
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	%	98,02	98,73	94,61	120,29	108,09

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	%	79,91	79,44	84,39	95,55	90,00
6	Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7 -12 tahun	Rasio	150,27	141,10	148,02	143,55	145,66
7	Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 tahun	Rasio	191,31	227,40	243,85	174,44	199,89
8	Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	Rasio	16,65	15,94	17,23	23,89	20,67
9	Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs	Rasio	12,58	11,97	15,75	26,59	16,78
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	%	98,65	100	78,17	106,11	120,45
11	Persentase pemenuhan SPM PAUD	%	NA	NA	NA	78,60	92,97
12	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	%	NA	NA	NA	95,66	95,50
13	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan kesetaraan	%	NA	NA	NA	0,009	99,22
14	Jumlah Warga Belajar Paket B Setara SMP	WB	2200	783	1.328	1.328	1.183
15	Jumlah Warga Belajar Paket C Setara SMA	WB	2010	2445	4.173	4.173	4.715
16	Jumlah PKBM Aktif	PKBM	109	50	42	70	47
17	Jumlah LKP Aktif	LKP	NA	23	26	47	39
18	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	82,13	99,24	80,83	79,21	80,47
19	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikasi Guru.	%	NA	49,59	92,24	47,79	51,41
20	Persentase Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi tenaga Pendidik.	%	5,27	48,57	24,34	29,18	35,51

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

2. Kesehatan

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan. Pedoman penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2016.

Kaberhasilan capaian program pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2020 tercatat sebesar 76,11. Apabila di lihat dari kondisi awal pada tahun 2016 tercatat sebesar 74,68, maka peningkatan selama tahun 2016-2020 sekitar 1,91 %.

Adapun Capaian indikator kinerja urusan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.27
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0/00	9	9	8	6	5
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	0/00	0,991	0,992	7	5	4
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	0/00000	177	120	91	75	75
4.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0/00	1	1	1	1	1
5.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	0/00	7	6	6	7	5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Persentase Keluarga Sehat	%	29,89	60,3	100	60,3	31,69
7.	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	97,4	105	97,4	100,87	91,25
8.	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93,21	94	92,31	96	94,84
9.	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	98,46	95	98,46	99,6	99,69
9.	Persentase Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	75,58	97	78,07	84,18	75,6
10.	Persentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	70,18	90	95,42	96	78,02
11.	Persentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	25,76	5,2	95,93	91,75	100
12.	Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	24,25	31,1	82,7	93,04	72,8
13.	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,06	0,02	0,04	0,03
14.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	75,58	97	78,07	100	100
15.	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	%	99,59	14,18	99,59	95,79	99,34
16.	Persentase orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	54,41	43,19	100	100	100
17.	Persentase penderita hipertensi mendapatkan	%	7	9,4	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	pelayanan secondary prevention sesuai standar						
18.	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	5	21,7	100	100	100
19.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	31,1	100	78,48	80,07
20.	Persentase Desa Siaga Aktif	%	12,53	13,39	12,53	12,5	19,09
21.	Persentase Kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah Tangga mencapai 50%	%	50	47,8	51,8	54,01	57,2
22.	Persentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah mencapai akses 100%	%	22,5	4,84	22,5	0	0
27.	Persentase Penduduk Miskin dengan Jaminan Kesehatan	%	45,54	54,19	45,54	53,3	53,02
28.	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat miskin	%	31	100,86	109,7	126,02	130,14
29.	Rasio Sarana Kesehatan Per Satuan Peduduk	0/00	0,14	0,38	0,04	0,14	0,14
30.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (1 : 30.000)	1/30.000	1/43,340	1/42,8	1/57.774	0,67	1/45.047
31.	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0/000	1/11,346	1/171.000	1/11.328	0,85	1/11.777
32.	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0/0000	0,17	0,008	0,17	0,11	0,11
33.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0/000	1/11,000	1/28.887	1/28.887	0,031	1/28.601
34.	Pembangunan Rumah Sakit type D/RS Pratama Cikatomas	Buah	0	0	0	0	1
35.	Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D/RS Pratama Ciawi, Manonjaya, Karangnunggal	Buah	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Persentase Puskesmas yang terakreditasi sesuai standar nasional	%	0	10	57,5	100	100
37.	Persentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar	%	80	80	74,63	100	100
38.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0/00	0,6	0,8	0,3	0,09	0,09
39.	Cakupan Jenis dan Jumlah Dokter Spesialis	%	65	70	80	89	93
40.	Cakupan Tenaga Kesehatan Lainnya	%	70	75	100	100	92,59
41.	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	65	70	74,94	89,31	77
42.	Cakupan Rawat Jalan dan Rawat Inap	%	65	70	91	115	93,57
43.	Cakupan Mutu Rumah Sakit	%	N/A	N/A	89,3	87	86,11
44.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	73	78,92	78	85,99	85,5
45.	Status Akreditasi	Status	N/A	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna
46.	Pencapaian SPIP	Level	Na	Na	Na	3	4
47.	Hasil penilaian SAKIP	Level	Na	Na	Na	B	BB

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Keterangan :

- Cakupan Mutu Rumah Sakit pada tahun 2016-2017 belum terdapat data cakupan rumah sakit, pelaksanaan indikator mutu di mulai pada tahun 2018.
- Status Akreditasi pada tahun 2016 belum dilaksanakan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengacu pada Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, terutama misi ke empat yaitu “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan”. Capaian penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian target

indikator-yang telah ditentukan, terdiri dari peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, penataan ruang, pertanahan, dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga hasilnya dapat menyentuh langsung salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Capaian kinerja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap	%	64,4	66,03	67,72	70,05	71,39
2.	Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik	%	94,48	94,71	94,94	95,17	95,17
3.	Rasio Ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat	%	64,79	65,1	69,26	72,01	72,80
4.	Rasio Ketersediaan Bangunan Fasilitas Publik	%	9,5	12,6	23,5	25	41,50
5.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	%	10,01	10,21	10,41	10,62	10,81

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan bidang perumahan rakyat adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya, bertujuan menjamin hak warga negara untuk

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak (Rumah Tidak Layak Huni) atau yang digolongkan ke dalam penduduk miskin. Sedangkan kawasan permukiman menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Realisasi pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah dilaksanakan sampai tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut :

Tabel 2.29
Indikator Kinerja
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	79,1	79,49	80,29	81,02	81,93
2.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	69,61	75,83	78,01	80,78	81,11
3.	Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Domestik	%	45,78	46,58	47,46	48,71	48,85
4.	Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan	%	35,51	36,14	37,38	38,22	38,28

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan mewujudkan kondisi kehidupan

masyarakat yang tenteram, aman yang memungkinkan setiap warga dapat melaksanakan kehidupannya secara wajar. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja utama untuk periode 2016-2021, namun mengalami beberapa kali perubahan ketentuan sehingga indikator kinerja utama secara otomatis juga mengalami perubahan.

Capaian indikator kinerja utama urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sampai dengan tahun 2020 diantaranya : upaya penegakan Perda dan Perkada mencapai 100%, hal ini karena dalam setiap pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan ekses; tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) mendapat nilai 87,93%; penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mencapai 52,78%. Capaian ini belum memenuhi target yang direncanakan disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya dengan jangkauan pelayanan yang sangat luas belum diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (relawan kebakaran) yang cukup termasuk dukungan sarana prasarana berupa Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang belum tersedia.

Untuk melihat capaian Indikator Kinerja Utama urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Indikator Kinerja
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	NA	NA	NA	NA	100
2	Persentase Penegakan PERDA	%	71	90	92	29,3	76,47
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	%	91	95	97,56	87,93	80,65

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	ketentraman, keindahan)						
4	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rasio	0.23	0.54	0.54	0,54	0,54
5	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	25	25	22,64	22,6	20,86
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	NA	NA	NA	NA	52,78
7	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	NA	NA	NA	93,39	52,78
8	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komu nitas masyarakat lain) yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah	%	NA	NA	NA	NA	0

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Keterangan :

- Untuk indikator Nomor 1 dan Nomor 6 target dan realisasi dari tahun 2016 - 2019 tidak ada dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tersosialisasikan ke daerah pada akhir tahun 2019 dan menjadi indikator kinerja utama Satpol PP tahun 2020 dan 2021, sejak berlakunya indikator tersebut indikator nomor 2,3,4,5,7, dan 8 sudah tidak berlaku. Dikarenakan indikator 2,3,4,5,7, dan 8 mengacu pada Permendagri sebelumnya (Permendagri 69 Tahun 2012) yang sudah tidak berlaku sejak keluarnya Permendagri Nomor 114 dan 121 tahun 2018
 - Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 20 Februari 2019.
 - Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 7 Desember 2018.

- Untuk indikator Nomor 7, 8 target dan realisasi dari tahun 2016 tidak ada, dikarenakan sub urusan kebakaran bergabung menjadi sub urusan di Satpol PP sejak tahun 2017. Dan seharusnya Tahun 2020 dan 2021 sudah tidak berlaku dan diganti oleh indikator nomor 6
- Untuk indikator Nomor 7 dan 8 target dan realisasi hanya muncul pada tahun 2019 sebagai masa transisi dari indikator nomor 6 sebelum tersosialisasikannya Permendagri Nomor 114 Tahun 2018.

6. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi : kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, serta korban eksploitasi dan diskriminasi yang dikelompokkan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta masyarakat/kelompok masyarakat yang menyelenggarakan penanganan masalah Kesejahteraan Sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diantaranya adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Penyuluh Sosial, Dunia Usaha, dan lain-lain.

Urusan sosial merupakan salah satu pengampu SPM (Standar Pelayanan Minimal) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar urusan bidang sosial yang **wajib** diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di wilayah kabupaten/kota.

Capaian Indikator Kinerja Utama urusan sosial Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	1,71	4,36	4,29	0,68	2,67
2	Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,02	0,03	0,59	0,09	0,09
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
5	Persentase PMKS yang tertangani	%	N/A	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

7. Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana dengan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kebencanaan, mengingat Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu wilayah rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. Capaian Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2019 telah mengalami penurunan secara signifikan, yaitu mencapai 141,11. Penurunan ini terjadi sebagai dampak positif dari peningkatan Indeks Kapasitas Daerah. Hasil perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 mencapai 0,42 dengan level SEDANG, artinya bahwa dengan posisi tingkat kapasitas daerah SEDANG wilayah Kabupaten Tasikmalaya masih membutuhkan penguatan pada beberapa prioritas, yaitu Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan Perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana.

Hasil perhitungan Indeks Kapasitas Daerah Bencana Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Hasil Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,72	0,42	SEDANG
2	Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu	0,70		
3	Pengembangan Ssitem Informasi, Diklat dan Logistik	0,74		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,34		

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,23		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,33		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,56		

Sumber : LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2020

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Risiko Bencana	Poin	224,80	224,80	203.01	203.01	203.01
2	Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan)	level	N/A	N/A	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

2.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dapat diamati dari aspek ketersediaan (*Suplay*) dan kebutuhan (*Demand*), artinya jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terpenuhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Masalah ketimpangan antara Pencari Kerja terdaftar dengan Lowongan Kerja terdaftar sangat jauh yang mengakibatkan tingkat pengangguran masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya. Pada kurun waktu 2017-2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya

mengalami penurunan menjadi 6,31%, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,12%. Hal ini merupakan dampak Pandemi Covid-19, pengaruh global termasuk kinerja capaian indikator makro Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 . Namun demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPT) dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan menjadi 69,54%.

Capaian kinerja Urusan Tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja						
	a. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	542	571	449	4915	3249
	b. Lowongan Kerja terdaftar	Orang	2.630	5.083	2.197	3.174	2.052
	c. Pencari Kerja terdaftar	Orang	12.250	12.154	11.056	11.432	13.623
	d. Bursa Kerja Swasta	Lembaga	30	22	38	40	74
2.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja						
	a. Persentase Pekerja yang mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	%	36	40	50	524	73,4
	b. Persentase kasus perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dititikberatkan pada upaya peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam masyarakat agar mampu mandiri, penguatan kelembagaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pembentukan dan penguatan kelembagaan berbasis gender merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender.

Sedangkan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis keluarga telah dilaksanakan melalui pemberdayaan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang dilaksanakan setiap tahun.

Capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tahun 2016-2020, untuk indikator Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, terakhir tahun 2020 tercatat 90 %. namun demikian belum sepenuhnya tertangani disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah tersebut. Demikian pula untuk capaian indikator Status Kabupaten layak Anak (KLA) sudah diperoleh Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019. Untuk melihat capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Indikator Kinerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase perempuan dan	%	65	70	80	85	90

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	anak korban kekerasan yang mendapatkan penangulangan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu						
2	Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	status/ skor	N/A	Menuju Pratama dengan skor 262	Menuju Pratama dengan skor 400	Pratama dengan skor 505	Pratama dengan skor 505
3	Capaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kategori	N/A	N/A	Pratama	Pratama	Pratama

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

3. Pangan

Kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat dapat dicerminkan dari besaran skor PPH (Pola Pangan Harapan), skor PPH maksimal adalah 100. Selama periode 2016 – 2020 perkembangan pola konsumsi pangan didominasi oleh kelompok kelompok pangan Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan lain-lain. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami kenaikan namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami penurunan sehingga angka PPH tahun 2020 tercapai 75,30, dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan dari sebesar 81,30. Sedangkan indikator lainnya yang ada pada bidang pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.36
Indikator Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	64,4	75,8	82,8	81,3	75,3
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	1.288.150	1.239.897	1.252.296	0,83	0,81
3	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan per kapita	%	N/A	3	3	3,40	3

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

4. Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya misi ke-4, yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Perkembangan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat tahun 2020, Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tasikmalaya tercatat 64,58 % meningkat dari 60,98 % pada tahun sebelumnya. Sedangkan capaian setiap indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Air	Nilai	40	41	53,57	71,43	59,29
2	Indeks Kualitas Udara	Nilai	65	66	79,08	81,42	84,11
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	65	66	53,22	37,81	37,55
4	Persentase Sampah yang Terkelola	Persentase	33,33	18,07	33,33	46,15	44,12

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada Indeks Kualitas Air, dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2005 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap beberapa sampel lokasi (sungai) diperoleh hasil dengan skor 59,29, artinya kriteria KURANG BAIK. Pengukuran Indeks Kualitas Udara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 dengan mengambil sampel pada beberapa lokasi udara, diperoleh skor 84,11, artinya TIDAK TERCEMAR. Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang dilakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, diperoleh skor 37,55 atau dengan Predikat WASPADA, sedangkan target nilai 69. Hasil perhitungan Persentase Sampah yang Terkelola sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dengan skor yang diperoleh 44,12, atau Predikat SANGAT KURANG BAIK, sedangkan target nilai 40.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan database hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diambil oleh penduduk, maka sesuai amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah, sejak tahun 2016 fokus pelayanan administrasi dokumen kependudukan masyarakat dilakukan dengan strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penataan administrasi kependudukan dengan indikator capaian kinerja meliputi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga berdasarkan Aplikasi SIAK, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak, Cakupan Akta Kematian, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran berdasarkan Aplikasi SIAK dan Pengolahan Perubahan Data yang terakumulasikan pada upaya terwujudnya tertib pengelolaan Administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Dalam rangka penyempurnaan database pembangunan kependudukan serta pencapaian target peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) maka pada tahun 2020 telah dilakukan kerjasama pemanfaatan data dengan lembaga/PD/desa. Capaian Kinerja urusan kependudukan dan Catatan Sipil adalah seperti yang tercantum dalam table 2.38.

Tabel 2.38.
Indikator Kinerja
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Evaluasi Akip Disdukcapil	Nilai	NA	NA	62,41	74,41	77,16
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat disdukcapil	Nilai	75,75	76,86	81,43	81,55	81,98
3	Persentase Rata - rata kepemilikan dokumen kependudukan	%	46,07	59,53	66,29	69,31	73,43
a.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga berdasarkan Aplikasi SIAK	%	71,37	89,52	89,59	93,19	94,3
b.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	94,71	97,28	97,86	96,95	97,54
c.	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	%	NA	NA	NA	12,87	38,41
d.	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	2,2	15,5	67,94	68,37	71,3
e.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	38,72	63,64	96,91	97,87	95,06
f.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran berdasarkan Aplikasi SIAK	%	23,36	31,69	45,47	46,63	43,99

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Keterangan :
 *: Kartu Identitas Anak mulai berlaku pada Tahun 2019

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketampilan, perilaku, kemampuan, kedadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui peningkatan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan desa difokuskan pada pemberdayaan kader dan revitalisasi posyandu serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sedangkan pemberdayaan lembaga perekonomian desa pada pembentukan dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Tabel 2.39
Indikator Kinerja
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	71,43	80	81,82	81,82	83,33
2	Persentase Posyandu aktif	%	80,01	81,21	82,59	85,04	98,93
3	Cakupan Pembinaan dan Pembentukan BUMDES	%	60	99,6	NA	86,61	96,01
4	Persentase Pasar Desa aktif	%	4,27	7,12	9,97	14,53	14,53

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan demografi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan namun juga dapat menjadi masalah suatu daerah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki luas wilayah 2.551,19 km2 terbesar di wilayah Priangan Timur juga memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, berjumlah 1.865.203 jiwa menurut hasil Sensus BPS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 tercatat 1,04% meningkat dari 0,16 pada tahun 2019. Pertumbuhan tersebut satu sisi merupakan dampak positif meningkatnya Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 76,11 poin. Namun di sisi lain perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terutama dalam pengendalian penduduk melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan terkait, karena apabila laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan akan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan untuk pembangunan.

Gambaran capaian Indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada table 2.40.

Tabel 2.40
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	N/A	N/A	N/A	71,53	70,47
2.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	%	N/A	11,50	10,38	11,29	12,64
3.	Persentase Peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	%	N/A	N/A	N/A	18,60	19,04

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita) ber-KB	%	N/A	N/A	N/A	47,30	82,08
5.	Cakupan Anggota BKR (Bina Keluarga Remaja) ber-KB	%	N/A	N/A	N/A	38,83	59,03
6.	Cakupan Anggota BKL (Bina Keluarga Lansia) ber-KB	%	N/A	N/A	N/A	22,76	59,67

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

10. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan dan kelancaran sarana transportasi dan prasarana pelengkap. Urusan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan Misi Keempat yakni Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan dengan Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan transfortasi darat yang efektif dan efisien.

Urusan Perhubungan berkaita pengelolaan angkutan, teknik sarana perhubungan dan lalu lintas merujuk pada penetapan indikator kinerja capaian sasaran terciptanya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, Terciptanya peningkatan kinerja pelayanan transportasi dan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan berkualitas.

Capaian indikator kinerja urusan Perhubungan sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.41
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai:	%	22,76	22,89	35,15	37,57	37,61
	a. Rambu-rambu Lalu Lintas	%	29,39	29,39	56,36	60,37	60,38

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Guardrail	%	33,44	33,44	45,94	45,94	45,94
	c. Marka Jalan	%	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	d. Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	11,33	12,00	12,37	20,47	20,68
	e. Warning Light/Traffic Light	%	35,71	35,71	57,14	57,14	57,14
2.	Persentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan laik jalan	%	81,00	82,00	83,00	84,00	89,93
3.	Persentase tingkat pelayanan angkutan umum	%	53,40	65,05	65,13	67,27	46,93
	a. Jumlah pelayanan	%	54,98	54,98	54,98	55,11	55,11
	b. Kepemilikan izin	%	60,23	94,71	93,40	97,70	65,50
	c. Faktor muat penumpang	%	45,00	45,45	47,00	49,00	20,18
4.	Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	%	74,77	75,48	75,88	80,56	82,05
5.	Persentase ketaatan masyarakat mematuhi aturan LLAJ	%	27,78	25,59	22,02	21,44	3,28
6.	Persentase ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	%	39,80	39,80	39,80	39,80	51,7

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

11. Komunikasi dan Informatika

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* di Kabupaten Tasikmalaya merupakan tujuan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Inforamatika. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa indikator sebagai ukuran keberhasilan yang kepada sasaran Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan ini mendukung salah satu indikator sasaran pada RPJMD khususnya Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dengan sasaran yang terukur yang harus dicapai adalah :

- a. Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

- b. Tersedianya Data/Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
- Realisasi capaian indikator kinerja utama Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Jaringan Internet perangkat Daerah yang terintegrasi	%	N/A	N/A	76	100	88
2	Persentase Interoperabilitas Aplikasi yang terkoneksi jaringan Intranet terintegrasi	%	N/A	N/A	50	100	100
3	Tersedianya Daftar Informasi Publik	%	N/A	N/A	100	100	100
4	Cakupan akses masyarakat dalam memanfaatkan data/informasi Pemerintah Daerah	%	N/A	N/A	60	100	90
5	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	31	92	233
6	Buku Kabupaten dalam Angka	Buku	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

12. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Melaksanakan amanat Misi Kedua RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata dengan sasaran meningkatnya jumlah dan peran UMKM dan Koperasi, pengembangan usaha koperasi penting sebagai wujud kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan.

Perkembangan kelembagaan koperasi di kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada indikator jumlah koperasi aktif, meningkatnya

kualitas kelembagaan koperasi dan keaktifan. Sampai dengan tahun 2020 jumlah Koperasi Aktif sebanyak 195, terjadi penurunan sebesar 59,8% dari tahun 2019 sebanyak 485, dikarenakan Dinas Usaha Kecil, dan Menengah melakukan inventarisasi Koperasi yang tidak melakukan RAT selama 3 tahun berturut-turut dari selisih penurunan jumlah Koperasi Aktif masuk kedalam rencana pembubaran, untuk selanjutnya dilakukan pembubaran secara permanen sebagaimana diatur didalam Permenkop Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Pasal 20 Ayat 3. Dari 195 Koperasi Aktif pada tahun 2020 yang dilakukan pemeriksaan penilaian kesehatan sebanyak 95 Koperasi dan 85 unit Koperasi diantaranya berstatus sehat.

Kinerja urusan UMKM sampai dengan tahun 2020 dilihat dari jumlah UMKM tercatat sebanyak 85.212 unit, terjadi peningkatan yang signifikan sekitar 113,8 % dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 39.846 unit. Lonjakan peningkatan terjadi karena pada tahun 2020 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menerbitkan program BPUN berupa bantuan permodalan bagi UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada penambahan izin usaha mikro.

Permasalahan yang dihadapi banyaknya UMKM tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai, sehingga peran dan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyikapi hal tersebut dengan memberikan pelatihan dan pembinaan dalam hal kewirausahaan, manajemen usaha, pengolahan, kemasan hingga pemasaran produk yang lebih berdaya saing di pasar Lokal, Nasional hingga Internasional.

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Jumlah Koperasi	Koperasi	432	466	466	485	195

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Jumlah UMKM yang memiliki Izin Usaha Mikro (IUM)	UMKM	250	750	1.500	2.214	4415
3.	Meningkatnya Jumlah UMKM	UMKM	33.908	34.402	34.790	39.846	85.212
4.	Jumlah UMKM yang terlatih	Unit	60	94	250	310	350

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

13. Penanaman Modal

Merebaknya wabah Corona Virus Diase 2019 (Covid-19) telah menjadi pandemi. Penyebaran wabah ini telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan realokasi dan *refocusing* APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020).

Capaian indikator kinerja utama (IKU) bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44
Indikator Kinerja
Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	647	408	539	1.201	424
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)	(Rp Juta)	253.681	1.092.482	137.958	898.362	750.600
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kabupaten Tasikmalaya	Skor	84,2	85,7	88,25	85,25	85,63

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

14. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan baik melalui organisasi kepemudaan maupun prestasi lainnya yang diharapkan lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan tahun 2020 organisasi pemuda yang aktif tercatat 16 (enam belas) organisasi dari jumlah total 60 organisasi yang terdata atau sekitar 26,67 %. Capaian ini termasuk raihan prestasi pemuda perlu terus ditingkatkan agar kontribusi pemuda lebih maksimal.

Perkembangan capaian pembangunan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45
Indikator Kinerja
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	N/A	N/A	N/A	13,33	22,22
2.	Jumlah Wirausaha Muda	Orang	N/A	N/A	N/A	220	280
3.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	28	32	40	66	2

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

15. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kabupaten Tasikmalaya memiliki berbagai potensi kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya jumlah kelompok seni dan budaya dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan sampai 91 lembaga kelompok seni.

Capaian Indikator capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina.	Lembaga	N/A	12	71	91	91
2	Jumlah kegiatan Seni dan Budaya yang digelar	Even	N/A	5	26	26	3
3	Jumlah Sanggar Seni yang mempunyai sertifikat izin (TDUP)	Sanggar	N/A	0	71	74	74

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

16. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan menunjang pencapaian Misi 1 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah, dan berkualitas serta menunjang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “TASIK CERDAS BERAHLAQ”, dan jargon Tasik Siap 2 yaitu “Menjadikan Sumber Daya Manusia berakhlak dan berkualitas” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Selain itu juga untuk melaksanakan amanah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PERKA PERPUSNAS RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Daerah kabupaten/kota.

Adapun sasaran urusan Perpustakaan adalah meningkatnya minat budaya baca masyarakat dengan capaian indikator kinerja pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan khusus / tahun	Orang	323.907	449.831	477.069	619.320	268.704
2	Jumlah koleksi buku perpustakaan	Judul / Eksemplar	14.783 (36.966 Eks)	349 (1.404 Eks)	1.338 (8.148 Eks)	288 (1.152 Eks)	500 (1.000 Eks)

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

17. Kearsipan

Penyelenggaraan Kearsipan ditujukan untuk menunjang pencapaian misi ke 3 yaitu mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dengan sasaran Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	%	80,59 (54/67)	80,59 (54/67)	40,29 (27/67)	43,28 (29/67)	49,20 (31/63)

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Tasikmalaya. Produksi perikanan yang dihasilkan Kabupaten Tasikmalaya terbagi menjadi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya mencapai 69.169,51 ton, sedangkan perikanan tangkap mencapai 1.540,49 ton. Capaian indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	57.787,38	62.410,37	68.651,41	68,227,88	70.710

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

2. Pariwisata

Bahwa untuk mengatur kelancaran pembangunan kepariwisataan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 3.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terbagi menjadi 2 urusan, yaitu Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, merujuk pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	944.525	1.419.916	1.421.728	1,449,314	658.170
2.	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	1.140.206.500	1.250.824.700	1.282.059.000	1,290,099,500	986.264.000

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

3. Pertanian

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelenggarakan urusan pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.

Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan daerah agraris, memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga kata “agribisnis” tercantum baik dalam Visi maupun dalam Misi Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dibentuk untuk mewujudkan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021, yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata dengan sasaran:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani,
2. Meningkatnya produksi dan daya saing produksi usaha pertanian dan perikanan.

Sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan merupakan potensi unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tasikmalaya. Besarnya kontribusi sektor sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan intensifikasi secara modernisasi dan industri pengolahan hasil sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produksi di masa mendatang mengingat adanya tantangan kedepan terhadap alih fungsi lahan semakin besar seiring dengan adanya pengaruh dari pertumbuhan penduduk yang terjadi.

Merebaknya wabah Corona Virus Diase 2019 (covid-19) telah menjadi pandemi. Penyebaran wabah ini telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada sektor pertanian. Petani kita, yang menurut data BPS 60% berumur lebih dari 45 tahun merupakan usia yang rentan terhadap Covid 19. Di sisi input pertanian, pupuk yang 40% dan pestisida yang 70% bahan aktifnya bergantung pada import, stok yang ada hanya cukup untuk empat hingga enam bulan

kedepan. Di sisi petani sendiri terjadi kebingungan terutama akses informasi yang tidak menentu yang membuat bingung.

Petani di desa-desa juga akan menghadapi tantangan mengakses pasar untuk menjual produk mereka atau membeli bahan baku pertanian seperti pupuk, benih dan pestisida karena keterbatasan suplai dan transportasi. Rantai pasokan makanan adalah jaringan yang kompleks yang melibatkan produsen, konsumen, input pertanian dan perikanan, pemrosesan dan penyimpanan, transportasi dan pemasaran.

Ketika virus menyebar dan kasus meningkat, dan langkah-langkah diperketat untuk menahan penyebaran virus, ada banyak cara sistem pasokan pangan di semua tingkatan akan mengalami screening untuk memastikan kebersihannya. Secara umum saat ini permasalahan kekurangan pangan masih minim, karena persediaan pangan masih memadai dan masih tersedia di pasar. Secara global stok pangan dunia ada pada tingkat yang cukup hingga akhir tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan realokasi dan refocusing APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020).

Oleh karena itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya merevisi target indikator kinerja utama (IKU) disesuaikan dengan relokasi dan refocusing anggaran, dimana produksi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, ketahanan pangan dan perikanan tahun anggaran 2020 ini diturunkan target awal.

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya produksi hasil olahan komoditas pertanian	Peningkatan jumlah produksi hasil olahan komoditas pertanian	Ton	26.172	26.709	27.243	28,242	12,822
2	Produksi Tanaman Pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.288.150	1.239.897	1.252.296	1.044.784	1.288.150
3	Meningkatnya produksi hortikultura	Peningkatan produksi hortikultura	Ton	270.875	263.344	265.977	256.986	191.978
4	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Peningkatan produksi perkebunan	Ton	57.125	57.121	57.978	57.844	44.680
5	Meningkatnya produksi komoditas peternakan yang ASUH	Peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH	Ton	78.305	64.473	65.763	62.108	90.010

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2026

4. Perdagangan

Urusan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Bupati di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk untuk mewujudkan misi ke 2 (dua) mewujudkan perekonomian yang tangguh

di bidang agribisnis dan pariwisata dengan sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai dan terjangkau serta meningkatnya industri produk pertanian.

Tabel 2.52
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Pameran	Orang	21	24	10	27	12
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	2,680,373.81	2,057,577.68	2,818,250.90	4.336.366,29	2.658.628,37
3	Revitalisasi Pasar	Unit	2	2	3	0	0
4	Rehabilitasi Pasar	Unit	4	3	3	4	0
5	Jumlah alat UTTP yang ditera	% UTTP	50	50	65	99	76,7

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

5. Perindustrian

Urusan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Bupati di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk untuk mewujudkan misi ke 2 (dua) mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata dengan sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai dan terjangkau serta meningkatnya industri produk pertanian.

Urusan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi terutama dalam pembentukan PDRB sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*primeover*) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi.

Selain itu industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang diharapkan dan ada kecenderungan menurunnya daya saing industri di pasar nasional maupun internasional.

Penurunan daya saing ini terkait dengan tingginya biaya atau kurang efisiennya proses produksi. Masalah biaya industri ini umumnya dikaitkan dengan meningkatnya biaya energi dan ekonomi biaya tinggi terkait dengan layanan birokrasi. Sementara kelemahan struktur industri juga ditunjuk sebagai salah satu penyebabnya. Kelemahan struktur industri ini tercermin dari lemahnya keterkaitan antar industri, misalnya antara industri hulu dan hilir dan antara industri besar dan kecil, serta belum berkembangnya industri pendukung. Klaster-klaster industri yang belum sepenuhnya terbangun juga merupakan indikator lemahnya struktur industri.

Indikator Capaian Kinerja Program urusan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini yaitu:

Tabel 2.53
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah IKM yang Mendapat Sertifikasi	IKM	106	46	58	117	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perizinan dan Teknologi						
2	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Unit	15,522	15,677	16,008	16.248	16.448
3	Pertumbuhan Industri	%	1,6	1,5	2,2	1,5	1,2
4	Jumlah Sentra Industri	Sentra	398	399	405	410	421

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

6. Transmigrasi

Urusan Transmigrasi merupakan urusan pilihan yang didasarkan pada Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.54
Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas transmigran						
	a. Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	Orang	0	0	20	50	0
	b. Jumlah Naskah MoU pelaksanaan Transmigrasi	Buah	2	0	1	0	1

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

2.3.4. Urusan Pemerintahan Penunjang

1. Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam pasal 3 diterangkan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan di atas tidak termasuk kepada urusan wajib maupun urusan pilihan akan tetapi merupakan urusan penunjang yang menunjang terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Tasikmalaya mendukung pada pencapaian pada misi ketiga Kabupaten Tasikmalaya, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun tujuan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya adalah Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Yang menjadi sasaran Bappeda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat, dengan indikator sasaran :
 - a. Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD
 - b. Tingkat Konsistensi Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD
 - c. Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Bappeda, dengan indikator sasaran :
 - a. Nilai Evaluasi AKIP Bappeda
 - b. Nilai IKM Bappeda
 - c. Tingkat Maturitas SPIP Bappeda

Tabel 2.55
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Konsistensi RKPd dan RPJMD	%	75	100	100	100	100
2.	Tingkat Konsistensi Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	%	75	100	100	100	100
3.	Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah terhadap RKPd	%	75	100	100	100	100
4.	Nilai Evaluasi AKIP SKPD	Poin	N/A	N/A	61,1	67,15	65,93
5.	Nilai IKM SKPD	Poin	80,08	80,28	80,41	74,29	78,292
6.	Nilai Maturitas SPIP	Poin	N/A	N/A	4,008	N/A	N/A

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

2. Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang berkaitan secara langsung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu : “Meningkatkan

tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima”, dengan indikator tujuan:

- Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah;
- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Pada tahun 2020 terjadi Pandemi Virus Corona (Covid-19) sehingga menyebabkan terjadinya perubahan stuktur anggaran, dan juga mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pencapaian pendapatan serta pajak daerah merupakan salah satu tujuan dan sasaran BPKPD yang telah tertuang dalam RPJMD dan Renstra, namun dikarenakan adanya pandemi pada tahun 2020 memaksa BPKPD untuk meninjau ulang dan melakukan perubahan target Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah. Perubahan target kinerja tersebut agar BPKPD dapat mencapai kinerja dengan baik walaupun ditengah pandemi ini. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja dengan hasil pengukuran kinerja seperti terlihat pada Tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.56
Indikator Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
2.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	15,95	85,69	-38,13	16,05%	6,10%

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

3. Kepegawaian

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin

oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya nomor 07 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan dan tugas lain yang diberikan Bupati. Adapun fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan
- b. Pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan pengendalian pegawai, manajemen kinerja pegawai, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan latihan.
- d. Pembinaan teknis bidang kepegawaian
- e. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya tercantum pada misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan secara langsung dengan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan Manajemen ASN yang profesional, melalui indikator tujuan Indeks Profesionalitas ASN, dengan sasaran;

- 1) Meningkatnya sistem manajemen kepegawaian yang profesional.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas perangkat daerah.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan indikator kinerja utama untuk periode 2016-2021. Capaian indikator kinerja utama di Tahun 2020 bisa dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase ketersediaan aparatur sesuai hasil analisis beban kerja	%	56.57	55.90	55.75	54,29	45,46
2.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Orang/ Tahun	5.06	5.6	5.33	15,83	9,6
3.	Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik (≥ 76)	%	99.62	99.68	98.18	99,81	99,97
4.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	CC	CC	64,03	70,06 (BB)	75,93 (BB)
5.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	2,7625	2,7625	N/A
6.	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,44	75,7	77,17	77,55	77,54
7.	Tingkat Akurasi Data SIMPEG	%	60	79.16	77.14	84,29	84,29

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2020

4. Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih, dimana Inspektorat Daerah dituntut sebagai pionir untuk melaksanakan manifestasi Undang-Undang tersebut. Inspektorat Daerah merupakan instansi yang mempunyai tugas mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai instansi pengawas, Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah sangat penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah harus mampu melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah juga bekerja sama dengan lembaga pengawas lain seperti KPK, BPKP dan BPK serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, Inspektorat Daerah juga diminta memainkan perannya dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kepada publik atau masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan misi ke tiga Kabupaten Tasikmalaya yaitu Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Salah satu kebijakan untuk melaksanakan misi ketiga Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik adalah meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan dengan sasaran program menurunnya penyimpangan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ukuran atau Indikator capaian program perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah selama Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya adalah :

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	52	50,82	61,58	55,77	81,75
2.	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti	%	41,7	83,03	81,17	80,86	72,79
3.	Kapabilitas APIP level "Inisial" pada Tahun 2016 dan level "Integrated" pada Tahun 2019	Level	N/A	N/A	Level 2	Level 2	Level 2
4.	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Maturitas SPIP level 2 (berkembang)	%	N/A	N/A	40,74	41,67	41,67

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Keterangan: Data dicantumkan N/A karena ada perubahan indikator kinerja pada perubahan RPJMD dan perubahan Renstra

5. Kesekretariatan Daerah

Sebagai tindak lanjut ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan adminsitratif. Adapun fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

- 4) Pembinaan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya di atas Sekretariat Daerah membangun kesisteman organisasi perangkat daerah, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, beriman, dan bertaqwa, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, mewujudkan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, yang merupakan salah satu bagian dari organisasi perangkat daerah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sebagai bagian dari perangkat daerah, dalam meyelenggarakan tugasnya Sekretaris Daerah di bantu oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi Bagian Bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah di tetapkan. Adapun jumlah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah 10 (sepuluh) bagian dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.59
Indikator Kinerja Urusan Kesekretariatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Predikat Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai	C	CC	B	B	B
2	Tingkat Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Nilai IKM Kabupaten	%	75,71	76,7	75,47	77,38	78,93

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Persentase Pemenuhan Administrasi, Sarana, dan Prasarana di Lingkungan Setda	%	100	100	100	100	100
5	Persentase rekomendasi hasil verifikasi bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
6	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	100	100	100	100
7	Persentase pembinaan BUMD dan sosialisasi ekonomi kerakyatan	%	100	100	100	100	100
8	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan nasional yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah Desa yang Menerapkan Siskeudes	Desa	150	351	351	351	351
10	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2021

6. Kesekretariatan DPRD

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan

yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan salah satu kebijakannya adalah Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif dengan sasaran program: Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel.

Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah tercantum bahwa Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Kesekretariatan DPRD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan tiga Fungsi DPRD	%	100	100	60	100	100
2.	Persentase Fasilitasi Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2021

7. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 102 tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Perbup dimaksud dikatakan, dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- b) Penyelenggaraan pembinaan teknis dalam pemeliharaan hubungan antar lembaga dan penanganan masalah aktual, ketahanan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia serta perlindungan masyarakat;
- c) Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Indikator Kerja Utama: “Prosentase potensi konflik terkait poleksosbud yang dimediasi”. Dan di akhir masa anggaran, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, secara umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dapat tercapai. Capaian IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.61
Indikator Kinerja
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase potensi konflik terkait poleksosbud yang dimediasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2021

2.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Iklim Investasi

Iklim investasi daerah yang baik mencerminkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan wilayah tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi investor untuk membuka usaha yang layak dari segi bisnis. Daya saing investasi daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja yang menjadi parameter Iklim Investasi
Kab. Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	647	408	539	1.201	424
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp juta	253.681	1.092.483	137.958	898.361,97	750.600,27

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2021

2.4.2. Prasarana Wilayah/Infrastruktur

Prasarana wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kondisi infrastruktur dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan pembangunan beberapa prasarana berikut yang disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Prasarana Wilayah/Infrastruktur
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Kelengkapan Perlengkapan Jalan	NA	NA	87	70	71
2	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	NA	NA	1	1	1

Sumber: LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin

berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Begitu pula halnya dengan keberadaan fasilitas lembaga keuangan khususnya perbankan. Fungsi intermediasi perbankan akan sangat strategis karena dapat menyediakan dana untuk investasi melalui saluran kredit atau pembiayaan. Serapan kredit atau pembiayaan yang digunakan pelaku usaha sebagai tambahan modal akan meningkatkan kapasitas perusahaan sehingga akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Beberapa Fasilitas Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel berbintang	Unit	-	-	-	1	1	1
		Kamar	-	-	-	39	39	39
		Tempat Tidur	-	-	-	2	44	56
2	Hotel Non bintang	Unit	22	20	-	33	32	37
		Kamar	373	376	-	456	399	410
		Tempat Tidur	563	607	-	586	588	612
3	Restoran**	Unit	-	-	25	31	33	42

Sumber : BPS Provinsi Barat

2.4.3.Sumber Daya Manusia (SDM)

Transisi struktur usia berdampak pada *dependency ratio* ataubeban ketergantungan. *Dependency ratio* merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. *Dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Perhitungan BPS Pusat (2015) menunjukkan *dependency ratio* tahun 2017 sebesar 52,71%yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja dan dianggap produktif mempunyai tanggungan masing-masing sebanyak 53 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif.

Tabel 2.65
***Dependency Ratio* Kabupaten Tasikmalaya**
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Dependency Ratio</i> (Rasio Ketergantungan)	52.97	52,71	52,55	52,48	52.49

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (berbagai tahun)

2.5. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan

Berdasarkan uraian capaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan sebelumnya, secara singkat rekapitulasi capaian kinerja pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.66
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	Pertumbuhan (LPE) PDRB	%	5,91	5,95	5,7	5,43	-0,98	belum tercapai (<)
1.1.2	Inflasi	%	2,75	3,88	2,3	1,72	0,26	belum tercapai (<)
1.1.3	PDRB per kapita ADHB	Rp. (Juta)	16,07	17,47	19,43	21.27	21.33	belum tercapai (<)
1.1.4	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	%	11,24	10,84	9,85	9,12	10,34	melampaui (>)
1.1.5	Indeks Pembangunan Manusia	%	63,57	64,14	65	65,64	65,67	melampaui (>)
1.1.6	Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,46	12,47	12,48	12,52	12,53	melampaui (>)
1.1.7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	%	6,94	7,12	7,13	7,17	7,35	melampaui (>)
1.1.8	Angka Usia Harapan Hidup	%	68,54	68,71	68,96	69,21	69,47	melampaui (>)
1.1.9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,07	0,06	0,02	0,04	0,03	belum tercapai (<)
1.1.10	Persentase Angka Partisipasi Kerja	%	91,49	93,39	85,34	93,75	93,17	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,67	63,56	64,07	66,46	69,54	belum tercapai (<)
1.1.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	8,51	6,61	6,92	6,25	6,83	melampaui (>)
1.1.13	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	75,06	93,39	93,05	93,75	92,88	melampaui (>)
1.1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	N/A	72	74	86	83,25	melampaui (>)
1.1.15	Persentase Pertumbuhan PAD	%	15,95	85,69	-38,13	16,05	6,10	melampaui (>)
1.1.16	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (ADHB)	%	0,27	0,25	0,23	0,21	0,22	belum tercapai (<)
1.1.17	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	%	7,42	7,43	7,54	7,69	7,61	belum tercapai (<)
1.1.18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	89,25	85,63	85,98	86,05	86,02	belum tercapai (<)
1.1.19	Indeks Gini	%	0,3	0,319	0,353	0,41	0,41	melampaui (>)
1.1.20	Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	N/A	Menuju Pratama dengan skor 262	Menuju Pratama dengan skor 400	Pratama dengan skor 505	Pratama	belum tercapai (<)
1.1.21	PDRB Sektor Pertanian	Rp. (Juta)	10.737.030,88	11.607.072,60	12.936.258,60	13.984.364,09	14.186.388,56	belum tercapai (<)
1.1.22	Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah	Inter- pretasi	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.23	Hasil Evaluasi SAKIP	Inter-pretasi	CC	CC	B	B	B	belum tercapai (<)
1.1.24	Hasil Evaluasi LPPD	Inter-pretasi	Sangat tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	sesuai (=)
1.1.25	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level	N/A	N/A	Level 2	Level 2	Level 2	belum tercapai (<)
1.1.26	Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap	%	64,4	66,03	67,72	70,05	71,39	melampaui (>)
1.1.27	Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik	%	94,48	94,71	94,94	95,17	95,17	melampaui (>)
1.1.28	Persentase Penduduk berakses perumahan dan infrastruktur pemukiman	%	57,15	59,51	60,79	81,02	64,37	sesuai (=)
1.1.29	Indeks kualitas lingkungan hidup	%	57,5	58,5	61,08	60,98	64,58	melampaui (>)
1.1.30	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW	%	10,2	10,205	10,4	10,62	10,8	sesuai (=)
1.1.31	Indeks Risiko Bencana	Poin	N/A	224,8	203,01	203,01	106,53	sesuai (=)
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
2.1	Kemampuan Ekonomi Daerah:							
2.1.5	Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi perizinan dan teknologi	IKM	106	46	58	117	0	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Infrastruktur Wilayah:							
2.2.1	Cakupan Kelengkapan Perlengkapan Jalan	%	N/A	N/A	87	70	71	melampaui (>)
2.2.2	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Unit	N/A	N/A	1	1	1	sesuai (=)
2.3	Sumber Daya Manusia:							
2.3.1	<i>Dependency Ratio</i> (Rasio Ketergantungan)	%	52,97	52,71	52,55	52,48	52,49	sesuai (=)
2.3.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3	%	N/A	N/A	46,33	N/A	N/A	sesuai (=)
3	ASPEK PELAYANAN UMUM							
3.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
3.1.1	Urusan Pendidikan							
3.1.1.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	62,25	76,11	66,56	78,6	75,69	melampaui (>)
3.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	%	100	104,05	105,33	101,09	100,39	melampaui (>)
3.1.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	%	95	96,76	98,61	95,7	93,65	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	%	99,54	98,73	94,61	120,29	108,09	melampaui (>)
3.1.1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	%	75	79,44	84,39	95,55	90	belum tercapai (<)
3.1.1.6	Rasio Ketersediaan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7 -12 tahun	%	165,3	141,1	148,02	143,55	145,66	belum tercapai (<)
3.1.1.7	Rasio Ketersediaan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 tahun	%	210,44	227,4	243,85	174,44	199,89	belum tercapai (<)
3.1.1.8	Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD- MI	%	18,32	15,94	17,23	19,99	20,67	belum tercapai (<)
3.1.1.9	Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs	%	12,58	11,97	15,75	16,47	16,78	belum tercapai (<)
3.1.1.10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	%	97,8	-	78,17	106.11	120,45	melampaui (>)
3.1.1.11	Persentase Pelayanan dalam pemenuhan SPM Pendidikan	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.1.1.12	Persentase Pelayanan dalam pemenuhan SPM Jenjang PAUD	%	100	100	100	78,6	92,97	belum tercapai (<)
3.1.1.13	Persentase Pelayanan dalam pemenuhan SPM Jenjang pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	95,5	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1.14	Persentase Pelayanan dalam pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	%	100	100	100	100	99,22	belum tercapai (<)
3.1.1.15	Persentase Rata-rata peningkatan nilai SPM Jenjang SD	%	70	-	90	100	86.00	sesuai (=)
3.1.1.16	Persentase Rata-rata peningkatan nilai SPM Jenjang SMP	%	68	-	100	100	88	sesuai (=)
3.1.1.17	Jumlah Warga Belajar Paket B Setara SMP	WB	2500	783	1301	1328	1183	belum tercapai (<)
3.1.1.18	Jumlah Warga Belajar Paket C Setara SMA	WB	3000	2445	3628	4173	4173	melampaui (>)
3.1.1.19	Jumlah PKBM Aktif	PKBM	39	50	42	70	47	melampaui (>)
3.1.1.20	Jumlah LKP Aktif	LKP	25	23	26	47	39	melampaui (>)
3.1.1.21	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	17	99,24	80,83	76,78	80,47	belum tercapai (<)
3.1.1.22	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikasi Guru.	%	49.59	-	42,97	47,79	51,41	belum tercapai (<)
3.1.1.23	Persentase Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi tenaga Pendidik.	%	5.27	48,57	24,34	29,18	35,51	melampaui (>)
3.1.1.24	Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	N/A	N/A	100	100	100	sesuai (=)
3.2	Urusan Kesehatan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.1	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	9	-	8	6	5	belum tercapai (<)
3.2.2	Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Orang	177	-	91	75	75	belum tercapai (<)
3.2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	97,4	105	97,4	100,86	91,25	belum tercapai (<)
3.2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	93,21	94	92,31	96	94,84	belum tercapai (<)
3.2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,46	95	98,46	99,59	99,69	belum tercapai (<)
3.2.6	Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,58	97	78,07	84,18	75,6	belum tercapai (<)
3.2.7	Persentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	0	90	95,42	96	78,02	belum tercapai (<)
3.2.8	Persentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	25,76	-	95,93	92,74	100	sesuai (=)
3.2.9	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat penderita Hipertensi dalam pemenuhan SPM Kesehatan	%	100	5,2	100	100	100	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.10	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat penderita Diabetes Melitus dalam pemenuhan SPM Kesehatan	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.11	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat penderita Tuberculosis dalam pemenuhan SPM Kesehatan	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.12	Persentase Desa Siaga Aktif	%	12,53	-	12,53	100	19,09	belum tercapai (<)
3.2.13	Persentase Keluarga Sehat	%	29,89	-	100	60,3	31,69	belum tercapai (<)
3.2.14	Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada penyakit menular dan tidak menular	%	N/A	A	100	100	100	sesuai (=)
3.2.15	Cakupan orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	99,59	14,18	99,59	98,54	99,34	belum tercapai (<)
3.2.16	Persentase pelayanan orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	54,41	43,19	100	100	100	sesuai (=)
3.2.17	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	%	7	-	100	100	100	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.18	Persentase penderita Diabet Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	5	21,7	100	100	100	sesuai (=)
3.2.19	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	31,1	100	77,7	80,07	belum tercapai (<)
3.2.20	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0/30000	1/41,334	1/42,80	1/57,774	1/57,774	1/45.047	melampaui (>)
3.2.21	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0,17	-	0,17	0,17	0,11	belum tercapai (<)
3.2.22	Persentase Puskesmas Sesuai Standar Akreditasi Nasional	%	0	100	57,5	100	100	sesuai (=)
3.2.23	Persentase penduduk miskin dengan Jaminan Kesehatan	%	45,54	100	45,54	53,3	53,02	belum tercapai (<)
3.2.24	Persentase Ketersediaan Obat Esensial di Pelayanan Dasar	%	40	-	100	-	100	sesuai (=)
3.2.25	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	%	0,6	0,8	0,3	0,3	0,09	belum tercapai (<)
3.2.26	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat miskin	%	31	100	30	85,4	125,5	melampaui (>)
3.2.27	Persentase Pemenuhan Obat Esensial di Pelayanan Dasar	%	80	80	74,63	100	100	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.29	Cakupan Jenis dan jumlah dokter spesialis	%	60	65	80	89	93	melampaui (>)
3.2.30	Cakupan tenaga kesehatan lainnya	%	70	75	100	100	92,59	belum tercapai (<)
3.2.31	Cakupan sarana dan prasarana rumah sakit	%	65	70	74,94	89,31	77	belum tercapai (<)
3.2.32	Cakupan rawat jalan dan rawat inap	%	65	70	91	115	93,57	melampaui (>)
3.2.33	Cakupan mutu rumah sakit	%	N/A	N/A	80	87	86,11	belum tercapai (<)
3.2.34	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	%	N/A	B (75)	B (80)	B (85,99)	B (85,5)	belum tercapai (<)
3.2.35	Status Akreditasi RS	status	N/A	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	sesuai (=)
3.3	Urusan Pekerjaan Umum							
3.3.1	Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap	%	64,4	66,03	67,72	70,05	71,39	melampaui (>)
3.3.2	Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik	%	94,48	94,71	94,94	95,17	95,17	belum tercapai (<)
3.3.3	Rasio Ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat	%	64,79	65,1	69,26	72,01	72,8	melampaui (>)
3.3.4	Rasio Ketersediaan Bangunan Fasilitas Publik	%	9,5	12,6	23,5	25	41,5	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.5	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari - hari masyarakat dalam rangka pemenuhan SPM Pekerjaan Umum	%	N/A	N/A	100	80,78	81,11	sesuai (=)
3.3.7	Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dalam rangka pemenuhan SPM Pekerjaan Umum	%	N/A	N/A	100	48,71	48,85	sesuai (=)
3.3.8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang	%	10,01	10,21	10,41	10,62	10,81	melampaui (>)
3.3.9	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	79,1	79,49	80,29	81,02	81,93	melampaui (>)
3.3.10	Persentase penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana	%	N/A	N/A	N/A	100	100	sesuai (=)
3.3.11	Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	%	N/A	N/A	N/A	100	100	sesuai (=)
3.3.12	Persentase penduduk berakses air minum	%	69,61	75,83	78,01	80,78	81,11	belum tercapai (<)
3.3.13	Persentase penduduk berakses air limbah domestic	%	45,78	46,58	47,46	48,7	48,85	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.14	Persentase peningkatan jalan lingkungan	%	35,51	36,14	37,38	38,22	38,28	belum tercapai (<)
3.4	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
3.4.1	Persentase Penegakan PERDA	%	70	75	100	29,03	-	belum tercapai (<)
3.4.2	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	98,6	100	100	87,93	-	belum tercapai (<)
3.4.3	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	sesuai (=)
3.4.4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	N/A	N/A	N/A	N/A	52,78	belum tercapai (<)
3.4.5	Persentase kejadian/konflik terkait poleksosbud yang dimediasi	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.5	Urusan Sosial							
3.5.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	1,71	4,36	4,29	0,68	2,67	belum tercapai (<)
3.5.2	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,02	0,03	0,59	0,09	0,09	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5.3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.5.4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.5.5	Persentase PMKS yang tertangani	%	N/A	100	100	100	100	sesuai (=)
3.5.6	Nilai Evaluasi AKIP Dinas	skor	N/A	CC	B	B	60,34	melampaui (>)
3.5.7	Pemenuhan SPM Sosial	%	N/A	-	100	100	100	sesuai (=)
3.5.8	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar diluar panti dalam rangka pemenuhan SPM Sosial	%	100	-	100	100	100	sesuai (=)
3.5.9	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti dalam rangka pemenuhan SPM Sosial	%	100	-	100	100	100	sesuai (=)
3.5.10	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia terlantar diluar panti dalam rangka pemenuhan SPM Sosial	%	100	-	100	100	100	sesuai (=)
3.5.11	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar	%	N/A	-	100	100	100	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	panti dalam rangka pemenuhan SPM Sosial							
3.5.12	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana dalam rangka pemenuhan SPM Sosial	%	100	N/A	100	100	100	sesuai (=)
3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
3.2.1	Tenaga Kerja							
3.2.1.1	Persentase Partisipasi angkatan kerja	%	62,67	63,56	64,07	66,46	69,54	belum tercapai (<)
3.2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,96	6,61	6,92	6,31	7,12	melampaui (>)
3.2.1.3	Persentase kasus perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.1.4	Pekerja yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan	%	-	40	50	52,84	54	belum tercapai (<)
3.2.1.5	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	Orang	16	5	2	4	0	belum tercapai (<)
3.2.1.6	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	-	-	B	B	B	B	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.1.7	Persentase Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
3.2.2.1	Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	skor	N/A	Menuju Pratama dengan skor 262	Menuju Pratama dengan skor 400	Pratama dengan skor 505	Pratama dengan skor 505	belum tercapai (<)
3.2.2.2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	65	70	80	85	90	sesuai (=)
3.2.2.3	Capaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kategori	N/A	N/A	Pratama	Pratama	Pratama	sesuai (=)
3.2.3	Pangan							
3.2.3.1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	N/A	1	1	1	81,5	melampaui (>)
3.2.3.2	Persentase Peningkatan Konsumsi Energi dan Protein	%	N/A	3	3	3	3,2	sesuai (=)
3.2.4	Lingkungan Hidup							
3.2.4.1	Nilai Evaluasi AKIP Dinas LH		CC	-	A	BB	BB	sesuai (=)
3.s2	Indeks Kualitas Air	%	40	41	53,57	43	59,29	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.4.3	Indeks Kualitas Udara	%	65	66	79,08	68	84,11	melampaui (>)
3.2.4.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	skor	65	66	53,22	68	37,55	belum tercapai (<)
3.2.4.5	Luas lahan yang dikonservasi		20 Ha	20	25	100 Ha	100 Ha	sesuai (=)
3.2.4.6	Persentase jumlah timbunan sampah yang tertangani	%	33,33	18,07	20,75	38,46	47	sesuai (=)
3.2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
3.2.5.1	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan	%	46,07	59,53	66,29	69,69	73,43	belum tercapai (<)
3.2.5.2	Nilai Evaluasi AKIP Disdukcapil	nilai	N/A	60	62,4	65	77,16	melampaui (>)
3.2.5.3	Maturisasi SPIP	nilai	1.390	3	4	N/A	N/A	sesuai (=)
3.2.5.4	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	75,75	76,86	81,43	81,5	81,98	melampaui (>)
3.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
3.2.6.1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	71,43	80	81,82	81,82	83,33	sesuai (=)
3.2.6.2	Persentase Posyandu aktif	%	80,01	81,21	82,59	85,04	98,93	melampaui (>)
3.2.6.3	Cakupan pembinaan BUM Desa	%	62,11	67,52	69,23	86,61	96,01	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.6.4	Persentase Pasar Desa Aktif	%	4,27	7,12	9,97	14,53	14,53	sesuai (=)
3.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
3.2.7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,25	0,29	0,23	0,16	1,04	belum tercapai (<)
3.2.7.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,6	2,6	2,4	2,5	2,5	sesuai (=)
3.2.7.3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmit need)	%	12	11,5	10,38	11,29	12,64	melampaui (>)
3.2.7.4	Persentase penurunan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	5,5	5	2,82	3,5	3,5	sesuai (=)
3.2.7.5	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	%	18	18,5	19	21	21	sesuai (=)
3.2.8	Perhubungan							
3.2.8.1	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.8.2	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.8.3	Presentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.8.4	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	N/A	N/A	CC	B	BB	sesuai (=)
3.2.8.5	Tingkat Maturitas Sistem Pegendalian Internal Pemerintah	Nilai	N/A	N/A	N/A	Level 3	Level 3	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.8.6	Kesesuaian perencanaan dan penganggaran	%	N/A	N/A	N/A	100	100	sesuai (=)
3.2.8.7	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai	%	22,76	22,9	35,15	49,96	37,61	belum tercapai (<)(tercapai)
3.2.8.8	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan laik jalan	%	122	112	123	94	89,93	belum tercapai (<)(tercapai)
3.2.8.9	Persentase tingkat pelayanan angkutan umum	%	53,4	65,05	65,13	67,27	46,93	belum tercapai (<)
3.2.8.10	Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	%	74,77	75,48	-	80,56	81,15	sesuai (=)
3.2.8.11	Persentase ketaatan masyarakat mematuhi aturan LLAJ	%	27,78	25,59	22,02	21,44	3,28	belum tercapai (<)(tercapai) (lebih kecil lebih baik)
3.2.8.12	Persentase ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	%	0,4	0,4	0,4	39,8	51,7	melampaui (>)
3.2.9	Komunikasi dan Informatika							
3.2.9.1	Presentase Jaringan Internet perangkat Daerah yang terintegrasi	%	N/A	N/A	76	100	88	sesuai (=)
3.2.9.2	Persentase Interoperabilitas Aplikasi yang terkoneksi jaringan Intranet terintegrasi	%	N/A	N/A	50	100	100	melampaui (>)
3.2.9.3	Tersedianya Daftar Informasi Publik	%	N/A	N/A	100	100	100	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.9.4	Cakupan akses masyarakat dalam memanfaatkan data / informasi Pemerintah Daerah	%	N/A	N/A	60	100	90	sesuai (=)
3.2.9.5	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	31	92	100	melampaui (>)
3.2.9.6	Buku Kabupaten dalam Angka	Buku	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
3.2.9.7	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kominfo	Poin	N/A	55	50,74	50,74	70	sesuai (=)
3.2.9.8	Nilai IKM Dinas Kominfo	Poin	N/A	N/A	77	77	88.80	sesuai (=)
3.2.9.9	Tingkat Maturisasi SPIP Dinas Kominfo	Level	N/A	N/A	Level 2	Level 2	Level 3	sesuai (=)
3.2.10	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
3.2.10.1	Jumlah Koperasi	Koperasi	432	466	466	485	195	melampaui (>)
3.2.10.2	Jumlah UMKM yang memiliki Izin Usaha Mikro (IUM)	UMKM	250	750	1.500	2.214	4415	melampaui (>)
3.2.10.3	Jumlah UMKM yang terlatih	UMKM	N/A	94	250	310	350	melampaui (>)
3.2.10.4	Jumlah UMKM	UMKM	33.908	34.402	34.790	39.846	85.212	melampaui (>)
3.2.11	Penanaman Modal							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.11.1	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)	investor	647	408	539	1,201	424	belum tercapai (<)
3.2.11.2	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) / Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. (Juta)	253.681	1.092.483	137.958	898.361,97	750.600,27	melampaui (>)
3.2.11.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Tasikmalaya	skor	84,2	85,7	88,25	85,25	85,63	melampaui (>)
3.2.12	Kepemudaan dan Olahraga							
3.2.12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	N/A	N/A	N/A	13,33	22,22	melampaui (>)
3.2.12.2	Persentase wirausaha muda	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	280	melampaui (>)
3.2.12.3	Jumlah atlet berprestasi	Orang	N/A	N/A	40	66	2	belum tercapai (<)
3.2.13	Kebudayaan							
3.2.13.1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina.	Sanggar	N/A	12	71	91	91	melampaui (>)
3.2.13.2	Jumlah kegiatan Seni dan Budaya yang digelar	Even	N/A	5	26	26	3	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.13.3	Jumlah Sanggar Seni yang mempunyai sertifikat izin(TDUP)	Sanggar	N/A	0	71	74	74	melampaui (>)
3.2.14	Perpustakaan							
3.2.14.1	Jumlah koleksi buku perpustakaan umum	Judul / Eksemplar	14.783 (36.966 Eks)	349 (1.404 Eks)	1.338 (8.148 Eks)	288 (1.152 Eks)	500 (1.000 Eks)	sesuai (=)
3.2.14.2	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan khusus	Orang	323.907	449.831	477.069	619.320	268.704	belum tercapai (<)
3.2.15	Kearsipan							
3.2.15.1	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	%	N/A	80,59	40,29	43,28	49,2	sesuai (=)
4	Layanan Urusan Pilihan							
4.1	Pariwisata							
4.1.1	Jumlah Kunjungan wisata	Orang	944.525	1.419.916	1.421.728	1.449.314	658.170	belum tercapai (<)
4.1.2	PAD Sektor Pariwisata	Rp	1.140.206.500	1.250.824.700	1.282.059.000	1.290.009.500	986.264.000	sesuai (=)
4.2	Pertanian							
4.2.1	Produksi hasil olahan komoditas pertanian	Ton	26.172	26.709	27.243	28.242	12.822	28,242
4.2.2	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.288.150	1.239.897	1.252.296	1.044.784	1.288.150	melampaui (>)
4.2.3	Produksi Hortikutura	Ton	270.875	263.344	265.977	256.986	191.978	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.4	Produksi komoditas perkebunan	Ton	57.125	57.121	57.978	57.844	44.680	belum tercapai (<)
4.2.5	Produksi komoditas peternakan	Ton	78.305	64.473	65.763	62.108	90.010	melampaui (>)
4.2.6	Produksi Perikanan	Ton	57.787,38	62.410,37	68.651,41	68,227,88	70.710	melampaui (>)
4.3	Perdagangan							
4.3.1	Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitas pameran	Orang	21	24	10	27	12	melampaui (>)
4.3.2	Ekspor Bersih perdagangan (US\$)	US\$	2,680,373.81	2,057,577.68	2,818,250.90	4.336.366,29	2.658.628.37	melampaui (>)
4.3.3	Revitalisasi Pasar	Unit	2	2	3	0	0	belum tercapai (<)
4.3.4	Rehabilitasi Pasar	Unit	4	3	3	4	0	belum tercapai (<)
4.3.5	Jumlah UTP yang ditera	%	50	50	65	99	76,7	melampaui (>)
4.4	Perindustrian							
4.4.1	Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi perizinan dan teknologi	IKM	106	46	58	117	0	belum tercapai (<)
4.4.2	Jumlah Industri Kecil dan menengah	Unit/ Usaha	15,522	15,677	16,008	16,248	16.448	melampaui (>)
4.4.3	Pertumbuhan Industri	%	1,6	1,5	2,2	1,5	1,2	belum tercapai (<)
4.4.4	Jumlah Sentra industry	Sentra	398	399	405	410	421	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5	Transmigrasi							
4.5.1	Meningkatkan layanan bagi transmigran (Fasilitasi dan Pelatihan Keterampilan)		1	1	1	1	0	belum tercapai (<)
5	Penunjang Urusan							
5.1	Perencanaan dan Pembangunan							
5.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
5.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
5.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan Perkada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
5.1.4	Tersedianya Dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
5.1.5	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD	-	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.1.6	Tingkat Konsistensi Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.7	Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.1.8	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda		N/A	N/A	67,4	65,93	65,93	melampaui (>)
5.1.9	Nilai IKM Bappeda	Poin	N/A	N/A	74,25	74,29	78,292	melampaui (>)
5.1.10	Tingkat Maturitas SPIP Bappeda		N/A	N/A	4,08	4,008	-	sesuai (=)
5.2	Keuangan							
5.2.1	Persentase Pajak Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	6,73	12,10	6,98	7,52	8,51	belum tercapai (<)
5.2.2	Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	sesuai (=)
5.2.3	Hasil Evaluasi SAKIP		CC	CC	B	B	BB	sesuai (=)
5.2.5	Persentase Belanja Pendidikan	%	³ 20	20	20	20	³ 20	sesuai (=)
5.2.6	Persentase Belanja Kesehatan	%	³ 10	10	10	10	³ 10	sesuai (=)
5.2.7	Persentase Belanja ADD	%	³ 10	10	10	10	³ 10	sesuai (=)
5.2.8	Persentase Dana Bagi Hasil Desa	%	³ 10	10	10	10	³ 10	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.10	Persentase Implementasi SIMDA APBD online	%	50	100	100	100	100	sesuai (=)
5.2.11	Penetapan APBD tepat waktu		Tepat waktu / 2	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu/2	sesuai (=)
5.2.12	Penyampaian LKPD tepat waktu		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	sesuai (=)
5.2.13	Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran		N/A	N/A	N/A	N/A	80	sesuai (=)
5.2.14	Hasil Evaluasi SAKIP		CC	CC	B	B	64	sesuai (=)
5.2.17	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	sesuai (=)
5.2.18	Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.2.19	Persentase Realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
5.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Orang/ Tahun	5.5	5.6	5.33	15,83	1,52	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.2	Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik	%	99.62	99.68	98.18	99,81	99,97	belum tercapai (<)
5.3.3	Persentase ketersediaan aparatur sesuai hasil analisis beban kerja	%	56.57	55.90	55.75	54,29	45,46	belum tercapai (<)
5.3.4	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	CC	CC	64,03	70,06	75,93 (BB)	melampaui (>)
5.3.5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	2,7625	2,7625	2,7625	belum tercapai (<)
5.3.6	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,44	75,7	77,17	77,55	77,54	melampaui (>)
5.3.7	Tingkat akurasi data kepegawaian	%	60	79.16	77.14	84,29	84,29	belum tercapai (<)
5.4	Pengawasan							
5.4.1	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti	%	41,7	65	72	42,32	72,79	belum tercapai (<)
5.4.2	Kapabilitas APIP level “Integrade” pada tahun 2019	Level	N/A	N/A	Level 2	Level 2	Level 2	belum tercapai (<)
5.4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Maturitas SPIP	%	N/A	N/A	40,74	41,67	41,67	belum tercapai (<)
5.5	Sekretariat Daerah							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5.1	Predikat Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai	C	CC	CC	B	B	sesuai (=)
5.5.2	Tingkat Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	sesuai (=)
5.5.3	Nilai IKM Kabupaten	Skor	75,71	76,7	77,9	78,93	78,93	belum tercapai (<)
5.5.4	Persentase rekomendasi hasil verifikasi bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.5.5	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.5.6	Persentase pembinaan BUMD dan sosialisasi ekonomi kerakyatan	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.5.7	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan nasional yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.5.8	Jumlah Desa yang Menerapkan Siskeudes	Desa	150	351	351	351	351	sesuai (=)
5.5.9	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.6	Sekretariat Dewan							
5.6.1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6.2	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.6.3	Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.6.4	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan tiga Fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.6.5	Persentase Fasilitasi Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.6.6	Cakupan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.6.7	Persentase Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.6.8	Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Dewan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.6.9	Persentase Fasilitasi Keluhan/Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	sesuai (=)
5.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							sesuai (=)
5.7.1	Indeks Kapasitas Daerah Kebencanaan	Nilai	N/A	N/A	N/A	Sedang	Sedang	sesuai (=)

Sumber : Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Tabel 2.67
Sandingan Ketercapaian Indikator Makro antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator Makro	Satuan	Kabupaten	Provinsi	Nasional
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,67	72,09	71,94
2	Angka Kemiskinan	%	10,34	8,43	10,19
3	Angka Pengangguran	%	7,12	10,46	7,07
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,98	2,4	2,07
5	Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta	21,33	41,81	54,58
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,41	0,398	0,385

2.6. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses prumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, dengan Visi **“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”** terdapat 24 indikator kinerja sasaran, yang mencerminkan komitmen untuk mencapai 4 (empat) misi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Dari 24 indikator kinerja sasaran yang terdapat pada RPJMD tersebut terdistribusi pada Misi Pertama, “Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaql-karimah dan Berkualitas” Sebanyak 7 (tujuh) indikator; Misi Kedua, “Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata”, sebanyak 5 (lima) indikator; Misi Ketiga, “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance*)” sebanyak 5 (lima) indikator; dan Misi Keempat, “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan” sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Tingkat capaian indikator pembangunan Kabupaten Tasikmalaya merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Berdasarkan data kinerja, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Realisasi Kinerja				Program Prioritas	Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah dan Berkualitas.																
T.1 Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berakhlaq mulia dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	S.1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keagamaan	Indeks Pendidikan	57,74	58,37	58,43	58,56	58,83	59,10	59,10	58,37	58,43	58,68	59,31	Tasik Cerdas Berakhlaq	Melampaui
		S.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74,68	74,94	75,32	75,60	75,88	76,15	76,15	74,94	75,32	75,71	76,11	Tasik Sehat	Melampaui
		S.3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase jumlah penduduk miskin	11,24	10,84	9,85	9,80	9,05	9,00	9,00	10,84	9,85	9,12	10,34	Tasik Sejahtera	Tidak Tercapai
			Indeks Pengeluaran	59,59	60,31	62,39	62,94	63,73	64,09	64,09	60,31	62,39	63,67	62,75	Tasik Sejahtera	Tidak tercapai
			Indeks Gini	0,304	0,319	0,353	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,35	0,41	0,41	Tasik Sejahtera	Tidak tercapai
		S.4. Meningkatkan pengarusutamaan gender, perlindungan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Tidak tersedia	85,63	85,98	86,00	86,07	86,08	86,08	85,63	85,98	86,05	86,02	Tasik Peduli Perempuan dan Anak	Belum Tersedia

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Realisasi Kinerja				Program Prioritas	Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
		perempuan dan anak.	Indikator Kabupaten Layak Anak	Menuju Pratama	Menuju Pratama (skor 200)	Pratama	Pratama (skor 500)	Menuju Madya (Skor 600) 525	Madya	Madya (Skor 601-700)	Menuju Pratama (skor 262)	Menuju Pratama (skor 400)	Pratama	Pratama dengan skor 505	Tasik Peduli Perempuan dan Anak	Tidak Tercapai
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.																
T.2. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis keunggulan agribisnis dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	S.5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	PDRB per kapita ADHB (Juta Rp)	16,07	17,47	19,4*	21,22**	21,411	23,007	23,007	17,47	19,43	21,27*	21,33*	Tasik Makmur dan Kreatif	Tidak tercapai
			Realisasi Investasi Daerah (Juta Rp)	253,681	1.092.482	137,957	293,667	308,351	323,768	323,768	266,365	279,683	898,361	750.600	Tasik Makmur dan Kreatif	Malampaui
		S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor agribisnis	PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp)	10.737.030,88	11.607.072,60	12.938.947,60*	12.746.863	14.388.200	14.735.400	14.735.400	11.607.072,60	12.936.258,60	12.984.364,90*	14.186.388,56**	Tani Mukti	Tidak tercapai
			Skor Pola Pangan Harapan	65,40	67,40	79,20	80,75	83,13	84,35	84,35	67,40	79,20	82,50	81,50	Tani Mukti	Tidak Tercapai
		S.7. Meningkatnya peran sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	944,525	1.419.916	1.421.728	1.561.908	950.000	1.601.245	1.601.245	1.419.916	1.421.728	1.449.314	658.170	Piknik Ka Tasik	Tidak Tercapai
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)																
T.3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan	Indeks Reformasi Birokrasi	S.8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dasar	75,71	75,47	76,61	77,38	80,00	81,00	81,00	76,70	77,90	78,93	78,83	Tasik Amanah	Tidak Tercapai

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Realisasi Kinerja					Program Prioritas	Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020				
berorientasi pelayanan prima.		dan pelayanan publik.	Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	Tasik Amanah	Tercapai	
			Hasil Evaluasi SAKIP	52,76	52,76	60,20	61,00	63,07	65,00	65,00	CC (Skor ?)	B (Skor ?)	61,00	61,41	Tasik Amanah	Melampaui		
			Hasil Evaluasi LPPD	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi (Skor ?)	Sangat tinggi (Skor ?)	Sangat tinggi	Belum tersedia	Tasik Amanah	Belum tersedia		
			Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	NA	NA	NA	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2 (2,7625)	Level 2 (2,7625)	Tasik Amanah	Nilai Maturitas tahun 2020 masih mengacu pada tahun 2019		
Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan																		
T.4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah	Persentase ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	S.9. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta	Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap	64,40	66,03	67,72	68,99	70,52	72,05	72,05	65,93	67,46	70,05	71,39	Tasik nyaman	Melampaui		
			Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik	94,48	94,71	94,94	95,17	95,40	95,63	95,63	94,71	94,94	95,17	95,17	Tasik nyaman	Tidak Tercapai		
			Rasio Ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat	64,79	65,10	69,26	70,04	65,59	74,45	74,45	64,99	65,19	72,01	72,80	Tasik nyaman	Melampaui		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Realisasi Kinerja				Program Prioritas	Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
		berwawasan lingkungan	Persentase Penduduk berakses perumahan dan infrastruktur pemukiman	57,52	59,51	60,79	61,56	64,37	66,19	66,19	59,51	60,79	62,18	62,54	Tasik nyaman	Tidak tercapai
			Indeks kualitas lingkungan hidup	57,5	58,5	59,5	60,5	61,05	62,5	62,5	58,5	59,5	60,98	64,58	Tasik Nyaman	Melampaui
			Persentase Perwujudan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	10,2	10.205	10,40	10,56	10,8	11	11	10,2	10,4	10,62+A17:P36	10,81	Tasik nyaman	Melampaui
		S.10. Terciptanya infrastruktur dan masyarakat yang tangguh bencana.	Indeks Risiko Bencana	224,80	224,80	203,01	142,11	106,53	74,51	74,51	224,8	152,16	141,11	Belum tersedia	Tasik Tangguh	Masih diolah BNBP

Sumber: RKPD Tahun 2020, Bappeda

2.7. Pandemi Covid-19

Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease* 2019 atau yang disebut juga dengan Covid-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. *World Health Organization* (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi Covid-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu.

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi Covid-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu.

Pada awal tahun 2020 negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*) akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan sehingga mengakibatkan resesi ekonomi global. Perkembangan dan penyebaran Covid-19 di dunia meningkat drastis pada tahun awal tahun 2020 ketika Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, yakni sebesar 336,88 persen dalam waktu 15 hari, sedangkan di Indonesia peningkatan kasus Covid-19 sebesar 405,11 persen dalam waktu 15 hari. Berikut beberapa dampak virus Covid-19 di Indonesia:

- Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan.
- Jemaah Indonesia batal berangkat umrah.
- Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun.
- Merusak tatanan ekonomi di Indonesia.
- Impor barang menjadi terhambat.

Penjabaran kondisi pandemi di Global, Nasional, Prov. Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya lebih lanjut disajikan pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.33.
Jumlah Kasus Pandemi Covid-19 Tingkat Global, Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kab. Tasikmalaya
Sumber : <https://covid19.go.id/>, <https://pikobar.jabarprov.go.id/>, <https://sigesit119.tasikmalayakab.go.id/>, diakses 27 Juni 2021

Sementara itu akibat pandemi, data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 adalah negatif yaitu berada pada minus -2,07 persen, yang mana pada tahun 2020 triwulan satu pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 2,97 persen, triwulan dua (-5,32 persen), triwulan tiga (-3,49 persen), dan triwulan empat (-2,19 persen). Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan dibandingkan tahun 2019. Indeks gini tahun 2019 Indonesia adalah 0,38. Selanjutnya pada tahun 2020 indeks gini meningkat menjadi 0,381 di semester 1 tahun 2020 dan menjadi 0,385 pada semester 2 tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya tidak berbeda signifikan antara dua tahun terakhir, hanya meningkat 0,005 poin. Krisis akibat pandemi juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat yang mana tingkat kemiskinan tahun 2019 adalah 9,32% dan pada tahun 2020

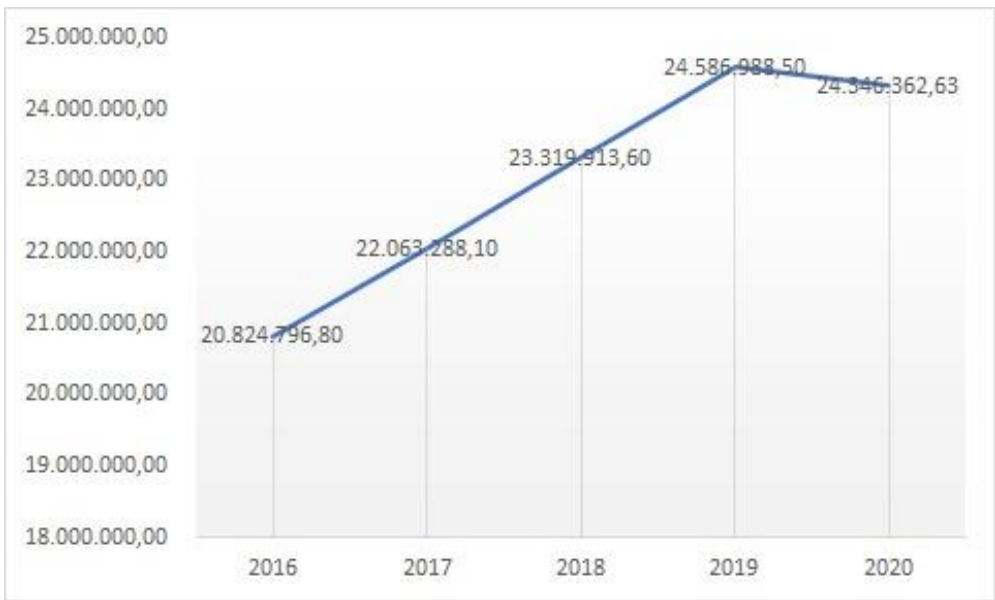
mengalami peningkatan menjadi 9,99% dengan jumlah penduduk miskin.

Situasi perlambatan ekonomi global dan nasional tentu menciptakan *bubble effect* terhadap pembangunan di daerah. Dalam konteks ini Kabupaten Tasikmalaya turut mengalami goncangan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 sebesar 5,43 persen, dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan kinerja perekonomian memburuk menjadikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya adalah negatif yaitu minus 0,98 persen di Tahun 2020. Situasi ini dipastikan akan mengkoreksi secara signifikan target pertumbuhan ekonomi periode tahun 2021 hingga tahun 2026.

Dengan telah ditemukannya vaksin, kebijakan menjaga jarak aman dengan orang lain melalui *physical distancing/social distancing* atau pembatasan sosial serta pola hidup bersih dan sehat tetap harus dilakukan di seluruh negara terdampak Covid-19 untuk menurunkan kurva penyebaran Covid-19. Namun demikian kebijakan *physical distancing/social distancing* berimplikasi pada pengurangan aktifitas perekonomian secara *massive*. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang terdampak Covid-19, hal tersebut mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya sektor pertanian, sektor pariwisata dan ketenagakerjaan. Pandemi Covid-19 ini yang berdampak pada sektor kesehatan dan sangat membatasi aktivitas ekonomi, sehingga berdampak pada menurunnya capaian PDRB Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020.

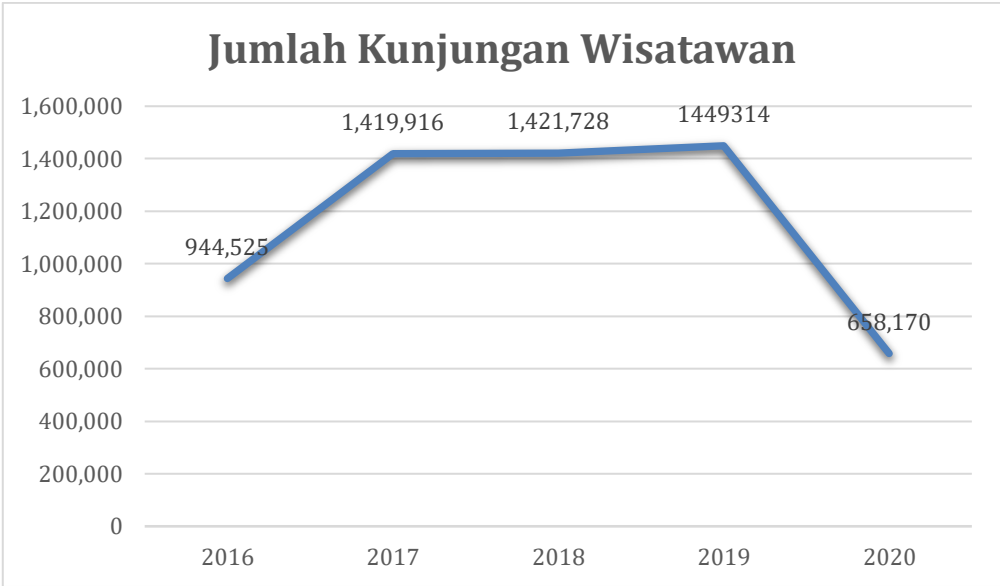
Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2020 mencapai Rp 37.446.145,35 triliun dan atas dasar harga konstan Tahun 2020 mencapai Rp 24.346.362,63 triliun. Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2020 terhadap Tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 0,99% menurun dibanding capaian Tahun 2019 besarnya 5,43%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah adalah Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar -14,98%. Adapun dari sisi Informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 26,14%. Dampak Covid-19

pada komponen PDRB ADHK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.34.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

Dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata karena adanya penutupan destinasi wisata. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara ke Kabupaten Tasikmalaya mengalami tren negatif sejak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan hanya 658.170 orang dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.449.314 orang, sehingga mengalami penurunan 54,59%. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik ke Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.35.
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Dalam mengatasi pandemi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berusaha memaksimalkan untuk mengembalikan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kehidupan masyarakat sejahtera melalui sektor-sektor pertanian dan agribisnis, peningkatan kepariwisataan, dan juga pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung keterwujudan secara maksimal pada sektor pertanian juga kepariwisataan.

2.8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 2.69.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program	Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase pemenuhan SPM PAUD	92,97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	55.210	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan	59.387	
			Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	95,5%	
			Jumlah Anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan dasar	271.087	
			Jumlah anak usia 7-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	283.857	
			Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	99,22%	
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.019	
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	1.027	
2	Bidang Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	91,25	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk
			Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	94,84	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program	Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,69	
			Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75,6	
			Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	78,02	
			Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	
			Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72,8	
			Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
			Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan sesuai standar	80,07	
			Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	
			Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	99,34	
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	81,11%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
		Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan sistem air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	48,85%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program	Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	
5	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Satuan Polisi Pamong Praja
			Pelayanan kerugian materil akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	100%	
			Pelayanan pengobatan	100%	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	52,78%	
			Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan		
			Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (balakar, satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/ atau dibawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan/perangkat daerah		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program	Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Program tanggap dan penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
			Jumlah warga Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
			Jumlah warga Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
6	Bidang Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Program Penanganan Bencana	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial		Dinas Sosial PMDP3A
			Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	
			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial		
			Terpenuhinya kebutuha dasar anak terlantar di luar panti	100	
			Persentase anak (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial		
			Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program	Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			Rehab sosial dasar tuna sosial khusus Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial		
			Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan pengemis di luar panti	100	
			Persentase % gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana di daerah Kabupaten/kota		
			Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota	100	
			Persentase (%) korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota		

Sumber : Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan daerah. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Tasikmalaya mencakup kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja keuangan masa lalu (2016-2020) maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya, berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan yang akan datang.

Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, dan juga pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Sementara itu laporan keuangan daerah lainnya yang berbasis akrual yaitu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2021. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan memperhatikan kinerja masa lalu, memperhatikan kondisi eksistensi tahun dasar, informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, rencana kebijakan kedepan serta informasi kebijakan lainnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya digunakan dengan melihat indikator pengalokasian anggaran dan realisasi anggaran baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan, melihat realisasi pertumbuhan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan yang dalam analisa ini dilakukan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir (2016-2020).

Dalam aspek akuntabilitas pelaksanaan anggaran dapat dikemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2016 -2020 mendapatkan 4 (empat) kali opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2016 tahun 2017 tahun 2019 dan tahun 2020, sedangkan pada tahun anggaran 2018 Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun, tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan. Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran. Untuk mengetahui lebih jelas maka dapat dilihat pada tabel rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 berikut :

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
Tahun 2016-2020
Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	3.220.134.392.705,00	3.358.422.634.796,00	3.590.307.028.557,00	3.914.059.952.879,00	3.750.671.647.796,67	4,01
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.013.369.975,00	413.087.952.699,00	247.955.999.553,00	267.426.198.085,00	292.933.685.532,67	20,99
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	46.641.989.248,00	57.064.136.521,00	58.426.606.032,00	67.052.357.509,00	64.449.820.115,25	8,90
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	18.932.786.745,00	23.391.726.962,00	22.516.845.168,00	10.066.201.848,00	7.684.155.102,00	-14,79
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.402.921.819,00	23.750.443.236,00	22.922.257.844,00	26.772.793.235,00	28.846.283.298,42	9,37
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.035.672.163,00	308.881.645.980,00	144.090.290.509,00	163.534.845.493,00	191.953.427.017,00	37,10
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	2.080.491.399.756,00	2.102.350.516.795,00	2.088.670.958.000,00	2.226.320.257.773,00	2.063.151.793.007,00	-0,08
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.635.748.200,00	77.425.200.795,00	71.476.136.000,00	71.949.360.000,00	114.752.174.955,00	19,02
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.467.972.525.000,00	1.442.184.968.000,00	1.451.247.063.000,00	1.508.324.968.000,00	1.403.102.763.000,00	-1,04
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	549.883.126.556,00	582.740.348.000,00	565.947.759.000,00	646.045.929.773,00	545.296.855.052,00	0,41
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	939.629.622.974,00	842.984.165.302,00	1.253.680.071.004,00	1.420.313.497.021,00	1.394.586.169.257,00	12,48
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	-	-	173.163.815.604,00	189.960.280.000,00	193.981.800.000,00	5,91
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	123.920.784.974,00	131.093.686.702,00	100.041.360.000,00	150.448.125.121,00	168.504.992.417,00	11,12
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.531.215.000,00	7.500.000.000,00	-	0,00	399.451.057.000,00	2571,82
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	545.718.850.000,00	414.243.961.600,00	624.138.243.400,00	658.077.512.800,00	632.648.319.840,00	7,04
1 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	0,00	0,00
1 . 3 . 7	Pendapatan Kepada Desa	227.458.773.000,00	290.146.517.000,00	322.586.652.000,00	390.088.434.100,00	0,00	19,89

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1 . 3 . 8	Dana Insentif Daerah	-	-	33.750.000.000,00	31.739.145.000,00	0,00	-5,96
2	BELANJA	3.537.600.671.048,00	3.536.554.745.811,00	3.672.738.856.247,00	4.085.999.370.033,00	3.955.782.149.514,85	2,97
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.128.844.003.270,50	2.117.988.422.411,00	2.143.737.486.011,00	2.299.573.872.669,00	2.345.713.529.342,17	2,50
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.467.101.349.974,27	1.344.570.965.066,70	1.422.802.280.505,00	1.450.360.330.367,30	1.305.376.222.994,17	-2,65
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	209.817.250.000,00	197.388.300.000,00	141.894.800.000,00	92.981.500.000,00	174.013.850.000,00	4,66
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	10.250.000.000,00	8.225.000.000,00	5.000.000.000,00	13.047.200.000,00	25.235.421.750,00	48,85
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.694.479.248,23	8.045.586.348,30	8.094.345.120,00	8.837.740.850,70	9.583.621.000,00	5,70
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	423.920.659.260,00	548.048.306.208,00	561.195.371.386,00	719.971.351.451,00	741.503.500.656,00	15,74
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	10.060.264.788,00	11.710.264.788,00	4.750.689.000,00	14.375.750.000,00	90.000.912.942,00	171,41
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.408.756.667.777,50	1.418.566.323.400,00	1.529.001.370.236,00	1.786.425.497.364,00	1.610.068.620.172,68	3,86
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.852.946.490,70	155.866.501.201,50	114.563.947.081,00	142.885.451.559,49	181.600.051.339,00	12,54
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.691.491.598,30	659.301.362.258,95	815.199.573.935,00	916.112.491.980,38	757.113.127.969,68	13,46
2 . 2 . 3	Belanja Modal	796.212.229.688,50	603.398.459.939,55	599.237.849.220,00	727.427.553.824,13	671.355.440.864,00	-2,81
	SURPLUS / (DEFISIT)	(317.466.278.343,00)	(178.132.111.015,00)	(82.431.827.690,00)	(171.939.417.154,00)	(205.110.501.718,18)	7,57
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	318.966.278.343,00	190.632.111.015,00	85.731.827.690,00	177.939.417.154,00	215.110.501.718,18	8,30
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	318.966.278.343,00	190.632.111.015,00	85.731.827.690,00	177.939.417.154,00	215.110.501.718,18	8,30
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan						
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-	
3 . 1 . 10	Penerimaan Investasi						
3 . 1 . 11	Penerimaan dari Investasi BUMD						
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.500.000.000,00	12.500.000.000,00	3.300.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	202,05

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan						
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	12.500.000.000,00	3.300.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	202,05
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	317.466.278.343,00	178.132.111.015,00	82.431.827.690,00	171.939.417.154,00	205.110.501.718,18	7,57
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian keuangan daerah melalui desentralisasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah khususnya potensi pendapatan asli daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Pendapatan Transfer; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Pendapatan daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi makro ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Besar kecilnya pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan suatu daerah dalam mendanai pembangunan dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 s.d 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

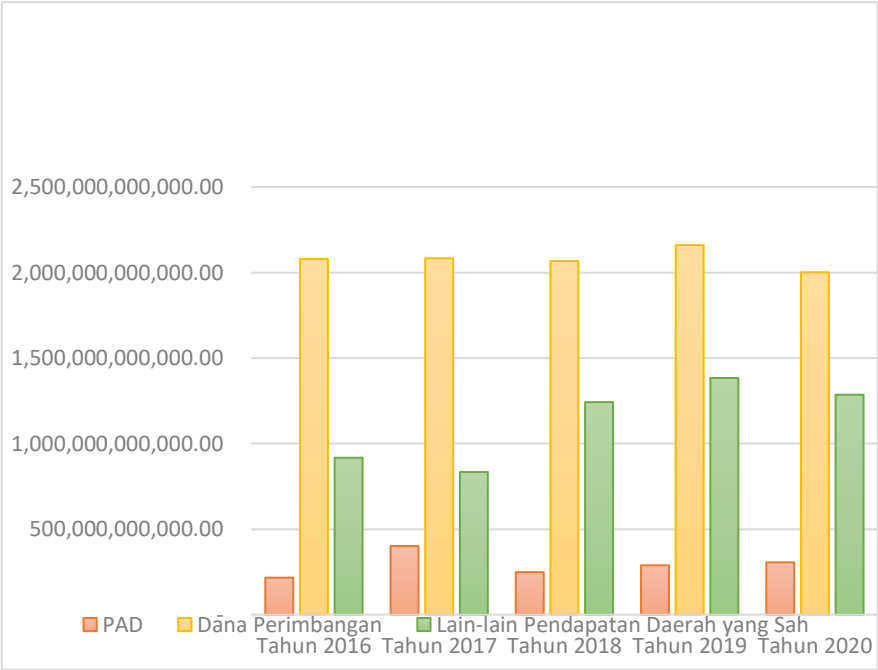
NO URUT	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.213.253.773.821,00	3.318.577.309.403,00	3.557.974.395.890,00	3.832.391.090.725,45	3.593.232.008.351,47	2,99
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	216.227.321.380,00	401.502.016.966,00	248.420.386.329,00	288.290.693.896,00	305.887.233.378,47	17,43
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	51.887.872.254,00	61.573.250.536,00	66.943.909.448,00	74.270.569.778,00	69.688.389.521,00	8,04
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	16.162.200.026,00	15.653.845.168,00	9.665.529.200,00	9.843.268.317,00	9.254.128.255,00	-11,39
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.402.921.819,00	22.235.362.895,00	23.292.566.789,00	26.780.062.955,00	29.200.666.163,00	9,44
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.774.327.281,00	302.039.558.367,00	148.518.380.892,00	177.396.792.846,00	197.744.049.439,47	29,12
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	2.079.589.818.872,00	2.083.179.479.122,00	2.067.009.180.838,00	2.160.615.166.635,00	2.001.464.118.531,00	-0,86
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75.717.223.463,00	73.251.267.974,00	65.481.928.205,00	57.273.053.225,00	85.302.380.447,00	5,64
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.467.972.525.000,00	1.442.184.968.000,00	1.451.247.063.000,00	1.508.324.968.000,00	1.381.192.559.000,00	-1,41
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	535.900.070.409,00	567.743.243.148,00	550.280.189.633,00	595.017.145.410,00	534.969.179.084,00	0,23
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	917.436.633.569,00	833.895.813.315,00	1.242.544.828.723,00	1.383.485.230.194,45	1.285.880.656.442,00	11,05
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	-	2.000.000.000,00	172.754.160.000,00	190.435.521.452,45	195.993.000.000,00	4273,97
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	120.510.157.698,00	130.732.874.072,00	138.492.730.525,00	142.797.736.155,00	147.162.587.267,00	5,15
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.531.215.000,00	7.500.000.000,00	-	0,00	399.451.057.000,00	2571,82
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	526.936.487.871,00	403.516.422.243,00	574.961.286.198,00	628.098.842.465,00	543.044.256.631,00	3,69

NO URUT	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	325.556.022,00	229.755.544,00	-29,43
1 . 3 . 7	Pendapatan Kepada Desa	227.458.773.000,00	290.146.517.000,00	322.586.652.000,00	390.088.429.100,00	0,00	19,89
1 . 3 . 8	Dana Insentif Daerah	-	-	33.750.000.000,00	31.739.145.000,00	0,00	-5,96

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

Persentase rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan diasumsikan berdasarkan perhitungan pertumbuhan pendapatan setiap tahun dibagi jumlah tahun RPJMD. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 realisasi sebesar Rp. 3.213.253.773.821 meningkat menjadi Rp. 3.318.577.309.403 pada tahun 2017, di tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 3.557.974.395.890, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 3.832.391.090.725,45 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 3.593.232.008.351,47. Pertumbuhan pendapatan daerah apabila di rata-ratakan dari tahun 2016-2020 yaitu sebesar 2,99%. Pertumbuhan tersebut didapatkan dari persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 17,43% Dana Perimbangan -0,86% dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 11,05%.

Berdasarkan sumber pendapatan yang paling dominan adalah Dana Perimbangan (dana Transfer) yang diikuti oleh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi paling sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui dana perimbangan, dana bagi hasil Pemerintah Provinsi dan bantuan keuangan. Kondisi pada tahun 2020 mengalami penurunan pada Pendapatan Daerah, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi *Covid-19* yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perkembangan dan posisi masing-masing jenis pendapatan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1
Proporsi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

Tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia berdasarkan hasil penelitian hampir seluruhnya dalam kondisi rendah, baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa, ini artinya Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Tidak terkecuali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ketergantungan pendapatan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada pemerintah pusat dan provinsi masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rp.)	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Proporsi (%)
1	2	3	4
2016	Rp3.213.253.773.821,00	Rp216.227.321.380,00	6,73
2017	Rp3.318.577.309.403,00	Rp401.502.016.966,00	12,10
2018	Rp3.557.974.395.890,00	Rp248.420.386.329,00	6,98
2019	Rp3.832.391.090.725,45	Rp288.290.693.896,00	7,52
2020	Rp3.593.232.008.351,47	Rp305.887.233.378,47	8,51
Rata-rata			8,37

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil walaupun terjadi peningkatan proporsi pada tahun ke tahunnya. Pertumbuhan rata-rata proporsi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 8,37 %. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.4
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

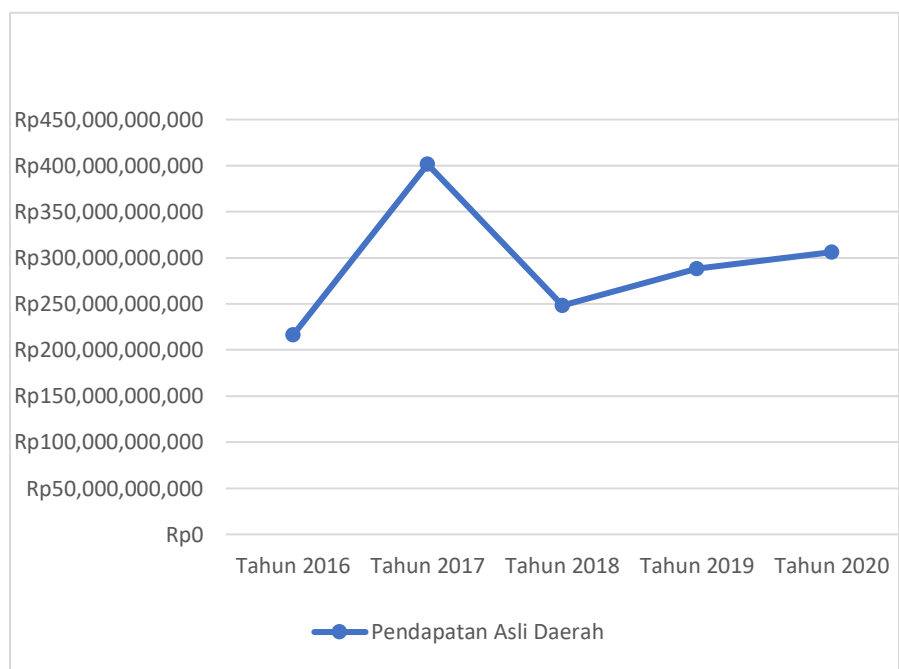
Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	2	3
2016	Rp216.227.321.380	15,95
2017	Rp401.502.016.966	85,69
2018	Rp248.420.386.329	-38,13
2019	Rp288.290.693.896	16,05
2020	Rp305.887.233.378	6,10

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi PAD mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Terdapat peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2017 hal tersebut dikarenakan terdapat Dana BOS yang diakui sebagai PAD. Sedangkan

pada tahun 2018 Dana BOS secara administratif sudah tidak dialokasikan pada akun PAD sehingga terdapat penurunan yang signifikan yaitu tingkat pertumbuhannya negatif (38,13%). Pada tahun 2019 PAD Kab. Tasikmalaya mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 16,05 % namun pada tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid-19 mempengaruhi keberhasilan memperoleh PAD sehingga PAD pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pertumbuhannya 6,10% jika dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PAD dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.2
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Sumber : Laporan Keuangan APBD Kab. Tasikmalaya

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran

yang tidak akan diperoleh pembayarannya oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung yang meliputi :
 - 1.1 Belanja Pegawai;
 - 1.2 Belanja Bunga;
 - 1.3 Belanja Subsidi;
 - 1.4 Belanja Hibah;
 - 1.5 Belanja Bantuan Sosial;
 - 1.6 Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa;
 - 1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa;
 - 1.8 Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung meliputi :
 - 2.1 Belanja Pegawai;
 - 2.2 Belanja Barang dan Jasa;
 - 2.3 Belanja Modal.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Alokasi anggaran belanja Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini :

Tabel 3.5
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

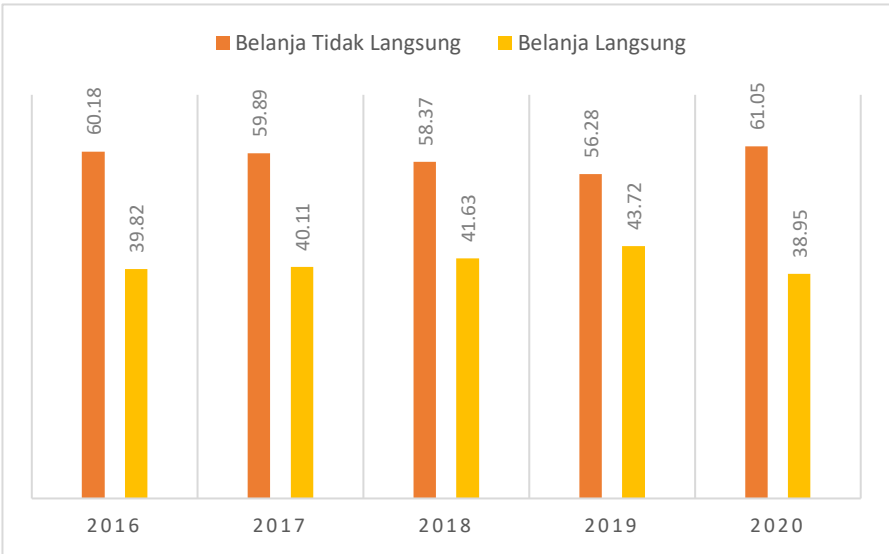
NO URUT	URAIAN	2016	2017	2018	2019	DESEMBER 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	3.340.087.941.149,00	3.410.282.766.639,00	3.463.237.132.515,00	3.794.194.780.061,27	3.687.570.197.190,69	2,60
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.057.506.834.931,00	2.084.765.322.166,00	2.064.534.957.151,00	2.161.509.659.423,00	2.251.246.485.146,00	2,30
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.419.277.655.501,00	1.318.193.852.591,00	1.350.764.619.830,00	1.363.770.494.730,00	1.255.770.646.175,00	-2,90
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	192.973.250.000,00	194.908.912.585,00	139.136.643.200,00	89.373.875.000,00	170.518.750.000,00	6,85
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	6.089.900.000,00	5.678.800.000,00	3.226.209.000,00	5.767.750.000,00	17.549.102.582,00	58,28
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.789.921.000,00	7.144.121.898,00	7.244.858.572,00	8.392.437.750,00	9.024.599.000,00	7,50
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	423.531.712.430,00	547.975.382.192,00	560.460.109.349,00	692.744.031.943,00	708.612.426.120,00	14,39
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	8.844.396.000,00	10.864.252.900,00	3.702.517.200,00	1.461.070.000,00	89.770.961.269,00	1485,14
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.282.581.106.218,00	1.325.517.444.473,00	1.398.702.175.364,00	1.632.685.120.638,27	1.436.323.712.044,69	3,39
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.123.958.423,00	144.800.797.218,00	108.022.110.761,00	132.056.621.652,00	176.993.966.122,00	14,44
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	431.346.864.143,00	614.586.422.893,00	765.837.783.536,00	863.720.504.270,27	692.088.685.806,69	15,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	737.110.283.652,00	566.130.224.362,00	524.842.281.067,00	636.907.994.716,00	567.241.060.116,00	-5,02

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas Komponen Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak semua komponen belanja mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung memiliki rata rata pertumbuhan positif walaupun masih ada yang mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi adalah pada komponen belanja tidak langsung yaitu Belanja Tidak Terduga sebesar 1485,14%. Nilai rata-rata yang sangat tinggi ini terjadi karena adanya peningkatan anggaran untuk penanggulangan pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat sebagai kebijakan Nasional. Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.461.070.000,00 meningkat menjadi Rp. 89.770.961.269,00 apabila dipersentasikan pertumbuhannya yaitu sebesar 6044,14%.

Pengalokasian anggaran merupakan salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembangunan yang dilakukan pada wilayahnya baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program/kegiatan sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program/kegiatan. Belanja pemerintah selama periode 2016-2020 jika dilihat dari proporsi anggaran belanja langsung maupun tidak langsung, proporsi belanja tidak langsung dapat ditekan tidak melebihi 70% dari keseluruhan belanja daerah.

Proporsi belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini:



Gambar 3.3
Proporsi Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas rata-rata Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 59,15% sedangkan rata-rata Proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 40,85%.

3.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Realisasi pembiayaan bersumber dominan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), selama ini belum dilakukan pinjaman daerah kecuali dilakukan oleh BLUD untuk menutup arus kas jangka pendek, sedangkan pengeluaran pembiayaan mengikuti ketentuan amanat peraturan daerah tentang penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2016 sebesar Rp. 318.966.278.343,00 menurun pada tahun 2017 menjadi Rp. 190.632.111.015,00 begitupun pada tahun 2018 SiLPA juga mengalami penurunan menjadi Rp. 86.426.653.779,00. Sedangkan pada tahun 2019 penerimaan pembiayaan Daerah mengalami kenaikan menjadi Rp. 221.626.968.161,57 kenaikan tersebut didapat dari SiLPA yang mengalami kenaikan ditambah adanya penerimaan pinjaman Daerah sebesar Rp. 43.687.551.007,57 SiLPA pada tahun 2020 kembali menjadi Rp. 215.110.501.718,18 perkembangan realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

NO URUT	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
3	PEMBIAYAAN DAERAH					-
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	318.966.278.343,00	190.632.111.015,00	86.426.653.779,00	221.626.968.161,57	215.110.501.718,18
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	318.966.278.343,00	190.632.111.015,00	86.426.653.779,00	177.939.417.154,00	215.110.501.718,18
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan					-
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	43.687.551.007,57	-
3 . 1 . 10	Penerimaan Investasi					-
3 . 1 . 11	Penerimaan dari Investasi BUMD					-
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.500.000.000,00	12.500.000.000,00	3.224.500.000,00	44.712.777.107,57	2.974.773.900,00
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan					-
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	12.500.000.000,00	3.224.500.000,00	4.000.000.000,00	-
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	40.712.777.107,57	2.974.773.900,00
	PEMBIAYAAN NETTO	317.466.278.343,00	178.132.111.015,00	83.202.153.779,00	176.914.191.054,00	212.135.727.818,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	190.632.111.015,00	86.426.653.779,00	177.939.417.154,00	215.110.501.718,18	117.797.538.978,96

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, serta ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Rata-rata neraca daerah pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	
1.1.1.	Kas di Kas Daerah	5,95
1.1.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	98,23
1.1.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	19,43
1.1.1.3.	Kas di BLUD	438,80
1.1.1.4.	Kas di Bendahara FKTP	(27,64)
1.1.1.5.	Kas di Bendahara BOS	325,78
1.1.1.6.	Kas Lainnya	(18,37)
1.1.2.	Piutang Pendapatan	48,29
1.1.2.1.	Piutang Lainnya	(6,12)
1.1.2.2.	Penyisihan Piutang	58,73
1.1.2.3.	Beban Dibayar Dimuka	2.315,97
1.1.3.	Persediaan	11,04
	JUMLAH ASET LANCAR	5,53
1.1.4.	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1.1.4.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
1.1.4.2.	Investasi Non Permanen Lainnya	(2,25)
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(2,25)
1.1.5.	Investasi Jangka Panjang Permanen	
1.1.5.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4,19
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	4,19
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1,95
1.2.	ASET TETAP	
1.2.1.	Tanah	0,49
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	21,36
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	8,45
1.2.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8,36
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	17,56
1.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,25
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan	16,03

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
	JUMLAH ASET TETAP	7,75
1.2.8.	DANA CADANGAN	
1.2.8.1.	Dana Cadangan	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00
1.3.	ASET LAINNYA	
1.3.1.	Tagihan Jangka Panjang	28,97
1.3.2.	Aset Tidak Berwujud	(42,55)
1.3.3.	Aset Lain-lain	22,38
	JUMLAH ASET LAINNYA	13,20
	JUMLAH ASET	6,19
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	175,80
2.1.2.	Pendapatan Diterima Dimuka	34,79
2.1.3.	Utang Beban	22,74
2.1.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	53.151,88
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,42
2.1.4.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2.1.4.1.	Utang Dalam Negeri	0,00
2.1.4.2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	15,42
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS	6,15
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6,19

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020

Selanjutnya kinerja neraca daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam 5 (tiga) tahun terakhir (2016-2020) sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	URAIAN	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR						
1.1.1.	Kas di Kas Daerah	177.296.352.737,00	75.110.327.599,00	158.417.557.265,00	181.566.593.474,00	101.515.473.396,00	5,95
1.1.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.089.367,00	0,00	29.860.488,00	1.850.647,00	98,23
1.1.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	34.463.048,00	55.056.615,00	64.957.226,00	0,00	0,00	19,43
1.1.1.3.	Kas di BLUD	1.570.244.015,00	599.098.050,00	11.537.835.095,00	11.981.812.072,00	10.463.993.913,78	438,80
1.1.1.4.	Kas di Bendahara FKTP	11.794.624.760,00	11.063.851.735,00	7.291.803.533,00	5.794.476.075,00	2.912.709.073,00	(27,64)
1.1.1.5.	Kas di Bendahara BOS		951.893.793,99	1.070.862.101,45	15.767.620.097,18	2.871.573.599,18	325,78
1.1.1.6.	Kas Lainnya	1.926.171.490,25	0,00	0,00	2.306.035.063,00	2.917.462.491,00	(18,37)
1.1.2.	Piutang Pendapatan	20.749.138.008,00	18.331.930.542,00	19.243.988.603,00	41.993.482.265,30	76.261.099.602,08	48,29
1.1.2.1.	Piutang Lainnya	109.493.000,00	98.293.000,00	92.293.000,00	96.293.000,00	84.293.000,00	(6,12)
1.1.2.2.	Penyisihan Piutang	-329.094.402,00	-338.305.652,00	-345.900.865,00	-666.414.053,00	(1.580.963.433,00)	58,73
1.1.2.3.	Beban Dibayar Dimuka	116.627.837,00	10.996.212.756,00	128.711.075,00	217.968.464,88	141.440.683,83	2.315,97
1.1.3.	Persediaan	24.511.144.455,00	35.298.647.313,00	37.450.829.967,00	35.311.386.674,10	35.233.161.557,90	11,04
	JUMLAH ASET LANCAR	237.779.164.948,25	152.172.095.118,99	234.952.937.000,45	294.399.113.620,46	230.822.094.530,77	5,53
1.1.4.	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.1.4.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
1.1.4.2.	Investasi Non Permanen Lainnya	2.097.356.851,34	2.238.337.665,00	1.816.579.150,45	2.268.303.805,31	1.775.233.875,00	(2,25)

No	URAIAN	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2.097.356.851,34	2.238.337.665,00	1.816.579.150,45	2.268.303.805,31	1.775.233.875,00	(2,25)
1.1.5.	Investasi Jangka Panjang Permanen						
1.1.5.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	129.747.856.284,42	152.314.824.401,67	163.747.198.044,67	149.800.068.192,44	150.385.251.010,94	4,19
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	129.747.856.284,42	152.314.824.401,67	163.747.198.044,67	149.800.068.192,44	150.385.251.010,94	4,19
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	131.845.213.135,76	154.553.162.066,67	165.563.777.195,12	152.068.371.997,75	152.160.484.885,94	1,95
1.2.	ASET TETAP						
1.2.1.	Tanah	490.994.462.934,94	472.795.652.926,62	491.505.373.631,72	497.272.605.881,72	499.950.331.481,72	0,49
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	711.392.825.188,65	777.097.144.307,91	991.418.726.393,26	1.227.418.886.090,46	1.531.907.816.120,24	21,36
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	1.098.338.750.806,06	1.178.693.271.335,34	1.306.509.777.972,06	1.424.291.582.121,77	1.518.437.109.622,77	8,45
1.2.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.952.743.052.627,00	2.253.088.875.701,00	2.451.346.342.625,20	2.615.066.513.542,20	2.682.252.012.091,20	8,36
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	113.901.381.814,35	133.243.172.789,14	164.684.102.915,43	196.817.092.019,41	216.822.194.750,98	17,56
1.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	210.676.044.978,00	210.676.044.978,00	200.869.044.745,67	221.090.497.908,67	229.030.493.644,67	2,25
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan	-1.196.012.036.144,00	-1.562.157.033.319,94	-1.619.614.760.574,36	-1.920.932.253.057,20	(2.136.659.991.362,20)	16,03
	JUMLAH ASET TETAP	3.382.034.482.205,00	3.463.437.128.718,07	3.986.718.607.708,98	4.261.024.924.507,03	4.541.739.966.349,38	7,75
1.2.8.	DANA CADANGAN						
1.2.8.1.	Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	ASET LAINNYA						
1.3.1.	Tagihan Jangka Panjang	175.735.290,00	146.778.250,00	271.847.438,75	337.331.714,35	415.056.714,35	28,97
1.3.2.	Aset Tidak Berwujud	97.567.001.106,50	17.313.032.677,25	18.992.232.672,25	11.699.114.860,75	4.767.116.967,75	(42,55)
1.3.3.	Aset Lain-lain	209.620.297.467,76	163.632.219.352,70	456.700.894.448,06	471.847.364.621,10	136.980.835.063,00	22,38

No	URAIAN	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JUMLAH ASET LAINNYA	307.363.033.864,26	181.092.030.279,95	475.964.974.559,06	483.883.811.196,20	142.163.008.745,10	13,20
	JUMLAH ASET	4.059.021.894.153,27	3.951.254.416.183,68	4.863.200.296.463,61	5.191.376.221.321,44	5.066.885.554.511,19	6,19
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	63.573.545,00	55.056.615,00	64.957.226,00	510.975.770,00	572.188.278,00	175,80
2.1.2.	Pendapatan Diterima Dimuka	237.592.425,00	268.698.031,72	278.160.585,64	316.152.375,97	660.372.900,42	34,79
2.1.3.	Utang Beban	24.773.409.656,00	22.604.865.024,00	26.133.831.106,00	16.854.815.430,00	37.016.258.634,74	22,74
2.1.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.112.476,00	6.620.071.256,00	6.627.436.456,00	11.926.474.296,59	3.909.267.146,00	53.151,88
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.077.688.102,00	29.548.690.926,72	33.104.385.373,64	29.608.417.872,56	42.158.086.959,16	15,42
2.1.4.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						0,00
2.1.4.1.	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	25.077.688.102,00	29.548.690.926,72	33.104.385.373,64	29.608.417.872,56	42.158.086.959,16	15,42
3.	EKUITAS DANA						
3.1.	EKUITAS	4.033.944.206.051,27	3.921.705.725.256,96	4.830.095.911.089,97	5.161.767.803.448,88	5.024.727.467.552,03	6,15
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.059.021.894.153,27	3.951.254.416.183,68	4.863.200.296.463,61	5.191.376.221.321,44	5.066.885.554.511,19	6,19

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset lainnya yang selama periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,19% untuk total aset daerah. Sedangkan aset lancar mengalami pertumbuhan sebesar 5,53%, aset tetap 7,75% dan aset lainnya 13,20%.

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban jangka pendek (jangka waktu maksimal 1 tahun) dan kewajiban jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang antara lain utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,42% dengan pertumbuhan untuk masing-masing jenis kewajiban antara lain kewajiban jangka pendek tumbuh rata-rata sebesar 15,42% sedangkan untuk kewajiban jangka panjang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,15%.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi berikut ini : 1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana

Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/pemerintah daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan penerimaan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan kelembagaan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan OPD Penghasil;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan serta administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah
8. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2026 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya;
2. Meningkatkan pendapatan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB dan Pajak Restoran
3. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan lebih pendapatan daerah melalui sistem dan prosedur yang lebih efisien, misal optimalisasi pembayaran secara online, optimalisasi alat rekam pendeteksi pajak restoran, SMS Gateway dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan lainnya.
5. Pembenahan manajemen penerimaan PAD
6. Melakukan pendataan atas potensi pajak dan retribusi daerah
7. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga teknis
8. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
9. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi

hasil BUMD juga dilakukan melalui pembentukan BUMD baru sebagai *holding company* sektor usaha BUMD;

10. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
11. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan lainnya melalui dana CSR;
12. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:

- a. Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan pihak swasta melalui perjanjian yang disepakati
- b. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
- d. Optimalisasi Pelaksanaan Perijinan Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
- e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya

- dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
2. Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
 3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
 4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 6. Penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas;
 7. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
 8. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum dan infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
 9. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis pedesaan melalui gerakan membangun desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
 10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan.

11. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengalokasikan dana kepada Desa sesuai ketentuan;
- c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang program kegiatan urusan wajib dan pilihan;
- e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus

dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Namun apabila dipandang perlu melakukan pinjaman daerah untuk kegiatan yang produktif, ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana disajikan di atas dipandang memungkinkan untuk itu.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja pegawai yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

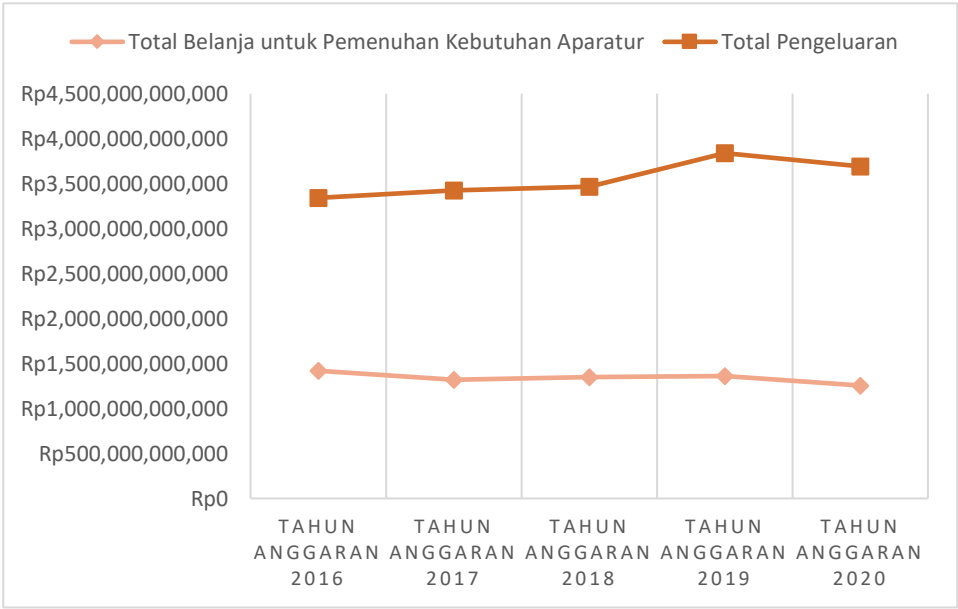
Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun anggaran 2016	1.419.277.655.501,00	3.341.587.941.149,00	42,47
2	Tahun anggaran 2017	1.318.193.852.591,00	3.422.782.766.639,00	38,51
3	Tahun anggaran 2018	1.350.764.619.830,00	3.466.461.632.515,00	38,97
4	Tahun anggaran 2019	1.363.770.494.730,00	3.838.907.557.168,84	35,52
5	Tahun anggaran 2020	1.255.770.646.175,00	3.690.544.971.090,69	34,03

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 3.9 diatas proporsi belanja pemenuhan kebutuhan terhadap total pengeluaran mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2020, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.436.323.712.044,69. Rata-rata belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2016-2020 sebesar Rp. 1.341.555.453.765,40 dan rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 3.499.759.625.816,24 dengan rata-rata proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) sebesar 38,42%. Untuk lebih jelasnya proporsi belanja langsung terhadap total pengeluaran dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 3.4
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan terhadap Total Pengeluaran Tahun 2016-2020

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang

perlu dibayar pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan netto dalam struktur APBD dipergunakan untuk menutup anggaran yaitu selisih kurang antara pendapatan dikurangi belanja. Pembiayaan netto adalah penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : Silpa, Pencairan dana cadangan dan penerimaan investasi, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.

Defisit riil menggambarkan realisasi total pengeluaran yang terdiri dari realisasi belanja dan realisasi pengeluaran pembiayaan yang ditutup dari realisasi pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2018 dan 2019 realisasi pendapatan daerah mampu menutupi realisasi belanja daerah dan realisasi pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada tahun 2016-2017 dan tahun 2020 realisasi pendapatan tidak mampu menutupi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sehingga terjadi yang harus ditutup.

Kondisi defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 2016-2020 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

NO URUT	URAIAN	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.213.253.773.821,00	3.318.577.309.403,00	3.557.974.395.890,00	3.832.391.090.725,45	3.593.232.008.351,47
2	Belanja Daerah	3.340.087.941.149,00	3.410.282.766.639,00	3.463.237.132.515,00	3.794.194.780.061,27	3.687.570.197.190,69
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	12.500.000.000,00	3.224.500.000,00	44.712.777.107,57	2.974.773.900,00
4	Defisit Riil	(128.334.167.328,00)	(104.205.457.236,00)	91.512.763.375,00	(6.516.466.443,39)	(97.312.962.739,22)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020 (diolah)

Komposisi penutup defisit riil anggaran pada kurun waktu tahun 2016-2020 digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

NO URUT	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun Anggaran sebelumnya	318.966.278.343,00	190.632.111.015,00	86.426.653.779,00	177.939.417.154,00	215.110.501.718,18
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	43.687.551.008	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Daerah Pembiayaan	318.966.278.343,00	190.632.111.015,00	86.426.653.779,00	221.626.968.161,57	215.110.501.718,18
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	190.632.111.015,00	86.426.653.779,00	177.939.417.154,00	215.110.501.718,18	117.797.538.978,96

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu empat tahun terakhir (2016-2019) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	318.966.278.343,00	100,00	190.632.111.015,00	100,00	86.426.653.779,00	100,00	177.939.417.154,00	100,00	215.110.501.718,18	100,00
1	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelampauan Penerimaan Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan Pembiayaan Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Neto	317.466.278.343,00	99,53	178.132.111.015,00	93,44	83.202.153.779,00	96,27	176.914.191.054,00	99,42	212.135.727.818,18	98,62
8	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar pada satu tahun anggaran. Untuk mendapatkan gambaran kapasitas kemampuan keuangan terlebih dahulu memproyeksikan belanja wajib dan mengikat yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun dimasa yang akan datang.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan tersebut dapat dihitung dari trend capaian keuangan pada periode sebelumnya dan juga dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang akan dihadapi. Hal, tersebut dilakukan agar mendapatkan nilai perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai. Dalam melakukan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2021-2026 terdapat perubahan struktur pendapatan, dibandingkan dengan tahun RPJMD sebelumnya. Struktur pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan

kemampuan Pendapatan Daerah. Trend pertumbuhan dalam 5 (lima) tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan sepenuhnya sebagai acuan tunggal karena keadaan yang tidak menentu di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, sehingga selain menggunakan proyeksi yang sesuai dengan trend pertumbuhan juga memperhatikan kebijakan ekonomi regional dan arah kebijakan nasional, keadaan atau kondisi tahun dasar, rencana kebijakan kedepan, serta dengan upaya peningkatan kualitas keuangan daerah. Proyeksi yang digunakan merupakan asumsi proyeksi optimis telah terkendalinya pandemi Covid-19 disertai tumbuhnya ekonomi Nasional. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yaitu 7,92 % terdiri dari pertumbuhan PAD 11,51% pendapatan transfer 7,94% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,54%. Berikut ini proyeksi pendapatan daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2021-2026
Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Uraian	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2026 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN DAERAH	3.493.135.437.407	4.054.039.336.259	4.289.898.336.613	4.542.107.945.807	4.808.332.124.547	5.096.366.962.076	7,92
1.1	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	333.496.428.005	433.973.498.547	463.573.896.139	495.319.304.164	529.360.397.911	565.868.756.626	11,51
1.1.1.	Pajak Daerah	86.485.825.000	90.818.764.833	95.459.603.715	100.404.411.188	105.665.602.334	111.265.879.258	5,17
1.1.2.	Retribusi Daerah	9.374.182.998	10.030.375.808	10.732.502.114	11.483.777.262	12.287.641.671	13.147.776.588	7,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.446.283.298	31.290.911.628	34.420.002.791	37.862.003.070	41.648.203.377	45.813.023.714	10,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	209.190.136.709	301.833.446.279	322.961.787.518	345.569.112.644	369.758.950.530	395.642.077.067	14,46
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.961.236.609.402	3.412.058.289.712	3.623.085.031.514	3.845.226.684.504	4.079.498.530.354	4.327.035.545.242	7,94
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.483.638.111.000	2.607.820.016.550	2.738.211.017.378	2.875.121.568.246	3.018.877.646.659	3.169.821.528.992	5,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah*	477.598.498.402	804.238.273.162	884.874.014.137	970.105.116.257	1.060.620.883.696	1.157.214.016.250	21,30
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.402.400.000	208.007.548.000	203.239.408.960	201.561.957.139	199.473.196.282	203.462.660.208	0,54
1.3.1.	Pendapatan Hibah	14.120.000.000	20.039.500.000	11.512.000.000	6.000.000.000	0	0	-0,13
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	184.282.400.000	187.968.048.000	191.727.408.960	195.561.957.139	199.473.196.282	203.462.660.208	2,00
	Jumlah Pendapatan	3.493.135.437.407	4.054.039.336.259	4.289.898.336.613	4.542.107.945.807	4.808.332.124.547	5.096.366.962.076	7,92

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026

Pengeluaran periodik yang bersifat wajib dan mengikat pemerintah daerah yang dibebankan pada keuangan daerah selama lima tahun kedepan tahun 2021-2026 memperlihatkan kondisi seperti berikut :

Tabel 3.14
Proyeksi dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
A	Belanja Operasi	1.529.854.753.709,00	1.626.183.711.278,63	1.651.071.413.478,13	1.678.631.069.783,60	1.706.732.146.811,50	1.736.604.737.274,20	2,58
1	Belanja Pegawai	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	0,00
2	Belanja Kegiatan Administrasi Umum	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	0,00
3	Belanja Hibah Parpol	1.382.217.000,00	1.382.217.000,00	1.382.217.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	16,17
4	Belanja BLUD	209.190.136.709,00	301.833.446.278,63	322.961.787.518,13	345.569.112.644,40	369.758.950.529,51	395.642.077.066,58	14,46
5	Belanja BOS	184.282.400.000,00	187.968.048.000,00	191.727.408.960,00	195.561.957.139,20	199.473.196.281,98	203.462.660.207,62	2,00
B	Belanja Transfer	667.137.906.663,00	700.514.981.287,48	735.572.573.273,56	772.391.438.653,12	811.060.469.556,93	811.060.469.556,93	4,00
1	Belanja Bagi Hasil	10.089.645.663,00	10.614.307.237,48	11.176.865.521,06	11.775.945.512,99	12.414.201.759,80	13.094.500.016,23	5,35
2	Alokasi Dana Desa	254.160.600.000,00	266.868.630.000,00	280.212.061.500,00	294.222.664.575,00	308.933.797.803,75	324.380.487.693,94	5,00
3	Dana Desa	402.887.661.000,00	423.032.044.050,00	444.183.646.252,50	466.392.828.565,13	489.712.469.993,38	514.198.093.493,05	5,00
C	Pembiayaan Pengeluaran	17.500.000.000,00	91.500.000.000,00	98.000.000.000,00	38.000.000.000,00	26.500.000.000,00	15.000.000.000,00	59,99
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-	-	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang			11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	-	0,00

No	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	30.000.000.000,00	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	68,67
4	Pemberian Pinjaman	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	-	-	0,00
	TOTAL	2.214.492.660.372,00	2.418.198.692.566,11	2.484.643.986.751,70	2.489.022.508.436,72	2.544.292.616.368,42	2.562.665.206.831,13	3,01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026

Pada proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk tahun 2021-2026 terdiri dari belanja operasi, belanja transfer dan pembiayaan pengeluaran. Belanja operasi yang bersifat wajib mengikat meliputi belanja pegawai, belanja kegiatan administrasi umum/*fixed cost*, belanja hibah parpol, belanja BLUD dan belanja BOS. Belanja Transfer terdiri dari belanja bagi hasil, alokasi dana desa dan dana desa serta pada pembiayaan pengeluaran berasal dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Rata-rata pertumbuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2021-2026 sebesar 3,01%. Proyeksi belanja pegawai akan sangat tergantung pada kebijakan pengelolaan SDM pada proyeksi wajib dan mengikat belanja pegawai diproyeksikan tetap setiap tahunnya, dengan asumsi pertumbuhan pegawai nol (*zero growth*) tidak ada kebijakan kenaikan gaji oleh pemerintah pusat.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Pada tabel 3.14 diatas dijadikan bahan untuk dapat memproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 mendatang, sebagai berikut :

Tabel 3.15
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi						Rata-rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pendapatan	3.493.135.437.407,00	4.054.039.336.259,09	4.289.898.336.612,71	4.542.107.945.807,08	4.808.332.124.547,44	5.096.366.962.076	7,92
2	Pencairan Dana Cadangan	-	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	-	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	35.000.000.000,00	31.500.000.000,00	28.350.000.000,00	25.515.000.000,00	22.963.500.000,00	20.667.150.000	(10,00)
	Total Penerimaan	3.528.135.437.407,00	4.085.539.336.259,09	4.318.248.336.612,71	4.667.622.945.807,08	4.831.295.624.547,44	5.117.034.112.076	6,27
	Dikurangi :							
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	2.214.492.660.372,00	2.418.198.692.566,11	2.484.643.986.751,70	2.489.022.508.436,72	2.544.292.616.368,42	2.562.665.206.831	3,01
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.313.642.777.035,00	1.667.340.643.692,98	1.833.604.349.861,01	2.178.600.437.370,36	2.287.003.008.179,02	2.554.368.905.245	14,48

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026

Kapasitas kemampuan keuangan riil tumbuh positif dengan besaran bervariasi setiap tahun, perhitungan ini berdasarkan agregat dari proyeksi pendapatan yang tumbuh positif yang dikurangi dengan komponen belanja wajib mengikat yang diproyeksikan tidak menurun, besaran belanja wajib mengikat dimaksud didominasi oleh belanja pegawai dengan asumsi tidak terdapat perubahan jumlah maupun kebijakan kenaikan gaji pegawai (*Zero Growth*), di sisi lain proyeksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran diproyeksikan semakin menurun sebagai indikator meningkatnya kualitas penyerapan anggaran dan matangnya perencanaan.

Beberapa catatan dari proyeksi kapasitas kemampuan keuangan riil di atas adalah bahwa pendapatan yang tumbuh positif masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dan provinsi sehingga tercapai atau tidaknya di masa yang akan datang sangat bergantung pada kebijakan para pihak dimaksud, di sisi lain besaran tersebut belum memperhitungkan SiLPA untuk kegiatan lanjutan yang berkontribusi besar terhadap belanja daerah dengan menambah jumlah pengeluaran pembiayaan daerah untuk menunjang pembangunan.

Kapasitas kemampuan keuangan riil Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat semakin besar dengan cara meningkatkan pendapatan yang berdasarkan analisis di atas masih sangat tergantung pada pemerintah pusat serta kebijakan pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, disisi lain perlu menekan belanja wajib mengikat seperti dengan cara mengendalikan jumlah pegawai atau meningkatkan efektivitas kelembagaan.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai:

- a. Rencana alokasi prioritas I, yakni berkaitan dengan kewajiban yang harus dialokasikan sebagai konsekuensi penganggaran dari pemerintah pusat dan/atau dana daerah urusan bersama. Alokasi prioritas diperuntukan bagi belanja yang bersumber dari DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi. Dikelompokkan menjadi prioritas 1

karena ikatan sumber data yang diprioritaskan harus dianggarkan sesuai dengan ketentuan pemberi bantuan. Program kegiatan yang diusulkan harus merupakan kegiatan terencana yang prioritas. Seperti belanja pemenuhan mandat perundang-undangan yaitu prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dari belanja daerah dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Prioritas Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil	1.313.642.777.035,00	1.667.340.643.692,98	1.833.604.349.861,01	2.178.600.437.370,36	2.287.003.008.179,02	2.554.368.905.244,63
2	Prioritas I	898.000.000.000,00	1.227.900.000.000,00	1.309.295.000.000,00	1.392.259.750.000,00	1.476.872.737.500,00	1.563.216.374.375,00
	1. DAK	598.000.000.000,00	627.900.000.000,00	659.295.000.000,00	692.259.750.000,00	726.872.737.500,00	763.216.374.375,00
	2. Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000.000,00	600.000.000.000,00	650.000.000.000,00	700.000.000.000,00	750.000.000.000,00	800.000.000.000,00
3	Prioritas II	415.642.777.035,00	439.440.643.692,98	524.309.349.861,01	786.340.687.370,36	810.130.270.679,02	991.152.530.869,63

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026

b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah serta alokasi amanat/kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana.

Prioritas II juga tetap diarahkan terhadap pemenuhan mandat perundang-undangan jika pada prioritas I belum terpenuhi yaitu prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen) serta *earmarking* belanja infrastruktur 25 % dari dana transfer umum (disesuaikan dengan amanat perundangan yang berlaku).

Selain itu program prioritas II berhubungan langsung dengan kepentingan publik, kegiatan yang memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diatas maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada urutan prioritas.
2. Meningkatkan kemandirian dan kualitas desentralisasi fiskal khususnya desentralisasi pendapatan.
3. Perlunya peningkatan keberansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui kemitraan pemerintah dan sektor swasta (*public private partnership*) maupun optimalisasi *corporate social responsibility* (CSR).
4. Jika dipandang perlu melakukan pinjaman daerah untuk mendanai sektor pembangunan infrastruktur yang produktif dan mendesak harus dilakukan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Dasar identifikasi permasalahan pembangunan daerah adalah tujuan pembangunan daerah yang ditegaskan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 258 ayat 1, yaitu:

1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
2. Kesempatan Kerja;
3. Lapangan Berusaha;
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik; dan
5. Daya Saing Daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun mendatang.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat

perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pembangunan daerah, sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Kekurangan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
 - Kondisi kekurangan guru menurut Neraca Pendidikan Tahun 2019 di tingkat Sekolah Dasar Negeri sebanyak 1.218 orang sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 1.282 orang dan di Sekolah Menengah Pertama Swasta sebanyak 690 orang.
 - Kebutuhan Kepala Sekolah menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2020 di jenjang Sekolah Dasar sebanyak 343 orang sedangkan di jenjang Sekolah Menengah Pertama sebanyak 17 orang.
 - Kebutuhan Pengawas Sekolah di jenjang Sekolah Dasar menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2020 sebanyak 60 orang sedangkan di jenjang Sekolah Menengah Pertama 8 orang .

- b. Belum maksimalnya APK PAUD dan APK/APM SMP.

Berdasarkan Data APK dan APM PAUD, SD dan SMP yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud RI Tahun 2020, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Tasikmalaya adalah 44,08%. capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik berturut-turut adalah 101,97% dan 97,23%. Sementara itu untuk Angka

Partisipasi Kasar (APK) SMP sebesar 92,67% dan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP baru mencapai 80,43%.

- c. Masih banyaknya ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat baik PAUD, SD maupun SMP.

Berdasarkan Neraca Pendidikan :

1. Tingkat PAUD, kondisi rusak sedang sebanyak 152 ruang sedangkan rusak berat dan rusak total sebanyak 146 ruang.
2. Tingkat Sekolah Dasar, kondisi rusak ringan sebanyak 4.187 ruang (59,72%), kondisi rusak sedang sebanyak 1.732 ruang (24,790), sedangkan kondisi rusak berat dan total sebanyak 780 ruang (11,13%)
3. Tingkat Sekolah Menengah Pertama, kondisi ruang kelas rusak ringan sebanyak 1.560 ruang (61,81%) kondisi rusak sedang sebanyak 391 ruang (15,49%), sedangkan kondisi rusak berat dan total sebanyak 98 ruang (3,88%).

- d. Masih kurangnya ruang perpustakaan SMP dalam kondisi baik. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2020, dari 265 Ruang Perpustakaan SMP yang kondisi baik sebanyak 36 ruang (13,58%), kondisi rusak ringan 162 ruang (61,13%), dan kondisi rusak sedang dan berat sebanyak 47 ruang (17,73%).

- e. Masih rendahnya persentase pendidik TK dan SD yang memiliki sertifikasi.

Berdasarkan Neraca Pendidikan Tahun 2019, persentase pendidik TK yang telah bersertifikasi sebanyak 59%, sedangkan di tingkat SD sebanyak 62,9%.

- f. Masih rendahnya kesadaran melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan Neraca Pendidikan Tahun 2019, angka putus sekolah di jenjang SD sebanyak 28 orang, sedangkan untuk jenjang SMP sebanyak 79 orang.

- g. Kualitas pendidikan belum merata.

Ini bisa di lihat dari perbandingan Indeks Pemerataan Guru PNS, berdasarkan Neraca Pendidikan di tingkat SD guru kelas sebesar 0,22 sedangkan guru mata pelajaran 0,44. Untuk di tingkat SMP guru UN sebesar 0,43 sedangkan guru mata pelajaran 0,61.

2. Kesehatan

- a. Masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Ibu akibat melahirkan.

Berdasarkan capaian realisasi Tahun 2020, Angka Kematian Bayi sebanyak 5 orang per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Ibu capaian realisasi Tahun 2020 sebanyak 75 orang per 100.000 kelahiran hidup.

- b. Rendahnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat. Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2020, jumlah kecamatan dengan cakupan PHBS Rumah Tangga mencapai 50% sebanyak 22 Kecamatan dari 39 Kecamatan.

- c. Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

- Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah 1/45.047 artinya 1 Puskesmas melayani 45.047 penduduk, seharusnya menurut Standar Kementerian Kesehatan RI 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk
- Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 adalah sejumlah 2 buah jika dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sebanyak 1.865.203 jiwa sehingga rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah 0,0011. menurut ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit yang menjelaskan bahwa seharusnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk

- d. Masih adanya status gizi buruk dan tingginya angka stunting. Berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2020 Persentase Balita Gizi Buruk sebanyak 0,03%, dan prevalensi Stunting Pada Tahun 2020 sebesar 34% berdasarkan SGSI.

- e. Masih rendahnya sumber daya kesehatan dan distribusinya belum merata, serta belum terstandarisasinya kompetensi tenaga kesehatan yang ada sesuai ANJAB dan ABK.

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2020 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk sebanyak 0,09%

- f. Meningkatnya Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (*multiple burden of disease*) atau munculnya penyakit

lain, kejadian luar biasa serta penyakit tidak menular yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian.

- g. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

- a. Rasio ruas jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) pada Tahun 2020 baru mencapai 71,39% atau 930,479 Km dari panjang jalan Kabupaten Tasikmalaya 1.303,32 Km, selain belum optimalnya sarana pendukung aksesibilitas dan konektifitas wilayah, belum optimal pula pengendalian dan pengawasan terhadap pengguna kendaraan berat yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) yang berpengaruh terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat, yang bersumber dari Daerah Irigasi (DI) baru mencapai 72,80% atau 39.671,22 Ha dari total Luas Daerah Irigasi 54,493 Ha, selain belum tercapainya kesediaan air baku untuk masyarakat, terjadi pula penurunan sumber air baku akibat perubahan fungsi lahan;
- c. Masih rendahnya ketaatan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang dan belum efektif pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2020 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang terealisasi sebesar 10,81% dari target 10,60% terjadi peningkatan sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai realisasi sebesar 10,62%, namun demikian capaian masih rendah.
- d. Bangunan Fasilitas Publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat yang tersedia baru 41,50% atau 83 bangunan fasilitas publik, sedangkan jumlah kebutuhan bangunan fasilitas publik di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 200 unit.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- a. Akses dan sarana prasarana sanitasi layak bagi masyarakat masih kurang. Persentase penduduk berakses air limbah domestik pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 48,85% atau

877.723 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.796.496 jiwa. Selain dari permasalahan tersebut, belum tersedia pula unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah.

- b. Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi. Persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 81,11% atau 1.457.154 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.796.496 jiwa.
- c. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni. Ketersediaan rumah layak huni pada Tahun 2020 baru terealisasi sebesar 81,93% atau 327.809 Unit dari target sebanyak 455.051 Unit.
- d. Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur Lingkungan. Persentase peningkatan jalan lingkungan pada Tahun 2020 adalah sebesar 38,28% kondisi baik dan sedang menjadi sepanjang 3.761,28 Km. Sedangkan panjang jalan lingkungan seluruhnya sepanjang 9.824,09.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Belum Optimalnya Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada serta pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal tersebut berdasarkan nilai persentase penegakan Perda sebesar 76,47%.

6. Sosial

- a. Belum tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang termutakhirkan yang diantaranya disebabkan masih adanya data DTKS yang belum padan NIK dengan data Disdukcapil dan minimnya jumlah tenaga pengelola data tingkat desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
- b. Masih adanya fakir miskin dan rentan miskin dalam DTKS yang belum menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat. Total DTKS untuk desil 1 sd. 4 (sangat miskin sd rentan

miskin) sebanyak 181.272 KPM, dan jumlah yang menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat melalui Program PKH dan Program Sembako (*sebelumnya dikenal dengan BPNT*) sebanyak 145.387 KPM atau sebesar 80,20% dari total fakir miskin dan rentan miskin dalam DTKS, sehingga masih terdapat 35.885 KPM/fakir miskin dan rentan miskin dalam DTKS yang belum menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat;

- c. Masih adanya KPM PKH yang belum menjadi penerima manfaat Program Sembako. Sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sembako, KPM PKH secara otomatis menjadi KPM Program Sembako. Namun kondisi pada tahun 2020, belum seluruhnya menjadi penerima manfaat Program Sembako. Dari total 120.562 KPM PKH, jumlah KPM yang telah menjadi penerima manfaat Program Sembako sebanyak 95.737 KPM atau masih terdapat sebanyak 24.825 (20,59%) KPM PKH yang belum menjadi penerima manfaat Program Sembako;
- d. Belum idealnya ratio pendamping sosial PKH terhadap jumlah KPM PKH. Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program PKH, ratio ideal pendamping sosial terhadap jumlah KPM adalah sebesar 1:250 sampai dengan 1:300 KPM. Sedangkan pada kondisi tahun 2020, jumlah pendamping sosial PKH sebanyak 329 pendamping berbanding dengan 120.562 KPM PKH atau dengan ratio 1:367 KPM;
- e. Belum optimalnya koordinasi Tikor Tingkat Kabupaten dan Tikor Tingkat Kecamatan, termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran Program Sembako serta monitoring eksistensi dan kinerja *e-Warong* sebagai agen penyalur bantuan Program Sembako. Kondisi pada tahun 2020, jumlah *e-Warong* sebanyak 393 dengan ratio terhadap KPM Program Sembako sebesar 1:444 KPM;
- f. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang terkait dengan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) belum terlaksana secara komprehensif. Pada periode sebelumnya pemenuhan SPM hanya terfokus pada bantuan permakanan, bantuan sandang dan alat bantu.

Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti pada tahun 2020 sebanyak 12.300 orang yang terdiri dari : 9.215 lanjut usia terlantar di luar panti, 1.762 orang penyandang disabilitas terlantar di luar panti, 1.573 orang anak terlantar di luar panti dan 50 orang gelandangan pengemis di luar panti;

- g. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, seperti gudang penyimpanan paket bantuan (*bufferstock*), tenda pengungsi dan kelengkapan dapur umum;
- h. Belum optimalnya layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga serta rendahnya jumlah rumah singgah/*shelter*/tempat tinggal sementara yang memberikan layanan kedaruratan sesuai standar. Kondisi tahun 2020, jumlah PPKS yang menerima layanan rujukan melalui SLRT dan Puskesmas sebanyak 295 orang dan 4.106 orang melalui layanan UPCPK dan baru disiapkan 1 shelter untuk memberikan layanan kedaruratan;
- i. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pada lembaga yang mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah SDM Kesos pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Jumlah anggota TKSK sebanyak 39 orang;
 - Jumlah Anggota TAGANA sebanyak 52 orang;
 - Jumlah anggota LK3 sebanyak 6 orang (1 lembaga);
 - Jumlah Penggerak Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 702 orang;
 - Jumlah panti rehabilitasi anak (LKSA) sebanyak 64 panti;

- Jumlah panti rehabilitasi penyandang disabilitas sebanyak 4 panti;
- Jumlah panti rehabilitasi lanjut usia sebanyak 10 panti;
- Jumlah panti rehabilitasi korban penyalahgunaan napza sebanyak 3 panti;
- Jumlah Pekerja Sosial Profesional sebanyak 2 orang
- Jumlah kepengurusan Karang Taruna 40 kepengurusan.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih cukup tinggi. TPT Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebesar 7,12 % (67.290 orang) angka ini lebih tinggi dari angka TPT Nasional sebesar 7,07 % namun masih di bawah Angka TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 10,46 %;
- Sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja kurang memadai. Balai Latihan Kerja (BLK) belum memiliki asrama dan ruang workshop untuk pelatihan tenaga kerja yang dipersiapkan untuk bekerja ke luar negeri;
- Kompetensi angkatan kerja masih tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh spesifikasi alat-alat pelatihan kerja masih tertinggal dibandingkan dengan spesifikasi kebutuhan pasar kerja;
- Jumlah peningkatan angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Angkatan kerja tahun 2020 berdasarkan pembuatan AK-1 sebanyak 13.623 orang, sedangkan untuk lowongan kerja yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebanyak 2.301 orang.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Belum optimalnya PUG dalam pembangunan dan masih rendahnya persentase Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG pada APBD Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar 10,94%;

- b. Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi dan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang capaian tahun 2020 sebesar 64.13;
- c. Belum optimalnya partisipasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan anak dalam penanganan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada tahun 2020 sebanyak 36 lembaga dan jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak sebanyak 2 lembaga;
- d. Masih rendahnya pelembagaan Desa Layak Anak sebagai penunjang capaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

3. Pangan

- a. Tingkat keamanan pangan segar yang masih rendah. Jumlah pangan segar yang telah diuji keamanannya masih sangat sedikit. Dari kebutuhan 30 sampel per bulan baru 10 sampel yang diuji keamanan pangannya. Hal ini diakibatkan oleh masih terbatasnya alat/bahan penguji keamanan pangan;
- b. Masih kurangnya cadangan pangan pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Permentan Nomor 11 tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Standar minimal CPPD sebanyak 500 ton, sedangkan CPPD yang tersedia di Kabupaten Tasikmalaya hanya 65 ton;
- c. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Pasal 27 Ayat 3 tentang Pangan, bahwa setiap desa harus memiliki cadangan pangan, namun sampai saat ini belum ada desa yang mempunyai cadangan pangan;
- d. Masih sedikitnya lumbung pangan yang berstatus aktif. Dari 179 lumbung pangan yang pernah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, hanya 10 yang aktif melakukan aktifitas simpan pinjam gabah, beras atau uang. Dari 10 lumbung pangan yang aktif hanya 1 yang melakukan RAT dan termasuk kategori sehat;

- e. Pola keragaman konsumsi masyarakat belum memenuhi prinsip Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Hal ini dilihat dari angka Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tasikmalaya sebesar 75,30 dari nilai ideal PPH sebesar 100.

4. Pertanahan

- a. Inventarisasi data aset belum optimal, dimana belum tercapainya perencanaan dari pemanfaatan dan penggunaan tanah.
- b. Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pertanahan adalah kurang optimalnya pengelolaan tanah-tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, termasuk penertiban sertifikatnya.
- c. Masih banyaknya lahan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang belum tersertifikasi bahkan sebagian digunakan secara informal oleh masyarakat.

5. Lingkungan Hidup

- a. Belum dimilikinya peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir).

Potensi timbulan sampah harian di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 adalah $1.803.800$ (jumlah penduduk) $\times 0,7$ kg (asumsi sampah per penduduk) = $1.262.660$ kg / $1.262,66$ ton. Kapasitas timbulan sampah yang terangkut adalah $2,61\%$ dari total jumlah timbulan sampah atau setara $32,56$ ton/hari.

Jumlah sarana pengangkutan sampah :

- Dumptruck : 14 unit (kondisi laik jalan 9 unit)
- Arm-roll : 3 unit (kondisi laik jalan 2 unit)

Wilayah pelayanan angkutan sampah meliputi jalur utara (kawasan Ciawi dan sekitarnya), jalur tengah (kawasan Singaparna dan sekitarnya), serta jalur timur (kawasan Manonjaya dan sekitarnya).

Jumlah Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) : 16 unit

Berdasarkan Masterplan Persampahan Kabupaten Tasikmalaya, zona prioritas pengelolaan persampahan untuk Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- 1 Zona 1 (Ciawi) : Kec. Ciawi, Kec. Kadiipaten, Kec. Pagerageung, Kec. Sukaresik, Kec. Sukahening, Kec. Rajapolah, Kec. Jamanis.
- 2 Zona 2 (Singaparna) : Kec. Singaparna, Kec. Salawu, Kec. Cigalontang, Kec. Sariwangi, Kec. Leuwisari, Kec. Padakembang, Kec. Mangunreja, Kec. Sukarame, Kec. Sukaraja, Kec. Tanjungjaya, Kec. Sukaratu, Kec. Cisayong
- 3 Zona 3 (Taraju) : Kec. Taraju, Kec. Puspahiang, Kec. Sodonghilir, Kec. Bojonggambir
- 4 Zona 4 (Manonjaya) : Kec. Manonjaya, Kec. Cineam, Kec. Karangjaya, Kec. Salopa, Kec. Jatiwaras, Kec. Gunungtanjung
- 5 Zona 5 (Karangnunggal – Cikatomas) : Kec. Karangnunggal, Kec. Bantarkalong, Kec. Culamega, Kec. Bojongasih, Kec. Parungponteng, Kec. Cipatujah, Kec. Cibalong, Kec. Cikatomas, Kec. Cikalong, Kec. Pancatengah

Yang sudah tersedia baru 1 (satu) unit TPA seluas \pm 6,28 Ha untuk zona 2 Singaparna dengan metode Open Dumping yang sudah tidak diperbolehkan lagi menurut peraturan perundangan. Seharusnya setiap TPA menggunakan metode *Sanitary Landfill* atau lahan urug terkendali.

- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui penerapan pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) maupun Bank Sampah dari hulu ke hilir secara efektif dan terpadu.

Pada tahun 2020 kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah :

Jumlah TPS 3R : 7 unit

Jumlah Bank Sampah Induk : 1 unit (Pasif)

Jumlah Bank Sampah Unit : 69 unit (43 unit aktif)

Daur ulang sektor informal : 36 lapak daur ulang

Kapasitas sampah terkelola : 142,17 ton/hari

- d. Belum optimalnya pengelolaan limbah padat, limbah cair, emisi udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh berbagai sektor.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan, sampah dan limbah B3 tidak maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana operasional.

Hingga tahun 2020, jumlah kegiatan dan/atau usaha yang mempunyai dokumen penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sebagai berikut :

- Rumah Sakit : 1 unit
- Puskesmas : 15 unit
- Klinik : 13 unit
- Lainnya : 10 unit

- f. Adanya Potensi penurunan kualitas lingkungan terutama penurunan kualitas air permukaan. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2020 adalah 59,29. Meskipun nilai IKA tersebut masih di atas target IKA Kabupaten, namun nilai IKA tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 71,43.

- g. Banyaknya lahan kritis. Pada tahun 2020, lahan kritis di luar Kawasan hutan seluas 11.284,45 Ha. Sedangkan dengan status sangat kritis seluas 38.440,4 Hektar.

Dalam upaya mendukung proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat mempertahankan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) secara yang berkelanjutan dalam rangka mengimbangi aktivitas pembangunan yang cenderung mengabaikan fungsi tutupan lahan berupa tegakan vegetasi, maka diperlukan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

Hingga tahun 2020 RTH yang terkelola meliputi;

- Taman Kota : 4 unit (meliputi kawasan perkotaan Singaparna, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas)
- Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) : - unit
- Taman Hutan Rakyat (Tahura) : - unit

h. Meningkatnya alih fungsi/peruntukkan lahan dari kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi lahan terbangun (permukiman, usaha/kegiatan, infrastruktur. Selama kurun waktu 2015-2020 terjadi penurunan luas sawah di Kabupaten Tasikmalaya dari 51.072 hektar pada tahun 2015 menjadi 47.376 hektar pada tahun 2020.

i. Kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, maka diperlukan pegawai yang mempunyai kapasitas dan kompetensi secara memadai sesuai kondisi dan situasi yang ada.

Pada tahun 2020, jumlah pegawai yang mempunyai kompetensi sebagai berikut :

- Dasar-Dasar Amdal : 9 orang
- Penilai Amdal : 5 orang
- Penyusun Amdal : 1 orang
- Pengendali Dampak Lingkungan : - orang
- Pengawas Lingkungan Hidup : - orang
- Analis Lingkungan Hidup : 1 orang
- PPNS Bidang Lingkungan Hidup : - orang

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan yang terdiri dari : Kartu Keluarga 94.3%, KTP-el 97.54%, Kartu Identitas Anak 38.41%, Akta Kematian 71.3%, Akta Kelahiran 95.06%. Dari 5 dokumen kependudukan, persentase rata-rata kepemilikannya sebesar 79,32%.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan melalui hak akses data oleh lembaga pengguna. Pada tahun 2020 lembaga pengguna yang telah melaksanakan pemanfaatan data melalui hak akses baru 2 perangkat daerah, yaitu RSUD

SMC dan Dinas Kesehatan dari 40 perangkat daerah yang telah menandatangani perjanjian kerja sama.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan masih rendahnya sinergitas penyelenggaraan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan jumlah Desa Mandiri dan pengentasan Desa Tertinggal pada Indeks Desa Membangun (IDM).
- b. Jumlah Desa Mandiri pada IDM 2021 sebanyak 22 Desa, Desa Maju sebanyak 65 Desa, Desa Berkembang sebanyak 256 Desa, dan jumlah Desa Tertinggal sebanyak 8 Desa;
 - 1) Belum optimalnya pengembangan dan penggalian potensi desa termasuk upaya peningkatan kerja sama desa;
 - 2) Belum optimalnya peran masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR). TFR mengukur jumlah rata-rata anak per wanita. TFR Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 2,41. Angka ini masih lebih besar dari angka TFR tingkat nasional sebesar 2,26;
- b. Masih tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need). Kondisi pada tahun 2020, persentase unmeet need sebesar 12,64%, masih relatif cukup besar jika disandingkan dengan persentase di wilayah lain yang sudah menembus angka di bawah 10% dan secara nasional sebesar 8,60%;
- c. Masih rendahnya tingkat pemakaian kontrasepsi. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari:
 - 1) Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) yaitu perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini

- menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS yang berstatus kawin di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebesar 67,00%;
- 2) Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Modern-Contraceptive Prevelence Rate/m-CPR). Kondisi pada tahun 2020 sebesar 70,47%;
 - 3) Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebesar 19,04%;
- d. Belum tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

9. Perhubungan

- a. Persentase fasilitas Perhubungan di Kab. Tasikmalaya sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 37,61%. Dimana jumlah Penerangan Jalan Umum yang terpasang baru mencapai 5.378 unit dari kebutuhan 26.000 unit, jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang 1.929 unit dari kebutuhan 3.195 unit, guardrail yang terpasang 588 meter dari kebutuhan 1.280 meter, marka jalan yang terpasang 632 meter dari kebutuhan 16.081 meter dan *warning light* yang terpasang 40 unit dari kebutuhan 70 unit.
- b. Tingginya pembayaran Listrik penerangan jalan umum :
 - Tahun 2019 Sebesar Rp. 14.410.809.566,-
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 17.171.829.968,-
 Dikarenakan sistem pembayarannya flat hidup/mati tetap dibayar, serta belum terpasangnya meterisasi (box kwh) sehingga daya yang terbayar sesuai pemakaian.

- c. Masih Rendahnya masyarakat yang menggunakan angkutan umum pada tahun 2020 baru mencapai 20,18%.
- d. Belum adanya master plan fasilitas perhubungan. Kegiatan Pengadaan fasilitas perhubungan masih dilaksanakan sesuai permintaan masyarakat, seharusnya kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan teknis atau pemetaan kebutuhan pemasangan fasilitas perhubungan.
- e. Masih tingginya jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan di Kab. Tasikmalaya pada Tahun 2020 sejumlah 210 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor 143, Kendaraan penumpang 12, kendaraan barang 20, tunggal 15 dan tabrak manusia 20.
- f. Jumlah Terminal type C di Kab. Tasikmalaya baru ada 2 lokasi yaitu di Rajapolah milik Pemda dan di Ciawi milik Perorangan. Sisanya 21 lokasi berupa Tempat Pemungutan Retribusi.

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya kapabilitas bidang komunikasi dan informatika, hal tersebut berdasarkan nilai persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 20%;
- b. Belum optimalnya penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masyarakat.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Sebagian besar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum bisa memenuhi persyaratan perbankan (*Unbankable*) dalam hal permodalan, sehingga banyak UMKM yang mengajukan bantuan permodalan ke kementerian KUMKM yang persyaratannya jauh lebih mudah dari perbankan. Data Tahun 2020 bahwa UMKM yang mengajukan permodalan sebanyak 141.663 UMKM;
- b. Menurunnya jumlah koperasi di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2019 terdapat 485 unit Koperasi, pada tahun 2020 setelah dilakukan inventarisasi pendataan langsung di lapangan yang masih berjalan usahanya sebanyak 195 Koperasi. Dari 195

Koperasi aktif pada tahun 2020 yang dilakukan pemeriksaan penilaian kesehatan sebanyak 95 Koperasi dan 85 unit Koperasi di antaranya berstatus sehat.

- c. Masih sedikit produk UMKM yang memanfaatkan pemasaran online (*marketplace*). Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya saing produk baik dari segi kualitas produk maupun kemasan. Berdasarkan data dari Dasartasik.com, sampai tahun 2020 hanya 210 UMKM dari 141.663 UMKM yang memanfaatkan pemasaran online;
- d. Kurang optimalnya fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Tasikmalaya. PLUT yang berfungsi sebagai inkubator bisnis UMKM tidak berjalan secara optimal karena terbatasnya fasilitas dan sarana penunjang pelatihan.

12. Penanaman Modal

- a. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. Belum optimalnya realisasi penanaman modal, pada Tahun 2020 Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 141.219.500.000,00 menduduki peringkat ke-20 di Provinsi Jawa Barat;
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan, dari 55 Perizinan, baru 5 perizinan yang bisa diakses secara online. Belum adanya informasi peruntukan ruang digital yang dapat diakses oleh pelaku usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Pengusaha Angkutan, Surat Izin Apotek dan Izin Usaha Mikro dan Kecil).

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya. Pada *event* Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Jawa Barat tahun 2019, Kabupaten Tasikmalaya menempati di

peringkat ke 15. Sedangkan pada Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) tahun 2018, berada pada peringkat ke 8.

- b. Kabupaten Tasikmalaya belum mempunyai pusat kegiatan olahraga skala regional dan pusat kegiatan kepemudaan;
- c. Masih kurangnya jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat. Dari 240 orang pelatih yang ada, hanya 32 orang yang bersertifikat (13,33%);
- d. Masih kurangnya wasit olahraga yang bersertifikat. Dari 150 orang wasit, baru 20 orang yang bersertifikat (13,33%);
- e. Belum adanya Rencana Induk Kepemudaan Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- f. Masih sedikitnya Organisasi Kepemudaan (OKP) yang aktif. Dari 72 OKP yang terdaftar, hanya 16 OKP yang aktif menjalankan aktivitas dan melaksanakan musyawarah daerah/cabang;

14. Statistik

Belum optimalnya pengelolaan data sektoral oleh Perangkat Daerah;

15. Persandian

Masih rendahnya nilai Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan hasil evaluasi mandiri menggunakan Indeks Keamanan Informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara berada pada kategori “tidak layak”.

16. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pelestarian seni budaya daerah.
- b. Belum optimalnya pelestarian/ pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya.
- c. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya.
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya tentang pemajuan kebudayaan.

- e. Kurangnya tim ahli dibidang seni, budaya, sejarah dan nilai budaya, cagar budaya dan permuseuman sehingga pengembangan potensi masih belum tergali secara optimal.

17. Perpustakaan

Masih rendahnya minat baca masyarakat (Koleksi buku belum memenuhi standar perpustakaan nasional, lokasi perpustakaan masih berada di Wilayah Kota Tasikmalaya, belum optimalnya promosi publikasi, koleksi perpustakaan digital masih sedikit), berdasarkan hasil catatan Tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan umum dan khusus hanya mencapai sebanyak 268.704 orang dari target 813.500 orang.

18. Kearsipan

Masih rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, hal tersebut berdasarkan nilai persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 49,20%.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Terbatasnya ketersediaan benih ikan unggul untuk perikanan budidaya. Selama ini pemenuhan kebutuhan benih ikan di pasok 50 % dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Ciamis;
- b. Menurunnya kualitas air di sentra produksi perikanan budidaya (Kecamatan Sukaratu, Padakembang, Singaparna, Leuwisari dan Sukarame). Diperkirakan produksi ikan budidaya berpotensi berkurang sampai dengan 50 %;
- c. Belum semua petani menerapkan teknologi tepat guna perikanan budidaya. Dari 400-an kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), sekitar 50 % yang sudah menerapkan teknologi tepat guna.
- d. Terbatasnya jumlah alat bantu penangkapan ikan modern. Dari 204 perahu hanya 10 perahu yang dilengkapi dengan *fishfinder* dan GPS.
- e. Terbatasnya jumlah sarana penangkapan ikan. Dari 3.025 nelayan tangkap/150 Kelompok Usaha Bersama (KUB), baru 91

KUB yang mempunyai 204 perahu & perlengkapannya (standar Kementerian Kelautan Perikanan RI untuk 1 perahu diawaki oleh 2 atau 3 orang nelayan).

- f. Menurunnya jumlah populasi ikan di perairan daratan/PUD sebesar 30 % (Data Statistik Perikanan).

2. Pariwisata

- a. Terbatasnya fasilitas pendukung di destinasi wisata. Dari 7 destinasi wisata yang dikelola Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, baru ada 2 *Tourism Information Center* (TIC) di Karangtawulan dan Cipanas Galunggung, serta baru tersedia 4 *homestay* di destinasi wisata Pamijahan, Sindangkerta, Galunggung, dan Cipatujah.
- b. Belum semua destinasi wisata memiliki dokumen *Detailed Engineering Design* (DED)/*Masterplan*. Dari 7 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya baru terdapat 5 destinasi wisata yang sudah memiliki DED yaitu destinasi wisata Cikalong, Galunggung, Pamijahan, Situ sanghiyang, dan Sindangjaya.
- c. Belum semua potensi desa wisata telah menjadi destinasi wisata siap kunjung. Dari 50 potensi desa wisata, baru 25 desa wisata yang siap kunjung dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Desa Wisata.

3. Pertanian

- a. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian, menjadi lahan non-pertanian. Berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat alih fungsi lahan pertanian seluas 29,04 ha. Jumlah ini akan bertambah pada saat pembangunan jalan tol Gedebage-Tasikmalaya.
- b. Ketersediaan prasarana pertanian belum memadai. Untuk kebutuhan 5 tahun mendatang harus dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 13.500 ha, pembangunan dan perbaikan dam parit sebanyak 450 unit, embung 180 unit, irigasi

- perpipaan/perpompaan 550 unit, irigasi tanah dangkal 135 unit, dan pembangunan jalan pertanian sepanjang 80 km.
- c. Rendahnya penggunaan pupuk organik. Dari luas sawah 47.900 ha yang melaksanakan pola budidaya organik hanya 7.625 ha;
 - d. Terbatasnya cakupan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan sarana prasarannya. Kabupaten Tasikmalaya hanya dilayani oleh 5 puskesmas yang berlokasi di Kecamatan Pagerageung, Karangnunggal, Cikatomas, Cibalong, Jatiwaras;
 - e. Ketersediaan sarana Inseminasi Buatan (IB) masih kurang. Dari kebutuhan 28.000 IB kit hanya terpenuhi sebanyak 14.000 IB kit (*service per conception* sebesar 1,5).

4. Perdagangan

- a. Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki pasar Kabupaten yang representatif;
- b. Prasarana dan sarana kemetrolagian masih belum optimal. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan pendukung, seperti alat bidur, dari 300 buah dibutuhkan, hanya tersedia 70 buah. Demikian pula Gedung Kemetrolagian yang belum tersedia;
- c. Masih rendahnya pemanfaatan fungsi resi Gudang (pemanfaatan hanya 10 % dari kapastias Gudang);
- d. Rendahnya kapasitas pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Jumlah eksportir di Kabupaten Tasikmalaya hanya 11 pelaku usaha;

5. Perindustrian

- a. Terbatasnya ketersediaan bahan baku kerajinan tangan. Hampir 80 % kebutuhan bahan baku anyaman mendong dan anyaman pandan masih didatangkan dari Jawa Tengah (Gombong dan Sleman);
- b. Terbatasnya jumlah IKM yang memiliki Izin Usaha Industri, Hak Kekayaan Intelektual, PIRT, dan Sertifikat Halal. Dari 16.448 unit usaha Industri Kecil dan Menengah, dari tahun 2016 sd 2020 baru 184 pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal, 68

pelaku usaha yang mempunyai P-IRT, dan 19 pelaku usaha yang mempunyai HKI (Hak Kekayaan Intelektual);

4.1.4. Urusan Penunjang

1. Perencanaan

Belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, hal tersebut berdasarkan hasil penilaian perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten sebesar 23,45.

2. Keuangan

- a. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang relatif baru belum dikuasai dengan baik;
- b. Rendahnya indeks kemandirian fiskal daerah, 5 tahun terakhir berkisar di angka 5 % dan termasuk kategori rendah di Jawa Barat;
- c. Rendahnya indeks desentralisasi fiskal, 5 tahun terakhir berkisar di angka 5 – 8 % dan termasuk kategori rendah di Jawa Barat;
- d. Masih belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah, seperti ex terminal cilembang, ex setda lama.
- e. Tidak ada fasilitas penyimpanan arsip (sementara ini masih sewa di luar)

3. Kepegawaian

- a. Belum optimalnya penerapan manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit, berdasarkan capaian sampai dengan Tahun 2020 nilai yang diperoleh baru sebesar 280 dari 400 ;
- b. Belum terpenuhinya hak ASN untuk meningkatkan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun, kondisi pada tahun 2020 baru mencapai 9,6 JP/Orang/Tahun;

4. Pengawasan

Belum efektifnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja Perangkat Daerah, hal tersebut berdasarkan atas Persentase

Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan APIP dan BPK dengan nilai 78,92%;

5. Administrasi Pemerintahan

- a. Capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah belum optimal, hal tersebut berdasarkan perolehan nilai LPPD Tahun 2020 sebesar 3,30 dengan kategori “sedang”;
- b. Tingkat integrasi perencanaan terhadap capaian kinerja masih belum optimal, hal tersebut berdasarkan perolehan nilai SAKIP Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2020 berada pada 62,37 dengan kategori B;
- c. Belum optimalnya tingkat pelayanan publik di Kabupaten Tasikmalaya, hal tersebut berdasarkan perolehan nilai IKM Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 sebesar 78,9.

6. Kesatuan Bangsa dan politik

- a. Masih kurangnya pemahaman nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara pada beberapa elemen masyarakat.
- b. Belum optimalnya peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam rangka penyelenggaraan demokrasi.
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas/LSM/OKP yaitu tertib administrasi organisasi, pembinaan kepengurusan, pembinaan secara umum sosialisasi partisipasi pembangunan;
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- e. Kurang optimalnya deteksi dini potensi konflik berlatar belakang IPOLEKSOSBUDHANKAM.

4.1.5. Permasalahan Berdasarkan Pengintegrasian Dokumen

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Permasalahan yang dirumuskan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didasarkan pada Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pelaksanaan TPB diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.

Secara umum, TPB yang dikembangkan di Indonesia terdiri atas 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator. Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan, terdapat 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten, jumlah indikator yang relevan terhadap kondisi wilayah Kabupaten Tasikmalaya sejumlah 214 indikator. Indikator tersebut dibagi ke dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola.

Setelah dilakukan identifikasi awal kondisi lingkungan dan isu Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan dokumen KLHS, dalam perumusan isu pembangunan berkelanjutan terdapat 3 tahap yang dilakukan yaitu:

1. Isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari hasil analisis 6 muatan. Kajian 6 muatan menggambarkan masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Analisis 6 muatan yang dilakukan adalah analisis kinerja layanan jasa ekosistem, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat ketahanan dan potensi sumber daya alam, dan kerentanan serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Terdapat 10 isu pembangunan berkelanjutan yang didapatkan dari analisis 6 muatan. Berikut ini merupakan hasil isu pembangunan berkelanjutan menurut analisis 6 muatan:
 - a. Proyeksi ketersediaan pangan terus menurun
 - b. Daya dukung air telah melampaui ambang batas daya dukung
 - c. Meningkatnya jumlah timbunan sampah sehingga melampaui kemampuan pelayanan persampahan
 - d. Meningkatnya timbunan lumpur tinja namun belum terdapat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
 - e. Adanya potensi penurunan produksi padi akibat alih fungsi lahan sawah

- f. Terdapat daerah yang masuk ke dalam kategori rawan bencana sangat tinggi, tinggi, dan sedang
 - g. Terdapat desa yang termasuk dalam kategori rentan terhadap dampak perubahan iklim
 - h. Meningkatnya potensi pencemaran air permukaan
 - i. Pesatnya pertumbuhan penduduk
 - j. Masih adanya potensi alih fungsi lahan
2. Isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari hasil konsultasi publik 1. Isu pembangunan berkelanjutan yang diaring dari kegiatan konsultasi publik 1 mencakup isu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Dari konsultasi publik 1 yang dilakukan pada tanggal 16 November 2020 didapatkan 36 isu pembangunan berkelanjutan strategis, berikut ini merupakan hasil isu pembangunan berkelanjutan hasil konsultasi publik 1:
- a. Masih tingginya angka pengangguran
 - b. Masih banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional
 - c. Alih fungsi lahan pertanian tinggi
 - d. Rendahnya harga jual komoditas pertanian
 - e. Belum memadainya fasilitas dan akses pelayanan kesehatan
 - f. Masih banyak terjadi kasus stunting
 - g. Belum optimalnya sekolah terhadap akses listrik, internet, komputer, infrastruktur bagi siswa disabilitas, air minum layak, sanitasi per jenis kelamin, dan fasilitas cuci tangan
 - h. Rendahnya angka partisipasi sekolah
 - i. Masih tingginya angka menikah dini
 - j. Belum optimalnya kebijakan yang responsif gender
 - k. Belum optimalnya akses air bersih
 - l. Belum adanya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat
 - m. Belum optimalnya program hemat energi
 - n. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan
 - o. Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata unggulan, baik pariwisata berbasis alam, buatan dan budaya yang berwawasan lingkungan
 - p. Masih tingginya tingkat pengangguran

- q. Masih belum optimalnya cakupan pelayanan infrastruktur jalan & jembatan
- r. Masih belum optimalnya infrastruktur pendukung industri
- s. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan daerah
- t. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
- u. Tingginya kerentanan risiko bencana alam terjadi
- v. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh
- w. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah daur ulang belum optimal (belum optimalnya TPS3R yang ada)
- x. Belum optimalnya produksi yang menggunakan sumber energi ramah lingkungan
- y. Masih belum optimalnya program yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim
- z. Tingginya kerentanan bencana
- aa. Belum optimalnya strategi terkait pengurangan risiko bencana
- bb. Belum optimalnya regulasi/kebijakan/kelembagaan yang melindungi wilayah penghasil pangan
- cc. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi sektor pertanian
- dd. Tingginya alih fungsi lahan dan/degradasi lahan
- ee. Kurang optimalnya rehabilitasi lahan kritis
- ff. Masih adanya tumpang tindih kewenangan
- gg. Belum optimalnya pelayanan publik
- hh. Masih rendahnya kerjasama/kemitraan dalam pembangunan ekonomi
- ii. Kualitas SDM masih rendah sehingga tidak mendukung dalam melakukan kemitraan
- jj. Minimnya kebijakan yang mendorong dan/atau menaungi perihal kemitraan dalam kegiatan pembangunan daerah
- kk. Adanya kondisi *Coronavirus Disease*

Tabel 4.1
Analisis Masalah terhadap Capaian TPB pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021-2026
di Kabupaten Tasikmalaya

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang menjadi Isu	Gap/Masalah
1	Tanpa Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. • Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (capaian Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020: 10,34%; Target nasional tahun 2020 berdasarkan Perpres 59 tahun 2017 adalah 7%; Terdapat gap sebesar 3,34%) • Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan belum tercapai (capaian 2020: 7,43 %; target berdasarkan RPJMN adalah 5%; terdapat gap 2,43%)

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang menjadi Isu	Gap/Masalah
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. • Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan. • Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pandemi COVID 19 • Total Fertility Rate (TFR) belum tercapai (capaian 2020: 2,5%; gap 0,4%) • Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun belum tercapai (capaian 2020: 21,80%; gap 6,4%) • Prevalensi HIV pada populasi dewasa belum tercapai (BAU 2024: 0,69; gap 19) • Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun belum tercapai (capaian 2020: 37,61; gap 28,91) • Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin belum tercapai (BAU 2024: 57,2; GAP 7,8) • Angka Prevalensi Stunting yang terus meningkat dari tahun 2017 sampai 2020 (Target berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017 adalah menurun)

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang menjadi Isu	Gap/Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. 	
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	<ul style="list-style-type: none"> Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya akses rumah tangga terhadap sumber air bersih dan sanitasi layak (81,01% dan 76,00% memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi, capaian 2020 dengan GAP masing-masing 18,99% dan 24%)
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi 	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya nilai indeks Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 106,53 (2020).

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang menjadi Isu	Gap/Masalah
		<p>kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya kerugian ekonomi akibat bencana Rp. 6.737.786. 000 (2020) Belum optimalnya sampah perkotaan yang tertangani 13% (2020) dan GAP 67%
15	Ekosistem Darat	<ul style="list-style-type: none"> Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional. Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati belum tercapai (capaian 2019: 1 dokumen; target meningkat) Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika belum tercapai (capaian 2019: 0 kebijakan; gap 1 dokumen)

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

4.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini dikarenakan analisis isu-isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

4.2.1. Isu Internasional

4.2.1.1 Komitmen *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals (MDGs)* yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan;

- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2 Revolusi Industri 4.0

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era Industry 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine- to machine*, komunikasi *human- to- machine*, *Artificial Intelligence (AI)*, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Beberapa dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Peran SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada *high skill* serta meningkatkan

keterampilan SDM industri yang dominan *low/middle ke level high skill*.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

4.2.2. Isu Nasional

4.2.2.1. Isu Strategis Dalam Kajian RPJMN

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut :

1)Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Isu strategisnya adalah :

a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

a. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

b. Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatan kualitas UMKM belum optimal.

c. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.

2) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2021-2025 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.

b. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jaminan perlindungan sosial.

c. Pemenuhan Layanan Dasar

Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yang belum optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan.

d. Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam

mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

e. Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat.

f. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

4) Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa

- a. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa.
- b. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
- c. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
- d. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.
- e. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama.
- f. Rendahnya budaya literasi.
- g. Belum optimalnya peran keluarga.

5) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar

- a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak.

- b. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas.
- c. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
- d. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
- e. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
- f. Konektivitas Transportasi Jalan.
- g. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital.

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim

- a. Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup.
- b. Ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

- a. Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir.
- b. Pemberantasan korupsi belum optimal.
- c. Indeks profesionalisme ASN.
- d. Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintah.
- e. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas.
- f. Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

4.2.2.2. Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah tentang New Normal

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara

masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (McKinsey Global Institute, 2020).

Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus korona.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Pengalaman dari negara-negara yang telah *recovery* dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input (supply chain) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya.

Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya recovery pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (*suplly chain*) dari pihak luar negri yang belum *recovery* sepenuhnya

tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi mereka. Menurut study yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute (2020), setidaknya terdapat lima sektor yang sangat berpotensi, yaitu; (1) Sebagai pusat manufaktur; (2) Infrastruktur hijau; (3) investasi dalam sektor digital; (4) Pelatihan ulang bakat, dan (5) Industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi di negara-negara ini tetapi juga meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang di ASEAN setelah era normal baru.

4.2.3. Isu Strategis RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mencapai visi **“TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
- 2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
- 3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
- 4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi

Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembangunan yaitu Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu:

- 1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
- 2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
- 3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
- 5) Reformasi birokrasi.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya

4.2.4.1. Telaahan terhadap RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 4 (empat) dari RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam RPJPD adalah "**Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/ Islami, Maju Dan Sejahtera Tahun 2025**" yang diwujudkan melalui 4 (empat) misi yaitu :

Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri

Yaitu memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja serta membangun masyarakat yang berakhlak mulia, saling menghargai dan berbudaya.

Misi Kedua

Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis

Yaitu mengembangkan dan memperkuat perekonomian yang berbasis keunggulan agribisnis. Struktur perekonomian yang dikembangkan ditekankan pada input sektor pertanian dalam arti luas yang secara struktural proporsinya semakin berarti dan mengarah pada sektor industri yang didukung oleh sektor jasa perdagangan dan perbankan.

Misi Ketiga

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)

Yaitu membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Misi Keempat

Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari

Yaitu menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi di setiap wilayah pembangunan. Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan

pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan. Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan. Memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Tantangan dalam 20 tahun yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, yaitu :

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya mengindikasikan perkembangan penduduk yang masih relatif tinggi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi, mengingat kemungkinan besarnya tekanan penduduk berkaitan dengan keterbatasan lahan yang dapat dibudidayakan, sehingga upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk perlu terus ditingkatkan dan laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan dari waktu ke waktu, karena akan berakibat pada :

- Pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja, akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.
- Pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan kualitas hidup akan menurunkan HDI/ IPM.

Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk dapat menciptakan kondisi penduduk yang tumbuh seimbang, yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif serta meningkatnya jumlah

penduduk yang disertai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, seperti meningkatnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, kondisi kesehatan yang lebih baik, daya saing dan kesejahteraan rakyat.

a. Pendidikan

Pada bidang pendidikan terdapat beberapa tantangan diantaranya yaitu:

- Aspek kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum secara optimal tertangani. Rendahnya penanganan aspek kualitas dan relevansi pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya kualitas lulusan terutama lulusan pendidikan menengah dan kejuruan, proses dan muatan pembelajaran yang belum memenuhi kebutuhan, serta kualifikasi tenaga pendidik yang bukan berdasarkan kompetensi.
- Rendahnya kualitas aspek tata kelola pendidikan ditunjukkan dengan birokrasi manajemen pelayanan pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, serta data dan informasi yang belum terkelola secara profesional dan berbasis teknologi terkini.
- Penyediaan tenaga pengajar adalah ketidakmerataan keberadaan tenaga pengajar antara perkotaan dan perdesaan, sehingga sering terjadi kelangkaan tenaga guru di daerah-daerah tertentu.
- Rendahnya angka partisipasi sekolah untuk tingkat lanjutan (SLTP dan SLTA), hal ini sangat mempengaruhi pada program penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun.
- Masih banyaknya fasilitas ruang belajar yang kondisi ruangnya perlu diperbaiki.
- Dengan semakin pesatnya perkembangan metodologi dan teknologi dalam bidang pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, serta pengembangan kurikulum berbasis

kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal.

- Pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan, dan sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja pembangunan daerah, melalui pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan berperadaban global.
- Bidang pendidikan perlu didorong untuk mencapai dimensi kualitatif sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan berdasarkan pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta moralitas dan memiliki komitmen terhadap perkembangan kemajuan masyarakat.
- Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, kualitas lulusan harus menjadi perhatian utama karena semakin tingginya persaingan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
- Sejalan dengan perkembangan jaman pemberdayaan lembaga pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, menjadi kebutuhan yang perlu diprioritaskan.
- Pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal.
- Masih banyak tenaga guru yang berstatus Non PNS yang mengakibatkan rendahnya kinerja karena ketidakpastian masa depan guru non PNS.
- Belum meratanya kinerja tenaga guru, karena keterbatasan pembinaan.
- Masih sedikitnya kuota guru yang disertifikasi
- Masih minimnya Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

b. Kesehatan

Kualitas di bidang kesehatan memerlukan beberapa upaya peningkatan kualitas kesehatan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada yakni sebagai berikut:

- Masih kurangnya tenaga kesehatan seperti : dokter, dokter gigi, dan bidan, di daerah untuk melayani kesehatan masyarakat.
- Masih kurangnya prasarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan ambulance.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, hal ini antara lain ditandai dengan masih rendahnya prosentase cakupan air bersih dan jamban sehat.
- Masih kurangnya regulasi untuk peningkatan kesadaran dalam bidang kesehatan, menuju hidup bersih dan sehat.
- Perlu adanya lembaga pendidikan kesehatan paramedis (perawat dan bidan), yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan kurangnya tenaga paramedis.
- Perlu adanya potensi dalam pengembangan promosi dan pelayanan kesehatan, pengamatan (surveilans) penyakit dan status gizi masyarakat serta pengorganisasian masyarakat yang dapat dilakukan di Pontren.
- Banyak munculnya penyakit baru (new emerging diseases) baik yang bersifat menular (seperti Avian Flue) maupun yang tidak menular serta mulai diketemukan banyak penyakit/gangguan kesehatan bersifat kejiwaan.
- Tingginya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, penggunaan teknologi di bidang kesehatan.
- Kabupaten Tasikmalaya masih harus menghadapi penyakit infeksi berbasis lingkungan juga harus menghadapi penyakit-penyakit tidak menular (degeneratif) seperti penyakit jantung dan stroke, peningkatan ancaman penularan penyakit HIV – AIDS.

- Biaya pengobatan terutama harga obat-obatan yang relatif tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat terutama oleh keluarga miskin.
- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian kualitas hidup penduduk yang bersih dan sehat.

c. Pemberdayaan Perempuan

Dalam bidang pemberdayaan perempuan tantangan yang dihadapi diantaranya:

- Dalam pengarus-utamaan gender dan perlindungan anak belum sepenuhnya dapat diaktualisasikan, hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemahaman pengarus-utamaan gender baik di pemerintahan, legislatif, swasta, LSM, perguruan tinggi maupun masyarakat. Di samping itu hasil-hasil pembangunan pun belum memperlihatkan hasil yang signifikan sehingga masih banyak permasalahan yang belum terpecahkan. Beberapa permasalahan tersebut dapat dilihat berdasarkan aspek demografis, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial budaya.
- Peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, advokasi/hukum, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, penanganan tindak kekerasan, penurunan eksploitasi dan penanganan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat (khususnya perempuan) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan gender.
- Masih adanya stigma di masyarakat terhadap perempuan terutama di pedesaan dimana perempuan merupakan makhluk lemah, porsi perempuan adalah rumah, di samping itu perempuan merupakan objek kaum laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia usaha maupun politik.
- Kondisi norma (adat-istiadat) yang membedakan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kemampuan, baik

kemampuan universal seperti intelektual maupun kemampuan spesifik (khusus) yang berkaitan dengan aspek fisik biologis.

- Masih adanya perbedaan (diskriminasi) terhadap kaum perempuan dalam berbagai hal, antara lain dalam kesempatan pendidikan, perlakuan dan penggajian di tempat kerja, perlindungan terhadap tindak kekerasan termasuk hak-hak reproduksinya.
- Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat maka meningkat pula pemahaman dan kesadaran semua pihak akan penerapan pengarusutamaan gender, sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidangnya masing-masing.

d. Agama

- Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.
- Belum adanya regulasi dalam penanganan urusan yang dapat dikelola oleh daerah dalam bidang agama.
- Pengelolaan sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- Memberi prioritas bagi pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut.
- Semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media, perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
- Munculnya ajaran-ajaran atau kelompok-kelompok yang bertentangan dengan ajaran agama tertentu.

e. Pemuda dan Olah Raga

- Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, apabila tidak dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan pengaruh

negatif kepada para pemuda yang perkembangan psikologisnya masih belum stabil.

- Adanya penghargaan yang lebih baik dari daerah lain kepada atlet-atlet yang berprestasi, dapat mengakibatkan atlet-atlet tersebut berpindah ke daerah lain.
- Kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri, dan lemahnya sandaran nilai dan norma untuk menghadapi masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya.
- Pembangunan bidang olah raga perlu mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat, khususnya swasta karena kemampuan pemerintah daerah terbatas.
- Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki sarana pengembangan kepemudaan dan keolahragaan terpadu dengan standar nasional.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil.
- Peran potensi kepemudaan dalam proses pembangunan belum optimal karena kendala psikologis, sosiologis dan kultur.

f. Seni dan Budaya

- Masih perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah.
- Kondisi kebudayaan dalam dua dasawarsa ke depan akan menghadapi berbagai perubahan sebagai imbas perubahan global dunia yang sekaligus menjadi tantangan bagi terwujudnya kondisi yang diinginkan sampai dengan tahun 2025. Nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, pada masa yang akan datang perkembangannya akan berat, sejalan dengan arus perubahan teknologi informasi dan era komputerisasi, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap

keempat aspek kebudayaan tersebut, agar terhindar dari kepunahan dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan budaya daerah.

- Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah perlu mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat mengingat seni dan budaya bersifat dinamis sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pembinaan dan pengembangan seni budaya.

g. Kesejahteraan Sosial

- Kondisi perekonomian nasional dan internasional, serta derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi akan mempengaruhi pola pikir dan pola hidup masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.
- Permasalahan kesejahteraan sosial akan semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai budaya dan agama, meningkatnya eksekse dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi, serta terjadinya bencana sosial dan bencana alam.
- Permasalahan fakir miskin, yatim piatu, jompo, penyandang cacat, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif serta penyandang masalah sosial lainnya memerlukan pemikiran yang lebih menyentuh substansi permasalahan pada tindakan yang bersifat regulasi.

2. Ekonomi

- Indeks Daya Beli masih merupakan komponen IPM yang terendah bila dibandingkan dengan dengan indeks pendidikan dan kesehatan.
- Masalah kemiskinan belum dapat terselesaikan mengingat perbedaaan sumber daya alam, sumber daya manusia,

geografis dan faktor budaya antar wilayah mengakibatkan terjadinya perbedaan kondisi serta permasalahan kemiskinan yang dihadapi. Pada tahun 2005, terdapat sekitar 480.332 jiwa yang dikategorikan sebagai penduduk miskin atau sebesar 26,94 % dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten pada tahun tersebut.

- Pembangunan pertanian dalam arti luas masih dihadapkan pada persoalan hubungan antar sub sistem pertanian yang belum sepenuhnya menunjukkan keharmonisan baik pada skala lokal, regional dan nasional; kinerja masing-masing subsistem pertanian belum optimal, terutama pada subsistem budidaya (on-farm) dimana petani dihadapkan pada luasan lahan yang semakin sempit, belum optimalnya penerapan teknologi pra panen dan pasca panen, daya saing produk rendah, harga tidak mendukung, dan struktur pasar yang cenderung merugikan petani; cara pandang sektoral yang belum terintegrasi pada sistem pertanian; serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global.
- Dalam pengembangan industri tingkat ketergantungan bahan baku dari luar masih tinggi, kemampuan dan keterampilan sumber daya industri dalam mengolah pencemaran limbah industri masih sangat rendah sehingga menyebabkan daya saing industri menurun.
- Tata niaga sarana produksi pertanian belum efektif.
- Persaingan usaha yang tidak sehat.
- Bencana alam, hama dan penyakit tanaman sulit diprediksi.
- Menurunnya minat generasi muda yang lebih berpendidikan untuk menjadi pelaku usaha tani.
- Pengaruh globalisasi pasar bebas.
- Belum berkembangnya wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi.
- Rendahnya nilai tukar hasil pertanian.

- Lemahnya perundang-undangan yang melindungi pertanian dalam negeri/lokal (terkait dengan kebijakan nasional dan internasional).
- Tidak adanya kepastian jaminan pasar.
- Belum meratanya akses pembangunan di seluruh wilayah.
- Terjadinya kemiskinan di masyarakat yang terstruktur.
- Menurunnya tingkat kesuburan lahan khususnya lahan sawah, baik fisik, kimia maupun biologi.
- Meningkatnya keragaman dan standar mutu permintaan produk primer/olahan, termasuk bebas residu kimia.
- Masih rendahnya SDM aparatur maupun masyarakat.
- Masih rendahnya kemampuan permodalan di berbagai sektor bidang ekonomi.
- Masih rendahnya diversifikasi produk.
- Masih rendahnya penguasaan informasi pasar.
- Adanya keterbatasan kepemilikan lahan pertanian.
- Adanya pergeseran alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain.
- Masih rendahnya jiwa kewirausahaan.
- Rendahnya peningkatan kualitas produk (pemenuhan kualitas, kuantitas, kontinuitas produk).
- Masih terbatasnya akses petani terhadap sektor hulu dan sektor hilir.
- Masih rendahnya manajemen efisiensi proses produksi.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- Dalam implementasinya pengembangan iptek masih sangat rendah karena mekanisme intermediasi yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna belum efektif, sinergi kebijakan yang lemah menyebabkan kegiatan IPTEK belum sanggup memberikan hasil yang signifikan, budaya iptek di masyarakat belum berkembang dan sumber daya iptek masih terbatas serta belum terkaitnya hasil kajian dengan kehidupan nyata belum menunjukkan keterkaitan.

- Di kalangan aparatur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dapat dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya kualitas sumber daya aparatur untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta penempatan aparat yang belum sesuai dengan ilmunya, sehingga menjadi suatu kendala dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Selain itu, sarana dan prasarana teknologi masih terbatas terutama teknologi informasi pemanfaatannya belum optimal baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- Iptek dan globalisasi telah mempercepat perubahan-perubahan di seluruh kawasan dunia menjadi semakin terbuka, transparan dan bebas hambatan. Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut adanya perubahan paradigma dari yang semula mengandalkan pada *resource-based competitiveness* menjadi *knowledge-based competitiveness*. Kedua konsep ini sangat berbeda dimana konsep yang pertama bertumpu pada keunggulan sumberdaya alam, lokasi dan kondisi geografis. Sebaliknya konsep yang terakhir bertumpu pada iptek serta pembangunan SDM. Disinilah peran pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi sangat penting. Daerah bersaing lebih menggunakan "otak" dari pada menggunakan "otot". Kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan sistem pendidikan yang baik dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan tenaga kerjanya menjadi sangat menentukan dalam memenangkan persaingan global.
- Dalam upaya peningkatan kemampuan IPTEK, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang adalah meningkatkan kemampuan iptek yang ditunjang oleh SDM yang berkualitas baik pemerintah, swasta, masyarakat, sarana dan prasarana, maupun pembiayaannya, dalam menghadapi perkembangan global menuju masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pembangunan iptek 20 tahun mendatang, mengacu pada nilai-nilai luhur yaitu dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*),

prima (*excellent*), inovatif (*innovation*) dan berpandangan jauh ke depan (*visionary*).

- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional yang sangat cepat dan dinamis, belum sebanding dengan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki daerah.

4. Infrastruktur Wilayah

- Untuk pengembangan transportasi di Kabupaten Tasikmalaya perlunya pengembangan angkutan umum serta jaringan jalan terutama untuk wilayah-wilayah yang berpenduduk padat.
- Jaringan transportasi diusahakan untuk memberikan pelayanan yang efisien. Untuk menghasilkan efisiensi transportasi tersebut diperlukan pengaturan atau hirarki peran serta fungsi jaringan transportasi.
- Aksesibilitas jasa pelayanan prasarana jalan dan jembatan ke / dan / dari sentra-sentra produksi belum merata.
- Cakupan pelayanan air bersih perdesaan dan perkotaan masih rendah dan masih dibawah standar nasional sebesar 60% sehingga belum seluruhnya masyarakat mendapat pelayanan air bersih.
- Dalam melaksanakan pembangunan sumber daya air dengan meningkatkan konservasi di kawasan lindung; pembangunan infrastruktur penampung air baku yang sekaligus dapat sebagai pengendali banjir seperti waduk, embung dan situ; memasyarakatkan gerakan hemat air; serta mengupayakan transfer air antar DAS untuk menyeimbangkan ketersediaan air, akan menjadi permasalahan yang cukup besar apabila tidak diimbangi dengan dana pembangunan yang cukup.
- Banyaknya jaringan pipa dan bangunan pelengkap prasarana air bersih pedesaan dan perkotaan yang usianya sudah tua menyebabkan kebocoran sehingga air tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

- Tingginya angka kehilangan air yang dikelola oleh PDAM sehingga berakibat pelayanan tidak optimal.
- Keterbatasan sumber air baku untuk air bersih yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Infrastruktur perdesaan belum tertangani secara optimal karena keterbatasan anggaran.
- Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam membangun dan memelihara sarana jalan, jembatan dan irigasi.
- Adanya resistensi masyarakat dalam melepas tanahnya untuk kepentingan pembangunan jalan dan irigasi.
- Pengembangan energi alternatif belum dikembangkan secara optimal

5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- Kondisi air tanah dan sungai-sungai besar di daerah Selatan Kabupaten Tasikmalaya seperti Sungai Cipatujah, Ciwulan dan Cimedang cenderung sukar dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat.
- Belum optimalnya penanganan terhadap beberapa zona rawan bencana alam.
- Bencana alam yang cukup besar sebagai salah satu faktor yang akan menghambat terhadap kelangsungan pembangunan yang sedang dilaksanakan, terutama untuk jenis bencana alam longsor.
- Konflik kepentingan terhadap berbagai kondisi alam yang memungkinkan terjadi bencana, akan memicu terjadinya konflik kepentingan dari berbagai pihak.
- Berbagai dampak negatif dari fenomena penurunan daya dukung lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan belum dapat diantisipasi secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan keseimbangan musim hujan dan kemarau, adanya kasus krisis air di musim kemarau. Pada wilayah pesisir pantai terjadi perubahan fungsi lahan, intrusi air laut, abrasi dan akresi pantai, kerusakan dan

berkurangnya luasan mangrove dan terumbu karang. Berkembangnya konflik sosial berupa konflik antara pencemar dan yang tercemar, konflik pemanfaat sumber daya alam dan lingkungan di hulu dan hilir. Faktor- faktor kegiatan dominan yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan antara lain, meningkatnya laju perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, laju kerusakan dan deforestasi hutan serta pembuangan limbah yang tidak mengindahkan baku mutu dan aturan. Hal tersebut diperparah dengan perilaku dan budaya yang belum ramah lingkungan, baik dari sisi perilaku membangun maupun perilaku individu masyarakatnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan belum diterapkan sepenuhnya dalam proses pembangunan. Pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah, limbah masih belum maksimal dan perlu adanya upaya antisipasi terhadap setiap kejadian yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan. Penggundulan hutan dan penebangan liar cenderung mengakibatkan terjadinya bencana alam dan menipisnya cadangan air, sehingga menurunnya pasokan air untuk irigasi.

- Pelibatan seluruh potensi masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan, sadar lingkungan, selaras dengan pengembangan mitigasi (bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan) perlu terus ditumbuhkembangkan.
- Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini sulit dilaksanakan karena terkait kerjasama dan komitmen antar pihak atau antar daerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar (*Polluters Pay Principle*), pola *role sharing* hulu hilir atau pusat daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai dilakukan.
- Penurunan perilaku dan budaya ramah lingkungan baik dari sisi perilaku membangun maupun perilaku individu masyarakat.

- Prinsip pembangunan berkelanjutan akan semakin sulit dilaksanakan apabila masyarakatnya semakin tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

6. Politik

- Sampai dengan saat ini, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum terlaksana secara optimal serta menghadapi beberapa kendala yang disebabkan oleh adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan dari berbagai level pemerintahan serta belum adanya peraturan pelaksanaan untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara komprehensif.
- Pengaruh negatif dari globalisasi perlu diwaspadai dan diantisipasi baik yang menyangkut bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Hankam.
- Melihat perubahan yang dihadapi di Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis. Proses pergantian kepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan kecepatan, serta kecermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.
- Tantangan terberat dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan,

sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.

7. Hukum dan HAM

- Dalam bidang hukum, belum semua Peraturan Daerah yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah, diketahui masyarakat. Keberhasilan pembangunan di bidang hukum dapat dilihat dari tingkat produktivitas Pemerintah Daerah baik secara kualitas maupun kuantitas yang berkaitan dengan penerbitan produk hukum daerah, dimana selama kurun waktu 2001 – 2005 telah cukup banyak diterbitkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, dan Naskah Perjanjian.
- Menyikapi perkembangan pembangunan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pembangunan hukum daerah berpotensi mengembangkan berbagai alternatif untuk menguatkan sistem hukum yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, cyber law, hukum agama yang melandasi penyelenggaraan zakat dan per- kawinan, dan penguatan terhadap kepentingan pragmatis hukum tata usaha.
- Pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat berbasis kesadaran hukum menjadi penentu berlangsungnya proses tata hukum daerah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Terutama dalam mendapatkan kepastian hukum untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

8. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

- Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya. Hal ini juga dapat diakibatkan dengan lemahnya penegakan peraturan daerah.

- Sosialisasi regulasi tentang ketentraman dan ketertiban belum dapat dilaksanakan sampai tingkat bawah.
- Potensi ancaman keamanan akan dihadapi dari berlangsungnya friksi dan konflik sosial terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Juga akibat dari lambannya pencapaian keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan.
- Ancaman lain yang cenderung meningkat adalah kejahatan transnasional, mengingat Jawa Barat merupakan jalur mobilitas orang dan barang yang strategis.
- Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih akan berlangsung dengan pertumbuhan kriminalitas yang disebabkan masih besarnya peng-angguran, akibat belum seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
- Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk menciptakan kondisi yang aman perlu didukung oleh berbagai sektor.
- Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten akan mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

9. Aparatur

- Implementasi sistem penempatan pendidikan dan pelatihan aparatur serta pengembangan sistem Keyword dan funishment dalam upaya pembinaan aparatur belum optimal.
- SDM aparatur masih perlu ditingkatkan agar memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan Tupoksi.
- Peran Staf Ahli Bupati masih perlu ditingkatkan dalam upaya mengatasi permasalahan pemerintahan
- Kualitas SDM aparatur dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.

- Perlu dibangunnya sistem akuntabilitas dan pengukuran kinerja aparatur.
- Jumlah aparatur yang secara kuantitas mencukupi, tetapi aspek kualitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kedisiplinan, profesionalisme dan etika. Hal ini akan mempengaruhi kinerja aparatur secara umum dan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

10. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

- Menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Penataan ruang ke depan perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu diperlukan regulasi yang jelas agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor.
- Mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah khususnya antara wilayah di perkotaan dan perdesaan
- Penyediaan kebutuhan lahan tidak mengubah fungsi kawasan lindung dan sawah irigasi teknis
- Mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

4.2.5. Telaahan RPJMD Daerah Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.2
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah lain	Periode RPJMD	Kebijakan terkait	Keterangan
1	Kota Tasikmalaya	Tahun 2017-2022	Visi : “Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani” Misi : 1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal 2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat 3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan 4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022
2	Kabupaten Garut	Tahun 2019-2024	Visi : “Mewujudkan Kabupaten Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan” Misi : 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat,	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

No	Daerah lain	Periode RPJMD	Kebijakan terkait	Keterangan
			berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi; 2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang; 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.	
3.	Kabupaten Ciamis	Tahun 2019-2024	Visi : “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua” Misi : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah	Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

No	Daerah lain	Periode RPJMD	Kebijakan terkait	Keterangan
			<p>yang mendukung perkembangan wilayah</p> <p>3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal</p> <p>4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p> <p>5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</p> <p>6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa</p>	

Sumber :

- Perda Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022
- Perda Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- Perda Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

4.2.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tasikmalaya, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi.

Isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari indikator TPB. Isu pembangunan berkelanjutan berasal dari hasil analisis ketercapaian indikator TPB yang tidak mencapai target. Dilakukan analisis gap dari ketercapaian indikator TPB. Target indikator yang digunakan adalah Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis ketercapaian indikator TPB di atas, dari 214 total indikator yang relevan terhadap Kabupaten Tasikmalaya 30,84% indikator mencapai target; 17,29% indikator tidak mencapai target; 8,41% butuh peningkatan; 7,48% butuh penurunan; dan 35,98% indikator tidak ada data. Berikut ini merupakan isu pembangunan berkelanjutan yang didapatkan dari hasil analisis ketercapaian indikator

- a. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan
- b. Belum optimalnya akses dan layanan air bersih
- c. Belum optimalnya akses dan layanan sanitasi layak
- d. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi
- e. Masih belum tercapainya target APK PAUD, SD, SMP
- f. Masih rendahnya jumlah wisatawan
- g. Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan sektor wisata
- h. Belum optimalnya pengelolaan limbah
- i. Tingginya resiko bencana
- j. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam
- k. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak serta penyetaraan gender

Lebih lanjut, KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Mengingat pentingnya KLHS Perubahan RPJMD, maka hasil nya akan digunakan sebagai salah masukan bagi

penyusun RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026. Hasil sintesis pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan, terdapat 5 TPB yang menjadi prioritas dalam penanganan dan pencapaian target. TPB prioritas yang memerlukan perhatian khusus adalah:

1. TPB 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. TPB 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
3. TPB 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
4. TPB 11: Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
5. TPB 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Berikut ini disajikan skenario terhadap 5 (lima) isu strategis hasil KLHS.

1. TPB 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

Tanpa Kemiskinan menjadi prasyarat agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam mencapai tujuan ini, ukuran kemiskinan tidak hanya didasarkan pada kemiskinan berdasarkan dimensi pendapatan, namun juga pengukuran kemiskinan berdasar akses terhadap layanan dasar serta akses sumber daya produktif lainnya. Di bawah ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 1.

Tabel 4.3.
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 1 tentang Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Outcome 1: Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemi	1. Program perlindungan dan jaminan sosial 2. Program rehabilitasi sosial

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
1.1 Meningkatkan kondisi ekonomi dan berkurangnya jumlah masyarakat miskin akibat pandemi 1.2 Meningkatkan jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN 1.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 1.4 Meningkatkan pengembangan dan perlindungan koperasi 1.5 Meningkatkan daya saing kepemudaan 1.6 Meningkatkan ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja • Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Balai Latihan Kerja • Badan Perencanaan Pengembangan Daerah • Prov. Jawa Barat • Pemerintah kecamatan • Pemerintah desa • Pelaku usaha • LSM bidang pemberdayaan masyarakat • Baznas • Kelompok Tani • Organisasi dan mitra bidang pemberdayaan masyarakat 		3. Program pemberdayaan sosial 4. Program perencanaan tenaga kerja 5. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 6. Program penempatan tenaga kerja 7. Program pengendalian penduduk 8. Program pembinaan keluarga berencana 9. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera 10. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 11. Program pendidikan dan latihan perkoperasian 12. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) 13. Program pengembangan UMKM 14. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 15. Program pengembangan sumber daya

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
			pariwisata dan ekonomi kreatif 16. Program penyuluhan pertanian 17. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 18. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 19. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sumber : *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026*

2. TPB 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Di bawah ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 3.

Tabel 4.4.
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 3 tentang
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan
seluruh penduduk semua usia

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
<p>Outcome 1: Fasilitas kesehatan yang sesuai standar dan meningkatnya kesehatan masyarakat</p> <p>Outcome 2: Pandemi COVID 19 Tertangani</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, • Dinas Lingkungan Hidup 	<p>1.Meningkatkan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan</p> <p>2.Peningkatan kualitas SDMk</p> <p>3.Mendorong peningkatan warga yang memiliki jaminan kesehatan</p> <p>4.Melakukan adaptasi perubahan perilaku terhadap kondisi pandemi.</p> <p>5.Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder</p> <p>6.Pemantauan penanganan pandemi melalui sistem informasi interaktif</p> <p>7.Penataan permukiman padat untuk mendukung terwujudnya prinsip <i>physical distancing</i></p>	<p>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>3. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p> <p>4. Program Penanggulangan Bencana</p> <p>5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>7. Program Penataan Bangunan & Lingkungannya</p> <p>8. Program Pengembangan Permukiman</p>

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

b. TPB 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Pengelolaan air bersih akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sehingga kemiskinan dapat ditekan dan di kurangi seiring dengan meningkatkan kualitas sanitasi. Beberapa upaya pada TPB 6 yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim; dan untuk mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan adalah dengan mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata. Di bawah ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 3.

Tabel 4.5.
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 6 tentang Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Outcomes 1: Meningkatnya kapasitas prasarana air baku dan akses rumah tangga terhadap pelayanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan 1.1 meningkatnya cakupan layanan air minum 1.2 terlindunginya sumber air baik secara kuantitas maupun kualitas dengan melakukan pengelolaan berkelanjutan Outcomes 2: Terwujudnya akses terhadap sanitasi layak dan peningkatan PHBS	<ul style="list-style-type: none">• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah• Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman• Dinas Lingkungan Hidup• Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan daya dukung penyediaan air dan mengefisiensikan pemanfaatannya2. Penuntasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang akses sanitasi layak4. Pengelolaan dan pengendalian pencemar air dan sanitasi yang buruk sehingga menyebabkan terjadinya penyakit	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum3. Program pengembangan permukiman4. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup7. Program pengendalian

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
bagi seluruh masyarakat 2.1 meningkatnya jumlah dan akses sanitasi layak 2.2 meningkatnya pengelolaan serta infrastruktur limbah dan lumpur tinja			pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 8. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 9. Program Pengembangan Permukiman 10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 11. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 12. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

c. TPB 11: Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

Adapun berdasarkan gambaran grafik hasil proyeksi dan GAP salah satu indikator pada TPB 11, secara umum dengan mempertimbangkan indikator yang berkesesuaian dengan isu 6 muatan maupun isu strategis lainnya yang terdapat dalam dokumen perencanaan. Di bawah ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 11.

Tabel 4.6.
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 11 tentang
Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan
berkelanjutan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
<p>Outcomes 1: Terwujudnya ketahanan (resilience) terhadap bencana, sosial, dan ekonomi</p> <p>1.1 meningkat nya kesadaran masyarakat mengenai tanggap darurat</p> <p>1.2 meningkat nya jumlah peraturan, dokumen, maupun kajian mengenai bencana</p> <p>1.3 menurunn ya risiko bencana</p> <p>1.4 berkurang nya korban jiwa dan kerugian akibat bencana alam</p> <p>Outcomes 2: Terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien</p> <p>2.1 meningkatnya jumlah sampah yang di daur ulang</p> <p>2.2 meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana, serta cakupan layanan persampahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang tahan bencana 3. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya 4. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan 5. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan 6. Pengembangan kelambagaan, peraturan dan perundang-undangan 7. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program perencanaan lingkungan hidup 3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program penataan bangunan Gedung 6. Program Penanggulangan Bencana 7. Program Penanganan Bencana 8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 9. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 10. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 11. Program Penyelenggaraan jalan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
			12. Program Pengembangan perumahan 13. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman 14. Program Penataan Desa 15. Program Administrasi Pemerintahan Desa 16. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 17. Program pengelolaan persampahan 18. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 19. Program pengelolaan persampahan 20. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 21. Program pengelolaan persampahan 22. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
			23. Program pengelolaan persampahan 24. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 25. Program pengelolaan persampahan

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

8. TPB 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

sasaran/outcomes utama dalam mewujudkan ekosistem darat yang berkelanjutan (TPB 15) di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu terlaksananya perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya genetik secara berkelanjutan. Dalam rangka mencapai *outcomes* tersebut, peranan berbagai pihak sangat diperlukan dengan arahan kebijakan dan arahan program.

Tabel 4.7.
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 15 tentang Ekosistem Darat

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Outcomes 1: Terlaksananya perencanaan , perlindungan , dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya genetik secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pertanian, Ketahan Pangan dan Perikanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	1. Perencanaan, perlindungan, dan pemberdayaan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik 2. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai	1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program pengelolaan keanekaragman hayati

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	4. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 5. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup 6. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Program pengembangan kurikulum 9. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 10. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

4.2.7. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan telaah dari rumpun permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 3 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Keenam Pelayanan Dasar tersebut merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah supaya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari keenam pelayanan dasar tersebut dapat terwujud secara baik sesuai dengan standar yang diharapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, adalah fundamental dalam memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi semua penduduk Kabupaten Tasikmalaya dan semua penduduk Indonesia. Pelayanan dasar ini juga memastikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki angkatan kerja yang sehat dan terdidik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Namun demikian, akses dan kualitas pelayanan dasar antar daerah dan kelompok masyarakat menjadi penghambat bagi pertumbuhan Kabupaten Tasikmalaya. Di sektor pendidikan, distribusi guru yang tidak merata dan buruknya kualitas pendidikan di banyak daerah adalah persoalan signifikan, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif. Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Di sektor kesehatan, masih banyak rumah sakit pemerintah dan swasta belum memenuhi standar minimum. Masih banyak rumah tangga berpendapat rendah belum memiliki rumah yang memadai, dan ketiadaan akses air minum dan sanitasi di banyak tempat berpengaruh pada tingginya angka penyakit menular dan stunting.

Permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar; khususnya di antara masyarakat marginal; kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; tidak meratanya distribusi sarana dan prasarana; kurangnya pendekatan baru dan inovatif dalam penyelenggaraan layanan; serta rendahnya koordinasi lintas sektor.

2. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi

Kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi

pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun misi Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah

Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam RPJMN periode 2020-2024 yang akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan layanan jaringan *on grid* dan *off grid* untuk akses ketenagalistrikan, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet untuk fasilitas umum (fasum), pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara) serta pembangunan waduk multi-purpose dan irigasi.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian *Big Data*, *Internet of Things (IoT)* maupun *artificial intelligence (AI)*. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

Tantangan pengembangan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya adalah aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dalam untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan dan untuk mendukung perkembangan wilayah serta pengembangan investasi di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, perlu dibangun infrastruktur strategis terutama sarana jalan. “Beberapa infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah direncanakan akan dibangun, meliputi infrastruktur strategis nasional dan regional yaitu meliputi pembangunan tol Cileunyi, Garut, Tasikmalaya (Cigatas). Pembangunan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya seperti rencana pembangunan jalan Tinewati-Cintaraja, pembangunan jalan lingkaran utara-selatan Kab. Tasikmalaya, penyelesaian gedung sarana olahraga, gedung perkantoran pemerintah, rencana pembangunan pasar dan terminal Singaparna, pembangunan Rumah Sakit serta pembangunan TPA Kabupaten Tasikmalaya.

4. Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal.

Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Apalagi pada saat ini sedang terjadi pandemi covid sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumberdaya kesehatan sedang berfokus ke pandemi, dan karena kekhawatiran masyarakat sehingga penderita penyakit kronis tidak mendapatkan penanganan yang optimal sehingga dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif, termasuk Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pun telah melaksanakannya, tetapi derajat kesehatan masyarakat belum dapat optimal. Upaya preventif yang telah dilakukan, diantaranya pemberian tambahan asupan gizi, terutama kepada bayi dan balita yang membutuhkan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ini, ditunjukkan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2019 sebesar 69,21 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 69,47. Seharusnya UHH tersebut masih terus untuk ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

5. *Recovery* Ekonomi dampak Pandemi Covid-19

Resesi ekonomi dampak Covid-19 tentu berdampak pada peningkatan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tasikmalaya angka kemiskinan di kabupaten tasikmalaya tahun 2020 meningkat menjadi 10,34% (181.520 jiwa) dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 9,12% (159.930 jiwa). Dari sisi penerimaan pemerintah daerah

Kabupaten Tasikmalaya, trend rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 (5 tahun) yaitu sebesar 2,99% dengan Rincian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebesar 17,43%, Dana Perimbangan negatif (0,86%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 11,05%. Kondisi pandemi menyebabkan proyeksi penerimaan tahun-tahun selanjutnya semakin sulit diprediksi disertai dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan periode 2021-2026.

Pemulihan ekonomi menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan pasca pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut, maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Pengembangan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menghadirkan investasi.

6. Pengembangan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 271.130,26 ha terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Dari seluruh luasan wilayah administrasi hampir di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdapat potensi daya tarik wisata terutama wisata alam serta Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu penghasil utama berbagai produk pertanian di Jawa Barat, dan memiliki potensi lain dalam bidang kerajinan tangan.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan berbagai sektor, terutama dengan mengembangkan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisatawan masih belum optimal

dan semakin rendah ketika pandemi covid, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 sebesar 658.170 orang; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp 750.600.276.197 Milyar; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2020 masih terbatas; d) Masih terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan event budaya tahun 2020 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

UMKM di Indonesia ikut menyumbang pertumbuhan ekonomi dengan pencapaian sebesar 60%. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. UMKM bisa menjadi salah satu harapan untuk mengurangi adanya jumlah pengangguran di Indonesia, sekaligus semakin membuka luas adanya lapangan pekerjaan baru. Tetapi jumlah UMKM di Kabupaten Tasikmalaya terus berkurang di tahun 2020 jumlah UMKM sebanyak 141.663 UMKM dibanding tahun 2019 sebanyak 45.000 UMKM.

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tasikmalaya belum optimal, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan. Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kabupaten Tasikmalaya melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kabupaten Tasikmalaya melalui revitalisasi obyek wisata.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tasikmalaya dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya memburuk dari tahun ke tahun, tahun 2020

Jumlah investor penanam modal dalam negeri hanya sebanyak 424 investor disbanding tahun 2019 sebanyak 1.201 investor penanam modal dalam negeri. Permasalahan investasi adalah pada belum optimalnya kecepatan pelayanan perijinan, promosi investasi yang belum optimal, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi yang belum optimal, didukung dengan pelayanan birokrasi yang belum efisien dan penggunaan teknologi belum optimal.

7. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan

Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian yaitu dari luas wilayah 270.882 Ha, lahan pertanian memiliki luas sebanyak 241.518 Ha, sedangkan sisanya sebanyak 29.364 Ha merupakan lahan non-pertanian. Kondisi wilayah seperti ini membuat perekonomian Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh sektor pertanian. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya dalam bidang pertanian yang salah satunya sebagai penghasil kelapa tertinggi ke-1 di Jawa Barat dengan 28.017 ton di tahun 2018 serta Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu produsen pangan utama (beras) di Jawa Barat yaitu nomor 9 dengan produksi 451.232 ton di Tahun 2020.

Berdasarkan data terakhir dari Perkembangan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 37.446 Trilyun, sektor Pertanian menyumbang Rp 114,18 Trilyun atau sekitar 37,88%. Kontribusi kedua didapatkan dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp 6,08 Trilyun (18,18%), dan kontribusi ketiga dari Sektor Konstruksi sebesar Rp 2,90 Trilyun (7,75%). Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tasikmalaya, tetapi trendnya terus menurun dari tahun ke tahun dan diperparah dengan kondisi perekonomian dunia yang sedang tidak baik akibat Covid-19.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu pertanian, harus dilaksanakan pengolahan yang diarahkan untuk mewujudkan tumbuhnya usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan harga yang wajar di tingkat petani, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mendukung itu maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) peningkatan mutu produk dan pengolahan komoditas pertanian menjadi bahan setengah jadi, (2) peningkatan harga komoditi hasil pertanian dan pembagian keuntungan (*profit sharing*) yang proporsional bagi petani, (3) penumbuhan unit-unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang dikelola oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani atau asosiasi tanaman pertanian, (4) peningkatan efisiensi biaya pengolahan dan pemasaran serta memperpendek mata rantai pemasaran.

8. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global

Pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan kita. Sektor pertanian telah terbukti memiliki peranan penting bagi pembangunan perekonomian suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada kontribusi sektor pertanian yang tidak hanya berperan dalam pembentukan PDRB, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan sektor pertanian sudah selayaknya dijadikan sebagai suatu sektor ekonomi yang sejajar dengan sektor lainnya. Sektor ini tidak lagi hanya berperan sebagai aktor pembantu apalagi figuran bagi pembangunan nasional, tetapi harus menjadi pemeran utama yang sejajar dengan sektor unggulan lainnya.

Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan suatu sektor, industri atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan didalam lingkungan global selama biaya imbangnya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang digunakan. Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing pertanian harus mengarah pada

penciptaan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu merangsang investor baik domestik maupun asing. Hal ini dapat dilakukan dengan menjamin keamanan dan dukungan infrastruktur penunjang lainnya seperti infrastruktur publik (jalan, sarana dan prasarana produksi lainnya, air, listrik dan infrastruktur penelitian yang mendukung investasi. Iklim yang kondusif di bidang pertanian juga tidak terlepas dari sisi pemerintahan kebijakan-kebijakan pelayanan seperti prosedur perizinan dan prosedur investasi harus dilakukan dengan tiga prinsip dasar cepat, mudah, dan murah.

9. Penanggulangan Kemiskinan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dan pada tahun 2019 sebesar 9,12%. Namun demikian, akibat dampak pandemi covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 meningkat menjadi 10,34%. Dengan indikator tersebut, masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Bila dicermati lebih detail maka beberapa hal yang membuktikan tingkat kesejahteraan yang belum optimal tersebut, yaitu: Penanganan kemiskinan belum optimal, jumlah warga miskin (DTKS) tahun 2020 sebesar 181.282 rumah tangga.

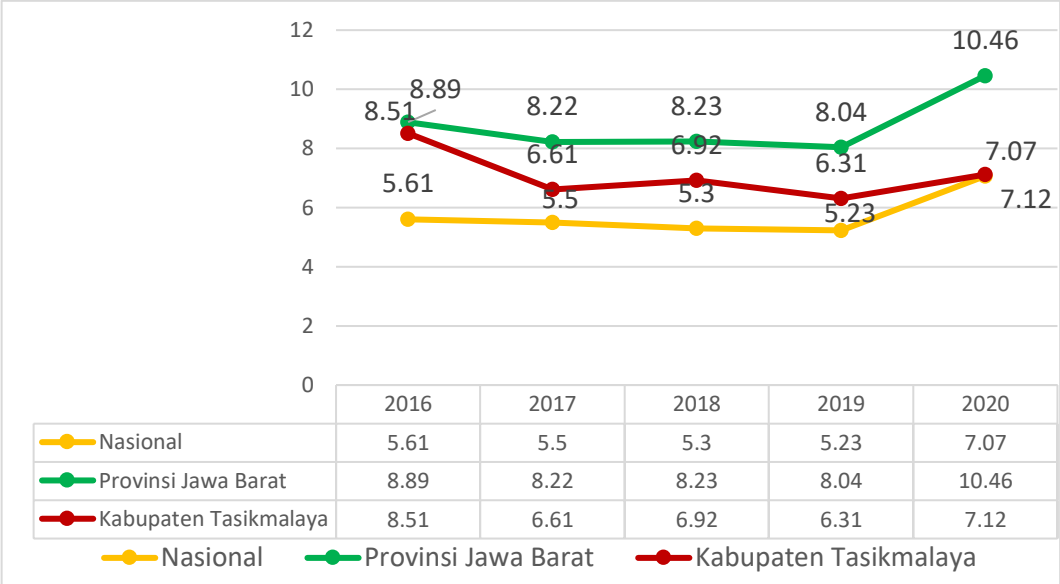
Angka kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya belum optimal menurun karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah, ketika angka kemiskinan

semakin menurun maka diperlukan upaya yang harus semakin konsisten dan konvergen.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata ; meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

10. Penanganan pengangguran

Pada awal tahun 2020 hingga saat ini, terjadi pandemi covid maka akan berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, karena terjadinya kontraksi ekonomi. Di lain pihak, masih belum optimalnya penurunan angka kemiskinan maupun jumlah warga miskin karena partisipasi angkatan kerja yang masih rendah. Semakin tinggi partisipasi angkatan kerja maka jumlah angkatan kerja akan semakin tinggi, sehingga jumlah orang yang berkesempatan bekerja meningkatkan dan pada gilirannya akan berdampak bagi penurunan TPT maupun penurunan angka kemiskinan dan jumlah warga miskin. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen bagi upaya pengentasan kemiskinan.



Gambar 4.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Prov. Jabar Dan
Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

11. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB

Masalah gizi masyarakat masih menjadi kendala yang di hadapi Kabupaten Tasikmalaya. Persoalan stunting atau gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi, menjadi tantangan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Bahkan, di tahun 2019 lalu, Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam salah satu kabupaten/kota dengan angka stunting cukup tinggi yakni di angka 33,8%.

Dari data Bulan Penimbangan Balita (BPB) Agustus 2020 kemarin, angka prevalensi yang melebihi target nasional di atas 20%, sedikitnya ada 32 kecamatan dan 159 desa dengan angka stunting cukup tinggi. Lima desa tertinggi persoalan stunting di antaranya, Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna 47,8%, Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi 46,4%, Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang 46,2%, Desa Kertaraharja Kecamatan Taraju 41,4% dan Desa Jayaratu Kecamatan Sariwangi 40%.

Persoalan stunting itu pun menjadi tantangan pada tahun 2020 memang menjadi tahun yang berat. Sebab dampak masa pandemi Covid-19 cukup menghantam sektor ekonomi

masyarakat. Hingga hal ini berpengaruh pada pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga.

Selanjutnya, belum optimalnya derajat kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, dikarenakan beberapa hal, yaitu: a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2020 AKI masih bernilai 75 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2020 AKB masih bernilai 5 per 1.000 kelahiran hidup; dan c). Kondisi rawan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 75,30.

Masih tingginya AKI Kabupaten Tasikmalaya disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil, pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI dan tingginya AKB menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Angka ini akan semakin tinggi dengan adanya pandemi Covid-19.

12. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya

Pengertian Tata Ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan pengertian kota, ditinjau dari segi geografis menurut Bintarto (1989), kota dapat diartikan suatu sistem jaringan kehidupan manusia, ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non alami dengan

gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di bawahnya.

Dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mencanangkan bahwa pembangunan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kota Singaparna yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana konstribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Apalagi ada banyak kejadian terutama di negara berkembang, kota-kota tersebut berkembang tanpa pengendalian. Jumlah penduduk terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.

Selain akan terjadi kepadatan dan ketidak teraturan bangunan, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara lain, (1) kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, (2) tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, (3) akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat

penduduk, (4) kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena banyak dijadikan pemukiman, (5) akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat, (6) tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan, (7) kepadatan penduduk membuat banyak sampah rumah tangga menumpuk, (8) banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih, (9) buruknya instalasi kelistrikan di daerah tersebut, (10) banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di permukiman padat karena hubungan arus pendek listrik, (11) banyaknya sungai atau drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula. Dalam hal ini perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan di wilayahnya. Meskipun pada umumnya kota telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan *Zoning Regulation*.

13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Isu lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim sendiri merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN yang perlu didukung pelaksanaannya oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat

buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia.

Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia.

Kabupaten Tasikmalaya menempati posisi kedua kerawanan bencana secara nasional, sebanyak 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya memiliki kerawanan menengah hingga tinggi bencana alam, terutama pergerakan tanah dan longsor dari 10 potensi bencana alam 1. Banjir, 2. Banjir Bandang, 3. Cuaca Ekstrim, 4. Gelombang Ekstrim dan Abrasi, 5. Gempa bumi, 6. Kebakaran Hutan dan Lahan, 7. Kekeringan, 8. Letusan Gunung api, 9. Tanah Longsor dan 10. Tsunami.

Tabel 4.8.

Sinkronisasi Isu Strategis Pembangunan Daerah Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kab. Tasikmalaya

RPJMN Tahun 2020-2024		RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	
1		2		3	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1	Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas
4	Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa				
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5	Reformasi birokrasi	2	Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar	3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;	3	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	4	Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar	4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	5	Recovery Ekonomi Dampak Pandemi Covid -19
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar	4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	6	Peningkatan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar	4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	7	Memperluas jejaring Kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan

RPJMN Tahun 2020-2024		RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	
1		2		3	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar	4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	8	Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional, dan global
1	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	9	Penanganan Masalah Kemiskinan
1	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	10	Penanganan pengangguran
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	11	Penurunan angka stunting, AKI dan AKB
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar	3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;	12	Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim	3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;	13	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sumber : Hasil analisis

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta’awun*, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta’awun*) dalam al-Qur’an disebut beberapa kali,

diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السَّلَام) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam

merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil 'alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Berdaya Saing	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.
	Sejahtera	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 5.2
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religijs/Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4:	Menciptakan Daerah Kabupaten

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai impact makro jangka menengah daerah, meliputi :

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun
2. Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4. Menurunnya Gini Rasio
5. Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, pada tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3
Visi, Misi dan Tujuan

Visi: Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65.67	65.93	66.198	66.45	66.71	66.97	67.23
2	Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	54,05 (CC)	55 (CC)	56 (CC)	57 (B)	58 (BB)	61 (BB)	61 (BB)
3	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-0.98	1-2	1-3	2-3	2-4	2-4	3-4
4	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.	Meningkatkan investasi daerah	Persentase Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp Juta	7.292,07	7.883,46	8.041,13	8.201,95	8.365,99	8.533,31	8.703,98

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

Tabel 5.4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian dan Berakhlakul Karimah.												
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	S.1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Poin	59,31	59,77	59,89	60,02	60,32	60,62	60,91	60,91
		S.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Poin	76,11	76,42	76,51	76,83	77,14	77,45	77,75	77,75
		S.3 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	66,68	68,04	68,04	68,07	68,08	68,08	68,12	68,12
		S.4. Meningkatkan pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20,72	21,83	22,16	22,49	22,82	23,15	23,15
		S.5 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,02	86,42	86,55	86,57	86,73	86,02	87,45	87,45
			I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	525 (Menuju Madya)	550 (Menuju Madya)	575 (Menuju Madya)	595 (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.												
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	S.6 Meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas	I.7 Nilai LPPD	Skor	3,31 (Sedang)	3,34 (Sedang)	3,36 (Sedang)	3,38 (Sedang)	3,40 (Sedang)	3,42 (Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)
			I.8 Nilai SAKIP	Skor	62,37 (B)	62,37 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	75 (BB)	75 (BB)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026	
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
		penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,9 Baik	79 Baik	80 Baik	80 Baik	80,15 Baik	80,30 Baik	80,50 Baik	80,50 Baik	
			I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	59,06	66,49	67,50	68,50	69,50	70,50	71,50	71,50	
			I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56,73	57	58	59	60	61	62	62	
			I.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	30 (Inovatif)	35 (Inovatif)	42 (Inovatif)	49 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	
			Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.										
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Rp Juta	21,33	23,41	24,84	26,27	27,71	29,14	30,57	30,57	
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.													
T.4 Meningkatkan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	NA	3	3	4	4	5	5	5	

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

Tabel 5.5
Keterkaitan Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025
dengan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Uraian	RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025		RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
Visi	Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/ Islami, Maju Dan Sejahtera Tahun 2025	↔	Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera
Misi kesatu	Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri	↔	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah
Misi kedua	Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis	✕	Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional
Misi Ketiga	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)	✕	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata
Misi Keempat	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari	↔	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global

Sumber: Bappeda Hasil Analisis 2021

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi: Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.					
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Manajemen Pendidikan Dasar	1	Pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan profesional termasuk yang berstatus non-PNS serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.
				2	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
				3	Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
				4	Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
				5	Rintisan fasilitasi layanan pendidikan inklusif
				6	Pengintegrasian nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di satuan pendidikan dasar
	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Layanan Kesehatan	1	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan profesional serta kualitas sarana prasarana kesehatan
				2	Peningkatan kualitas manajemen RSUD SMC dan Rintisan Pembangunan RSUD Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal, dan Manonjaya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				3	Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
				4	Percepatan vaksinasi COVID-19 sesuai target nasional (100%)
				5	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
				6	Optimalisasi SIGESIT 119, Layanan Cepat Tanggap Darurat Kesehatan
			Penguatan upaya promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat	1	Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat
				2	Peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam setiap kegiatan
				3	Penguatan peran serta institusi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif
				4	Peningkatan budaya olahraga rekreasi dan olahraga prestasi
			Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	1	Peningkatan cakupan penggunaan alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur
				2	Peningkatan promosi dan edukasi tentang Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana)
	S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.3. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga	1	Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan serta rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				2	Pemberdayaan keluarga miskin melalui pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
				3	Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial
				4	Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) di seluruh kecamatan (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Masalah Sosial)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				5	Bea siswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya lokal	1	Meningkatkan kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam kegiatan produktif bagi pembangunan daerah
	S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1	Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan
		I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	1	Perlindungan anak dari kasus kekerasan dan peningkatan layanan kualitas hidup anak
				2	Pengembangan dan pelembagaan Desa Layak Anak
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.					
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.7 Nilai LPPD	Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	1	Akselerasi persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan
				2	Peningkatan fasilitasi pembinaan Mental Spiritual kepada masyarakat termasuk : <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan dukungan kesejahteraan santri, ajengan/guru ngaji, dan marbot mesjid• Penguatan kegiatan keagamaan, mesjid, majelis taklim, madrasah, dan pondok pesantren• Penyediaan Kartu Sakti Santri• Penguatan peran DKM sebagai pusat pemberdayaan umat• Fasilitasi sertifikasi gratis tanah wakaf• Penyelenggaraan festival keislaman

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				3	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian dan pengelolaan BUMD seperti : <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan pengembangan induk perusahaan daerah (<i>Holding Company</i>) • Pembentukan dan Pengembangan Bank/BPR Syariah • Optimalisasi manajemen BUMD • Pembentukan dewan ekonomi syariah Kabupaten Tasikmalaya
				4	Penguatan partisipasi publik melalui pengembangan komunikasi kepala daerah dengan masyarakat dalam forum rembuk warga dan halaqah pembangunan daerah bersama para ulama dan tokoh masyarakat
				5	Meningkatkan fasilitasi dan harmonisasi kemitraan eksekutif-legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
				6	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				7	Penguatan peran kelembagaan masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum
				8	Penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, toleransi, keharmonisan, dan kerukunan umat beragama
		I.8 Nilai SAKIP	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Penataan dan penguatan organisasi, dan tata laksana perangkat daerah
				2	Peningkatan pengawasan, evaluasi, dan pengukuran kinerja
				3	Peningkatan kualitas perencanaan yang sinergis, akuntabel, dan partisipatif

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				4	Percepatan pembangunan daerah melalui sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa
		I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan publik	1	Peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, mudah dan murah berbasis teknologi informasi
		I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah	1	Optimalisasi ketepatan alokasi dan distribusi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dann pemenuhan pelayanan dasar
				2	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
				3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan kualitas manajemen ASN	1	Implementasi Sistem Merit
				2	Peningkatan kapasitas, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan aparatur
		I.12 Indeks Inovasi Daerah	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya inovasi daerah	1	Apresiasi inovasi daerah melalui lomba penyelenggaraan inovasi daerah
				2	Adopsi dan promosi inovasi daerah
				3	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.					
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis perdesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	1	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM pertanian
				2	Pembangunan dan pengembangan prasarana sarana pertanian
				3	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
				4	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan peternakan
				5	Pengembangan komoditas unggulan pertanian
				6	Pengembangan potensi, diversifikasi, modernisasi dan industrialisasi produk pertanian terstandar dalam upaya menembus pasar nasional dan internasional

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	7	Asuransi petani
				1	Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan
				2	Peningkatan keamanan pangan
				3	Penganekaragaman konsumsi pangan
			Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	1	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM perikanan
				2	Pengembangan prasarana dan sarana perikanan
				3	Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan
				4	Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan
				5	Asuransi nelayan
			Pengembangan usaha mikro dan koperasi	1	Fasilitasi Wirausaha di perdesaan
				2	Penguatan kapasitas dan fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pertanian, koperasi, usaha mikro serta ekonomi kreatif
				3	Fasilitasi sertifikasi produk usaha mikro (PIRT, HAKI, dan Label Halal)
				4	Penguatan SDM dan kelembagaan koperasi
				5	Peningkatan kewirausahaan pemuda
			Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	1	Peningkatan volume perdagangan melalui pembangunan pasar, pasar digital, dan peningkatan kualitas pasar rakyat yang sehat dan bersih
				2	Peningkatan promosi perdagangan dan kemudahan prosedur ekspor
				3	Penyediaan data barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar
				4	Perlindungan Konsumen melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal
			Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah	1	Penguatan IKM melalui fasilitasi kemitraan, legalitas usaha dan peningkatan sarana produksi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			berbasis komoditas unggulan daerah	2	Pembangunan kawasan industri terpadu dalam memanfaatkan momentum pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap
				3	Pembangunan Tasik Industrial Park di Tasikmalaya Selatan
			Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	1	Pengembangan dan peningkatan daya saing destinasi wisata desa berbasis komunitas dengan memperhatikan pemuliaan lingkungan
				2	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata
				3	Peningkatan SDM kepariwisataan
				4	Pengembangan pemasaran pariwisata melalui sistem digital
				5	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
			Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	1	Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa
				2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
				3	Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
				4	Peningkatan kapasitas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan RT/RW
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.					
T.4 Meningkatkan investasi daerah	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	Menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi
				2	Pemberian insentif penanaman modal
				3	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal melalui Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			Mencetak tenaga kerja unggul berdaya saing	4	Peningkatan promosi dan pengendalian penanaman modal
				1	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul dan Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah melalui Sistem Pelatihan Mobile Training Unit Harian (MATUH)
				2	Peningkatan prasarana dan sarana balai latihan kerja
				3	Peningkatan kesempatan kerja melalui fasilitasi bursa kerja dan padat karya
				4	Perlindungan dan pendampingan ketenagakerjaan
			Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah	1	Penataan infrastruktur kawasan ibu kota pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
				2	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, pusat perdagangan, dan destinasi pariwisata
				3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	1	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman
				2	Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten
				3	Peningkatan Drainase Perkotaan dan Lingkungan
				4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
				5	Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air minum untuk mendukung kebutuhan masyarakat
			Memantapkan sistem transportasi antar wilayah	1	Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan di bidang perhubungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	2	Meningkatkan cakupan penerangan jalan umum (Tasik Caang)
			Peningkatan tatakelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i> (TPS3R)
				2	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian kualitas air, udara, dan tutupan lahan
				3	Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan tahun 2021-2026 dipersiapkan terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan yang diambil melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya untuk dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fokus atau tema setiap tahun di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Penanganan Kesehatan akibat Pandemi, Perlindungan sosial, dan Transformasi Manajemen Birokrasi	Akselarasi Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat dengan didukung Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi Daerah	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM Berbasis Digital	Pembangunan dan Kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah	Pembangunan Wilayah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Vaksinasi Covid-19 • Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi • Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi tenaga kerja 2. Pengembangan usaha mikro 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha mikro berbasis komunitas sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19 • Rintisan Transformasi Pelayanan Digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Pembangunan infrastruktur daerah (Peningkatan Jalan Kabupaten dan jaringan irigasi, Lanjutan pembangunan RS di Cikatomas, 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jalan Kabupaten dan jaringan irigasi • Rintisan pembangunan Rumah Sakit di Ciawi • Rintisan pembangunan TPA Nangkaleah • Pembangunan Pasar Singaparna • Digitalisasi pemasaran produk UMKM • Rintisan Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Ciawi-Kadipaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada PILPRES, PILEG dan PILKADA • Lanjutan pembangunan Rumah Sakit di Ciawi • Lanjutan pembangunan TPA Nangkaleah • Lanjutan pembangunan Pasar Singaparna 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Agribisnis melalui pembangunan <i>Geopark</i> Galunggung • Rintisan pembangunan RS di Karangnunggal • Rintisan pembebasan lahan jalan lingkaran utara (Padakembang-Cikunir) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan program pembangunan • Lanjutan pembebasan lahan jalan lingkaran utara (Padakembang-Cikunir) • Rintisan pembangunan Kawasan agroindustry Tasik Industrial Park (TIP) di wilayah selatan • Rintisan pembangunan RS di Manonjaya

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Puskesmas Cisaruni, Mall Pelayanan Publik, Pembangunan Gedung Kantor, Lanjutan Pembangunan Puskesmas (Cikatomas) • Pematangan lahan pasar Singaparna • Pematangan lahan dan Pembentukan badan jalan masuk pasar singaparna • Penyiapan Dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (Jalan Tol Gedebage-Tasik-Cilacap perubahan RDTR Perkotaan Singaparna) • Rintisan pembangunan pasar Manonjaya	• Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tasikmalaya Selatan • Pembentukan BPR Syari'ah			

Sumber: Bappeda Hasil Analisis 2021

6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama 6 (enam) tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 6.3

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TOTAL						4.331.310.876.822		7.016.284.261.208		12.310.793.114.611		7.074.855.839.055		7.461.505.412.043		7.964.231.946.253		46.158.981.449.992	
M.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah																		
T.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65.67	65.90	2.550.023.927.186	66.19	3.871.898.257.791	66.45	9.449.601.177.219	66.71	4.179.219.282.179	66.97	4.493.741.190.465	67.23	4.850.723.190.079	67.23	29.395.207.024.919	
S.1	Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya					1.219.978.759.854		2.486.242.836.795		2.167.700.201.208		2.311.189.060.952		2.467.985.402.762		2.638.500.685.518		13.291.596.947.089	
		I.1 Indeks Pendidikan	Poin	59.31	59.77	1.219.978.759.854	59.89	2.486.242.836.795	60.02	2.167.700.201.208	60.32	2.311.189.060.952	60.25	2.467.985.402.762	60.91	2.638.500.685.518	60.91	13.291.596.947.089	
		Strategi: Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Manajemen Pendidikan Dasar																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	74,23	74,33	910.776.411.352	74,43	1.034.492.547.082	74,53	1.137.985.101.845	74,63	1.251.822.612.246	74,73	1.376.972.372.428	74,83	1.514.642.110.556	74,83	7.226.691.155.509	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai IKM	Poin	78,02	78,07	1.942.606.546	78,12	7.211.423.113	78,17	8.097.165.424	78,22	7.237.176.750	78,27	7.809.080.218	78,32	8.279.056.342	78,32	40.576.508.393	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	92,84	100	41.467.397.300	100	180.009.097.050	100	194.844.545.466	100	202.419.881.830	100	209.162.478.285	100	217.077.352.634	100	1.044.980.752.565	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	97,72	100	182.885.654.176	100	766.327.527.750	100	453.849.256.871	100	465.234.734.577	100	478.081.776.615	100	490.404.229.913	100	2.836.783.179.902	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	89,82	100	74.155.420.480	100	467.723.975.330	100	338.231.517.138	100	348.878.462.651	100	359.784.816.531	100	370.958.361.027	100	1.959.732.553.157	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	99,22	100	8.751.270.000	100	29.978.266.470	100	33.452.614.464	100	34.456.192.898	100	35.489.878.685	100	36.554.575.046	100	178.682.797.563	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum yang telah ditetapkan	Persen	100					100	405.000.000	100	405.000.000					0	810.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik Kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	Persen	51,18			53,18	500.000.000	55,18	450.000.000	57,18	350.000.000	59,18	300.000.000	61,38	200.000.000	61,38	1.800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pendidikan dasar, paud DAM PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	Persen	100					100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah jenjang SD dan SMP yang menerapkan muatan lokal Bahasa Sunda	Persen	100					100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	540.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					1.315.453.164.721		1.356.026.020.558		7.251.756.843.477		1.837.224.917.289		1.994.041.268.456		2.179.911.100.433		15.934.413.314.934	
		I. 2 Indeks Kesehatan	Poin	76.11	76.42	1.315.453.164.721	76.51	1.356.026.020.558	76.83	7.251.756.843.477	77.14	1.837.224.917.289	77.45	1.994.041.268.456	77.75	2.179.911.100.433	77.75	15.934.413.314.934	
		Strategi: Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Layanan Kesehatan																	
		Penguatan upaya promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat																	
		Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi																	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,18	72,35	100.000.000	74,25	105.000.000	76,5	137.150.000	78,8	146.632.500	80,1	153.964.125	80,5	161.662.331	80,5	804.408.956		
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	80	75	307.762.427. 094	80	331.675.655 .269	85	427.001.456 .318	90	499.371.027. 486	95	563.496.167 .675	100	639.542.851. 180	100	2.768.849.58 5.022		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					358.804.517. 359		306.718.225 .308		498.873.037 .315		503.873.528. 096		536.050.399 .180		568.729.941. 698	0	2.773.049.64 8.956	Dinas Kesehatan	
		Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	%	33,3	41,6	290.244.896. 928	50	187.986.865 .100	58,3	217.361.969 .460	66,7	220.090.147. 658	83,3	224.344.684 .846	100	239.658.124. 430	100	1.379.686.68 8.422	Dinas Kesehatan	
		Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000)	Rasio	1/7.122	1/6067	45.392.919.4 31	1/6171	81.506.360. 208	1/6275	190.012.317 .855	1/6382	188.799.692. 938	1/6491	211.672.842 .460	1/6601	223.990.599. 815	1/6601	941.374.732. 707	Dinas Kesehatan	
		Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	Rasio	0,11	1.11	22.361.859.0 00	2.11	31.000.000. 000	3.11	85.600.000. 000	4,11	88.790.000.0 00	5,11	93.529.500. 000	6,11	98.480.295.0 00	6,11	419.761.654. 000	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	18,9	18	804.842.000	17	6.225.000.0 00	16	5.898.750.0 00	14	6.193.687.50 0	13	6.503.371.8 75	12	6.600.922.45 3	12	32.226.573.8 28	Dinas Kesehatan	
						-		559.023.000		1.578.712.5 93		1.627.521.16 8		1.678.205.0 37			0	5.443.461.79 8	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	%	100	100	-	100	559.023.000	100	1.578.712.5 93	100	1.627.521.16 8	100	1.678.205.0 37	100	31.765.809.3 52	100	37.209.271.1 50	Dinas Kesehatan	
						-		857.737.650		1.141.006.2 50		1.286.921.34 4		1.444.132.6 64			0	4.729.797.90 8	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Rasio	0,1	0,1	-	0,11	857.737.650	0,12	1.141.006.2 50	0,13	1.286.921.34 4	0,14	1.444.132.6 64	0,15	1.725.002.56 3	0,15	6.454.800.47 1	Dinas Kesehatan	
						345.800.000		1.320.621.8 67		1.550.000.0 00		1.617.500.00 0		1.688.375.0 00			0	6.522.296.86 7	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	%	N/A	25	345.800.000	35	1.320.621.8 67	45	1.550.000.0 00	55	1.617.500.00 0	65	1.688.375.0 00	75	1.762.791.50 0	75	8.285.088.36 7	Dinas Kesehatan	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		-	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	67	67.5%	-	68%	800.000.000	68.5%	840.000.000	69%	661.500.000	69.5%	694.575.000	70%	1.458.607.50 0	0,7	4.454.682.50 0	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	Dokumen	70.47%	71	7.487.456.00 0	71	13.119.563. 200	72	14.168.060. 000	72	15.101.463.0 00	72	15.819.036. 150	73	16.575.431.2 85	73	82.271.009.6 35	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Umur	21	21	1.167.962.50 0	21	2.003.580.0 00	21	1.854.634.0 00	21	1.942.365.70 0	21	2.034.483.9 85	21	2.131.208.18 4	21	11.134.234.3 69	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya kepada Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	%	100	100	120.060.000. 000	100	121.223.000 .000	100	139.450.000 .000	100	153.350.000. 000	100	168.650.000 .000	100	185.500.000. 000	100	888.233.000. 000	Rumah Sakit Medika Citra Utama
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kabupaten Tasikmalaya	%		100	52.103.104.6 00	100	30.300.000. 000	100	5.545.336.0 00.000	100	35.940.480.0 00	100	41.199.410. 000	100	35.425.400.0 00	100	5.740.304.39 4.600	Rumah Sakit Medika Citra Utama
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	5.078.990.62 6	100	3.926.674.1 04	100	4.123.007.8 09	100	4.329.158.20 0	100	4.545.616.1 10	100	4.772.896.91 5	100	26.776.343.7 64	Puskesmas Cipatujah

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	5.670.151.32 3	100	4.003.400.0 00	100	4.203.570.0 00	100	4.413.748.50 0	100	4.634.435.9 25	100	4.866.157.72 1	100	27.791.463.4 69	Puskesmas Karangnunggal
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.170.630.67 3	100	2.839.817.7 21	100	2.981.808.6 07	100	3.130.899.03 7	100	3.287.443.9 89	100	3.451.816.18 9	100	18.862.416.2 16	Puskesmas Cikalong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	4.122.216.19 0	100	3.058.883.5 94	100	3.211.827.7 74	100	3.372.419.16 2	100	3.541.040.1 21	100	3.718.092.12 7	100	21.024.478.9 68	Puskesmas Cikatomas
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.063.841.96 6	100	2.395.473.8 83	100	2.515.247.5 77	100	2.641.009.95 6	100	2.773.060.4 54	100	2.911.713.47 6	100	15.300.347.3 12	Puskesmas Pancatengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.230.768.85 8	100	1.232.823.3 00	100	1.294.464.4 65	100	1.359.187.68 8	100	1.427.147.0 73	100	1.498.504.42 6	100	8.042.895.81 0	Puskesmas Cibalong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.609.554.10 8	100	1.503.332.4 85	100	1.578.499.1 09	100	1.657.424.06 5	100	1.740.295.2 68	100	1.827.310.03 1	100	9.916.415.06 6	Puskesmas Parungponteng
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.821.487.44 8	100	1.909.303.1 29	100	2.004.768.2 85	100	2.105.006.70 0	100	2.210.257.0 35	100	2.320.769.88 6	100	12.371.592.4 83	Puskesmas Bantarkalong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	800.907.321	100	770.000.000	100	808.500.000	100	848.925.000	100	891.371.250	100	935.939.813	100	5.055.643.38 4	Puskesmas Bojongasih
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.086.510.01 9	100	1.120.388.2 00	100	1.176.407.6 10	100	1.235.227.99 1	100	1.296.989.3 90	100	1.361.838.86 0	100	7.277.362.07 0	Puskesmas Culamega
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan	%	100	100	2.305.794.07 5	100	2.228.023.1 40	100	2.339.424.2 97	100	2.456.395.51 2	100	2.579.215.2 87	100	2.708.176.05 2	100	14.617.028.3 63	Puskesmas Bojonggambir

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capalan Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		kewenangannya sebagai BLUD																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	5.139.100.84 3	100	3.976.560.0 00	100	4.175.388.0 00	100	4.384.157.40 0	100	4.603.365.2 70	100	4.833.533.53 4	100	27.112.105.0 47	Puskesmas Sodonghilir
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.458.510.94 3	100	1.440.000.0 00	100	1.512.000.0 00	100	1.587.600.00 0	100	1.666.980.0 00	100	1.750.329.00 0	100	9.415.419.94 3	Puskesmas Taraju
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.048.735.27 6	100	3.094.783.4 94	100	3.249.522.6 69	100	3.411.998.80 2	100	3.582.598.7 42	100	3.761.728.67 9	100	20.149.367.6 62	Puskesmas Salawu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.876.452.89 3	100	2.239.616.3 23	100	2.351.597.1 39	100	2.469.176.99 6	100	2.592.635.8 46	100	2.722.267.63 8	100	14.251.746.8 35	Puskesmas Puspahiang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.768.706.93 4	100	2.567.680.8 00	100	2.696.064.8 40	100	2.830.868.08 2	100	2.972.411.4 86	100	3.121.032.06 0	100	16.956.764.2 02	Puskesmas Tanjungjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.267.282.04 7	100	3.041.720.5 69	100	3.193.806.5 97	100	3.353.496.92 7	100	3.521.171.7 74	100	3.697.230.36 2	100	20.074.708.2 76	Puskesmas Sukaraja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.809.938.98 9	100	3.158.640.6 23	100	3.316.572.6 54	100	3.482.401.28 7	100	3.656.521.3 51	100	3.839.347.41 9	100	21.263.422.3 23	Puskesmas Salopa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.769.526.04 1	100	2.738.434.0 91	100	2.875.355.7 96	100	3.019.123.58 5	100	3.170.079.7 65	100	3.328.583.75 3	100	17.901.103.0 31	Puskesmas Jatiwaras
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.383.079.70 5	100	1.666.896.0 00	100	1.750.240.8 00	100	1.837.752.84 0	100	1.929.640.4 82	100	2.026.122.50 6	100	10.593.732.3 33	Puskesmas Cineam

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.695.468.225	100	3.631.674.200	100	3.813.257.910	100	4.003.920.806	100	4.204.116.846	100	4.414.322.688	100	23.762.760.675	Puskesmas Manonjaya	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.399.846.762	100	1.459.789.000	100	1.532.778.450	100	1.609.417.373	100	1.689.888.241	100	1.774.382.653	100	9.466.102.479	Puskesmas Gunungtanjung	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.946.913.226	100	1.792.859.094	100	1.882.502.049	100	1.976.627.151	100	2.075.458.509	100	2.179.231.434	100	11.853.591.463	Puskesmas Singaparna	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	681.226.294	100	1.171.298.150	100	1.229.863.058	100	1.291.356.210	100	1.355.924.021	100	1.423.720.222	100	7.153.387.955	Puskesmas Tinewati	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.038.353.784	100	1.952.132.000	100	2.049.738.600	100	2.152.225.530	100	2.259.836.807	100	2.372.828.647	100	12.825.115.368	Puskesmas Sukarama	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.914.126.029	100	2.030.696.304	100	2.132.231.119	100	2.238.842.675	100	2.350.784.809	100	2.468.324.049	100	13.135.004.985	Puskesmas Mangunreja	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.652.665.294	100	3.091.016.000	100	3.245.566.800	100	3.407.845.140	100	3.578.237.397	100	3.757.149.267	100	20.732.479.898	Puskesmas Cigalontang	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.797.264.990	100	1.366.379.183	100	1.434.698.142	100	1.506.433.049	100	1.581.754.702	100	1.660.842.437	100	9.347.372.503	Puskesmas Leuwisari	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	426.681.571	100	466.877.527	100	490.221.403	100	514.732.474	100	540.469.097	100	567.492.552	100	3.006.474.624	Puskesmas Karangjaya	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan	%	100	100	2.354.773.442	100	1.987.058.232	100	2.086.411.144	100	2.190.731.701	100	2.300.268.286	100	2.415.281.700	100	13.334.524.505	Puskesmas Sariwangi	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		kewenangannya sebagai BLUD																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.213.762.589	100	1.073.465.336	100	1.127.138.603	100	1.183.495.533	100	1.242.670.310	100	1.304.803.825	100	7.145.336.196	Puskesmas Cisaruni
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.240.124.814	100	2.697.791.562	100	2.832.681.140	100	2.974.315.197	100	3.123.030.957	100	3.279.182.505	100	17.147.126.175	Puskesmas Sukaratu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.055.755.593	100	2.143.407.113	100	2.250.577.469	100	2.363.106.342	100	2.481.261.659	100	2.605.324.742	100	13.899.432.918	Puskesmas Cisayong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.457.919.701	100	1.575.210.966	100	1.653.971.514	100	1.736.670.090	100	1.823.503.595	100	1.914.678.774	100	10.161.954.640	Puskesmas Sukahening
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.849.045.503	100	3.239.211.402	100	3.401.171.972	100	3.571.230.571	100	3.749.792.099	100	3.937.281.704	100	21.747.733.251	Puskesmas Rajapolah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.718.587.493	100	2.076.647.000	100	2.180.479.350	100	2.289.503.318	100	2.403.978.483	100	2.524.177.408	100	14.193.373.052	Puskesmas Jamanis
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.609.937.137	100	2.974.928.400	100	3.123.674.820	100	3.279.858.561	100	3.443.851.489	100	3.616.044.064	100	20.048.294.471	Puskesmas Ciawi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.904.004.787	100	1.875.370.164	100	1.969.138.672	100	2.067.595.606	100	2.170.975.386	100	2.279.524.155	100	12.266.608.770	Puskesmas Kadipaten
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.120.599.703	100	1.939.452.000	100	2.036.424.600	100	2.138.245.830	100	2.245.158.122	100	2.357.416.028	100	12.837.296.283	Puskesmas Pagerageung

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capalan Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.392.336.59 4	100	1.846.600.0 00	100	1.938.930.0 00	100	2.035.876.50 0	100	2.137.670.3 25	100	2.244.553.84 1	100	11.595.967.2 60	Puskesmas Sukaresik
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirasaha muda;	%	20,84%;	20,89%	-	20,94%	450.000.000	20,99%	300.000.000	21,04%	350.000.000	21,09%	500.000.000	21,14%	500.000.000	21,14%	2.100.000.00 0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	22,22%	22,72%	2.692.541.00 0	23,50%	8.165.000.0 00	24,00%	11.020.000. 000	24,50%	2.700.000.00 0	25,00%	3.470.000.0 00	25,50%	3.225.000.00 0	25,50%	31.272.541.0 00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	10.52 %	15.74 %	7.735.000.00 0	26.31 %	126.758.691 .350	31.57 %	9.328.000.0 00	42.10 %	9.926.000.00 0	47.36 %	9.900.000.0 00	65.78 %	10.220.000.0 00	65.78 %	173.867.691. 350	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	16 %	16 %	585.000.000	24.00 %	11.910.000. 000	32.00 %	1.300.000.0 00	36.00 %	1.800.000.00 0	40.00 %	1.900.000.0 00	50.00 %	3.041.000.00 0	50.00 %	20.536.000.0 00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	13.33 %	13.33 %	0	18.33 %	800.000.000	23.33 %	450.000.000	28.33 %	150.000.000	33.33 %	604.000.000	38.33 %	350.000.000	38.33 %	2.354.000.00 0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	21,00%	21,00%	21,05%	507.459.000	21,10%	500.000.000	21,15%	516.500.000	21,20%	516.500.000	21,25%	516.500.000	21,75%	516.500.000	21,75%	3.073.459.00 0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
																	0		
S.3	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial					10.409.018. 811		23.348.535. 616		22.108.312. 534		22.678.867.5 38		23.636.654. 119		24.011.281.6 97	0	126.192.670. 315	
		I.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	66,68	68,04	10.409.018. 811	68,04	23.348.535. 616	68,07	22.108.312. 534	68,08	22.678.867.5 38	68,08	23.636.654. 119	68,12	24.011.281.6 97	68,12	126.192.670. 315	
		Strategi: Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga																	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capalan Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlan-tar, lanjut usia terlan-tar, penyandang disabilitas terlan-tar, dan gelandangan pengemis yang terpenu- hi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	1.523.738.41 8	100	5.082.000.0 00	100	5.120.000.0 00	100	5.120.000.00 0	100	5.157.511.2 50	100	5.196.898.06 3	100	27.200.147.7 31	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	%	66,9	66,92	274.673.608	66,94	4.160.000.0 00	67	4.330.000.0 00	67,17	4.330.000.00 0	67,4	4.500.000.0 00	67,6	4.500.000.00 0	67,6	22.094.673.6 08	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	%	100	100	1.823.600.00 0	100	3.300.000.0 00	100	2.125.000.0 00	100	2.035.000.00 0	100	2.160.000.0 00	100	2.070.000.00 0	100	13.513.600.0 00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	7.01%	23	90.000.000	224	1.090.000.0 00	1121	1.440.000.0 00	1120	1.440.000.00 0	1121	1.440.000.0 00	1121	1.440.000.00 0	1121	6.940.000.00 0	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	Tahun	1	1	28.606.257	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	178.606.257	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	63,23	68,5	5.221.050.23 1	69	7.336.535.6 16	69,5	7.410.812.9 84	70	8.061.618.01 7	70,5	8.456.948.9 18	71	8.872.046.36 4	71	45.359.012.1 30	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	78	78.5	1.447.350.29 7	79	2.350.000.0 00	79.5	1.652.499.5 50	80	1.662.249.52 1	80.5	1.892.193.9 51	81	1.902.337.27 0	81	10.906.630.5 89	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.4	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal					2.525.000.0 00		3.839.864.8 22		3.110.820.0 00		3.051.436.40 0		3.092.865.1 28		3.135.122.43 1	0	18.755.108.7 81	
		1.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20.72	2.525.000.0 00	21.83	3.839.864.8 22	22.16	3.110.820.0 00	22.49	3.051.436.40 0	22.82	3.092.865.1 28	23.15	3.135.122.43 1	23.15	18.755.108.7 81	
		Strategi: Mengkatka n pelestarian seni dan budaya lokal																	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	Persen	20	30	2.525.000.00 0	30,5	3.439.865.0 22	31	1.824.820.0 00	31,5	1.859.316.40 0	32	1.894.502.7 28	32,5	1.930.392.78 3	32,5	13.473.896.9 33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni yang dibina	Persen	25		-	35	399.999.800	40	406.000.000	45	412.120.000	50	418.362.400	55	424.729.648	55	#VALUE!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah yang terdokumentasikan	Persen	0					6	50.000.000	7	50.000.000	8	50.000.000	9	50.000.000	9	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah manuskrip sejarah	Dokumen	0					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	0					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola	Persen	45					45,5	730.000.000	46	630.000.000	46,5	630.000.000	47	630.000.000	47	2.620.000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S.5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.					1.657.983.800		2.441.000.000		4.925.000.000		5.075.000.00		4.985.000.000		5.165.000.00	0	24.248.983.800	
		I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86.02	86.42	907.983.800	86.55	1.541.000.000	86.57	3.065.000.000	86.73	3.215.000.00	87.02	3.365.000.000	87.45	3.540.000.00	87.45	15.633.983.800	
		Strategi: Pengarusutamaan gender dalam pembangunan																	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Dokumen	10.94%	11.49	63.483.800	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	1.463.483.800	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Perangkat Daerah dan Lembaga swasta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG kewenang kabupaten/kota			0,0001	275.000.000	1	390.000.000	1	1.220.000.000	1	1.220.000.00	1	1.220.000.000	1	1.220.000.00	1	5.545.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Layanan Bagi korban kekerasan perempuan	Orang	83.33%	3	275.000.000	50 Orang	150.000.000	102 Orang	270.000.000	102 Orang	270.000.000	102 Orang	270.000.000	102 Orang	270.000.000	102 Orang	1.505.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	83,33%	0,8571	294.500.000	1 Dokumen	851.000.000	1 Dokumen	1.300.000.000	1 Dokumen	1.425.000.00	1 Dokumen	1.550.000.000	1 Dokumen	1.700.000.00	1 Dokumen	7.120.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Perlindungan Anak
		I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505	525	750.000.000	550	900.000.000	575	1.860.000.000	595	1.860.000.000	615	1.620.000.000	625	1.625.000.000	625	10.389.077.314.934	
	(Pratama)			(Menuju Madya)	(Menuju Madya)		(Menuju Madya)		(Menuju Madya)		(Menuju Madya)		(Menuju Madya)		(Menuju Madya)		(Menuju Madya)		
		Strategi: Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak																	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Dokumen	0,00%	0,00%	750.000.000	99	900.000.000	112	1.860.000.000	112	1.860.000.000	111	1.620.000.000	112	1.625.000.000	551	8.615.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
M.2	Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional																		
T.2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	54,05 (CC)	55 (CC)	1.294.118.350.579	56 (CC)	1.713.617.557.077	57 (B)	1.725.159.104.786	58 (BB)	1.737.527.784.722	61 (BB)	1.777.370.679.918	61 (BB)	1.878.685.831.428	61 (BB)	10.126.479.308.510	
S.6	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah					1.294.118.350.579		1.713.617.557.077		1.725.159.104.786		1.737.527.784.722		1.777.370.679.918		1.878.685.831.428		10.126.479.308.510	
		I.7 Nilai LPPD	Skor	3.31	3.34	205.804.522.733	3.36	305.294.594.614	3.38	374.848.171.484	3.40	392.438.829.374	3.42	377.883.919.045	3.44	406.791.038.066	3.44	2.063.061.075.316	
				(Sedang)	(Sedang)		(Sedang)		(Sedang)		(Sedang)		(Sedang)		(Sedang)		(Sedang)		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Strategi :Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin		B	28.085.106.6 31	B	35.779.222. 693	B	39.361.594. 962	B	43.302.871.9 59	B	47.639.044. 279	B	52.409.716.6 01	B	246.577.557. 125	Sekretariat Daerah
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin		85	39.418.192.8 88	85	39.063.186. 033	85	43.242.004. 636	85	47.968.805.1 00	85	53.037.323. 110	85	58.650.568.5 46	85	281.380.080. 313	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	%		100	37.967.550.0 00	100	38.302.550. 000	100	39.277.550. 000	100	39.090.050.0 00	100	39.543.800. 000	100	40.042.925.0 00	100	234.224.425. 000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%		100	4.035.000.00 0	100	5.102.877.3 00	100	6.076.142.3 30	100	7.497.633.86 3	100	9.061.274.5 49	100	10.781.279.3 04	100	42.554.207.3 46	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip	%		100	855.000	100	1.200.000.0 00	100	1.219.000.0 00	100	870.000.000	100	725.000.000	100	750.000.000	100	4.764.855.00 0	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%			-	100	100.000.000	100	0	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	1.750.000.00 0	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PERUIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	%			-		0		0		0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik	%		100	1.602.500	100	3.646.000.0 00	100	2.530.000.0 00	100	1.600.000.00 0	100	1.035.000.0 00	100	1.165.000.00 0	100	9.977.602.50 0	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase kegiatan pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah yang dilaksanakan	%	-		-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Sekretariat Daerah

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemenuhan kebijakan bidang energi baru terbarukan	%		100	42.386.665	100	80.000.000	100	88.000.000	100	96.800.000	100	106.480.000	100	117.128.000	100	530.794.665	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	%		100	4.600.000.000	100	8.211.100.000	100	5.232.210.000	100	3.255.431.000	100	3.280.974.100	100	3.309.071.510	100	27.888.786.610	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%		100	4.500.000.000	100	8.000.000.000	100	5.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	26.500.000.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	75,1	75,5	4.682.124.049	76	5.075.000.000	77,5	5.100.000.000	80	5.100.000.000	81	5.100.000.000	83	5.100.000.000	83	30.157.124.049	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	79	80	555.000.000	82	900.000.000	83,5	2.550.000.000	84	1.850.000.000	85	2.000.000.000	86	2.550.000.000	86	10.405.000.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100%	100	11.030.000.000	100	11.350.000.000	100	16.100.000.000	100	16.250.000.000	100	11.625.000.000	100	11.625.000.000	100	77.980.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya	%	100	100%	13.880.000.000	100%	25.975.000.000	100%	68.550.000.000	100%	68.450.000.000	100%	63.825.000.000	100%	75.450.000.000	100	316.130.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100		12.455.000.000	100%	37.325.000.000	100%	42.325.000.000	100%	42.350.000.000	100%	37.725.000.000	100%	37.725.000.000	100	209.905.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	100	100%	1.425.000.000	100%	25.975.000.000	100%	26.225.000.000	100%	26.100.000.000	100%	26.100.000.000	100%	26.100.000.000	100	131.925.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100	100%	11.030.000.0 00	100%	11.350.000. 000	100%	16.100.000. 000	100%	16.250.000.0 00	100%	11.625.000. 000	100%	11.625.000.0 00	100	77.980.000.0 00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
																		-	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	%	52,52	65	14.768.875.5 00	72,5	30.765.125. 500	80	33.183.690. 631	85,5	44.019.484.1 88	89	35.242.590. 754	92,5	36.363.903.6 26	92,5	194.343.670. 199	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69,73	71,13	100.000.000	73,93	112.000.000	75	128.800.000	76,92	141.680.000	78,23	155.848.000	80	171.432.800	80	809.760.800	Satuan Polisi Pamong Praja
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	83,61	84,32	8.416.079.50 0	85,5	12.332.557. 438	86,21	17.384.178. 925	87	19.121.073.2 64	87,65	20.431.584. 253	88,05	22.855.012.6 79	88,05	100.540.486. 059	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Point	0 point	2 point	8.100.000.00 0	2,1 point	2.400.000.0 00	2,3 point	3.400.000.0 00	2,5 point	3.525.000.00 0	2,7 point	3.650.000.0 00	2,9 point	3.800.000.00 0	2.9	24.875.000.0 00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	661.750.000	100 %	2.099.975.6 50	100 %	1.425.000.0 00	100 %	1.650.000.00 0	100 %	1.925.000.0 00	100 %	2.100.000.00 0	100	9.861.725.65 0	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	%	3	30	50.000.000	50	100.000.000	70	300.000.000	80	350.000.000	90	400.000.000	100	450.000.000	100	1.650.000.00 0	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		1.8 Nilai SAKIP	Skor	62,37 (B)	62,37 (B)	32.084.745. 464	65 (B)	35.138.463. 639	67 (B)	37.864.951. 471	69 (B)	39.374.920.4 34	71 (BB)	41.640.080. 672	75 (BB)	44.246.599.6 93	75 (BB)	230.349.761. 373	
		Strategi: Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah																	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcom e)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbangda	Poin	65,93	69,5 Poin	7.235.960.56 4	70,05 Poin	8.390.000.0 00	71 Poin	8.557.800.0 00	72 Poin	8.728.956.00 0	73 Poin	8.903.535.1 20	7400 %	13.258.541.8 79	74	55.074.793.5 63	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Nilai IKM Bappelitbangda	Poin	78,292	78,80 Poin	4.853.606.74 8	79,31 Poin	5.291.132.1 41	79,82 Poi n	3.962.404.7 84	80,33 Poi n	4.032.503.87 9	80,84 Poi n	4.104.004.9 57	8135 %	-	81,35	22.243.652.5 09	
	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	%	23,45	23,75	2.502.500.00 0	24,05	2.225.000.0 00	24,35	2.748.500.0 00	24,65	2.798.370.00 0	24,95	2.854.337.4 00	25,25	2.924.158.64 4	25,25	16.052.866.0 44	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	100	717.889.300	100	648.426.930	100	1.200.000.0 00	100	1.224.000.00 0	100	1.248.480.0 00	100	1.273.449.60 0	100	5.038.796.23 0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	N/A	100	721.889.392	100	621.825.762	100	1.100.000.0 00	100	1.122.000.00 0	100	1.144.440.0 00	100	1.167.328.80 0	100	4.710.155.15 4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan	%	N/A	100	1.041.000.00 0	100	1.088.000.0 00	100	1.209.760.0 00	100	1.233.955.20 0	100	1.258.634.3 04	100	1.283.806.99 0	100	5.831.349.50 4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																	Pengembangan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,15	72	12.300.275.160	72,5	13.630.302.676	73	15.683.332.944	73,5	16.491.666.238	74	18.008.832.862	74,5	19.809.716.148	74,5	95.924.126.028	Inspektorat Daerah
		Nilai IKM Perangkat Daerah		80,01	80,5	1.015.646.000	81	1.228.200.000	81,5	1.351.020.000	82	1.486.122.000	82,5	1.634.734.200	83	1.798.207.620	83	8.513.929.820	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	%	-	100	945.314.300	100	1.189.845.730	100	1.143.830.303	100	1.258.213.333	100	1.384.034.667	100	1.522.438.133	100	7.443.676.466	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN dan ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	%	-	100	750.664.000	100	825.730.400	100	908.303.440	100	999.133.784	100	1.099.047.162	100	1.208.951.879	100	5.791.830.665	Inspektorat Daerah
		1.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78.9 Baik	79 Baik	142.056.979 .115	80 Baik	155.955.205 .837	80 Baik	193.376.281 .830	80.15 Baik	187.291.387. 851	80.30 Baik	187.860.615 .664	80.50 Baik	188.728.838. 562	80.50 Baik	10.389.077.3 14.934	
		Strategi: Peningkatan kualitas layanan publik																	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	%	100	100	100.000.000	100	550.000.000	100	561.000.000	100	572.220.000	100	583.664.400	100	595.337.688	100	2.962.222.088	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Disdukcapil	Poin	77,16	76	3.219.559.877	76,5	4.902.197.813	77	5.270.107.550	77,5	5.783.818.350	78	6.348.900.175	78,5	6.995.490.200	78,5	32.520.073.965	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai IKM Disdukcapil		81,98	82	6.097.115.665	82,25	7.517.736.490	82,5	9.004.855.865	82,75	8.535.887.915	83	8.721.442.630	83,25	8.923.133.465	83,25	48.800.172.030	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP Elektronik	%	97,54	98		98,1	125.000.000	98,2	3.665.000.000	98,3	25.000.000	98,4	25.000.000	98,5	25.000.000	98,5	3.865.000.000	Dinas Kependudukan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	38,41	50		65	75.000.000	75	3.900.000.000	85	260.000.000	90	260.000.000	95	260.000.000	95	4.755.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95,06	97	272.095.000	97,5	125.000.000	98	195.000.000	98,5	195.000.000	99	95.000.000	99,5	95.000.000	99,5	977.095.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penerbitan Akta Kematian	%	71,3	80		84	25.000.000	88	25.000.000	92	25.000.000	96	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	10	25	-	40	60.940.000	55	210.940.000	70	218.440.000	85	226.315.000	100	234.583.750	100	951.218.750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih	Kali	N/A		-	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	5	625.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
																		-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	Point	64,81	36,8	81.000.000	65	100.642.436	66	155.674.558	66	155.674.558	66	155.674.558	66	155.674.558	366	804.340.668	Sekretariat DPRD
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	Point	77,28	78,3	47.713.279.427	78,3	48.765.771.301	80,3	53.109.734.424	80,3	53.109.734.424	80,3	53.109.734.424	80,3	53.109.734.424	478	308.917.988.424	Sekretariat DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	71,3	80	16.586.818.644	84	19.719.157.141	96	35.518.974.141	96	35.518.974.141	96	35.518.974.141	96	35.518.974.141	96	178.381.872.349	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	65.700.000	100%	90.700.000	100%	92.700.000	100%	94.700.000	100%	96.700.000	100%	96.700.000	100	537.200.000	Kecamatan Bantarkalong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Bantarkalong

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	152.000.000	Kecamatan Bantarkalong
	PROGRAM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	108.400.000	100%	109.400.000	100%	110.400.000	100%	110.400.000	100	488.600.000	Kecamatan Bantarkalong
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrtasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	17.000.000	100%	18.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100	105.000.000	Kecamatan Bantarkalong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bantarkalong	%	N/A Poin	N/A Poin	1.460.147.92 7	59 (CC) Poin	1.650.890.8 76	60 (CC) Poin	1.675.485.8 76	61 (B) Poin	1.682.485.87 6	63 (B) Poin	1.689.485.8 76	63 (B) Poin	1.689.485.87 6	65 (B) Poin	9.847.982.30 7	Kecamatan Bantarkalong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	60.650.000	100%	61.150.000	100%	63.150.000	100%	65.150.000	100%	67.150.000	100%	67.150.000	100	384.400.000	Kecamatan Bojongasih
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Bojongasih
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	77.000.000	100%	78.000.000	100%	79.000.000	100%	79.000.000	100	465.000.000	Kecamatan Bojongasih
	PROGRAM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100	159.000.000	Kecamatan Bojongasih
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrtasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	23.000.000	100%	25.000.000	100%	26.500.000	100%	26.500.000	100	125.000.000	Kecamatan Bojongasih
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bojongasih	%	N/A Poin	N/A Poin	1.486.503.40 8	59 (CC) Poin	1.742.902.5 24	60 (CC) Poin	1.773.525.8 56	61 (B) Poin	1.804.675.65 5	63 (B) Poin	1.836.362.4 49	63 (B) Poin	1.836.362.44 9	65 (B) Poin		Kecamatan Bojongasih

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	79.90 Poin	79.90 Poin	85.500.000	80.50 Poin	67.450.000	80.85 Poin	93.100.000	81.20 Poin	96.600.000	81.55 Poin	109.100.000	81.55 Poin	109.100.000	81.95 Poin	560.850.000	Kecamatan Bojonggambir
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	n/a %	n/a %	-	n/a %	0	10%	15.000.000	10%	16.000.000	10%	17.000.000	10%	17.000.000	10	65.000.000	Kecamatan Bojonggambir
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	71.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	80.500.000	100%	81.000.000	100%	81.000.000	100	463.500.000	Kecamatan Bojonggambir
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	30.000.000	100%	32.300.000	100%	121.300.000	100%	122.800.000	100%	124.300.000	100%	124.300.000	100	555.000.000	Kecamatan Bojonggambir
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administarsi sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	20.000.000	100%	16.000.000	100%	25.000.000	100%	25.500.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100	138.500.000	Kecamatan Bojonggambir
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bojonggambir	%	N/A Poin	n/a Poin	1.624.395.15 2	59 (CC) Poin	1.562.825.0 70	60 (CC) Poin	1.841.880.0 00	61 (B) Poin	1.849.880.0 0	63 (B) Poin	1.857.880.0 00	63 (B) Poin	1.857.880.0 0	65 (B) Poin		Kecamatan Bojonggambir
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ciawi	%	83,99 Poin	84,46 Poin	79.950.000	84,71 Poin	79.950.000	84,97 Poin	95.450.000	85,22 Poin	95.950.000	85,48 Poin	96.450.000	85,48 Poin	96.450.000	85,73 Poin	544.200.000	Kecamatan Ciawi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	25%	0	25%	26.000.000	25%	26.000.000	25%	27.000.000	25%	27.000.000	25	106.000.000	Kecamatan Ciawi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	75.000.000	100%	92.000.000	100%	93.000.000	100%	94.000.000	100%	94.000.000	100	524.000.000	Kecamatan Ciawi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	36.000.000	100%	37.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100	199.000.000	Kecamatan Ciawi

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capalan Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	31.000.000	100%	31.500.000	100%	32.500.000	100%	32.500.000	100	171.500.000	Kecamatan Ciawi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ciawi	%	N/A Poin	N/A Poin	1.798.683.19 2	59 (CC) Poin	2.030.457.1 12	60 (CC) Poin	2.067.532.5 57	61 (B) Poin	2.028.971.38 6	63 (B) Poin	2.108.952.1 20	63 (B) Poin	2.108.952.12 0	65 (B) Poin		Kecamatan Ciawi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Cibalong
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	101.000.000	100%	101.000.000	100%	102.000.000	100%	103.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100	615.000.000	Kecamatan Cibalong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100	159.000.000	Kecamatan Cibalong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	25.500.000	100%	29.000.000	100%	32.500.000	100%	32.500.000	100	163.500.000	Kecamatan Cibalong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cibalong	%	N/A Poin	N/A Poin	1.834.950.27 5	59 (CC) Poin	2.035.045.4 72	60 (CC) Poin	2.426.273.1 50	61 (B) Poin	2.476.573.15 0	63 (B) Poin	2.527.665.1 50	63 (B) Poin	2.527.665.15 0	65 (B) Poin	163.500.000	Kecamatan Cibalong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	39.950.000	100%	39.071.700	100%	40.071.700	100%	41.071.700	100%	42.071.700	100%	42.071.700	100	244.308.500	Kecamatan Cibalong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	87.051.450	100%	87.950.000	100%	88.950.000	100%	89.950.000	100%	90.950.000	100%	90.950.000	100	535.801.450	Kecamatan Cigalontang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	30.750.000	100%	31.250.000	100%	31.750.000	100%	32.250.000	100%	32.750.000	100%	32.750.000	100	191.500.000	Kecamatan Cigalontang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	81.000.000	100%	91.000.000	100%	91.000.000	100%	91.000.000	100%	91.000.000	100%	91.000.000	100	536.000.000	Kecamatan Cigalontang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	115.000.000	100%	120.500.000	100%	126.000.000	100%	126.000.000	100	537.500.000	Kecamatan Cigalontang
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	37.000.000	100%	53.700.000	100%	53.700.000	100%	53.700.000	100%	53.700.000	100%	53.700.000	100	305.500.000	Kecamatan Cigalontang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cigalontang	%	N/A Poin	N/A Poin	1.775.536.94 2	59	1.972.600.0 00	60	1.931.600.0 00	61	1.935.600.00 0	63	1.939.600.0 00	63	1.939.600.00 0	65	11.494.536.9 42	Kecamatan Cigalontang
							(CC) Poin		(CC) Poin		(B) Poin		(B) Poin		(B) Poin		(B) Poin		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	79.90 Poin	79.90	95.058.000	80.50	114.950.000	80.85	116.500.000	81.20	118.500.000	81.55	122.500.000	81.55	122.500.000	81.95	690.008.000	Kecamatan Cikalong
					Poin		Poin		Poin		Poin		Poin		Poin				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	30.76 %	0	30.76 %	13.000.000	30.76 %	13.000.000	30.76 %	13.000.000	30.76 %	13.000.000	30.76 %	52.000.000	Kecamatan Cikalong
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	75.500.000	100%	108.900.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100	324.400.000	Kecamatan Cikalong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	111.400.000	100%	111.900.000	100%	112.400.000	100%	112.400.000	100	498.100.000	Kecamatan Cikalong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	26.000.000	100%	54.900.000	100%	30.000.000	100%	30.500.000	100%	31.000.000	100%	31.000.000	100	203.400.000	Kecamatan Cikalong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cikalong	%	N/A Poin	N/A Poin	1.455.633.63 9	59	1.566.374.0 68	60	1.886.000.0 00	61	1.889.500.00 0	63	1.993.000.0 00	63	1.993.000.00 0	65	10.783.507.7 07	Kecamatan Cikalong
							(CC) Poin		(CC) Poin		(B) Poin		(B) Poin		(B) Poin		(B) Poin		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capalan Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capalan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	84.700.000	100%	85.200.000	100%	88.500.000	100%	90.000.000	100%	96.000.000	100%	96.000.000	100	540.400.000	Kecamatan Cikatomas
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Cikatomas
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	76.000.000	100%	76.500.000	100%	76.500.000	100%	77.000.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100	461.000.000	Kecamatan Cikatomas
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	34.600.000	100%	35.500.000	100%	36.400.000	100%	37.300.000	100%	37.300.000	100	206.100.000	Kecamatan Cikatomas
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	19.800.000	100%	21.600.000	100%	23.400.000	100%	23.400.000	100	124.200.000	Kecamatan Cikatomas
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cikatomas	%	NA Poin	N/A Poin	1.473.159.15 1	59 (CC) Poin	1.697.402.0 00	60 (CC) Poin	1.730.392.6 00	61 (B) Poin	1.741.637.60 0	63 (B) Poin	1.798.892.6 00	63 (B) Poin	1.798.892.60 0	65 (B) Poin	10.240.376.5 51 -	Kecamatan Cikatomas
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	75.600.000	100%	53.480.000	100%	54.480.000	100%	55.480.000	100%	56.480.000	100%	56.480.000	100	352.000.000	Kecamatan Cineam
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	24.000.000	100%	25.200.000	100%	26.400.000	100%	27.600.000	100%	27.600.000	100	130.800.000	Kecamatan Cineam
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	94.600.000	100%	97.500.000	100%	100.400.000	100%	103.300.000	100%	103.300.000	100	575.100.000	Kecamatan Cineam
	PROGRAM		%	100%	100%	25.000.000	100%	41.600.000	100%	43.000.000	100%	44.400.000	100%	45.800.000	100%	45.800.000	100	245.600.000	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah																	Kecamatan Cineam
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	20.000.000	100%	60.000.000	100%	67.000.000	100%	79.000.000	100%	81.000.000	100%	81.000.000	100	388.000.000	Kecamatan Cineam
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cineam	%	N/A Poin	N/A Poin	1.907.646.57 5	59 (CC) Poin	1.981.930.2 39	60 (CC) Poin	2.036.389.0 26	61 (B) Poin	2.091.197.37 7	63 (B) Poin	2.147.600.4 84	63 (B) Poin	2.147.600.48 4	65 (B) Poin	12.312.364.1 85 -	Kecamatan Cineam
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	79.90 Poin	79.90 Poin	91.000.000	80.50 Poin	91.000.000	80.85 Poi n	111.500.000	81.20 Poi n	118.750.000	81.55 Poi n	125.500.000	81.55 Poi n	125.500.000	81.95 Poi n	663.250.000 -	Kecamatan Cipatujah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	n/a %	n/a %	-	n/a %	0	14.3 %	30.000.000	14.3 %	33.000.000	14.3 %	37.000.000	14.3 %	37.000.000	14.3 %	137.000.000	Kecamatan Cipatujah
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	n/a %	100%	76.000.000	100%	75.000.000	100%	20.000.000	100%	21.500.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100	240.500.000	Kecamatan Cipatujah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	125.500.000	100%	127.500.000	100%	131.500.000	100%	131.500.000	100	566.000.000	Kecamatan Cipatujah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	n/a %	100%	30.000.000	100%	32.000.000	100%	49.000.000	100%	36.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100	303.000.000	Kecamatan Cipatujah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cipatujah	%	N/A Poin	N/A Poin	1.947.040.71 1	59 (CC) Poin	2.134.125.4 95	60 (CC) Poin	2.286.491.4 95	61 (B) Poin	2.409.391.49 5	63 (B) Poin	2.481.767.8 57	63 (B) Poin	2.481.767.85 7	65 (B) Poin	13.740.584.9 10 -	Kecamatan Cipatujah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cisayong	%	83,99 Poin	84,46 Poin	73.600.000	84,71 Poin	73.600.000	84,97 Poin	89.100.000	85,22 Poin	90.100.000	85,48 Poin	91.100.000	85,48 Poin	91.100.000	85,73 Poin	508.600.000	Kecamatan Cisayong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	7,69%	0	15,38%	25.000.000	15,38%	25.500.000	15,38%	26.000.000	15,38%	26.000.000	0,1538	102.500.000	Kecamatan Cisayong

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	75.000.000	100%	95.000.000	100%	99.500.000	100%	101.500.000	100%	101.500.000	100	548.500.000	Kecamatan Cisayong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	111.000.000	100%	113.500.000	100%	116.000.000	100%	116.000.000	100	506.500.000	Kecamatan Cisayong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	84.000.000	100%	55.000.000	100%	106.000.000	100%	106.000.000	100	403.000.000	Kecamatan Cisayong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cisayong	%	N/A Poin	N/A Poin	1.772.431.25 4	59 (CC) Poin	1.860.708.9 19	60 (CC) Poin	1.956.708.9 19	61 (B) Poin	1.990.208.91 9	63 (B) Poin	2.030.208.9 19	63 (B) Poin	2.030.208.91 9	65 (B) Poin	11.640.475.8 49	Kecamatan Cisayong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	69.900.000	100%	59.900.000	100%	62.400.000	100%	64.900.000	100%	67.400.000	100%	67.400.000	100	391.900.000	Kecamatan Culamega
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Culamega
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.500.000	100%	77.000.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100	460.500.000	Kecamatan Culamega
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.500.000	100%	26.000.000	100%	26.500.000	100%	26.500.000	100	154.500.000	Kecamatan Culamega
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	15.500.000	100%	21.000.000	100%	26.500.000	100%	26.500.000	100	109.500.000	Kecamatan Culamega
			%	N/A Poin	N/A Poin		59		60		61		63		63		65		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Culamega				1.514.308.09 0	(CC) Poin	1.607.585.2 53	(CC) Poin	1.612.085.2 53	(B) Poin	1.616.585.25 3	(B) Poin	1.621.085.2 53	(B) Poin	1.621.085.25 3	(B) Poin	9.592.734.35 5	Kecamatan Culamega
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	69.050.000	100%	90.700.000	100%	98.500.000	100%	100.500.000	100%	102.500.000	100%	102.500.000	100	563.750.000	Kecamatan Gunungtanjung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Gunungtanjung
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	75.000.000	100%	77.200.000	100%	78.000.000	100%	78.500.000	100%	79.000.000	100%	79.000.000	100	466.700.000	Kecamatan Gunungtanjung
	PROGRAM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	28.000.000	100%	28.500.000	100%	28.500.000	100	162.500.000	Kecamatan Gunungtanjung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administarsi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	17.000.000	100%	18.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100	101.000.000	Kecamatan Gunungtanjung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Gunungtanjung	%	N/A Poin	N/A Poin	1.556.026.03 4	59 (CC) Poin	1.556.375.0 34	60 (CC) Poin	1.573.642.0 00	61 (B) Poin	1.576.242.0 0	63 (B) Poin	1.579.342.0 00	63 (B) Poin	1.579.342.00 0	65 (B) Poin	9.420.969.06 8	Kecamatan Gunungtanjung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	N/A %	100%	18.000.000	100%	20.000.000	100%	25.500.000	100%	26.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100	145.000.000	Kecamatan Jamanis
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	%	N/A Poin	N/A Poin	1.808.658.68 5	59 (CC) Poin	1.862.722.4 32	60 (CC) Poin	2.123.036.1 32	61 (B) Poin	2.110.536.13 2	63 (BB) Poin	2.115.036.1 32	63 (BB) Poin	2.115.036.13 2	65 (B) Poin	12.135.025.6 45	Kecamatan Jamanis
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis	%	83,99 Poin	84,46 Poin	56.750.000	84,71 Poin	57.700.000	84,97 Poin	92.500.000	85,22 Poin	94.500.000	85,48 Poin	96.500.000	85,48 Poin	96.500.000	85,73 Poin	494.450.000	Kecamatan Jamanis

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	N/A %	0	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100	106.000.000	Kecamatan Jamanis
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	N/A %	100%	76.000.000	100%	76.500.000	100%	89.000.000	100%	89.900.000	100%	90.100.000	100%	90.100.000	100	511.600.000	Kecamatan Jamanis
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	105.500.000	100%	81.300.000	100%	107.500.000	100%	107.500.000	100	451.800.000	Kecamatan Jamanis
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	25.000.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100	142.000.000	Kecamatan Jatiwaras
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jatiwaras	%	N/A Poin	N/A Poin	1.679.413.79 8	59 (CC) Poin	1.484.071.7 21	60 (CC) Poin	2.171.165.9 27	61 (B) Poin	2.184.303.75 4	63 (B) Poin	2.216.431.2 10	63 (B) Poin	2.216.431.21 0	65 (B) Poin	11.951.817.6 20	Kecamatan Jatiwaras
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	72.400.000	100%	72.900.000	100%	72.900.000	100%	74.600.000	100%	76.600.000	100%	76.600.000	100	446.000.000	Kecamatan Jatiwaras
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Jatiwaras
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	77.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100	461.000.000	Kecamatan Jatiwaras
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100	155.000.000	Kecamatan Jatiwaras
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	111.000.000	100%	113.500.000	100%	116.000.000	100%	116.000.000	100\	506.500.000	Kecamatan Kadipaten

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	51.000.000	100%	43.500.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100	208.500.000	Kecamatan Kadipaten
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten	%	N/A Poin	N/A Poin	1.499.060.89 8	59 (CC) Poin	1.548.573.2 98	60 (CC) Poin	1.636.033.9 27	61 (B) Poin	1.660.370.75 4	63 (B) Poin	1.654.502.9 10	63 (B) Poin	1.654.502.91 0	65 (B) Poin	9.653.044.69 7	Kecamatan Kadipaten
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten	%	83,99 Poin	84,46 Poin	67.349.000	84,71 Poin	60.554.050	84,97 Poin	90.250.000	85,22 Poin	104.250.000	85,48 Poin	113.750.000	85,48 Poin	113.750.000	85,73 Poin	549.903.050	Kecamatan Kadipaten
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	33,33%	25.000.000	33,33%	26.000.000	33,33%	26.500.000	33,33%	27.000.000	33,33%	27.000.000	0,3333	131.500.000	Kecamatan Kadipaten
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	75.000.000	100%	98.700.000	100%	107.000.000	100%	113.000.000	100%	113.000.000	100	582.700.000	Kecamatan Kadipaten
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	75.000.000	100%	76.500.000	100%	77.000.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100	459.500.000	Kecamatan Karangjaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.500.000	100%	26.000.000	100%	26.500.000	100%	26.500.000	100	154.500.000	Kecamatan Karangjaya
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	9.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000	100	57.000.000	Kecamatan Karangjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangjaya	%	N/A Poin	N/A Poin	1.323.846.45 0	59 (CC) Poin	1.466.598.7 96	60 (CC) Poin	1.471.285.3 84	61 (B) Poin	1.481.505.11 0	63 (B) Poin	1.499.997.1 59	63 (B) Poin	1.499.997.15 9	65 (B) Poin	8.743.230.05 8	Kecamatan Karangjaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangjaya	%	100%	100%	58.050.000	100%	58.050.000	100%	60.050.000	100%	62.050.000	100%	64.050.000	100%	64.050.000	100	366.300.000	Kecamatan Karangjaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	%	100%	100%	-	100%	0	100%	16.000.000	100%	16.500.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100	66.500.000	Kecamatan Karangjaya

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Karangnunggal
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100	456.000.000	Kecamatan Karangnunggal
	PROGRAM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Karangnunggal
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100%	100%	16.000.000	100%	32.000.000	100%	34.000.000	100%	36.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100	194.000.000	Kecamatan Karangnunggal
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangnunggal	%	N/A Poin	N/A Poin	1.692.479.582	59 (CC) Poin	2.084.172.057	60 (CC) Poin	2.316.894.475	61 (B) Poin	2.321.894.475	63 (B) Poin	2.326.894.475	63 (B) Poin	2.326.894.475	65 (B) Poin	13.069.229.539	Kecamatan Karangnunggal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	103.150.000	100%	103.150.000	100%	110.650.000	100%	112.150.000	100%	113.650.000	100%	113.650.000	100	656.400.000	Kecamatan Karangnunggal
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	30.000.000	100%	30.750.000	100%	31.250.000	100%	31.750.000	100%	31.250.000	100%	31.250.000	100	186.250.000	Kecamatan Leuwisari
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	81.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100	193.000.000	Kecamatan Leuwisari
	PROGRAM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	102.000.000	100%	103.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100	463.000.000	Kecamatan Leuwisari
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	14.000.000	100%	19.000.000	100%	20.750.000	100%	17.500.000	100%	17.850.000	100%	17.850.000	100	106.950.000	Kecamatan Leuwisari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Leuwisari	%	N/A Poin	N/A Poin	2.088.788.74 7	59 (CC) Poin	2.149.276.8 47	60 (CC) Poin	2.178.520.0 00	61 (B) Poin	2.160.092.00 0	63 (B) Poin	2.160.692.0 00	63 (B) Poin	2.160.692.00 0	65 (B) Poin	12.898.061.5 94	Kecamatan Leuwisari
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	81%	81%	63.950.000	81.05 %	63.950.000	82%	43.950.000	82.05 %	43.950.000	83%	43.950.000	83%	43.950.000	0,83	303.700.000	Kecamatan Leuwisari
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	30.000.000	100%	30.500.000	100%	31.000.000	100%	31.000.000	100	143.000.000	Kecamatan Mangunreja
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100	188.000.000	Kecamatan Mangunreja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	108.400.000	100%	108.400.000	100%	108.400.000	100%	108.400.000	100	483.600.000	Kecamatan Mangunreja
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	19.750.000	100%	16.500.000	100%	21.850.000	100%	21.850.000	100	104.950.000	Kecamatan Mangunreja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mangunreja	%	N/A Poin	N/A Poin	1.782.557.36 0	59 (CC) Poin	1.845.389.9 22	60 (CC) Poin	1.907.104.9 22	61 (B) Poin	1.928.589.92 2	63 (B) Poin	1.901.639.9 22	63 (B) Poin	1.901.639.92 2	65 (B) Poin	11.266.921.9 70	Kecamatan Mangunreja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	80.42 %	80.42 %	50.000.000	80.5 %	67.600.000	80.85 %	67.600.000	81.2 %	58.100.000	81.55 %	58.600.000	81.55 %	58.600.000	81.55 %	360.500.000	Kecamatan Mangunreja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	64.250.000	100%	42.130.000	100%	43.630.000	100%	45.130.000	100%	46.630.000	100%	46.630.000	100	288.400.000	Kecamatan Manonjaya

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	28.000.000	100%	29.400.000	100%	30.800.000	100%	32.200.000	100%	32.200.000	100	152.600.000	Kecamatan Manonjaya
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	78.000.000	100%	78.500.000	100%	79.000.000	100%	79.000.000	100	466.500.000	Kecamatan Manonjaya
	PROGRAM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	28.000.000	100%	28.500.000	100%	28.500.000	100	162.500.000	Kecamatan Manonjaya
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100%	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.500.000	100%	25.500.000	100%	26.500.000	100%	26.500.000	100	151.000.000	Kecamatan Manonjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Manonjaya	%	N/A Poin	N/A Poin	1.534.402.410	59	1.534.402.410	60	1.636.773.979	61	1.622.588.924	63	1.641.532.518	63	1.641.532.518	65	9.611.232.759	Kecamatan Manonjaya
							(CC) Poin		(CC) Poin		(B) Poin		(B) Poin		(B) Poin				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%	39.500.000	100%	130.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100	688.500.000	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100	670.500.000	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	152.000.000	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	150.000.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100	1.150.000.000	Kecamatan Padakembang
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	125.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100	845.000.000	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Padakembang	%	N/A Poin	N/A Poin	1.696.324.01 7	59 (CC) Poin	1.696.324.0 17	60 (CC) Poin	1.707.579.1 89	61 (CC) Poin	1.982.427.19 1	63 (B) Poin	230.327.189	63 (B) Poin	230.327.189	65 (B) Poin	7.543.308.79 2	Kecamatan Padakembang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pagerageung	%	N/A Poin	N/A Poin	1.662.655.45 2	59 (CC) Poin	1.649.272.7 17	60 (CC) Poin	1.768.702.1 49	61 (B) Poin	1.787.051.41 3	63 (B) Poin	1.806.228.9 90	63 (B) Poin	1.806.228.99 0	65 (B) Poin	10.480.139.7 11	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerageung	%	83,99 Poin	84,46 Poin	77.000.400	84,71 Poin	77.000.000	84,97 Poin	77.500.000	85,22 Poin	78.000.000	85,48 Poin	78.500.000	85,48 Poin	78.500.000	100 Poin	466.500.400	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	10%	0	20%	25.000.000	20%	25.500.000	20%	26.000.000	20%	26.000.000	0,2	102.500.000	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang di Tindak Lanjuti	%	100%	100%	75.629.800	100%	75.000.000	100%	85.000.000	100%	86.000.000	100%	87.000.000	100%	87.000.000	100	495.629.800	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di laksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	32.000.000	100%	32.500.000	100%	33.000.000	100%	33.000.000	100	180.500.000	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang Undangan	%	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100	125.000.000	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pancatengah	%	N/A Poin	N/A Poin	1.216.608.55 5	59 (CC) Poin	1.501.614.2 70	60 (CC) Poin	1.720.316.5 55	61 (B) Poin	1.798.516.55 5	63 (B) Poin	1.801.216.5 55	63 (B) Poin	1.801.216.55 5	65 (B) Poin	9.839.489.04 5	Kecamatan Pancatengah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	79.90 Poin	79.90 Poin	71.000.000	80.50 Poin	71.000.000	80.85 Poin	72.500.000	81.20 Poin	74.000.000	81.55 Poin	75.500.000	81.55 Poin	75.500.000	85.74 Poi n	439.500.000	Kecamatan Pancatengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	18.18 %	0	27.3 %	11.000.000	27.3 %	11.000.000	27.3 %	11.000.000	27.3 %	11.000.000	27.3 %	44.000.000	Kecamatan Pancatengah

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	66.000.000	100%	75.000.000	100%	81.000.000	100%	85.000.000	100%	85.500.000	100%	85.500.000	100	478.000.000	Kecamatan Pancatengah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	100.000.000	100%	100.500.000	100%	102.000.000	100%	102.000.000	100	454.500.000	Kecamatan Pancatengah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.400.000	100%	26.400.000	100	143.000.000	Kecamatan Pancatengah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100	96.000.000	Kecamatan Parungponteng
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Parungponteng	%	N/A Poin	N/A Poin	-	59 (CC) Poin	1.783.537.1 90	60 (CC) Poin	2.430.683.1 17	61 (B) Poin	2.535.358.06 8	63 (B) Poin	2.643.399.2 66	63 (B) Poin	2.643.399.26 6	65 (B) Poin	12.036.376.9 07	Kecamatan Parungponteng
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	80 Poin	81 Poin	67.750.000	81 Poin	67.750.000	82,05 Poi n	69.750.000	82,85 Poi n	71.750.000	83,4 Poin	73.750.000	83,4 Poin	73.750.000	84,5 Poin	424.500.000	Kecamatan Parungponteng
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	N/A %	0	12.5 %	8.000.000	12.5 %	8.500.000	12.5 %	9.000.000	12.5 %	9.000.000	12.5 %	34.500.000	Kecamatan Parungponteng
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100	252.000.000	Kecamatan Parungponteng
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	N/A %	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	110.000.000	100%	110.500.000	100%	111.000.000	100%	111.000.000	100	492.500.000	Kecamatan Parungponteng
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	N/A %	100%	8.000.000	100%	12.000.000	100%	16.000.000	100%	17.200.000	100%	18.800.000	100%	18.800.000	100	90.800.000	Kecamatan Puspahiang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Puspahiang	%	N/A Poin	N/A Poin	1.656.231.10 2	59 (CC) Poin	1.444.623.4 02	60 (CC) Poin	1.605.218.8 64	61 (B) Poin	1.682.395.22 6	63 (B) Poin	1.760.471.5 88	63 (B) Poin	1.760.471.58 8	65 (B) Poin	9.909.411.77 0	Kecamatan Puspahiang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	79.90 Poin	79.90 Poin	66.900.000	80.50 Poin	67.300.000	80.85 Poin	99.300.000	81.20 Poin	102.800.000	81.55 Poin	105.300.000	81.55 Poin	105.300.000	81.95 Poin	546.900.000	Kecamatan Puspahiang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	n/a %	n/a %	-	n/a %	0	14.3 %	60.000.000	14.3 %	73.300.000	14.3 %	86.600.000	14.3 %	86.600.000	14.3 %	306.500.000	Kecamatan Puspahiang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	N/A %	100%	76.000.000	100%	76.500.000	100%	81.000.000	100%	83.400.000	100%	85.600.000	100%	85.600.000	100	488.100.000	Kecamatan Puspahiang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Cakupan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	0	100%	123.500.000	100%	127.500.000	100%	131.500.000	100%	131.500.000	100	539.000.000	Kecamatan Puspahiang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	%	79,9 Poin	80,28 Poin	60.300.000	80,52 Poin	95.684.900	80,76 Poin	133.550.000	81 Poin	137.050.000	81,25 Poin	140.550.000	81,25 Poin	140.550.000	81,49 Poin	707.684.900	Kecamatan Rajapolah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	n/a %	n/a %	-	n/a %	0	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100	106.000.000	Kecamatan Rajapolah
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	75.991.800	100%	93.500.000	100%	95.000.000	100%	96.500.000	100%	96.500.000	100	533.491.800	Kecamatan Rajapolah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	32.000.000	100%	111.000.000	100%	113.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100	511.000.000	Kecamatan Rajapolah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	55.000.000	100%	47.000.000	100%	59.500.000	100%	59.500.000	100	253.000.000	Kecamatan Rajapolah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rajapolah	%	80 Poin	80,30 Poin	1.544.332.42 3	81,73 Poin	1.900.225.0 50	82,20 Poin	2.217.431.0 00	82,76 Poin	1.993.181.00 0	83,15 Poin	1.988.431.0 00	83,15 Poin	1.988.431.00 0	83,80 Poin	11.632.031.4 73	Kecamatan Rajapolah

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	77.400.000	100%	77.400.000	100%	77.400.000	100%	77.400.000	100%	77.400.000	100%	77.400.000	100	464.400.000	Kecamatan Salawu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	16.500.000	100%	17.250.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100	90.250.000	Kecamatan Salawu
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100	456.000.000	Kecamatan Salawu
	PROGRAM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	24.999.950	100%	24.999.950	100%	24.999.950	100%	24.999.950	100%	24.999.950	100%	24.999.950	100	149.999.700	Kecamatan Salawu
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undanganPersentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undanganPersentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100	144.000.000	Kecamatan Salawu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Salawu	%	N/A Poin	N/A Poin	1.341.941.86 1	59 (CC) Poin	1.341.941.8 61	60 (CC) Poin	1.473.941.8 61	61 (B) Poin	1.436.941.86 1	63 (B) Poin	1.436.941.8 61	63 (B) Poin	1.436.941.86 1	65 (B) Poin	8.468.651.16 6	Kecamatan Salawu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	72.050.000	100%	72.000.000	100%	78.500.000	100%	80.000.000	100%	82.000.000	100%	82.000.000	100	466.550.000	Kecamatan Salopa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Salopa

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	76.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100	460.000.000	Kecamatan Salopa
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	34.600.000	100%	35.500.000	100%	36.400.000	100%	37.300.000	100%	37.300.000	100	206.100.000	Kecamatan Salopa
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100%	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	19.800.000	100%	21.600.000	100%	23.400.000	100%	23.400.000	100	124.200.000	Kecamatan Salopa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Salopa	%	N/A Poin	N/A Poin	1.647.437.727	59 (CC) Poin	1.791.425.900	60 (CC) Poin	1.681.772.600	61 (B) Poin	1.708.587.600	63 (B) Poin	1.765.842.600	63 (B) Poin	1.765.842.600	65 (B) Poin	10.360.909.027	Kecamatan Salopa
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	%	80,09 Poin	81 Poin	61.600.000	81,05 Poin	61.600.000	82 Poin	63.100.000	82,05 Poin n	64.600.000	83 Poin	66.100.000	83 Poin	66.100.000	83,05 Poin n	383.100.000	Kecamatan Sariwangi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	-	Kecamatan Sariwangi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	N/A %	100%	76.000.000	100%	76.000.000	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	152.000.000	Kecamatan Sariwangi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	N/A %	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	113.900.000	100%	114.900.000	100%	115.900.000	100%	115.900.000	100	510.600.000	Kecamatan Sariwangi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	N/A %	100%	16.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100	56.000.000	Kecamatan Sariwangi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	%	N/A Poin	N/A Poin	1.700.510.127	59 (CC) Poin	1.812.564.446	60 (CC) Poin	1.854.964.446	61 (B) Poin	1.822.464.446	63 (B) Poin	1.824.964.446	63 (B) Poin	1.824.964.446	65 (B) Poin	10.840.432.357	Kecamatan Sariwangi

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	90.700.000	100%	90.700.000	100%	90.700.000	100%	90.700.000	100%	90.700.000	100%	90.700.000	100	544.200.000	Kecamatan Singaparna
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	16.500.000	100%	17.250.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100	90.250.000	Kecamatan Singaparna
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	77.200.000	100%	75.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100	456.200.000	Kecamatan Singaparna
	PROGRAM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	108.400.000	100%	108.400.000	100%	108.400.000	100%	108.400.000	100	483.600.000	Kecamatan Singaparna
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100	80.000.000	Kecamatan Singaparna
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Singaparna	%	N/A Poin	N/A Poin	1.626.285.59 4	59	1.652.769.3 23	60	1.692.633.2 58	61	1.665.633.25 8	63	1.665.633.2 58	63	1.665.633.25 8	65	9.968.587.94 9	Kecamatan Singaparna
							(CC) Poin		(CC) Poin		(B) Poin		(B) Poin		(B) Poin		(B) Poin		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	80 Poin	81 Poin	98.350.000	81.73 Poin	50.932.200	82.76 Poin	51.950.844	84.33 Poin	52.989.861	85.32 Poin	54.049.658	85.32 Poin	54.049.658	86.23 Poin'	362.322.221	Kecamatan Sodonghilir
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	n/a %	n/a %	-	25%	0	33%	18.000.000	41.67 %	24.000.000	50%	24.000.000	50%	24.000.000	58.33 %	90.000.000	Kecamatan Sodonghilir
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	75.000.000	100%	81.000.000	100%	80.000.000	100%	81.000.000	100%	81.000.000	100	474.000.000	Kecamatan Sodonghilir
	PROGRAM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	%	N/A %	100%	15.890.000	100%	25.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	57.000.000	100%	57.000.000	100	264.890.000	Kecamatan Sodonghilir
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	21.110.000	100%	18.185.000	100%	23.000.000	100%	28.250.000	100%	34.500.000	100%	34.500.000	100	159.545.000	Kecamatan Sodonghilir
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Kecamatan	%	N/A Poin	N/A Poin	1.416.853.82 0	59 (CC) Poin	1.436.923.4 76	60 (CC) Poin	1.558.163.9 46	61 (B) Poin	1.594.367.22 5	63 (B) Poin	1.642.144.5 69	63 (B) Poin	1.642.144.56 9	65 (B) Poin	9.290.597.60 5	Kecamatan Sodonghilir
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100%	100%	24.895.900	100%	24.895.900	100%	24.895.900	100%	24.895.900	100%	24.895.900	100%	24.895.900	100	149.375.400	Kecamatan Sukahening
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	15.000.000	100%	8.000.000	100%	17.000.000	100%	17.500.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100	93.500.000	Kecamatan Sukahening
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukahening	%	80 Poin	80,30 Poin	280.339.998	81,73 Poin	289.223.048	82,20 Poin	320.018.998	82,76 Poin	325.018.998	83,15 Poin	325.018.998	83,15 Poin	325.018.998	83,80 Poin	1.864.639.03 8	Kecamatan Sukahening
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening	%	79,9 Poin	80,28 Poin	62.261.400	80,52 Poin	76.511.400	80,76 Poin	78.023.400	81,00 Poin	80.523.400	81,25 Poin	83.023.400	81,25 Poin	83.023.400	81,49 Poin	463.366.400	Kecamatan Sukahening
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A %	100%	6.998.800	100%	6.998.800	100%	7.498.800	100%	7.998.800	100%	8.498.800	100%	8.498.800	100	46.492.800	Kecamatan Sukahening
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	74.994.150	100%	74.994.150	100%	74.994.150	100%	75.494.150	100%	75.994.150	100%	75.994.150	100	452.464.900	Kecamatan Sukahening
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	69.750.000	100%	49.225.000	100%	77.475.000	100%	79.975.000	100%	82.475.000	100%	82.475.000	100	441.375.000	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Sukaraja

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	111.100.000	100%	118.500.000	100%	121.400.000	100%	124.300.000	100%	124.300.000	100	675.600.000	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	106.500.000	100%	108.500.000	100%	110.500.000	100%	110.500.000	100	488.500.000	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	16.000.000	100%	17.600.000	100%	44.600.000	100%	28.000.000	100%	30.500.000	100%	30.500.000	100	167.200.000	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukaraja	%	N/A Poin	N/A Poin	1.526.531.19 0	59 (CC) Poin	1.687.527.8 40	60 (CC) Poin	1.752.782.5 80	61 (B) Poin	1.790.554.41 4	63 (B) Poin	1.828.853.6 86	63 (B) Poin	1.828.853.68 6	65 (B) Poin	10.415.103.3 96	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	93.000.000	100%	96.000.000	100%	99.000.000	100%	102.000.000	100%	102.000.000	100	568.000.000	Kecamatan Sukarame
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	32.000.000	100%	33.000.000	100%	34.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100	194.000.000	Kecamatan Sukarame
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	45.000.000	100%	46.000.000	100%	47.700.000	100%	49.400.000	100%	51.100.000	100%	51.100.000	100	290.300.000	Kecamatan Sukarame
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukarame	%	N/A Poin	N/A Poin	1.654.603.43 4	59 (CC) Poin	1.812.850.2 39	60 (CC) Poin	1.764.137.3 87	61 (B) Poin	1.777.142.40 4	63 (B) Poin	1.801.069.9 03	63 (B) Poin	1.801.069.90 3	65 (B) Poin	10.610.873.2 70	Kecamatan Sukarame
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	100%	64.365.800	100%	48.250.000	100%	50.250.000	100%	52.250.000	100%	54.250.000	100%	54.250.000	100	323.615.800	Kecamatan Sukarame
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	0	100%	14.000.000	100%	15.200.000	100%	15.900.000	100%	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Sukarame

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Di Tindak Lanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	80.000.000	100%	103.700.000	100%	109.000.000	100%	111.000.000	100%	111.000.000	100	590.700.000	Kecamatan Sukaratu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000	100%	126.500.000	100%	133.000.000	100%	133.000.000	100	567.500.000	Kecamatan Sukaratu
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	16.000.000	100%	20.000.000	100%	45.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100	291.000.000	Kecamatan Sukaratu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	%	N/A Poin	N/A Poin	1.698.469.02 9	59 (CC) Poin	1.919.849.4 56	60 (CC) Poin	2.109.100.4 56	61 (B) Poin	2.116.100.45 6	63 (B) Poin	2.133.100.4 56	63 (B) Poin	2.133.100.45 6	65 (B) Poin	12.109.720.3 09	Kecamatan Sukaratu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	%	78,03 POIN	78,30 POI N	63.500.000	78,50 POI N	70.000.000	79 POIN	104.750.000	79,50 POI N	125.250.000	79,60 POI N	145.750.000	79,60 POI N	145.750.000	80,40 POI N	655.000.000	Kecamatan Sukaratu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	100%	N/A %	-	12,50%	0	25%	26.000.000	25%	26.500.000	25%	27.000.000	25%	27.000.000	0,25	106.500.000	Kecamatan Sukaratu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanran Publik	%	100%	100%	64.250.000	100%	42.130.000	100%	43.630.000	100%	45.130.000	100%	46.630.000	100%	46.630.000	100	288.400.000	Kecamatan Sukaresik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	-	100%	28.000.000	100%	29.400.000	100%	30.800.000	100%	32.200.000	100%	32.200.000	100	152.600.000	Kecamatan Sukaresik
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	80.000.000	100%	82.000.000	100%	84.000.000	100%	86.000.000	100%	86.000.000	100	494.000.000	Kecamatan Sukaresik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	25.000.000	100%	32.000.000	100%	33.000.000	100%	34.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100	194.000.000	Kecamatan Sukaresik

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capalan Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	16.000.000	100%	32.000.000	100%	34.000.000	100%	36.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100	194.000.000	Kecamatan Sukaresik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukaresik	%	N/A Poin	N/A Poin	1.557.044.21 0	59 (CC) Poin	1.615.263.1 10	60 (CC) Poin	1.614.212.2 48	61 (B) Poin	1.648.008.88 9	63 (B) Poin	1.682.337.4 63	63 (B) Poin	1.682.337.46 3	65 (B) Poin	9.799.203.38 3	Kecamatan Sukaresik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	81%	81%	63.950.000	81.05 %	63.950.000	82%	51.000.000	82,05%	52.000.000	83%	53.000.000	83%	53.000.000	0,83	336.900.000	Kecamatan Tanjungjaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100%	100%	30.000.000	100%	30.750.000	100%	31.250.000	100%	31.750.000	100%	32.250.000	100%	32.250.000	100	188.250.000	Kecamatan Tanjungjaya
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	76.000.000	100%	81.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100	193.000.000	Kecamatan Tanjungjaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	102.000.000	100%	103.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100	463.000.000	Kecamatan Tanjungjaya
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100%	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	20.750.000	100%	17.500.000	100%	22.850.000	100%	22.850.000	100	111.950.000	Kecamatan Tanjungjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Tanjungjaya	%	N/A Poin	N/A Poin	1.520.778.18 9	59 (CC) Poin	1.472.070.1 89	60 (CC) Poin	1.646.184.6 89	61 (B) Poin	1.558.940.18 9	63 (B) Poin	1.512.430.1 89	63 (B) Poin	1.512.430.18 9	65 (B) Poin	9.222.833.63 4	Kecamatan Tanjungjaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	79.90 Poin	79.90 Poin	65.000.000	80.50 Poin	65.000.000	80.85 Poin	67.000.000	81.20 Poin	69.000.000	81.55 Poin	71.000.000	81.55 Poin	71.000.000	81.95 Poin	408.000.000	Kecamatan Taraju
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A %	N/A %	-	N/A %	0	11.11 %	29.000.000	11.11 %	29.000.000	11.11 %	31.000.000	11.11 %	31.000.000	11.11 %	120.000.000	Kecamatan Taraju

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	N/A %	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	88.500.000	100%	89.000.000	100%	89.500.000	100%	89.500.000	100	506.500.000	Kecamatan Taraju
	PROGRAM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum																	
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	48.000.000	100%	48.500.000	100%	49.000.000	100%	49.000.000	100	244.500.000	Kecamatan Taraju	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	N/A %	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100	108.000.000	Kecamatan Taraju
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	%	N/A Poin	N/A Poin	1.635.288.84 4	59 (CC) Poin	1.724.340.7 27	60 (CC) Poin	1.811.330.7 27	61 (B) Poin	1.808.330.72 7	63 (B) Poin	1.810.830.7 27	63 (B) Poin	1.810.830.72 7	65 (B) Poin	10.600.952.4 79	Kecamatan Taraju
		I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	59,06	66.48	886.918.967 .644	67.50	1.179.013.7 66.201	68.50	1.085.035.7 37.730	69.50	1.083.749.63 9.109	70.50	1.134.204.4 67.960	71.50	1.201.244.81 5.591	71.50	6.570.167.39 4.235	
		Strategi: Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah																	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	%	92.70 %	100 %	778.417.982. 841	100 %	951.191.300 .376	100 %	856.181.636 .335	100 %	853.872.361. 087	100 %	906.908.695 .648	100 %	973.182.562. 208	100	5.319.754.53 8.495	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74 %	77 %	594.325.000	80 %	1.343.000.0 00	83 %	1.663.000.0 00	86 %	1.683.000.00 0	89 %	2.068.000.0 00	90 %	1.703.000.00 0	0,9	9.054.325.00 0	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	%	99.54 %	100 %	3.324.840.26 0	100 %	9.957.575.0 00	100 %	11.695.000. 000	100 %	10.145.000.0 00	100 %	6.295.000.0 00	100 %	6.470.000.00 0	100	47.887.415.2 60	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70.08 Poin	76.00 Poin	127.729.900	80.00 Poin	230.000.000	81.00 Poin	253.000.000	82.00 Poin	278.300.000	83.00 Poin	306.130.000	84.00 Poin	336.743.000	84.00 Poin	1.531.902.90 0	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	85.83 Poin	86.00 Poin	104.454.089. 643	86.50 Poin	216.291.890 .825	86.75 Poin	215.243.101 .395	86.80 Poin	217.770.978. 022	87.00 Poin	218.626.642 .312	87.25 Poin	219.552.510. 383	87.25 Poin	1.191.939.21 2.580	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
		I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56,73	57	25.800.756. 984	58	36.199.026. 786	59	31.977.132. 271	60	32.575.041.3 54	61	33.641.670. 645	62	35.491.815.0 65	62	195.685.443. 105	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Strategi: Meningkatkan kualitas manajemen ASN																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	75,93	76,03	8.212.852.63 4	76,13	9.402.938.3 36	76,24	10.410.480. 828	76,36	11.451.528.9 11	76,49	12.596.681. 802	76,69	13.856.349.9 82	76,69	65.930.832.4 93	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Poin	77	77	1.737.771.80 0	77,1	6.185.796.2 50	77,3	4.007.613.4 43	77,6	4.093.407.44 3	77,95	4.189.655.8 43	78,3	4.288.479.08 3	78,3	24.502.723.8 62	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian)	Poin	83,5	83,5	4.327.971.30 0	91	5.945.154.1 50	94	5.541.060.0 00	96,5	5.541.060.00 0	96,5	5.541.060.0 00	96,5	5.541.060.00 0	96,5	32.437.365.4 50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi																	
		Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian)	Poin	80	82,5	1.755.232.70 0	97,5	3.070.000.0 00	102,5	3.208.000.0 00	132,5	3.100.000.00 0	132,5	3.140.000.0 00	135	3.264.141.00 0	135	17.537.373.7 00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi																	
		Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian)	Poin	116,5	119	81.346.600	124	620.000.000	123,5	705.000.000	128,5	695.000.000	128,5	710.000.000	133,5	750.000.000	133,5	3.561.346.60 0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/Orang /Tahun	9,6 JP/Orang /Tahun	10 JP/Orang/T ahun	9.685.581.95 0	12 JP/Orang/T ahun	10.975.138. 050	14 JP/Orang/T ahun	8.104.978.0 00	16 JP/Orang/T ahun	7.694.045.00 0	18 JP/Orang/T ahun	7.464.273.0 00	20 JP/Orang/T ahun	7.791.785.00 0	20 JP/Orang/T ahun	51.715.801.0 00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		I.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	45	1.452.378.6 39	47	2.016.500.0 00	49	2.056.830.0 00	51	2.097.966.60 0	55	2.139.925.9 32	60	2.182.724.45 1	60	11.946.325.6 22	
					(Inovatif)		(Inovatif)		(Inovatif)		(Inovatif)		(Sangat Inovatif)		(Sangat Inovatif)				

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Strategi: Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan																	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	N/A	100	1.452.378.639	100	2.016.500.000	100	2.056.830.000	100	2.097.966.600	100	2.139.925.932	100	2.182.724.451	100	11.946.325.622	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
M.3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata																		
T.3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-0,98	1-3	152.563.303.777	1-3	679.660.592.532	2-3	459.717.075.684	2-4	483.050.669.920	2-4	487.337.426.686	3-4	506.895.981.770	3-4	2.769.225.050.370	
S.7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan					152.563.303.777		679.660.592.532		459.717.075.684		483.050.669.920		487.337.426.686		506.895.981.770		2.769.225.050.370	
		I.13 PDRB Per Kapita	Rp Juta	21.33	23.41	152.563.303.777	24.84	679.660.592.532	26.27	459.717.075.684	27.71	483.050.669.920	29.14	487.337.426.686	30.57	506.895.981.770	30.57		
		Strategi: - Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian -Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan -Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	60.57 Poin	63.60 Poin	22.443.974.907	67.10 Poin	24.060.185.146	67.16 Poin	31.981.490.718	70.85 Poin	34.140.389.254	70.99 Poin	36.407.232.717	74.96 ppoin	38.787.418.353	74.96 ppoin	187.820.691.095	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		IKM	Poin	78.98 Poin	82.93 Poin	1.761.951.15 0	83.32 Poin	3.629.254.9 70	83.72 Poi n	2.742.054.1 04	84.11 Poi n	2.879.156.80 9	84.51 Poi n	3.023.114.6 49	84.90 poin	3.174.270.38 2	84.90 poin	17.209.802.0 63	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.150.427.50 0	12 Bulan	4.545.204.4 00	12 Bulan	111.033.479 .305	12 Bulan	116.585.153. 270	12 Bulan	122.414.410 .934	12 Bulan	128.535.131. 480	12 Bulan	485.263.806. 889	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase legalitas usaha perikanan budidaya, pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil , tanda daftar pembudi daya ikan kecil dan Produksi perikanan budi daya	Bulan	N/A Bulan	12 Bulan	1.742.517.50 0	12 Bulan	2.124.253.4 36	12 Bulan	5.745.900.8 08	12 Bulan	6.033.195.84 8	12 Bulan	6.334.855.6 40	12 Bulan	6.651.598.42 2	12 Bulan	28.632.321.6 54	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan dan Produksi pengolahan hasil usaha perikanan	Kelompo k	N/A Kelompo k	4 Kelomp ok	395.000.000	10 Kelompok	555.028.400	10 Kelompok	2.047.529.8 20	10 Kelompok	2.149.906.31 1	10 Kelompok	2.257.401.6 27	10 Kelompok	2.370.271.70 8	10 Kelompok	9.775.137.86 5	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	Kecamat an	39 Kecamat an	39 Kecam atan	21.868.007.3 00	39 Kecam atan	157.100.526 .650	39 Kecam atan	45.208.291. 067	39 Kecam atan	47.468.705.6 20	39 Kecam atan	49.842.140. 901	39 Kecam atan	52.334.247.9 46	39 Kecam atan	373.821.919. 485	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)	Ha	0 Ha	50 Ha	35.502.329.9 59	0 Ha	105.201.600 .000	205 Ha	84.465.234. 000	210 Ha	100.415.643. 019	215 Ha	104.684.487 .669	215 Ha	109.613.683. 453	215 Ha	539.882.978. 100	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (Keswan dan Veteriner)	Paket	2 Paket	2 Paket	43.806.300	9 Paket	1.030.000.0 00	9 Paket	1.676.500.0 00	9 Paket	1.760.325.00 0	9 Paket	1.848.341.2 50	9 Paket	1.940.758.31 3	9 Paket	8.299.730.86 3	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya Bencana Pertanian dan Tertanggulangnya bencana pertanian	Paket	1 Paket	0 Paket	0	2 Paket	400.000.000	2 Paket	820.000.000	2 Paket	861.000.000	2 Paket	904.050.000	2 Paket	949.252.500	2 Paket	3.934.302.50 0	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase izin usaha pertanian	PBS	N/A PBS	0 PBS	0	34 PBS	499.999.800	34 PBS	1.099.999.7 90	0 PBS	1.154.999.78 0	34 PBS	1.212.749.7 68	34 PBS	1.273.387.25 7		5.241.136.39 5	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani dan Terlaksananya penyuluhan pertanian	Kelompo k	0 Kelompo k	125 Kelo mpok	1.347.898.89 6	237 Kelo mpok	16.065.766. 850	240 Kelo mpok	9.498.297.0 46	245 Kelo mpok	9.973.211.89 8	250 Kelo mpok	10.471.872. 493	255 kelompok	11.255.931.7 43	255 kelompok	58.612.978.9 26	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Unit	1 unit	1 unit	500.000.000	1 unit	1.250.000.000	1 unit	1.187.500.000	1 unit	1.159.375.000	1 unit	1.164.218.750	1 unit	1.171.023.438	1 unit	6.432.117.188	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase ketahanan pangan masyarakat	Ton	N/A Ton	50 Ton	1.301.755.000	60 Ton	7.648.100.000	70 Ton	3.798.092.750	80 Ton	3.987.997.388	90 Ton	4.187.397.257	100 Ton	4.396.767.120	100 Ton	25.320.109.514	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase keamanan pangan masyarakat	Kecamat an	N/A Kecamat a n	6 Kecama tan	0	12 Kecam atan	400.000.000	14 Kecam atan	570.000.000	16 Kecam atan	598.500.000	18 Kecam atan	628.425.000	20 Kecam atan	659.846.250	20 Kecam atan	2.856.771.250	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	44.27 %	46.15 %	0	47.98 %	433.980.050	49.75 %	500.000.000	51.47 %	550.000.000	53.14 %	600.000.000	54.76 %	650.000.000	54.76 %	2.733.980.050	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	%	100 %	100 %	0	100 %	681.357.550	100 %	500.000.000	100 %	525.000.000	100 %	550.000.000	100 %	575.000.000	100	2.831.357.550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang dibina	%	100 %	100 %	350.000.000	100 %	10.418.304.150	100 %	500.000.000	100 %	550.000.000	100 %	600.000.000	100 %	650.000.000	100	13.068.304.150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro Formal	%	14.2 %	19.7 %	582.683.150	24.8 %	3.003.028.706	29.5 %	1.453.000.000	33.8 %	1.595.000.000	37.7 %	1.705.000.000	41.2 %	1.815.000.000	41.2 %	10.153.711.856	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan wirausaha baru	%	52 %	50 %	0	36 %	5.792.915.700	28 %	750.000.000	24 %	775.000.000	20 %	800.000.000	18 %	825.000.000	18	8.942.915.700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana perdagangan yang mendukung aktifitas perdagangan	%	100%	100%	30.354.547.600	100%	141.830.000.000	100%	36.848.946.018	100%	39.636.846.116	100%	42.369.072.886	100%	45.163.950.375	100%	336.203.362.995	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	%	1 %	1 %	1.050.000.00 0	1 %	1.805.300.0 00	1 %	2.600.000.0 00	1 %	2.600.000.00 0	1 %	2.600.000.0 00	1 %	2.600.000.00 0	1	13.255.300.0 00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	%	2 %	2 %	491.500.000	2 %	1.600.000.0 00	2 %	850.000.000	2 %	850.000.000	2 %	850.000.000	2 %	1.000.000.00 0	2	5.641.500.00 0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera dan tera ulang	%	8282 Alat UTTP	5%	215.600.000	5%	330.000.000	5%	400.000.000	5%	450.000.000	5%	500.000.000	5%	550.000.000	5%	2.445.600.00 0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan formal	Unit Usaha	1535 Unit Usaha	1550 Unit Usaha	500.000.000	1566 Unit Usaha	1.356.000.0 00	1582 Unit Usaha	125.000.000	1597 Unit Usaha	200.000.000	1613 Unit Usaha	200.000.000	1629 Unit Usaha	200.000.000	1629 Unit Usaha	2.581.000.00 0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah	%	1.2 %	1.3 %	2.800.000.00 0	1.4 %	2.185.000.0 00	1.5 %	1.550.000.0 00	1.6 %	1.300.000.00 0	1.7 %	1.350.000.0 00	1.8 %	950.000.000	1.8 %	10.135.000.0 00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM Formal	%	2 %	2.3 %	0	3.4 %	150.000.000	3.7 %	50.000.000	4 %	100.000.000	4.3 %	110.000.000	4.5 %	275.000.000	4.5 %	685.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terfasilitasinya pelayanan sistem informasi Industri	IKM	- IKM	- IKM	0	200 IKM	250.000.000	200 IKM	275.000.000	200 IKM	300.000.000	200 IKM	332.750.000	200 IKM	336.025.000	200 IKM	1.493.775.00 0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	80 Poin	81 Poin	2.202.851.00 0	81 Poin	4.252.300.5 80	82 Poin	3.037.710.4 00	82 Poin	2.853.531.44 0	83 Poin	2.952.534.5 84	83 Poin	3.050.888.04 2	83 Poin	18.349.816.0 46	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	72 Poin	74 Poin	13.158.093.2 66	75 Poin	15.045.299. 867	76 Poin	13.775.652. 192	77 Poin	14.457.184.8 01	78 Poin	15.172.794. 041	79 Poin	15.969.183.7 44	79 Poin	87.578.207.9 11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	Rupiah	979.264. 000	2,047,000, 000 Rp	1.420.845.00 0	2,149,350, 000 Rp	119.358.927 .500	2,256,817, 500 Rp	57.895.000. 000	2,369,658, 375 Rp	49.995.000.0 00	2,488,141, 294 Rp	32.444.984. 500	2,612,548, 358 Rp	34.067.233.7 25	2,612,548, 358 Rp	295.181.990. 725	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	%	3 %	3 %	50.000.000	5 %	60.000.000	7 %	175.000.000	9 %	175.000.000	11 %	175.000.000	13 %	183.750.000	0,13	818.750.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-95,64 %	0 %	830.000.000	10 %	5.750.000.0 00	15 %	3.400.000.0 00	15 %	3.950.000.00 0	20 %	3.950.000.0 00	30	3.950.000.00 0	30	21.830.000.0 00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya	%	-54,50 %	0 %	430.000.000	231,48 %	3.100.000.0 00	3.00 %	2.050.000.0 00	3.00 %	2.400.000.00 0	3.00 %	2.400.000.0 00	3.00 %	2.520.000.00 0	3.00 %	12.900.000.0 00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	0 %	0 %	-	1.25 %	15.529.720. 000	2.43 %	475.000.000	3.52 %	475.000.000	4.49 %	175.000.000	5.31 %	175.000.000	5.31 %	16.829.720.0 00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	%	0.96%	0.41%	492.903.000	1.25 %	600.000.000	1.875 %	1.525.000.0 00	2.50 %	1.525.000.00 0	3.13 %	1.525.000.0 00	3.75 %	1.525.000.00 0	3.75 %	7.192.903.00 0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	%	76.39 Poin	79.46 Poin	150.000.000	79.66 Poin	167.203.650	79.76 Poi n	150.000.000	79.86 Poi n	150.000.000	80.00 Poi n	150.000.000	80.10 Poi n	150.000.000	80.10 Poi n	917.203.650	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	Poin	Poin	6.043.678.06 2	80	11.027.634. 820	80	8.945.966.6 17	81	8.862.440.61 7	82	9.060.654.8 20	83	9.134.654.82 0	83	53.075.029.7 56	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	%	00 %	00 %	0	100 %	900.000.000	100 %	990.000.000	100 %	1.002.000.00 0	100 %	1.110.000.0 00	100 %	1.230.000.00 0	100%	5.232.000.00 0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitas kerjasama desa	Desa	00 Desa	351 Desa	250.000.000	351 Desa	250.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	2.900.000.00 0	Dinas Pemberdayaan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Desa	00 Desa	351 Desa	450.000.000	351 Desa	2.734.372.0 00	351 Desa	8.865.850.0 00	351 Desa	7.963.050.00 0	351 Desa	9.165.850.0 00	351 Desa	8.373.050.00 0	351 Desa	37.552.172.0 00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	Lembaga	00 Lembaga	180 Lembaga	1.682.934.18 7	350 Lembaga	2.050.000.0 00	402 Lembaga	2.825.000.0 00	440 Lembaga	3.062.500.00 0	467 Lembaga	3.300.000.0 00	505 Lembaga	3.575.250.00 0	505 Lembaga	16.495.684.1 87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PMD	Poin	00 Poin	00 Poin	0	55 Poin	3.890.821.4 07	57 Poin	4.010.000.0 00	59 Poin	4.021.000.00 0	61 Poin	4.047.050.0 00	63 Poin	407.370.500	63 Poin	16.376.241.9 07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Nilai IKM Dinas PMD	Poin	00 Poin	00 Poin	0	76,61 Poin	598.506.900	77,61 Poi n	2.720.581.0 50	78,61 Poi n	2.959.557.75 0	79,01 Poi n	3.161.037.2 00	79,60 Poi n	3.281.037.20 0	79,60 Poi n	12.720.720.1 00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
M.4	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global																		
T.4	Meningkatkan investasi daerah	Persentase Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp Juta	7.292,07	7,883.46	334.605.295 .280	8,041.13	751.107.853 .808	8,201.95	676.315.756 .922	8,365.99	675.058.102. 234	8,533.31	703.056.114 .974	8,703.98	727.926.942. 975	8,703.98	3.868.070.06 6.193	
S.8	Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya					334.605.295 .280		751.107.853 .808		676.315.756 .922		675.058.102. 234		703.056.114 .974		727.926.942. 975		3.868.070.06 6.193	
		I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	149.219. 000.000	3	334.605.295 .280	3	751.107.853 .808	4	676.315.756 .922	4	675.058.102. 234	5	703.056.114 .974	5	727.926.942. 975	5	3.868.070.06 6.193	
		Menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi -Mencetak tenaga kerja unggul berdaya saing																	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokume n	0	0 Dokume n	0	1 Dokum en	250.000.000	0 Dokum en	0	0 Dokum en	0	0 Dokum en	-	1 dokumen	250.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	Orang	624 Orang	848 Oran g	2.503.619.49 4	1200 Ora ng	7.126.564.0 00	1200 Ora ng	6.250.000.0 00	1200 Ora ng	6.350.000.00 0	1200 Ora ng	6.450.000.0 00	1200 Ora ng	6.550.000.00 0	6624 orang	35.230.183.4 94	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	3249 orang	3281 oran g	10.042.925.5 00	3313 oran g	10.749.327. 757	3345 oran g	10.849.999. 167	3377 oran g	11.119.778.6 10	3409 oran g	12.017.636. 636	3441 oran g	13.205.611.5 71	23415 orang	67.985.279.2 41	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus HI yang diselesaikan	%	100 persen	100 persen	69.430.250	100 persen	524.873.000	100 persen	650.000.000	100 persen	650.000.000	100 persen	650.000.000	100 persen	650.000.000	100 persen	3.194.303.25 0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Jumlah Investor	%	2.5 %	3 %	394.390.500	3 %	400.000.000	4 %	600.000.000	4 %	125.000.000	5 %	255.000.000	5 %	710.000.000	0,05	2.484.390.50 0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	Pameran	- Pameran	5 Pamera n	190.320.900	5 Pamera n	500.000.000	5 Pamera n	500.000.000	6 Pamera n	800.000.000	6 Pamera n	860.000.000	6 Pamera n	925.000.000	33 pameran	3.775.320.90 0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Jenis ijin	55 Jenis Ijin	55 Jenis Ijin	337.750.000	55 Jenis Ijin	32.047.099. 542	55 Jenis Ijin	1.750.000.0 00	55 Jenis Ijin	2.350.000.00 0	55 Jenis Ijin	2.980.000.0 00	55 Jenis Ijin	3.330.000.00 0	55 Jenis Ijin	42.794.849.5 42	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	%	6.08 %	10 %	317.436.000	12 %	851.127.000	14 %	650.000.000	16 %	695.000.000	18 %	700.000.000	20 %	750.000.000	0,2	3.963.563.00 0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	%	100 Persen	0 Persen	0	100 Perse n	150.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Perse n	250.000.000	100 Perse n	300.000.000	100 Perse n	350.000.000	100 Perse n	1.300.000.00 0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	Orang	n/a orang	- orang	1.126.800	40 orang	565.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	765.000.000	200 orang	3.626.126.80 0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	n/a paket	- paket	0	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	1 paket	100.000.000	2 paket	200.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	800.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Poin	78.95 Poin	73 Poin	824.506.111	75 Poin	5.446.806.7 37	75.5 Poin	5.743.187.4 11	76 Poin	5.838.096.78 2	76.5 Poin	6.038.096.7 82	77 Poin	6.283.096.78 2	77 Poin	30.173.790.6 05	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	85.63 Poin	85.20 Poin	578.501.390	85.80 Poin	1.811.975.0 50	86.00 Poin	2.335.957.5 00	86.20 Poi n	2.540.375.37 5	86.30 Poi n	2.730.014.1 44	86.40 Poi n	2.984.884.85 1	86.40 Poi n	12.981.708.3 10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Strategi:																	
		- Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah																	
		-Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan																	
		- Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah																	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	Ha	39671,22 Ha	40053,24 Ha	30.699.050.0 00	40323,24 Ha	43.628.230. 000	40599,24 Ha	49.950.000. 000	40871,24 Ha	45.050.000.0 00	41141,24 Ha	46.150.000. 000	41416,24 Ha	47.350.000.0 00	41416,24 Ha	262.827.280. 000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	%	18,76 %	19,07 %	7.047.717.00 0	19,57 %	23.855.000. 000	20,04 %	18.455.000. 000	20,5 %	17.610.000.0 00	20,96 %	18.085.000. 000	21,43 %	21.380.000.0 00	0,2143	106.432.717. 000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum bukan jaringan perpipaan	%	46,35 %	0 %	0	0 %	0	46,39 %	1.000.000.000	46,42 %	1.000.000.00	46,46 %	1.200.000.000	46,50 %		0,465	3.200.000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPS3R	%	10,26 %	17,95 %	2.495.000.000	20,51 %	2.400.000.000	25,64 %	3.500.000.000	33,33 %	4.500.000.00	41,03 %	4.800.000.000	48,72 %	5.300.000.00	0,4872	22.995.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPA	%	0 %	0 %	0	0 %	0	25 %	15.000.000.000	50 %	15.000.000.000	75 %	15.000.000.000	100 %	15.000.000.000	100	60.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan skala setempat	%	45,23 %	45,46 %	0	45,54 %	9.750.000.000	45,66 %	8.990.000.000	45,8 %	9.765.000.000	45,97 %	11.935.000.000	46,14 %	14.260.000.000	46,14	54.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan skala terpusat	%	3,43 %	3,43 %	10.486.060.000	3,81 %	99.054.542.287	4,15 %	92.893.084.073	4,47 %	95.414.105.754	4,76 %	99.718.787.869	5,05 %	98.907.623.627	5,05	496.474.203.610	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Genangan di wilayah Perkotaan yang tertangani	%	0 %	0 %	0	8,33 %	2.000.000.000	16,66 %	2.000.000.000	24,99 %	2.000.000.000	33,32 %	2.000.000.000	41,65 %	2.000.000.000	41,65	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan	%	38,28 %	38,48 %	12.655.000.000	39,04 %	35.200.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	-	0	47.855.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	%	44,19 %	44,19 %	450.000.000	47,67 %	59.749.975.000	53,49 %	24.967.500.000	59,30 %	15.055.310.000	65,12 %	15.308.191.760	70,93 %	15.326.941.177	0,7093	130.857.917.937	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	%	57,97 %	59,78 %	15.710.714.000	64,49 %	3.549.500.000	67,39 %	5.200.000.000	70,29 %	5.720.000.000	73,19 %	5.720.000.000	76,09 %	5.720.000.000	0,7609	41.620.214.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	%	48,09 %	49,59 %	124.689.764.017	51,07 %	202.324.291.819	52,54 %	211.343.997.590	53,98 %	217.985.741.219	55,47 %	225.823.140.267	56,93 %	232.779.380.377	0,5693	1.214.946.315.289	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi	%	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	1.005.000.000	100 %	505.000.000	100 %	505.000.000	100 %	505.000.000	100	2.520.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	%	7,69 %	15,38 %	350.000.000	23,08 %	1.300.000.000	30,77 %	1.750.000.000	38,46 %	950.000.000	46,15 %	1.100.000.000	53,85 %	1.150.000.000	53,85	6.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Pola Ruang	%	35,82 %	35,87 %	350.000.000	35,93 %	1.100.000.000	36 %	850.000.000	36,08 %	1.400.000.000	36,17 %	1.350.000.000	36,27 %	1.500.000.000	36,27	6.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	600.000.000	100 %	22.184.850.000	100 %	34.832.250.000	100 %	34.532.250.000	100 %	34.632.250.000	100 %	34.932.250.000	100	161.713.850.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	%	9,71 %	9,72 %	1.075.328.000	9,76 %	5.150.000.000	9,80 %	10.122.500.000	9,84 %	8.472.500.000	9,88 %	8.722.500.000	9,92 %	8.972.500.000	9,92	42.515.328.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	%	80,52 %	80,53 %	1.000.000.000	80,66 %	13.818.000.000	80,79 %	13.868.000.000	80,92 %	13.868.000.000	81,05 %	13.868.000.000	81,18 %	13.868.000.000	81,18 %	70.290.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	%	0 %	0,15 %	1.507.800.000	0,26 %	1.158.337.201	0,62 %	6.040.000.000	0,96 %	6.257.600.000	1,30 %	6.257.600.000	1,63 %	6.260.800.000	1,63 %	27.482.137.201	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	0 %	0 %	0	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyalerasan dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	%	100 %	0 %	0	100 %	450.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	800.000.000	100 %	850.000.000	100 %	950.000.000	100	5.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	%	50 %	55 %	737.500.000	60 %	773.750.000	65 %	1.379.960.000	70 %	877.474.500	75 %	1.004.672.750	80 %	1.055.662.500	0,8	5.829.019.750	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas lahan RTH	%	0,74 %	0,74 %	1.100.000.000	0,75 %	1.217.500.000	0,77 %	1.789.290.000	0,78 %	1.384.635.500	0,80 %	1.449.082.000	0,90 %	2.019.330.000	0,009	8.959.837.500	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin penyimpanan limbah B3	%	80 %	82 %	128.000.000	84 %	175.500.000	86 %	233.000.000	88 %	300.500.000	90 %	388.000.000	92 %	485.500.000	0,92	1.710.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengelola usaha dan/atau kegiatan yang pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan izin lingkungan	%	50 %	55 %	380.000.000	70 %	439.500.000	75 %	512.000.000	80 %	614.000.000	85 %	722.000.000	90 %	842.500.000	0,9	3.510.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui keberadaannya melalui keputusan pemerintah	%	0 %	0 %	0	0 %	125.000.000	20% %	150.000.000	33 %	200.000.000	42 %	200.000.000	50 %	200.000.000	0,5	875.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kelembagaan yang berkembang	%	75 %	75 %	185.000.000	75 %	255.000.000	80 %	325.000.000	80 %	395.000.000	90 %	465.000.000	90 %	545.000.000	0,9	2.170.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentaselembaga yang dibina sesuai kriteria berbudaya lingkungan	%	32 %	0 %	0	40 %	220.000.000	48 %	240.000.000	52 %	260.000.000	66 %	280.000.000	74 %	300.000.000	0,74	1.300.000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	100 %	100 %	108.750.000	100 %	127.500.000	100 %	155.000.000	100 %	182.500.000	100 %	218.750.000	100 %	263.750.000	100	1.056.250.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang dikelola di sumber	Kubik	71490 kubik	73315 ku bik	5.085.000.00	90740 ku bik	5.618.250.0	110355 k ubik	5.691.672.5	143990 k ubik	5.874.378.50	172030 k ubik	6.073.890.5	200784 k ubik	6.278.475.00	200784 k ubik	34.621.666.5	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	%	72,02 %	72,22 %	23.136.880.3	72,42 %	22.177.413.	72,62 %	22.650.361.	72,82 %	23.111.368.5	73,02 %	23.580.595.	73,32 %	24.058.207.8	73,32 %	138.714.827.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	%	82,46 %	82,56 %	3.538.041.75	82,66 %	5.724.101.0	82,86 %	3.460.000.0	83,06 %	3.720.000.00	83,26 %	4.005.000.0	83,46 %	4.295.000.00	83,46 %	24.742.142.7	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai	%	37,61 %	38,31 %	17.578.000.0	39,01 %	64.205.000.	39,71 %	29.450.000.	40,41 %	29.250.000.0	41,11 %	30.000.000.	41,82 %	31.000.000.0	41,82 %	201.483.000.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan layak jalan	%	89,93 %	72 %	125.000.000	74 %	125.000.000	76 %	205.000.000	77 %	240.000.000	79 %	270.000.000	80 %	300.000.000	80 %	1.265.000.00	
	PROGRAMPENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	%	82,05 %	82,15 %	350.000.000	82,20 %	1.875.000.000	82,30 %	3.520.000.000	82,50 %	4.730.000.00	82,70 %	5.240.000.000	83 %	5.750.000.00	83 %	21.465.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten	%	0,75 %	0,73 %	580.000.000	0,70 %	965.000.000	0,69 %	1.825.000.000	0,67 %	2.165.000.00	0,65 %	2.455.000.000	0,63 %	2.745.000.00	0,63 %	10.735.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	%	54,98 %	64,77 %	230.000.000	65,34 %	225.000.000	65,9 %	490.000.000	66,47 %	695.000.000	67,04 %	700.000.000	67,61 %	705.000.000	67,61 %	3.045.000.000	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100 %	100 %	661.750.000	100 %	2.099.975.650	100 %	1.425.000.000	100 %	1.650.000.00	100 %	1.925.000.000	100 %	2.100.000.00	100	9.861.725.650	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Point	0 point	2 point	8.100.000.00	2,1 point	2.400.000.000	2,3 point	3.400.000.000	2,5 point	3.525.000.00	2,7 point	3.650.000.000	2,9 point	3.800.000.00	2,9 point	24.875.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Point	72,65 point	72,85 point	250.000.000	73 point	310.000.000	73,2 point	180.000.000	73,4 point	189.000.000	73,6 point	198.000.000	73,8 point	207.000.000	73,8 point	1.334.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Administrasi tepat waktu	%	100 %	100 %	33.000.184.010	100 %	35.205.117.337	100 %	37.224.293.051	100 %	40.508.511.198	100 %	44.074.351.160	100 %	48.314.295.125	100	238.326.751.881	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	%	100 %	100 %	4.155.000.000	100 %	5.007.360.000	100 %	11.200.000.000	100 %	11.685.000.000	100 %	12.155.000.000	100 %	12.615.000.000	100	56.817.360.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outco me)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100 %	100 %	7.250.000.00 0	100 %	8.850.000.0 00	100 %	9.773.357.0 00	100 %	9.075.000.00 0	100 %	9.575.000.0 00	100 %	9.225.000.00 0	100	53.748.357.0 00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100 %	0 %	0	100 %	1.710.000.0 00	100 %	1.710.000.0 00	100 %	1.710.000.00 0	100 %	1.710.000.0 00	100 %	1.802.000.00 0	100	8.642.000.00 0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	100 %	100 %	3.549.749.19 3	100 %	4.181.387.3 32	100 %	4.715.347.2 72	100 %	5.196.976.21 1	100 %	5.695.555.1 50	100 %	6.204.134.09 0	100	29.543.149.2 48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Bappeda Hasil Analisis 2021

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

6.3.1. Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) terdapat rencana struktur ruang berupa rencana sistem perkotaan nasional. Sistem perkotaan nasional terdiri atas PKN, PKW, dan PKL. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan Kabupaten Tasikmalaya termasuk pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tasikmalaya. Dalam lampiran IX Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bahwa Kawasan Priangan Timur dan Pangandaran diarahkan untuk pengembangan kegiatan Pertanian, Industri, Perkebunan, Pariwisata dan Panas Bumi.

Dalam Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya termasuk pada Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur-Pangandaran sebagai penjabaran dari kawasan andalan priangan timur-pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak (Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan) yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem

jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

6.3.1.1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas:

A. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

1) Singaparna

- Arahan pengembangan : sebagai Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Pusat Pendidikan, serta Menjadi Sentra Agribisnis, Yang Mempertimbangkan Aspek Lingkungan.
- Fungsi pusat kegiatan : sebagai fungsi perdagangan dan jasa, agribisnis, pendidikan dan permukiman perkotaan
- Wilayah pelayanannya : Seluruh kabupaten
- Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Terminal Tipe B, Rumah Sakit Tipe B, Pasar Kabupaten, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, pusat pendidikan skala pendidikan tinggi

2) Karangnunggal

- Arahan pengembangan : sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, wisata, dan pusat pelayanan bagi Kabupaten Tasikmalaya Bagian Selatan.
- Fungsi pusat kegiatan : sebagai fungsi perdagangan dan jasa, agribisnis, pendidikan dan permukiman perkotaan
- Wilayah pelayanannya : wilayah tasik bagian selatan
- Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Terminal Tipe C, Rumah Sakit Tipe C, Pasar Kabupaten, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, pusat pendidikan skala pendidikan tinggi

3) Manonjaya

- Arahan pengembangan : sebagai pusat perdagangan dan jasa, agrobisnis, dan agroindustri.
- Fungsi pusat kegiatan : sebagai fungsi perdagangan dan jasa, agribisnis, pendidikan dan permukiman perkotaan
- Wilayah pelayanannya : beberapa kecamatan (PPK)
- Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Terminal Tipe C, Rumah Sakit Tipe C, Pasar Kabupaten, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, pusat pendidikan skala pendidikan tinggi

4) Ciawi

- Arahan pengembangan : sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional dan pelayanan umum.
- Fungsi pusat kegiatan : sebagai fungsi perdagangan dan jasa, agribisnis, pendidikan dan permukiman perkotaan
- Wilayah pelayanannya : beberapa kecamatan (PPK)
- Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Terminal Tipe C, Rumah Sakit Tipe C, Pasar Kabupaten, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, pusat pendidikan skala pendidikan tinggi

5) Cikatomas

- Arahan pengembangan : sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional dan pelayanan umum.
- Fungsi pusat kegiatan : sebagai fungsi perdagangan dan jasa, agribisnis, pendidikan dan permukiman perkotaan
- Wilayah pelayanannya : beberapa kecamatan (PPK)
- Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Terminal Tipe C, Rumah Sakit Tipe C, Pasar Kabupaten, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, pusat pendidikan skala pendidikan tinggi

B. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

- Arahkan pengembangan : sebagai pusat pelayanan untuk beberapa kecamatan.
- Fungsi pusat kegiatan : sebagai fungsi perdagangan dan jasa dan permukiman perkotaan
- Wilayah pelayanannya : beberapa kecamatan
- Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Terminal Tipe C, Rumah Sakit Tipe C, Pasar Kabupaten, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, pusat pendidikan skala pendidikan tinggi

C. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

- Arahkan pengembangan : sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- Fungsi pusat kegiatan : fungsi utamanya sebagai permukiman pedesaan, kemudian fungsi pendukung pertanian dan lainnya
- Wilayah pelayanannya : beberapa desa
- Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Pasar Tradisional, Sub Terminal, Puskesmas/Pustu, SMP/SMA

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

- 1. Perkotaan Singaparna**, sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang diarahkan sebagai pusat pemerintahan dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan dan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Pusat Pendidikan, serta Menjadi Sentra Agribisnis, Yang Mempertimbangkan Aspek Lingkungan.
- 2. Perkotaan Karangnunggal**, sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, wisata, dan pusat pelayanan bagi Kabupaten Tasikmalaya Bagian Selatan.
- 3. Perkotaan Manonjaya**, sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi 7 (tujuh) desa, yaitu: Desa Manonjaya, Kalimanggis, Pasirpanjang, Margaluyu, Margahayu, Kamulyan, dan Desa Cilangkap yang diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa, agrobisnis, dan agroindustri.

4. Perkotaan Ciawi, sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi 6 (enam) desa, yaitu ; Desa Ciawi, Pakemitan, Pakemitan Kidul, Kurniabakti, Sukamantri, dan Pasirhuni yang diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional dan pelayanan umum.

5. Perkotaan Cikatomas sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Cogreg, Desa Pakemitan dan Desa Linggalaksana yang diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional dan pelayanan umum

D. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan ibukota kecamatan lainnya yang tidak termasuk dalam PKL di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi:

- 1) PPK Rajapolah meliputi 4 (empat) desa, yaitu Desa Rajapolah, Desa Manggungjaya, Desa Manggungsari, dan Desa Sukaraja
- 2) PPK Taraju meliputi 2 (dua) desa, yaitu Desa Raksasari dan Desa Singasari
- 3) PPK Cipatujah meliputi 2 (dua), yaitu Desa Cipatujah dan Desa Sindangkerta
- 4) PPK Cibalong meliputi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Singajaya, Desa Cibalong, dan Desa Parung
- 5) PPK Cineam meliputi 4 (empat) desa, yaitu Desa Cineam, Desa Madiasari, Desa Ciampanan dan Desa Cijulang
- 6) PPK Salawu meliputi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Neglasari, Desa Karangmukti dan Desa Tanjungsari
- 7) PPK Cikalong meliputi 1 (satu) desa, yaitu Desa Singkir
- 8) PPK Pancatengah meliputi 1 (satu) desa, yaitu Desa Pancawangi

Tabel 6.4
Rencana Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Sistem Pusat Kegiatan	Fungsi Utama	Fungsi Pendukung	Sarana Umum
A.	PKL			
1.	Singaparna	Pusat Pemerintahan Skala Kabupaten	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe B 2. Rumah Sakit Tipe B 3. Pasar Kabupaten 4. Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern
2.	Karangnunggal	Pusat kegiatan bagi Wilayah Tasikmalaya bagian Selatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe B 2. Rumah Sakit Tipe B 3. Pasar Kabupaten 4. Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern
3.	Manonjaya	Pusat Pelayanan skala Kabupaten dan beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe C 2. Rumah Sakit Tipe C 3. Pasar Kabupaten 4. Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern
4.	Ciawi	Pusat Pelayanan skala Kabupaten dan beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe B 2. Rumah Sakit Tipe B 3. Pasar Kabupaten 4. Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern
5.	Cikatomas	Pusat Pelayanan skala Kabupaten dan beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe C 2. Rumah Sakit Tipe C 3. Pasar Kabupaten 4. Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern
B.	PPK			
1.	Rajapolah	Pusat Pelayanan skala beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe C 2. Puskesmas Rawat Inap 3. Pasar 4. Akademi
2.	Salawu	Pusat Pelayanan	1. Perdagangan dan Jasa	1. Terminal Tipe C 2. Puskesmas Rawat Inap

No	Sistem Pusat Kegiatan	Fungsi Utama	Fungsi Pendukung	Sarana Umum
		skala beberapa kecamatan	2. Permukiman Perkotaan	3. Pasar 4. Akademi
3.	Taraju	Pusat Pelayanan skala beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe C 2. Puskesmas Rawat Inap 3. Pasar 4. Akademi
4.	Cineam	Pusat Pelayanan skala beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe C 2. Puskesmas Rawat Inap 3. Pasar 4. Akademi
5.	Cipatujah	Pusat Pelayanan skala beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe C 2. Puskesmas Rawat Inap 3. Pasar 4. Akademi
6.	Cibalong	Pusat Pelayanan skala beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe C 2. Puskesmas Rawat Inap 3. Pasar 4. Akademi
7.	Cikalong	Pusat Pelayanan skala beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe C 2. Puskesmas Rawat Inap 3. Pasar 4. Akademi
8.	Pancatengah	Pusat Pelayanan skala beberapa kecamatan	1. Perdagangan dan Jasa 2. Permukiman Perkotaan	1. Terminal Tipe C 2. Puskesmas Rawat Inap 3. Pasar 4. Akademi
B.	PPL			
1.	Kadipaten	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
2.	Pageurageung	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
3.	Sukaresik	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal

No	Sistem Pusat Kegiatan	Fungsi Utama	Fungsi Pendukung	Sarana Umum
				<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas • SMP/SMA
4.	Jamanis	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
5.	Sukahening	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
6.	Sukaratu	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
7.	Cisayong	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
8.	Sariwangi	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
9.	Leuwisari	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
10.	Cigalontang	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
11.	Desa Kutawaringin	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
12.	Mangunreja	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal

No	Sistem Pusat Kegiatan	Fungsi Utama	Fungsi Pendukung	Sarana Umum
				<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas • SMP/SMA
13.	Tanjungjaya	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
14.	Sukarame	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
15.	Sukaraja	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
16.	Padakembang	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
17.	Puspahiang	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
18.	Bojonggambir	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
19.	Sodonghilir	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
20.	Jatiwaras	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
21.	Karangjaya	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal

No	Sistem Pusat Kegiatan	Fungsi Utama	Fungsi Pendukung	Sarana Umum
				<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas • SMP/SMA
22.	Salopa	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
23.	Gunungtanjung	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
24.	Parungponteng	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
25.	Bantarkalong	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
26.	Bojongasih	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
27.	Culamega	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
28.	Desa Singkir	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA
29.	Desa Pancawangi	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Tradisional • Sub Terminal • Puskesmas • SMP/SMA

Sumber: Hasil Analisis 2018

6.3.1.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana

6.3.1.2.1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

A. Jaringan Jalan

Perencanaan pengembangan sistem jaringan jalan harus memperhatikan sistem hirarki yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya, baik jalan dengan kewenangan pusat (nasional), provinsi, dan kabupaten. Untuk klasifikasi jalan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, disusun berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta mengacu KEPMEN PU No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer - 1 (JKP-1).

Berdasarkan Permen PU No 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1).

Tabel 6.5

Jaringan Jalan Nasional yang Melintasi Wilayah Kab. Tasikmalaya

No Ruas Dalam Kepmen	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	
		Jalan Arteri Primer (JAP)	Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)
041	BTS. KAB. TASIKMALAYA/GARUT – RAJAPOLAH	18,50	
	JLN. RAYA CIAWI (CIAWI)	5,73	
042	RAJAPOLAH - BTS. KAB. TASIKMALAYA/CIAMIS	1,22	
043	BTS. KAB. TASIKMALAYA/CIAMIS – ANCOL	13,14	
044	BTS. KOTA RAJAPOLAH - BTS. KOTA TASIKMALAYA		4,78
	JLN. RAYA RAJAPOLAH (RAJAPOLAH)		2,14
	JLN. RAYA INDIHIANG (INDIHIANG)		3,42

Sumber : Lampiran PERMEN PU No 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Selain kebijakan nasional, konsep rencana pengembangan jaringan jalan merujuk pada kebijakan Nasional dan RTRW Provinsi, terkait dengan rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar, melalui ruas jalan Kadipaten–Rajapolah yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi kecamatan Kadipaten, kecamatan Ciawi, kecamatan Sukaresik, kecamatan Jamanis, kecamatan Rajapolah, kecamatan Manonjaya dan kecamatan Cineam) dan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacap kecamatan yang dilewati adalah Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Cineam.

Penataan jaringan jalan menyangkut dua hal, yaitu melengkapi pola jaringan yang sudah ada dan meningkatkan kualitas jaringan jalan atau jembatan yang kurang memenuhi syarat (perlu studi lebih lanjut dan terpisah). Dasar-dasar yang digunakan dalam penataan jaringan jalan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing kawasan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan kawasan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) harus dapat berhubungan satu dengan yang lainnya tanpa melalui pusat pelayanan lainnya. Hal ini adalah untuk meningkatkan dan mendayagunakan interaksi antar pusat permukiman perkotaan.
- 2) Pada masing-masing PKL, PPK sedapat mungkin dapat berhubungan tanpa melalui pusat kegiatan/pelayanan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi fungsional antar kawasan pada tingkat yang lebih rendah.
- 3) Undang –undang No 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang Jalan, dimana pada undang-undang dan peraturan perundangan tersebut membahas tentang fungsi dan kelas jalan serta status jalan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, adapun rencana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya meliputi :

Tabel 6.6.
Rencana Jaringan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Jaringan Jalan	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Berdasrakan Materi Teknis
1	Jalan Nasional	
	(1) Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol)	1. Pembangunan jalan tol berupa jalan tol Cileunyi–Garut–Tasikmalaya(Kadipaten-Sukaresik-Jamanis-Rajapolah- Kota Tasikmalaya-Manonjaya-Cineam) 2. Pembangunan jalan tol berupa jalan tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya-Cilacap (Cigalontang-Singaparna-Manonjaya-Cineam)
	(2) jalan arteri primer	Pengembangan Jalan Arteri Primer (AP); Ruas jalan Kadipaten – Ciawi - Rajapolah;
	(3) jalan kolektor primer 1	Pengembangan jalan kolektor primer 1 (JKP-1): 3. Ruas jalan Rajapolah – Indihiang; 4. Ruas jalan Cikaengan – Cipatujah; 5. Ruas jalan Cipatujah – Kalapagenep;
2	Jaringan jalan Provinsi	
	Jalan kolektor primer 1	Pengembangan jalan kolektor primer 1 (JKP-1): 1. Ruas jalan Sukaraja- Karangnunggal – Cipatujah; 2. Ruas jalan Salawu – Singaparna; 3. Ruas jalan Singaparna – Mangkubumi; 4. Ruas jalan Ciawi – Singaparna; 5. Ruas jalan Manonjaya – Salopa; 6. Ruas jalan Papayan -Cikalong; dan 7. Ruas jalan Mangunreja - Sukaraja. 8. Jalan Horizontal di Jawa Barat Bagian Selatan 9. Jalan Horizontal Tengah Selatan-Selatan Jawa Barat 10. Ruas jalan yang menghubungkan Kab.Tasikmalaya dengan Kab. Ciamis melalui Jembatan Betmen (Benteng-Manonjaya) 11. Jalan Lintas Tengah Bantar-Tawang Banteng 12. Ruas jalan Ciawi – Singaparna; 13. Ruas jalan Taraju – Bojonggambir; 14. Ruas jalan Darawati – Culamega – Bojonggambir
3	Jaringan jalan Kabupaten	

No	Jaringan Jalan	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Berdasarkan Materi Teknis
	(1)Jalan kolektor primer 3	<p>Pengembangan jalan kolektor primer 3 (tiga) meliputi ruas jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruas jalan Ciawi – Panumbangan; 2) Ruas jalan Ciawi – Pasirhuni; 3) Ruas jalan Cibalong – Derah; 4) Ruas jalan Cikatomas– Cimedang, 5) Ruas jalan Cilangkap – Cineam, 6) Ruas jalan Cineam - Sirnajaya - Citalahab, 7) Ruas jalan Cirenude – Cihanura, 8) Ruas jalan Cisaruni – Padakembang; 9) Ruas jalan Ciseda – Sayuran; 10)Ruas jalan Ciwatin – Kalapagenep; 11)Ruas jalan dalam kota Ciawi; 12)Ruas jalan dalam kota Rajapolah; 13)Ruas jalan dalam kota Singaparna; 14)Ruas jalan dalam kota Mangunreja; 15)Ruas jalan dalam kota Manonjaya; 16)Ruas jalan dalam kota Sukaraja; 17)Ruas jalan dalam kota Cikatomas; 18)Ruas jalan dalam Kota Taraju; 19)Ruas jalan Derah – Simpang Urmi; 20)Ruas jalan Eureunpalay – Bojongasih; 21)Ruas jalan Gunungsari – Cipanas; 22)Ruas jalan Terminal Ciawi; 23)Ruas jalan Kudang – Cibeuti; 24)Ruas jalan Mangunraja – Sukaraja; 25)Ruas jalan Manonjaya – Salopa; 26)Ruas jalan Pagendingan – Cisayong; 27)Ruas jalan Pamoyanan – Suryalaya; 28)Ruas jalan Papayan – Cikalong; 29)Ruas jalan Pasirgintung – Lengkongbarang; 30)Ruas jalan Rajapolah – Kiarajangkung; 31)Ruas jalan Simpang – Arjasari – Cisaruni; 32)Ruas jalan Singaparna – Sariwangi; 33)Ruas jalan Singaparna – Cigalontang; 34)Ruas jalan Sindangreret – Cidadap; 35)Ruas jalan Taraju – Sodonghilir – Derah; 36)Ruas jalan Warungpeuteuy- Taraju; 37)Ruas jalan Sukagalih – Ciponyo; 38)Ruas jalan Sariwangi –Parentas;
	(2)Jalan lokal	Pemeliharaan jalan lokal (kewenangan kabupaten) sebanyak 176 ruas jalan
	(3)Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Perkotaan	1. Pengembangan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya (Singaparna):

No	Jaringan Jalan	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Berdasarkan Materi Teknis
	dan jalan akses menuju kawasan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya	<p>Kecamatan yang dilalui jalan lingkaran utara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kec. Mangunreja; ▪ Kec.Singaparna; ▪ Kec. Cigalontang; ▪ Kec. Leuwisari; dan ▪ Kec. Padakembang <p>Kecamatan yang dilalui jalan lingkaran selatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Mangunreja ; ▪ Kecamatan Sukarame ; ▪ Kecamatan Singaparna ; <p>2. Ruas Jalan Tinewati – Cintaraja</p>
4	Pembangunan dan penggantian jembatan	<p>1) Pembangunan jembatan masuk kawasan Ibukota;</p> <p>2) Pembangunan jembatan pada jalan Kabupaten meliputi :</p> <p>a) Jembatan Cikalapa berada di ruas jalan Rancabakung – Cibatu ;</p> <p>b) Jembatan Lintungnaga sebagai penghubung antara Kecamatan Sukarame dengan Kecamatan Tanjungjaya ;</p> <p>c) Jembatan pada jalan lingkaran Utara Selatan Ibukota.</p> <p>3) Rencana penggantian jembatan di Kabupaten Tasikmalaya meliputi beberapa jembatan</p>

Sumber: Hasil analisis dan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Disamping hal tersebut, selain jalan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terdapat pula jalan Desa, yang merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

6.3.1.2.2. Sistem Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud adalah :

- a) pengembangan dan pembangunan terminal penumpang;

- b) Optimalisasi Alat Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Jalan;
- c) Optimalisasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Tabel 6.7.
Rencana Pengembangan Terminal Penumpang
di Kabupaten Tasikmalaya

No	Pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Lokasi (Kecamatan)
A	Terminal Penumpang	
1	Peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi tipe B	PKL Singaparna
2	Optimalisasi terminal penumpang tipe C	1) Kecamatan Ciawi; 2) Kecamatan Rajapolah; 3) Kecamatan Cineam; 4) Kecamatan Sukaraja; 5) Kecamatan Cikatomas; 6) Kecamatan Bantarkalong; 7) Kecamatan Karangnunggal 8) Kecamatan Bojonggambir; dan 9) Kecamatan Pancatengah
3	Pembangunan terminal penumpang tipe C	1) Kecamatan Cipatujah 2) Kecamatan Cikalong 3) Kecamatan Bantarkalong 4) Kecamatan Taraju 5) Kecamatan Manonjaya; 6) Kecamatan Cibalong; 7) Kecamatan Salopa; 8) Kecamatan Gunung Tanjung ; 9) Kecamatan Cisayong; 10) Kecamatan Bojongasih; 11) Kecamatan Sodonghilir; 12) Kecamatan Sukaratu; 13) Kecamatan Kadipaten; 14) Kecamatan Pagerageung; 15) Kecamatan Tanjungjaya ; dan 16) Kecamatan Puspahiang
B	Optimalisasi Alat Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Jalan (Jembatan Timbang)	Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berada di Kecamatan Kadipaten yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat
C	Optimalisasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis di Kabupaten Tasikmalaya berada di Kecamatan Singaparna

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

6.3.2.1.3. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tasikmalaya berupa ;

1. Jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) mencakup beberapa trayek yaitu ;
 - Karangnunggal – Kota Tasikmalaya - Depok ;
 - Karangnunggal – Kota Tasikmalaya - Bandung ;
 - Singaparna – Garut – Cikarang ;
 - Singaparna- Garut- Bandung ;
 - Singaparna- Garut- Bekasi ;
 - Singaparna- Garut – Cianjur- Sukabumi ;
2. Jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) mencakup beberapa trayek yaitu ;
 - Singaparna – Garut - Jakarta;
 - Singaparna – Garut - Tangerang;
 - Karangnunggal – Kota Tasikmalaya - Jakarta ;
3. Jaringan trayek angkutan perkotaan mencakup beberapa trayek meliputi beberapa trayek ;
4. Jaringan trayek angkutan perdesaan mencakup beberapa trayek meliputi beberapa trayek ;

Adapun rencana pengembangan jaringan trayek dijelaskan pada tabel 6.8. berikut dibawah ini ;

Tabel 6.8.
Rencana Pengembangan Jaringan Trayek

Jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi	Jaringan Trayek antar kota antar provinsi	Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
a) Terminal Singaparna – Garut – Cibinong (Kabupaten Bogor) b) Terminal Singaparna – Garut – Bekasi (Kota Bekasi) c) Terminal Singaparna – Garut – Bogor ; d) Terminal Singaparna – Garut – Karawang ;	a) Terminal Karangnunggal – Jakarta – Merak ; b) Terminal Singaparna – Purwokerto ; c) Terminal Singaparna – Yogyakarta – Solo ; d) Terminal Singaparna – Surabaya ;	Pengembangan jaringan trayek angkutan perkotaan : a. Ciawi – Cipanas b. Siangparna-Sukakarsa c. Singaparna – linggasirna d. Singaparna – Linggamulya- Rawa e. Singaparna- Ceungceum-Cigadog- Paniis

Jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi	Jaringan Trayek antar kota antar provinsi	Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
e) Terminal Singaparna – Garut – Cianjur – Sukabumi ; f) Terminal Singaparna- Rajapolah – Ciamis – Cirebon (Via Cisinga) ; g) Terminal Singaparna – Ciawi – Malangbong – Bandung ; h) Terminal Singaparna – Garut – Depok ; i) Terminal Singaparna – Garut – Samedang ; j) Terminal Singaparna- Rajapolah – Ciamis – Indramayu (Via Cisinga) ; k) Terminal Singaparna – Garut- Subang ;	e) Terminal Singaparna – Banyuwangi – Bali ;	f. Singaparna-rancapaku g. Singaparna-sukamenak h. Singaparna-Cimerah i. Singaparna-Sindangsono j. Singaparna-Ciponyo-Cipanas k. Singaparna-leuwisari-Cikedung l. Singaparna-Kokoncong m. Singaparna- Cisaruni-kubangeceeng-karangdan n. Singaparna – Batubelah o. Singaparna- Cikunir-tawangbanteng – Cisinga- Singaparna p. Singaparna- Cisinga-Tawang Banteng – Kikisik Pengembangan jaringan trayek angkutan perdesaan: a. Simpang -sindang b. Simpang – Pamijahan - Bongas c. Simpang - Rancabakung-Cikukulu d. Simpang – Sindangreret – Kujang e. Simpang -Leuwipicung f. Simpang – Rancabakung Cipaku g. Simpang- Rancabakung – Bojongasih – Madur h. Simpang -Nagrog i. Rancabakung – Cilangla j. Rancabakung – Cimuncang k. Rancabakung – Cibatuk – Cintawangi l. Rancabakung – Cilangla m. Rancabakung – Cinunjang n. Rancabakung -Simpang -Pamayang

Jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi	Jaringan Trayek antar kota antar provinsi	Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
		<p>o. Rancabakung – Simpang -Cikijing</p> <p>p. Rancabakung – Simpang – Petakan</p> <p>q. Rancabakung - Batulawang- Sukarame</p> <p>r. Rancabkung – Batulawang – Cibat</p> <p>s. Cikatomas -Salopa</p> <p>t. Cikatomas – Buniasih</p> <p>u. Cikatomas – Tawang</p> <p>v. Cikalong – Cimanuk</p> <p>w. Cikalong – Cikancra</p> <p>x. Cibeber -Cikalong - Cidadap – Cipatujah</p> <p>y. Cibeber- kalapagenep- cimanuk</p> <p>z. Ciawi-pagerageung</p> <p>aa. Ciawi – Gombong</p> <p>bb. Ciawi – Kertamukti</p> <p>cc. Ciawi- Cileleus</p> <p>dd. Ciawi-sukamenak</p> <p>ee. Ciawi – margasari</p> <p>ff. Ciawi – mandalasari</p> <p>gg. Ciawi – bugel</p> <p>hh. Ciawi – Condong</p> <p>ii. Ciawi- kadipaten</p> <p>jj. Ciawi – suryalaya</p> <p>kk. Ciawi- Sukaresik (Ciawi – Panumbangan)</p> <p>ll. Rajapolah – kiarajangkung</p> <p>mm. Cineam – karanglayung-sirnajaya</p> <p>nn. Cineam-Cikondang</p> <p>oo. Cineam – Ciampanan</p> <p>pp. Cineam – Pasir Mukti – Cisarua</p> <p>qq. Cineam – rajadatu – janggala</p> <p>rr. Mananjaya – cihaur- cikareo</p> <p>ss. Mananjaya – gunung tanjung -bengk</p> <p>tt. Singaparna – Cibalinarik- Sukaraja</p>

Jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi	Jaringan Trayek antar kota antar provinsi	Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
		uu. Singaparna - Cigalontang vv. Singaparna - Tenjowaringin ww. Singaparna – cicanir xx. Singaparna -Sirnaraja yy. Singaparna – Cikeusal zz. Singaparna - Jahiang

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

6.3.1.2.4. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api

Pengembangan Sistem jaringan jalur perkeretaapian di Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas ;

- a. Sistem jaringan jalur kereta api meliputi:
 - Pengembangan jalur kereta api : Manonjaya – Awipari, jalur Rajapolah – Indihiang dan jalur Ciawi – Rajapolah;
 - Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur kereta api lintas Utara – Selatan berada antara Galunggung – Tasikmalaya.
 - pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta – Cikampek – Purwakarta – Bandung – Tasikmalaya – Banjar -Kroya – Kebumen – Kutoarjo – Yogyakarta – Klaten – Surakarta – Madiun –Kertosono – Jombang - Surabaya ;
- b. Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api meliputi ;
 - Pengembangan Jalur ganda lintas Kiaracondong–Cicalengka – Cibatu – Tasikmalaya ;
 - Peningkatan jalur KA Manonjaya - Awipari - Rajapolah - Indihiang – Ciawi
 - Revitalisasi dan Peningkatan Jalur KA Tasikmalaya – Indihiang – Pirusa
- c. Pengembangan stasiun kereta api melalui program renovasi bangunan stasiun meliputi :
 - Stasiun Manonjaya;
 - Stasiun Rajapolah; dan
 - Stasiun Ciawi.

6.3.1.2.5. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Untuk rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut berupa pengembangan pelabuhan berada di wilayah Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal dan Cikalong

6.3.1.2.6. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:

- a. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan
- b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi
- c. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
- d. Rencana Sistem jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pada tabel berikut dapat dilihat konsep dan rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 6.9.
Konsep dan Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

No	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Konsep	Rencana Pengembangan
1	Sistem jaringan prasarana energi/Kelistrikan	<p>Konsep Pengembangan pelayanan energi listrik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik. 2. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani, utamanya bagi kawasan-kawasan permukiman yang belum memperoleh pelayanan energi listrik yang bersumber dari PLN. 3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap KK akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani. 4. Pengembangan alternatif bentuk energi lain yang bisa dikembangkan untuk peningkatan pelayanan listrik di Kabupaten Tasikmalaya meliputi mikrohidro dan solarcell serta biogas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan jaringan pipa minyak melintasi wilayah Kabupaten; dan b. Pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan Infrastruktur BBM ; 2. Pengembangan Jaringan prasarana tenaga listrik terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan pembangkit tenaga listrik ; b. Pembangunan gardu induk berada di Kecamatan Karangnunggal; c. Pembangunan gardu distribusi berada di seluruh kecamatan. 3. Pengembangan Jaringan prasarana transmisi tenaga listrik meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi Kecamatan Cineam, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Mangunreja, Kecamatan Salawu dan Kecamatan Kadipaten.

No	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Konsep	Rencana Pengembangan
			<ul style="list-style-type: none"> b. Penambahan dan perbaikan jaringan listrik meliputi seluruh kecamatan; dan c. Optimalisasi pelayanan listrik meliputi seluruh kecamatan. <p>4. Pengembangan energi alternatif meliputi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pemanfaatan sumber energi air pada Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol Kecamatan Cineam ; b. Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi Karaha Bodas, Gn. Galunggung, Cipacing, Ciheras, Cigunung, Cibalong, Cipanas-Ciawi, Cakrabuana di Kab. Tasikmalaya c. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan : energi air skala kecil, energi surya, energi angin, bio-energi; d. Pengembangan bioenergi reaktor biogas meliputi beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Pageurageung, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Taraju dan Kecamatan Mangunreja ; <p>5. Pengembangan desa-desa mandiri energi</p>

No	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Konsep	Rencana Pengembangan
2	Sistem Jaringan Telekomunikasi	<p>Perlu peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern; 2. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan; 3. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten. 4. Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan jaringan teresterial, melalui pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik. 2. Pengembangan jaringan satelit, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan jaringan telekomunikasi internet berada di setiap ibukota kecamatan; b. Pengembangan perdesaan berbasis internet dan c. Pengembangan menara telekomunikasi bersama
3	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan jaringan sumber daya air: Wilayah Sungai (WS) yang berada pada wilayah kabupaten, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kabupaten; 2. jaringan irigasi yang berfungsi mendukung produktivitas pertanian 3. jaringan air baku untuk air bersih; 4. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan 5. sistem pengendalian banjir di wilayah kabupaten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Wilayah Sungai (WS) <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Citanduy berupa sempadan sungai meliputi Sungai Ciparagan, Sungai Cijolang, Sungai Cipambokongan dan Sungai Cipanerekan. b. Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Ciwulan – Cilaki berupa sempadan sungai meliputi Sungai Ciwulan, Sungai Cilaki, Sungai Cidadap, Sungai Cipatujah, Sungai Ciawi, Sungai Cimerak, Sungai Cikaso, Sungai Cimari dan Sungai Cilayu

No	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Konsep	Rencana Pengembangan
			<p>2.Peningkatan perlindungan Cekungan air tanah meliputi Kecamatan Salawu, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Leuwisari dan Kecamatan Kadipaten</p> <p>3.Pengembangan pemanfaatan air buangan kawah Gunung Galunggung yang terdapat di Gunung Galunggung</p> <p>4.Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan jaringan irigasi kewenangan pusat meliputi Daerah Irigasi Cikunten1 dan Daerah Irigasi Cikunten 2. b. Pengembangan jaringan irigasi kewenangan Provinsi meliputi Daerah Irigasi Padawaras, Daerah Irigasi Ciramajaya, Daerah Irigasi Biuk, Daerah Irigasi Cikunir, Daerah Irigasi Cigede, dan Daerah Irigasi Cibantaran. c. Pengembangan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten <p>5.Pembangunan bendungan meliputi Bendungan Leuwikeris di Desa Ancol Kecamatan Cineam, Bendungan Cikembang di Kecamatan Cineam dan Bendungan Pasir Angin di Kecamatan Manonjaya.</p> <p>6.Pengembangan jaringan air baku terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengelolaan air sungai meliputi Sungai Citanduy, Sungai Ciwulan, Sungai Cimedang, Sungai

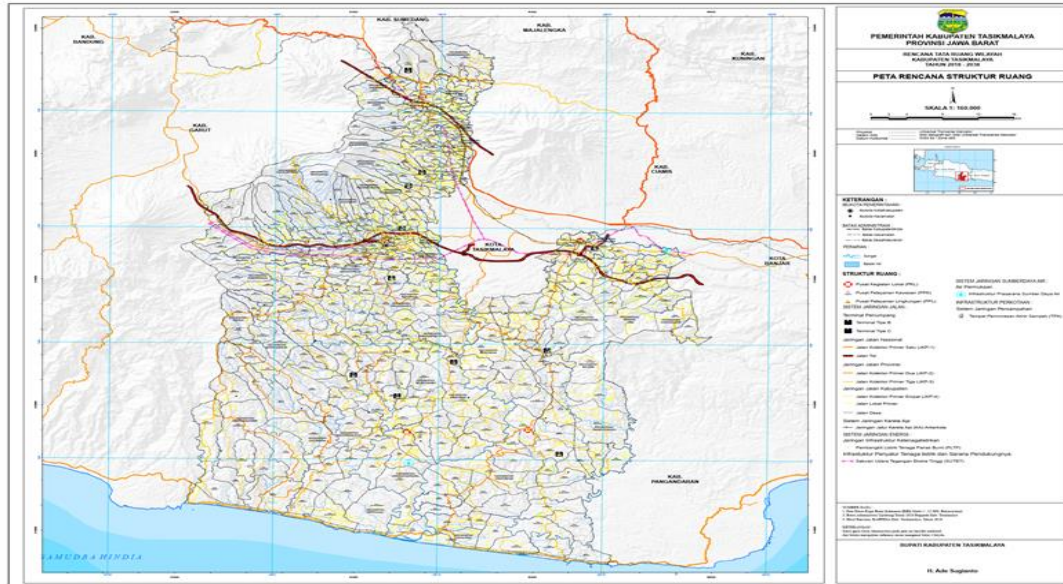
No	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Konsep	Rencana Pengembangan
			<p>Cipangukusan, Sungai Cipanyarang dan Sungai Cilangla.</p> <p>b. Peningkatan pengelolaan mata air meliputi Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Sukaresik dan Kecamatan Pagerageung.</p> <p>7. Pengembangan sistem pengendalian banjir meliputi :</p> <p>a. Pembangunan tanggul penahan air pasang laut meliputi Kecamatan Cikalong, Karangnunggal dan Kecamatan Cipatujah.</p> <p>b. Normalisasi Sungai Citanduy.</p>
4	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	<p>Sistem Jaringan Persampahan:</p> <p>☑ Arahana penanganan persampahan di wilayah perkotaan Kabupaten Tasikmalaya diperlukan sebuah TPPAS skala regional</p> <p>☑ sistem Pengelolaan Sampah di kawasan perkotaan berprinsip menuju Zero Waste, didukung kerjasama antara pihak swasta, masyarakat dan dinas kebersihan.</p>	<p>1. Pembangunan tempat penampungan sementara berada di seluruh kecamatan;</p> <p>2. Optimalisasi tempat pemrosesan akhir Nangkaleah di Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja</p> <p>3. Peningkatan pelayanan persampahan berada di seluruh kecamatan;</p> <p>4. Pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional berada di Kecamatan Mangunreja;</p>

No	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Konsep	Rencana Pengembangan
		<p>☑ Sistem pengelolaan sampah di kawasan pedesaan dapat dilakukan dengan cara diolah menjadi kompos (pupuk organik) yaitu dengan cara memisahkan jenis sampah yang dapat diuraikan bakteri (dimanfaatkan untuk kompos) dan sampah yang tidak dapat diuraikan bakteri (proses dibakar).</p>	<p>5. Pengembangan sistem pengelolaan pengangkutan sampah berada di kawasan perkotaan;</p> <p>6. Pengembangan pengelolaan sampah sistem komposting berupa pembuatan kompos berada di kawasan pedesaan; dan</p> <p>7. Pembangunan dan Pengelolaan TPA di Perkotaan Singaparna, Manonjaya, Ciawi, Karangnunggal, dan Cikatomas</p> <p>8. Zona prioritas pengelolaan persampahan di Kabupaten tasikmalaya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona 1 (Ciawi) : Kec. Ciawi, Kec. Kadiipaten, Kec. Pagerageung, Kec. Sukaresik, Kec. Sukahening, Kec. Rajapolah, Kec. Jamanis. • Zona 2 (Singaparna) : Kec. Singaparna, Kec. Salawu, Kec. Cigalontang, Kec. Sariwangi, Kec. Leuwisari, Kec. Padakembang, Kec. Mangunreja, Kec. Sukarame, Kec. Sukaraja, Kec. Tanjungjaya, Kec. Sukaratu, Kec. Cisayong • Zona 3 (Taraju) : Kec. Taraju, Kec. Puspahiang, Kec. Sodonghilir, Kec. Bojonggambir • Zona 4 (Manonjaya) : Kec. Manonjaya, Kec. Cineam, Kec. Karangjaya, Kec. Salopa, Kec. Jatiwaras, Kec. Gunungtanjung

No	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Konsep	Rencana Pengembangan
		<input checked="" type="checkbox"/> kelemahan: sistem sanitasi terpusat merupakan sistem pengolah limbah yang kompleks, karena membutuhkan sarana instalasi pengolah limbah dan perlengkapannya seperti transportasi. Selain sarana instalasi pengolahan juga dibutuhkan prasarana jaringan pipa pengumpul	
		Sistem Jaringan Drainase Pengembangan drainase <input checked="" type="checkbox"/> Drainase lingkungan: memanfaatkan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. <input checked="" type="checkbox"/> drainase wilayah mengikuti jaringan jalan dengan sistem campuran antara terbuka dan tertutup. Drainase wilayah dialirkan ke drainase lingkungan.	1. Pembangunan saluran drainase meliputi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan. 2. Peningkatan kualitas saluran drainase meliputi perkotaan Singaparna, perkotaan Manonjaya dan perkotaan Ciawi. 3. Pemeliharaan kualitas saluran drainase meliputi perkotaan Karangnunggal, perkotaan Rajapolah, perkotaan Mangunreja, perkotaan Taraju, perkotaan Cipatujah, perkotaan Bantarkalong, perkotaan Cikatomas dan perkotaan Cineam.
		<input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Alam di Kabupaten Tasikmalaya meliputi penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi, penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung berapi; dan penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami	1. Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi di Kec. Cikatomas, Manonjaya, Salopa, Bojonggambir, Mangunreja, Cibalong, Bantarkalong, Rajapolah, Pagerageung, Cisayong, Singaparna. 2. Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana letusan gunung Berapi di Kec. Singaparna, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Sariwangi dan Kecamatan Leuwisari ;

No	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Konsep	Rencana Pengembangan
			3. Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Cikatomas

Sumber : Analisis dan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031



Gambar 6.1
Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber : Analisis dan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031

6.3.2. Rencana Pola Ruang

Mengacu pada pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten (Permen ATR No 1 Tahun 2018), disebutkan bahwa Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sebagai acuan dasar dalam penyusunan rencana pola ruang, maka perlu ditinjau beberapa aspek/elemen yang mendasari dan dipertimbangkan terkait dengan pengertian, fungsi, asumsi dasar, dan kriteria perumusannya.

Konsep rencana pola ruang untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dirumuskan berdasarkan kriteria:

- Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam RTRW Nasional, yang tertuang dalam PP No 26 Tahun 2008;
- Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat No 20 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

- c. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
- d. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang masih berlaku sesuai Perda Kabupaten Tasikmalaya No 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031
- e. Memperhatikan guna lahan eksisting berdasarkan interpretasi citra terbaru (Tahun 2016);
- f. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- g. Mempertimbangkan hasil dari analisis kesesuaian lahan untuk fungsi lindung sesuai dengan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung; dan
- h. Mempertimbangkan hasil analisis daya dukung lahan untuk kawasan lindung dan budidaya sesuai Permen PU No 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

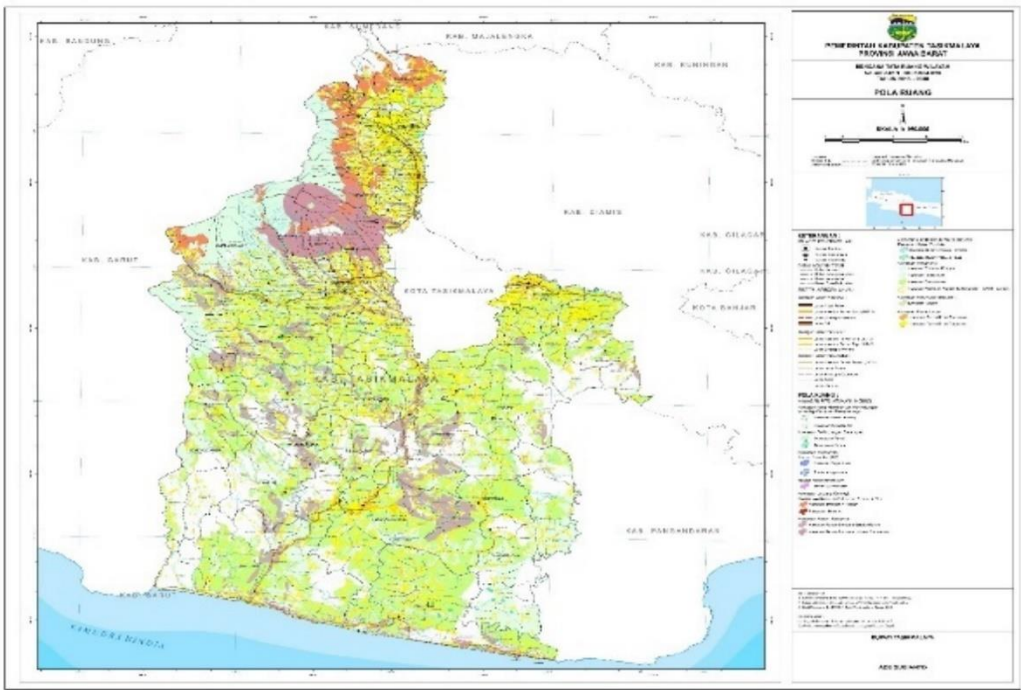
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang sudah ada disusun untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2031. Secara garis besar, rencana pola ruang Kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu :

- a. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
- b. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten/kota

yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berdasarkan ketentuan di atas, untuk menghasilkan peta rencana pola ruang yang baru (revisi), perlu dilakukan analisis overlay beberapa peta peruntukan lahan, meliputi:

1. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tasikmalaya menurut Perda RTRW Kab Tasikmalaya (Peraturan daerah No 2 Tahun 2012)
2. Peta Penggunaan Lahan Eksisting (*Land Use*) tahun 2018
3. Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat, termasuk peta kawasan lindung dan kawasan hutan yang sudah ditetapkan penetapan kawasannya melalui SK Menhut.
4. Peta kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan peta tematik/sektoral lainnya yang terbaru, seperti sebaran kawasan perkebunan
5. Peta hasil analisis kemampuan lahan (daya dukung) Kabupaten Tasikmalaya sesuai Permen PU No 20 Tahun 2007.



Gambar 6.2

Peta Rencana Pola Ruang

Sumber : Analisis dan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031

Tabel 6.10.
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

A	Kawasan Lindung	Luas Ha
1	Kawasan Hutan Lindung	16,605.02
2	Sempadan Mata Air	522.25
3	Sempadan Pantai	2,155.06
4	Sempadan Sungai	4,830.48
5	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	252.71
6	Sempadan Patahan Aktif pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	4,349.91
7	Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	20,292.24
8	Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api	9,239.54
9	Danau/Situ	19.40
10	Sungai	1,827.92
11	Kawasan Imbuhan Air Tanah	7,488.14
12	Kawasan Pelestarian Alam	9.76
13	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.36
	TOTAL KAWASAN LINDUNG	67,609.80
B	Kawasan Budidaya	Luas Ha
1	Kawasan Peruntukan Industri	563.27
2	Kawasan Perkebunan	67,609.01
3	Kawasan Permukiman Perdesaan	34,598.42
4	Kawasan Permukiman Perkotaan	10,659.91
5	Kawasan Tanaman Pangan	27,341.87
6	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	25,173.51
7	Kawasan Hutan Produksi Tetap	4,898.12
8	Kawasan Hortikultura	32,676.34
	TOTAL KAWASAN BUDIDAYA	203,520.46
	TOTAL KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA	271,130.26

Sumber : Analisis dan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2021-2041

Tabel 6.11.
Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Tasikmalaya

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
1	Sistem Perkotaan								
	a. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pembangunan Prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang kawasan pusat pemerintahan	PKL Singaparna						Kementerian PUPR, Bappenas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bappeda
		Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah	PKL Singaparna						Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dnas Kesehatan, dan Bappeda
		Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	PKL Karangnunggal						Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dnas Kesehatan, dan Bappeda
		Pembangunan prasarana pelayanan umum gedung kesenian, ruang terbuka hijau, taman tempat bermain	PKL Singaparna						Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bappeda
		Pembangunan prasarana olah raga dan rekreasi	PKL Singaparna						Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, Pemuda dan

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
									Olahraga dan Bappeda
		Pembangunan TPA	PKL Singaparna (TPA Nangkaleh)						Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda
		Pembangunan IPAL dan IPLT Skala Pelayanan Kabupaten dan Kawasan	PKL Singaparna						Kementerian PUPERA, DPRKP, DLH, Bappeda
		Pembangunan Terminal Type B	PKL Singaparna						Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bappeda
		Finalisasi Legalisasi Perda RDTR & PZ	PKL Ciawi, PKL Manonjaya, PKL Karangnunggal, PKL Cikatomas ,						Dinas PUPR, Bappeda, Bag. Hukum-Setda
		Penataan infrastruktur kecamatan	PKL Singaparna PKL Ciawi, PKL Manonjaya, PKL Karangnunggal, PKL Cikatomas						Kementerian PUPR, Dishub, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bappeda
		Pembangunan terminal Type C	PKL Ciawi PKL Manonjaya PKL Cikatomas						Dishub, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bappeda
		Pembangunan Rumah Sakit Umum	PKL Karangnunggal PKL Ciawi PKL Cikatomas						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
									Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinkes, dan Bappeda
		Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi	PKL Manonjaya PKL Ciawi						Kementerian Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan infrastruktur dasar daerah perbatasan	Wilayah yang berbatasan dengan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten lain						Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bappeda
	b. Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK)	Peningkatan infrastruktur kecamatan	PPK : Rajapolah, Taraju, Cipatujah, Bantarkalong, Cibalong, Cineam, salawu, Pancatengah dan Cikalong .						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bappeda
		Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan minapolitan	Cipatujah, Karangnunggal dan Cikalong						Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, dan Bappeda
		c. Pengembangan dan pemantapan fungsi Pusat Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan prasarana dan sarana desa;Pengembangan sentra agribisnis	PPL Kadipaten, Pageurageung, Sukaresik, Jamanis, Sukahening, Sukaratu, Cisayong, Sariwangi, Leuwisari, Cigalantong, Desa					

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan dan penataan potensi wisata	Kutawaringin, Mangunreja, Tanjungjaya, Sukarame, Sukaraja, Padakembang, Puspahiang, Bojonggambir, Sodonghilir, Jatiwaras, Karangjaya, Salopa, Gunungtanjung, Parungponteng, Bantarkalong, Bojongasih, Culamega, Desa Singkir, dan Desa Pancawangi						Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bappeda
		Pengembangan sarana prasarana Kesehatan	PPL Kadipaten, Pageurageung, Sukaresik, Jamanis, Sukahening, Sukaratu, Ciasayong, Sariwangi, Leuwisari, Cigalantong, Kutawaringin, Mangunreja, Tanjungjaya, Sukarame, Sukaraja, Padakembang, Puspahiang, Bojonggambir, Sodonghilir, Jatiwaras, Karangjaya, Salopa, Gunungtanjung, Parungponteng, Bantarkalong, Bojoasih, Culamega, Desa Singkir, dan Desa Pancawangi						Dinkes, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bappeda
2	Sistem Jaringan Prasarana								
	1. Sistem Jaringan Prasarana Utama								
	(a) sistem jaringan transportasi darat								
	(1) Pengembangan jaringan jalan nasional;	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan jalan tol	<ul style="list-style-type: none">Cileunyi – Tasikmalaya – BanjarGedebage – Tasikmalaya - Cilacap						Kemen PUPR, Dinas Bina Marga Prov dan Kab
		<ul style="list-style-type: none">Pengembangan Jalan Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none">Ruas jalan kadipaten-rajapolahRuas Jalan Rajapolah-CisayongRuas Jalan Ciawi-Kadipaten						
		<ul style="list-style-type: none">Pengembangan jalan kolektor Primer 1	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan jalan kolektor primer 1 (JKP-1):Ruas Jalan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa BaratRuas jalan Rajapolah – Indihiang;Ruas jalan Cibeureum – Manonjaya;Ruas jalan Manonjaya – Cimaragas;Ruas jalan Urug – Karangnunggal;Ruas jalan Karangnunggal – Cipatujah;						

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
			<ul style="list-style-type: none">▪ Ruas jalan Salawu – Singaparna;▪ Ruas jalan Singaparna – Mangkubumi;▪ Ruas jalan Cikaengan – Cipatujah; dan▪ Ruas jalan Cipatujah – Kalapagenep.						
	(2) pengembangan jaringan jalan provinsi	peningkatan jalan kolektor primer (KP 2)	<ul style="list-style-type: none">▪ ruas jalan Ciawi – Singaparna;▪ ruas jalan Manonjaya – Salopa;▪ ruas jalan Pasirgintung-Cikalong;▪ ruas jalan Mangunreja - Sukaraja.▪ Ruas jalan Papayan - Cikalong						Dinas Bina Marga Prov dan Kab
	(3) Pengembangan jaringan jalan kabupaten	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan ruas jalan lokal	Seluruh Kecamatan						Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Dinhub, BPN dan Bappeda
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jalan lingkar Utara	Cigalontang, Leuwisari, Singaparna, Padakembang, Sukarame.						
		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jalan lingkar Selatan	Mangunreja, Siangaparna dan Sukarame						
		Pembangunan jembatan kabupaten;	<ul style="list-style-type: none">▪ Seluruh Kecamatan						Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Dishub dan Bappeda
		Optimalisasi terminal penumpang tipe C.	Ciawi, Cikatomas						Dishub, PUPR, Bappeda, DLH
		Pembangunan terminal penumpang tipe C	Karangnunggal, Manonjaya						Dishub, PUPR, Bappeda, DLH
		optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis	Singaparna						Dishub
	(4) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.	Pengembangan jaringan trayek angkutan umum kota;	<ul style="list-style-type: none">• Ciawi – Cipanas• Singaparna – Sukakarsa• Singaparna – linggasirna• Singaparna – Linggamulya- Rawa						Dishub

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
			<ul style="list-style-type: none">• Singaparna-Ceungceum-Cigadog-Paniis• Singaparna-rancapaku• Singaparna-sukamenak• Singaparna-Cinerah• Singaparna-Sindangsono• Singaparna-Ciponyo-Cipanas• Singaparna-leuwisari-Cikedung• Singaparna-Kokoncong• Singaparna- Cisaruni-kabubangecong-karangdan• Singaparna – Batubelah• Singaparna- Cikunir-Tawangbanteng – Cisinga- Singaparna• Singaparna- Cisinga-Tawang Banteng – Kikisik						
		Pengembangan jaringan trayek angkutan perdesaan;	<ul style="list-style-type: none">• Simpang -sindang• Simpang – Pamejahan - Bongas• Simpang - Rancabakung-Cikukulu• Simpang – Sindang Reret – Kujang• Simpang -Leuwipicung• Simpang – Rancabakung Cipaku• Simpang- Ranca Bakung – Bojongaish• Simpang -Nagrok• Rancabakung – Cilangla• Rancabakung – Cimuncang• Rancabakung – Cibatu – Cintawangi• Rancabakung – Cilangla• Rancabakung – Cinunjang• Rancabakung - Simpang -Pamayang• Rancbakung – Simpang -Cikijing• Rancabakung - Batulawang- Sukarame• Rancabkung – Batulawang – Cibatu• Cikatomas -Salopa• Cikatomas – Buniasih• Cikatomas – Tawang• Cikatomas – Cimanuk						Dishub

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
			<ul style="list-style-type: none"> • Cikalong – Cikancra • Cibeber -Cikalong - Cidadap – Cipatujah • Cibeber- kalapa genep-cimanuk • Ciawi-pagerageng • Ciawi – Gombong • Ciawi – Kertamukti • Ciawi- Cileleus • Ciawi-sukamenak • Ciawi – margasari • Ciawi – mandalasari • Ciawi – bugel • Ciawi- kadipaten • Ciawi – suryalaya • Ciawi- Sukaresik • Trajapolah – kiara jangkung • Cineam – karanglayung-sinarjaya • Cineam-Cikondang • Cineam – Ciampangan • Cineam – Pasir Mukti – Csarua • Cineam – rajadatu – janggala • Manonjaya – cihaur-cikareo • Mananjaya – gunung tanjung -bengkok • Singaparna – Cibalanarik- Sukaraja • Singaparna - Cigalontang • Singaparna - Tenjowaringin • Singaparna – cikanir • Singaparna -Sirnajaya • Singaparna – Cikesal • Singaparna - Jahlang 						
		Pengembangan jaringan angkutan ke tempat wisata dan di tempat wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebar di Kabupaten Tasikmalaya 						
		Pengembangan jaringan trayek angkutan perbatasan	Tasikmalaya - Cibalong; Tasikmalaya – Singaparna.						Dishub
		(b) Pengembangan Sistem transportasi laut	Pengembangan pelabuhan pendukung pengembangan komoditas unggulan industri	Kecamatan Karangnunggal, Cipatujah dan Cikalong					

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
									Pertambangan Provinsi
	1. sistem prasarana lainnya.								
	(a) Sistem jaringan prasarana energi	Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik	Seluruh kecamatan						PLN
		Peningkatan dan optimalisasi pelayanan listrik	Seluruh kecamatan						PLN
		Pengembangan energi potensial air	DAS Cimanuk, Cilaki dan Ciwulan						Dinas Pertambangan Prov, PLN
	(b) Sistem jaringan sumberdaya air	Rehabilitasi dan Optimalisasi pengembangan jaringan irigasi	Di seluruh Kabupaten Tasikmalaya						Kemen PUPR, Dis PU SDA Prov, Dinas Pekerjaan Umum,BBWS Dinas Pertanian dan Penataan Ruang, BPSDA
		pengelolaan DAS	Di seluruh Kabupaten Tasikmalaya						Kemen PUPR, Dis PU SDA Prov, Dinas Pekerjaan Umum,BBWS Dinas Pertanian dan Penataan Ruang, BPSDA
		Optimalisasi kapasitas air baku Padawaras	Karangnunggal						Kemen PUPR, Dis PU SDA Prov, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPSDA
		Perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir:	Cipatujah, dan Daerah rawan banjir lainnya						Kemen PUPR, Dis PU SDA Prov, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPSDA
	(c) Sistem Prasarana Lingkungan lainnya								
	(1) Sistem jaringan persampahan	Pembangunan tempat penampungan sampah sementara	Setiap kecamatan						Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, dan Dinas

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan 2022-2026					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
									Lingkungan Hidup
	(2) Sistem jaringan air minum	Pengembangan jaringan pengolahan air minum	Cipondok, Cikawali, Cibunigeulis, Cilangla, Cianeut, Cigelap, Cimaung, Cikondang, Cipanyusupan, Cisaladah, Cibatur, Cisitu, Cibulak, dan Cibuntu						Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, PDAM
		Pengembangan jaringan pipa distribusi.	Seluruh kecamatan						Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, PDAM
		Pengembangan jaringan perpipaan air minum	Kawasan perkotaan						Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, PDAM
	(3) Sistem jaringan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pengolahan limbah industri. 	Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cipatujah, Taraju						Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup
	(4) Sistem jaringan drainase	Pembangunan saluran drainase.	Seluruh kecamatan						Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		Pemeliharaan saluran drainase	Seluruh Kecamatan						Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
	(5) sistem jalur dan ruang evakuasi bencana alam	Optimalisasi perencanaan dan penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.	Kawasan Rawan Bencana						Satkorlak, Bag. Sosial, Bappeda, Litbang
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana evakuasi bencana Penyusunan mitigasi bencana 	Kawasan Rawan Bencana						Satkorlak, Bag. Sosial, Bappeda, Litbang
B	PERWUJUDAN POLA RUANG								
1	Kawasan Lindung								
	a. Hutan lindung;	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan batas kawasan hutan lindung daerah perbatasan Penanaman tanaman tahunan; Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung; 	kawasan hutan lindung						Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Dinas

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
		<ul style="list-style-type: none">Pengembangan pola insentif dan disinsentifOptimalisasi pengelolaan kawasan hutan lindung							Kehutanan Provinsi
	b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;	<ul style="list-style-type: none">Penghijauan kawasan;Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut	kawasan resapan air						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi
	c. kawasan perlindungan setempat;	Penegakan aturan garis sempadan pantai dan sempadan sungai;	kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi
		Penataan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai;							Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi
		Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, & rehabilitasi kawasan sempadan;							Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi
	d. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;	Penetapan batas kawasan suaka alam dan cagar budaya;	Salawu						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi
		Penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal;	Bantarkalong, Salawu, Cineam, Taraju, Karangjaya, Sukaraja, Manonjaya, Leuwisari, Gunungtanjung						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi
	e. Kawasan rawan bencana alam;	<ul style="list-style-type: none">Pengaturan kegiatan pada kawasan budidaya;Pengurangan resiko bencana alam pada kawasan;Penyusunan mitigasi bencana.	Kawasan Rawan Bencana						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
	f. Kawasan Lindung Lainnya	Perlindungan terhadap terumbu karang, hutan mangrove, dan kawasan estuaria	Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Karangnunggal						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi
2	Kawasan Budidaya								
	a. Kawasan peruntukan hutan rakyat	Penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan	Kawasan Hutan Rakyat						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi
		<ul style="list-style-type: none">Rehabilitasi lahan kritis;Pembangunan kebun bibit rakyat	Kawasan Hutan Rakyat						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi
	b. Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Seluruh Kecamatan						
		penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Seluruh Kecamatan						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Pemantapan kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan	Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Taraju, Manonjaya, Cikalong						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Optimalisasi UPTD Balai Benih Holtikultura Cimintar	Cipatujah						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Optimalisasi UPTD Balai Benih Padi dan palawija Margajaya	Mangunreja						Dinas Pertanian dan Bappeda
		pembangunan pusat pembibitan komoditas unggulan agribisnis	Kadipaten, Karangnunggal						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian	Jamanis						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas agribisnis unggulan	Puspahiang, Jatiwaras, Salawu, Sukaraja, Manonjaya						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Inventarisasi Kawasan agropolitan	Seluruh kecamatan						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Pembangunan & pemantapan kawasan agropolitan	Seluruh kecamatan						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Inventarisasi kawasan <i>Coorporate Farming</i>	Seluruh kecamatan						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Pembangunan kawasan <i>Coorporate Farming</i>	Seluruh kecamatan						Dinas Pertanian dan Bappeda
		Pemantapan kawasan <i>Coorporate Farming</i>	Seluruh kecamatan						Dinas Pertanian dan Bappeda

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengembangan Upland	Seluruh kecamatan						Dinas Pertanian dan Bappeda
	c. Peternakan	Pemantapan Kawasan Perbibitan Sapi Potong di Pedesaan (<i>Village Breeding Centre</i>)	Cibalong, Parungponteng, Cikatomas,Culamega, Pancatengah, Bantarkalong, Karangnunggal, Cipatujuh, Cikalong, Bojongasih.						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Optimalisasi UPTD Perbibitan Ternak Sapi Potong dan Kambing	Pancatengah dan Sariwangi						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas	Singaparna, Ciawi, Manonjaya						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Singaparna						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Ternak	Daging (Singaparna, Manonjaya, Ciawi), Susu (Pagerageung, Salawu,Cisayong), Telur (Singaparna,Rajapolah, Leuwisari)						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Ternak	Manonjaya, Singaparna, Ciawi,Pancatengah, Taraju						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan Sapi Perah	Pagerageung,Cisayong, Kadipaten,Ciawi,Sukaresik, Sukaratu dan Salawu						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Perbibitan Unggas di Pedesaan (<i>Village Poultry Farm</i>)	Manonjaya, Leuwisari, Ciawi, Sukaratu, Bantarkalong, Salawu dan Cineam						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan Ternak Kambing PE	Sariwangi, Cineam, Cigalontang						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Kawasan Kebun Rumput Pastura Untuk Hijauan Makanan Ternak	Cibalong, Parungponteng, Cikatomas, Pancatengah, Salopa, Jatiwaras, Bantarkalong, Karangnunggal, Cipatujuh, Cikalong, Cineam, Bojongasih, Gunungtanjung, Culamega, Pagerageung						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	d. Kawasan peruntukan perikanan	Pengembangan Sentra Komoditas Unggulan Perikanan dan Kelautan	Gurame (Padakembang, Leuwisari, Cisayong, Sukarame, Sukaratu, Sariwangi, Mangunreja), Udang Galah (Sukarame, Cigalontang, Leuwisari, Padakembang, sariwangi, Sukaratu, Cisayong dan Sukahening) Ikan Nilem (Padakembang, Cisayong, Leuwisari, Sukarame, Sukaratu, Singaparna)						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
			Perikanan Laut (Cipatujah, Cikalong, Karangnunggal)						
		Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya (Padakembang, Leuwisari, Sukaratu, Singaparna) Perikanan Tangkap (Cipatujah, Cikalong dan Karangnunggal)						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Optimalisasi UPTD Perbenihan Ikan dan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan	Padakembang, Cipatujah, Karangnunggal.						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Sentra Pembenihan dan Pembesaran Ikan Air Tawar	Gurame (Padakembang, Leuwisari, Cisayong, Sukarame, Sukaratu, Sariwangi, Mangunreja), Udang Galah (Sukarame, Cigalontang, Leuwisari, Padakembang, sariwangi, Sukaratu, Cisayong dan Sukahening) Ikan Nilem (Padakembang, Cisayong, Leuwisari, Sukarame, Sukaratu, Singaparna) Ikan Mas (Padakembang, Cisayong, Sariwangi, Mangunreja, Sukarame)						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Optimalisasi Tempat Pendaratan Ikan	Cipatujah, Cikalong						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pembangunan Pangkalan pendaratan Ikan	Cipatujah dan Cikalong						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pembangunan Pusat Pemasaran Ikan	Padakembang						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Optimalisasi Sarana Perikanan Budidaya dan perikanan Tangkap	Kabupaten Tasikmalaya						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Peningkatan aksesibilitas pusat-produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kabupaten Tasikmalaya						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pembangunan gudang penyimpanan ikan dan pendinginan (Cold Storage)	Cipatujah, Cikalong						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Cipatujah, Cikalong						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	e. Kawasan peruntukan pariwisata	Pembangunan sarana prasarana kawasan wisata	Seluruh obyek wisata Kabupaten						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata,

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
									pemuda dan olahraga
		Optimalisasi objek wisata agro	Taraju, Kadipaten						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga
		Penataan infrastruktur transportasi menuju kawasan objek wisata	Seluruh obyek wisata Kabupaten						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga
		Pengembangan daya tarik wisata di setiap kawasan wisata	Seluruh obyek wisata Kabupaten						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga
		Perencanaan dan penyediaan fasilitas paket wisata terpadu	Kabupaten Tasikmalaya						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga
	f. Kawasan peruntukan permukiman (Perdesaan dan Perkotaan) dan	Pembangunan prasarana dan sarana permukiman.	Setiap kecamatan						Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		Pengembangan kawasan permukiman sehat dan berwawasan lingkungan	Seluruh Kecamatan						Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		Revitalisasi kawasan permukiman kumuh	Kawasan kecamatan ibukota						Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		Pengembangan rumah layak huni bagi MBR	Seluruh Kecamatan						Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		Pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana	Kawasan rawan bencana						Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		i. Kawasan Lainnya							
	Kawasan perdagangan/jasa	Perencanaan Pembangunan pasar induk	Singaparna						Bappeda, Disperindag
		Pengembangan sarana kelembagaan dan perekonomian (Koperasi	Bantarkalong, Cikatomas,						Bappeda, Disperindag

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Pelaksana
				2022-2026					
				2022	2023	2024	2025	2026	
		usaha bersama, perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis)	Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cipatujah, Taraju						
		Pengembangan sarana promosi & pusat informasi pengembangan agribisnis	Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Taraju, Manonjaya, Cipatujah						Bappeda, Disperindag
		Penataan dan pengembangan pasar tradisional	Setiap kecamatan						Bappeda, Disperindag
		Pengendalian pembangunan pasar modern	Setiap kecamatan						Bappeda, Disperindag
		Optimalisasi Pasar Ikan tawar	Singaparna – Singaparna Jatihurip – Cisayong Padakembang- Padakembang						Bappeda, Disperindag
		Pengembangan prasarana dan sarana pemasaran komoditas perikanan tangkap unggulan	<ul style="list-style-type: none">CipatujahCikalong						Bappeda, Disperindag
		Pengembangan prasarana dan sarana keuangan penunjang komoditas perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none">CipatujahCikalong						Bappeda, Disperindag
		Optimalisasi sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<ul style="list-style-type: none">TPI Pamayangsari CipatujahTPI Cimanuk Cikalong						Bappeda, Disperindag
		Pengembangan kios cenderamata pada kawasan wisata	Seluruh kawasan obyek wisata						Bappeda, Disperindag

Sumber : Analisis dan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka *review* terlebih dahulu terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	3.493.135.437.407,00	4.054.039.336.259,09	4.289.898.336.612,71	4.542.107.945.807,08	4.808.332.124.547,44	5.096.366.962.076
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	100.000.000.000,00	-	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	35.000.000.000,00	31.500.000.000,00	28.350.000.000,00	25.515.000.000,00	22.963.500.000,00	20.667.150.000
	Total Penerimaan	3.528.135.437.407,00	4.085.539.336.259,09	4.318.248.336.612,71	4.667.622.945.807,08	4.831.295.624.547,44	5.117.034.112.076
	Dikurangi :						
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	2.214.492.660.372,00	2.418.198.692.566,11	2.484.643.986.751,70	2.489.022.508.436,72	2.544.292.616.368,42	2.562.665.206.831
A	Belanja Operasi	1.529.854.753.709,00	1.626.183.711.278,63	1.651.071.413.478,13	1.678.631.069.783,60	1.706.732.146.811,50	1.736.604.737.274,20
1	Belanja Pegawai	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00
2	Belanja Kegiatan Administrasi Umum	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00
3	Belanja Hibah Parpol	1.382.217.000,00	1.382.217.000,00	1.382.217.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
4	Belanja BLUD	209.190.136.709,00	301.833.446.278,63	322.961.787.518,13	345.569.112.644,40	369.758.950.529,51	395.642.077.066,58
5	Belanja BOS	184.282.400.000,00	187.968.048.000,00	191.727.408.960,00	195.561.957.139,20	199.473.196.281,98	203.462.660.207,62
B	Belanja Transfer	667.137.906.663,00	700.514.981.287,48	735.572.573.273,56	772.391.438.653,12	811.060.469.556,93	811.060.469.556,93
1	Belanja Bagi Hasil	10.089.645.663,00	10.614.307.237,48	11.176.865.521,06	11.775.945.512,99	12.414.201.759,80	13.094.500.016,23
2	Alokasi Dana Desa	254.160.600.000,00	266.868.630.000,00	280.212.061.500,00	294.222.664.575,00	308.933.797.803,75	324.380.487.693,94
3	Dana Desa	402.887.661.000,00	423.032.044.050,00	444.183.646.252,50	466.392.828.565,13	489.712.469.993,38	514.198.093.493,05
C	Pembiayaan Pengeluaran	17.500.000.000,00	91.500.000.000,00	98.000.000.000,00	38.000.000.000,00	26.500.000.000,00	15.000.000.000,00

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pembentukan Dana		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00			
2	Pembayaran Pokok Utang			11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	30.000.000.000,00	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4	Pemberian Pinjaman	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00		
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.313.642.777.035,00	1.667.340.643.692,98	1.833.604.349.861,01	2.178.600.437.370,36	2.287.003.008.179,02	2.554.368.905.245

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Hasil Analisis

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Memperhatikan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan target pembangunan berkelanjutan (TPB)
5. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana program Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2021-2026 berjumlah 393 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Tasikmalaya, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,84 %	100 %	41.467.397.300	100 %	180.009.097.050	100 %	194.844.545.466	100 %	202.419.881.830	100 %	209.162.478.285	100 %	217.077.352.634	100 %	1.044.980.752.565	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,72 %	100 %	182.885.654.176	100 %	766.327.527.750	100 %	453.849.256.871	100 %	465.234.734.577	100 %	478.081.776.615	100 %	490.404.229.913	100 %	2.836.783.179.902	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	89,82 %	100 %	74.155.420.480	100 %	467.723.975.330	100 %	338.231.517.138	100 %	348.878.462.651	100 %	359.784.816.531	100 %	370.958.361.027	100 %	1.959.732.553.157	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,22 %	100 %	8.751.270.000	100 %	29.978.266.470	100 %	33.452.614.464	100 %	34.456.192.898	100 %	35.489.878.685	100 %	36.554.575.046	100 %	178.682.797.563	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum yang telah ditetapkan	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	405.000.000	100 %	405.000.000	0 %	0	0 %		0 %	810.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	51,18 %	0 %	0	53,18 %	500.000.000	55,18 %	450.000.000	57,18 %	350.000.000	59,18 %	300.000.000	61,38 %	200.000.000	61,38 %	1.800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pendidikan dasar, paud DAM PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah jenjang SD dan SMP yang menerapkan	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	540.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		muatan lokal Bahasa Sunda																
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	33,3 %	41,6 %	293.495.299.878	50 %	293.495.299.878	58,3 %	293.495.299.878	67 %	293.495.299.878	83,3 %	293.495.299.878	100	239.658.124.430	100 %	1.707.134.623.820	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000)	1/7.122 0/0000	1/6067 0/0000	34.334.154.575	1/6171 0/0000	63.154.637.208	1/6275 0/0000	184.743.008.705	1/6382 0/0000	183.244.418.330	1/6491 0/0000	205.835.429.122	1/6491 0/0000	223.990.599.815	1/6601 0/0000	895.302.247.755	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0,11 %	1.11 %	0	2.11 %	0	3.11 %	75.600.000.000	4,11 %	82.134.330.000	5,11 %	64.040.000.000	6.11%	98.480.295.000	6,11 %	320.254.625.000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	18,9 %	18 %	804.842.000	17 %	6.225.000.000	15,75 %	5.898.750.000	14 %	6.193.687.500	13 %	6.503.371.875	13%	6.600.922.453	12 %	32.226.573.828	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0.1 Skor	0.1 Skor	0	0.11 Skor	857.737.650	0.12 Skor	1.141.006.250	0.13 Skor	1.286.921.344	0.14 Skor	1.444.132.664	15%	1.725.002.563	0.15 Skor	6.454.800.471	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	100 %	100 %	0	100 %	559.023.000	100 %	1.578.712.593	100 %	1.627.521.168	100 %	1.678.205.037	100%	31.765.809.352	100 %	37.209.271.150	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	N/A %	25 %	345.800.000	35 %	1.320.621.867	45 %	1.550.000.000	55 %	1.617.500.000	65 %	1.688.375.000	75%	1.762.791.500	75 %	8.285.088.367	Dinas Kesehatan
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	39671,22 Ha	40053,24 Ha	30.699.050.000	40323,24 Ha	43.628.230.000	40599,24 Ha	49.950.000.000	40871,24 Ha	45.050.000.000	41141,24 Ha	46.150.000.000	#REF!	48.457.500.000	41416,24 Ha	263.934.780.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	18,76 %	19,07 %	7.047.717.000	19,57 %	23.855.000.000	20,04 %	18.455.000.000	20,5 %	17.610.000.000	20,96 %	18.085.000.000	21,43 %	18.989.250.000	21,43 %	104.041.967.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum bukan jaringan perpipaan	46,35 %	0 %	0	0 %	0	46,39 %	1.000.000.000	46,42 %	1.000.000.000	46,46 %	1.200.000.000	46,50 %	1.260.000.000	46,50 %	4.460.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPS3R	10,26 %	17,95 %	2.495.000.000	20,51 %	2.400.000.000	25,64 %	3.500.000.000	33,33 %	4.500.000.000	41,03 %	4.800.000.000	48,72 %	5.300.000.000	48,72 %	22.995.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPA	0 %	0 %	0	0 %	0	25 %	15.000.000.000	50 %	15.000.000.000	75 %	15.000.000.000	100 %	15.000.000.000	100 %	60.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan sekala setempat	45,23 %	45,46 %	0	45,54 %	9.750.000.000	45,66 %	8.990.000.000	45,8 %	9.765.000.000	45,97 %	11.935.000.000	46,14 %	12.531.750.000	46,14 %	52.971.750.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan sekala terpusat	3,43 %	3,43 %	10.486.060.000	3,81 %	99.054.542.287	4,15 %	92.893.084.073	4,47 %	95.414.105.754	4,76 %	99.718.787.869	5,05 %	98.907.623.627	5,05 %	496.474.203.610	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Genangan di wilayah Perkotaan yang tertangani	0 %	0 %	0	8,33 %	2.000.000.000	16,66 %	2.000.000.000	24,99 %	2.000.000.000	33,32 %	2.000.000.000	41,65 %	2.000.000.000	41,65 %	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan	38,28 %	38,48 %	12.655.000.000	39,04 %	35.200.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0,00%	-	0 %	47.855.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	44,19 %	44,19 %	450.000.000	47,67 %	59.749.975.000	53,49 %	24.967.500.000	59,30 %	15.055.310.000	65,12 %	15.308.191.760	70,93%	15.326.941.177	70,93 %	130.857.917.937	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	57,97 %	59,78 %	15.710.714.000	64,49 %	3.549.500.000	67,39 %	5.200.000.000	70,29 %	5.720.000.000	73,19 %	5.720.000.000	76,09%	5.720.000.000	76,09 %	41.620.214.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	48,09 %	49,59 %	124.689.764.017	51,07 %	202.324.291.819	52,54 %	211.343.997.590	53,98 %	217.985.741.219	55,47 %	225.823.140.267	56,93%	237.114.297.280	56,93 %	1.219.281.232.192	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	1.005.000.000	100 %	505.000.000	100 %	505.000.000	100,00 %	505.000.000	100 %	2.520.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	7,69 %	15,38 %	350.000.000	23,08 %	1.300.000.000	30,77 %	1.750.000.000	38,46 %	950.000.000	46,15 %	1.100.000.000	53,85%	1.150.000.000	53,85 %	6.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Pola Ruang	35,82 %	35,87 %	350.000.000	35,93 %	1.100.000.000	36 %	850.000.000	36,08 %	1.400.000.000	36,17 %	1.350.000.000	36,27%	1.500.000.000	36,27 %	6.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	600.000.000	100 %	22.184.850.00	100 %	34.832.250.00	100 %	34.532.250.00	100 %	34.632.250.00	100,00 %	34.932.250.00	100 %	161.713.850.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	9,71 %	9,72 %	1.075.328.00	9,76 %	5.150.000.000	9,80 %	10.122.500.00	9,84 %	8.472.500.000	9,88 %	8.722.500.000	9,92%	8.972.500.000	9,92 %	42.515.328.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	80,52 %	80,53 %	1.000.000.00	80,66 %	13.818.000.00	80,79 %	13.868.000.00	80,92 %	13.868.000.00	81,05 %	13.868.000.00	81,18%	13.868.000.00	81,18 %	70.290.000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	0 %	0,15 %	1.507.800.000	0,26 %	1.158.337.201	0,62 %	6.040.000.000	0,96 %	6.257.600.000	1,30 %	6.257.600.000	1,63%	6.260.800.000	1,63 %	27.482.137.201	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0 %	0 %	0	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100,00 %	50.000.000	100 %	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	52,515 %	65 %	14.768.875.500	72,50 %	30.765.125.500	80 %	33.183.690.631	85,50 %	44.019.484.188	89 %	35.242.590.754	92,5	36.363.903.626	92,5 %	194.343.670.199	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	7.250.000.000	100 %	8.850.000.000	100 %	9.773.357.000	100 %	9.075.000.000	100 %	9.575.000.000	100 %	9.225.000.000	100 %	53.748.357.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	0 %	0	100 %	1.710.000.000	100 %	1.710.000.000	100 %	1.710.000.000	100 %	1.710.000.000	100 %	1.802.000.000	100 %	8.642.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	7.01 Orang	23 Orang	90.000.000	224 Oran g	1.090.000.000	1121 Ora ng	1.440.000.000	1120 Ora ng	1.440.000.000	1121 Ora ng	1.440.000.000	#REF!	1.440.000.000	1121 Ora ng	6.940.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpe-nuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100 %	100 %	1.523.738.418	100 %	5.082.000.000	100 %	5.120.000.000	100 %	5.120.000.000	100 %	5.157.511.250	100%	5.196.898.063	100 %	27.200.147.731	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	66.9 %	66.92 %	274.673.608	66.94 %	4.160.000.000	67 %	4.330.000.000	67.17 %	4.330.000.000	67.4 %	4.500.000.000	#REF!	4.500.000.000	67.6 %	22.094.673.608	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %	100 %	1.823.600.000	100 %	3.300.000.000	100 %	2.125.000.000	100 %	2.035.000.000	100 %	2.160.000.000	100%	2.070.000.000	100 %	13.513.600.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	1 tahun	1 tahun	28.606.257	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 tahun	178.606.257	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	0 Dokume n	0	0 Dokume n	0	1 Dokum en	250.000.000	0 Dokum en	0	0 Dokum en	0	0	-	1 Dokume n	250.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	624 Orang	848 Oran g	2.503.619.494	1200 Ora ng	7.126.564.000	1200 Ora ng	6.250.000.000	1200 Ora ng	6.350.000.000	1200 Ora ng	6.450.000.000	1200 Ora ng	6.550.000.000	1200 Ora ng	35.230.183.494	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	3249 orang	3281 orang	10.042.925.500	3313 orang	10.749.327.757	3345 orang	10.849.999.167	3377 orang	11.119.778.610	3409 orang	12.017.636.636	3441 orang	13.205.611.571	3441 orang	67.985.279.241	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100 persen	100 persen	69.430.250	100 persen	524.873.000	100 persen	650.000.000	100 persen	650.000.000	100 persen	650.000.000	100 persen	650.000.000	100 persen	3.194.303.250	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	10,94 Dokumen	11,49 Dokumen	63.483.800	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	1.463.483.800	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan perangkat daerah dan lembaga swasta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG kewenangan Kabupaten/Kota	n/a Dokumen	0.0001 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	390.000.000	1 Dokumen	1.220.000.000	1 Dokumen	1.220.000.000	1 Dokumen	1.220.000.000	1	1.220.000.000	1 Dokumen	5.545.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Layanan Bagi korban kekerasan perempuan	83.33 Orang	3 Orang	275.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	102 Orang	270.000.000	50 Orang	1.145.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83.33 Dokumen	85.71 Dokumen	294.500.000	1 Dokumen	851.000.000	1 Dokumen	1.300.000.000	1 Dokumen	1.425.000.000	1 Dokumen	1.550.000.000	1 Dokumen	1.700.000.000	1 Dokumen	7.120.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	0.0005 Dokumen	0.0005 Dokumen	750.000.000	99 Dokumen	900.000.000	112 Dokumen	1.860.000.000	112 Dokumen	1.860.000.000	111 Dokumen	1.620.000.000	112	1.625.000.000	112 Dokumen	8.615.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1 unit	1 unit	500.000.000	1 unit	1.250.000.000	1 unit	1.187.500.000	1 unit	1.159.375.000	1 unit	1.164.218.750	1 unit	1.171.023.438	1 unit	6.432.117.188	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase ketahanan pangan masyarakat	N/A Ton	50 Ton	1.301.755.000	60 Ton	7.648.100.000	70 Ton	3.798.092.750	80 Ton	3.987.997.388	90 Ton	4.187.397.257	100 Ton	4.396.767.120	100 Ton	25.320.109.514	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase keamanan pangan masyarakat	N/A Kecamatan	6 Kecamatan	0	12 Kecamatan	400.000.000	14 Kecamatan	570.000.000	16 Kecamatan	598.500.000	18 Kecamatan	628.425.000	20 Kecamatan	659.846.250	20 Kecamatan	2.856.771.250	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0 %	100 %	4.500.000.000	100 %	8.000.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100 %	26.500.000.000	Sekretariat Daerah
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	0 %	100 %	4.600.000.000	100 %	8.211.100.000	100 %	5.232.210.000	100 %	3.255.431.000	100 %	3.280.974.100	100	3.309.071.510	100 %	27.888.786.610	Sekretariat Daerah
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyalarsan dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	100 %	0 %	0	100 %	450.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	800.000.000	100 %	850.000.000	100 %	950.000.000	100 %	5.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	50 %	55 %	737.500.000	60 %	773.750.000	65 %	1.379.960.000	70 %	877.474.500	75 %	1.004.672.750	80 %	1.055.662.500	80 %	5.829.019.750	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas lahan RTH	0,74 %	0,74 %	1.100.000.000	0,75 %	1.217.500.000	0,77 %	1.789.290.000	0,78 %	1.384.635.500	0,80 %	1.449.082.000	90,00 %	2.019.330.000	0,90 %	8.959.837.500	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin penyimpanan limbah B3	80 %	82 %	128.000.000	84 %	175.500.000	86 %	233.000.000	88 %	300.500.000	90 %	388.000.000	92 %	485.500.000	92 %	1.710.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengelola usaha dan/atau kegiatan yang pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan izin lingkungan	50 %	55 %	380.000.000	70 %	439.500.000	75 %	512.000.000	80 %	614.000.000	85 %	722.000.000	90 %	842.500.000	90 %	3.510.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui keberadaannya melalui keputusan pemerintah	0 %	0 %	0	0 %	125.000.000	20% %	150.000.000	33 %	200.000.000	42 %	200.000.000	50 %	200.000.000	50 %	875.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kelembagaan yang berkembang	75 %	75 %	185.000.000	75 %	255.000.000	80 %	325.000.000	80 %	395.000.000	90 %	465.000.000	90 %	545.000.000	90 %	2.170.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga yang dibina sesuai kriteria berbudaya lingkungan	32 %	0 % 0	40 %	220.000.000	48 %	240.000.000	52 %	260.000.000	66 %	280.000.000	74 %	300.000.000	74 %	1.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	108.750.000	100 %	127.500.000	100 %	155.000.000	100 %	182.500.000	100 %	218.750.000	100 %	263.750.000	100 %	1.056.250.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang dikelola di sumber	71490 kubik	73315 ku bik	5.085.000.000	90740 ku bik	5.618.250.000	110355 k ubik	5.691.672.500	143990 k ubik	5.874.378.500	172030 k ubik	6.073.890.500	200784 k ubik	6.278.475.000	200784 k ubik	34.621.666.500	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP Elektronik	97,54 %	98 %	0	98,10 %	125.000.000	98,20 %	3.665.000.000	98,30 %	25.000.000	98,40 %	25.000.000	98,5	25.000.000	98,50 %	3.865.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	38,41 %	50 %	0	65 %	75.000.000	75 %	3.900.000.000	85 %	260.000.000	90 %	260.000.000	95	260.000.000	95 %	4.755.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penerbitan Akta Kematian	71,3 %	80 %	0	84 %	25.000.000	88 %	25.000.000	92 %	25.000.000	96 %	25.000.000	99,5	95.000.000	100 %	195.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akta Kelahiran	95,06 %	97 %	272.095.000	97,5 %	125.000.000	98 %	195.000.000	98,5 %	195.000.000	99 %	95.000.000	100	25.000.000	99,5 %	907.095.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	10 %	25 %	0	40 %	60.940.000	55 %	210.940.000	70 %	218.440.000	85 %	226.315.000	100	234.583.750	100 %	951.218.750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan	N/A Kali	0 Kali	0	1 Kali	125.000.000	1 Kali	125.000.000	1 Kali	125.000.000	1 Kali	125.000.000	1	125.000.000	1 Kali	625.000.000	Dinas Kependudukan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		berdasarkan Data Konsolidasi Bersih																dan Pencatatan Sipil
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	00 %	00 %	0	100 %	900.000.000	100 %	990.000.000	100 %	1.002.000.000	100 %	1.110.000.000	100 %	1.165.500.000	100 %	5.167.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitas kerjasama desa	00 Desa	351 Desa	250.000.000	351 Desa	250.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	630.000.000	351 Desa	2.930.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	00 Desa	351 Desa	450.000.000	351 Desa	2.734.372.000	351 Desa	8.865.850.000	351 Desa	7.963.050.000	351 Desa	9.165.850.000	351 Desa	9.624.142.500	351 Desa	38.803.264.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	00 Lembaga	180 Lembaga	1.682.934.187	350 Lembaga	2.050.000.000	402 Lembaga	2.825.000.000	440 Lembaga	3.062.500.000	467 Lembaga	3.300.000.000	505 Lembaga	3.465.000.000	505 Lembaga	16.385.434.187	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	67 %	67.5 %	0	68 %	800.000.000	68.5 %	840.000.000	69 %	661.500.000	69.5 %	694.575.000	70%	1.458.607.500	70 %	4.454.682.500	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	70.47 Dokumen	71 Dokumen	7.487.456.000	71 Dokumen	13.119.563.200	72 Dokumen	14.168.060.000	72 Dokumen	15.101.463.000	72 Dokumen	15.819.036.150	73	16.575.431.285	73 Dokumen	82.271.009.635	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21 umur	21 umur	1.167.962.500	21 umur	2.003.580.000	21 umur	1.854.634.000	21 umur	1.942.365.700	21 umur	2.034.483.985	21	2.131.208.184	21 umur	11.134.234.369	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
																		Perempuan dan Perlindungan Anak
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai	37,61 %	38,31 %	17.578.000.000	39,01 %	64.205.000.000	39,71 %	29.450.000.000	40,41 %	29.250.000.000	41,11 %	30.000.000.000	41,82 %	31.000.000.000	41,82 %	201.483.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan layak jalan	89,93 %	72 %	125.000.000	74 %	125.000.000	76 %	205.000.000	77 %	240.000.000	79 %	270.000.000	80 %	300.000.000	80 %	1.265.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	82,05 %	82,15 %	350.000.000	82,20 %	1.875.000.000	82,30 %	3.520.000.000	82,50 %	4.730.000.000	82,70 %	5.240.000.000	83 %	5.750.000.000	83 %	21.465.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten	0,75 %	0,73 %	580.000.000	0,70 %	965.000.000	0,69 %	1.825.000.000	0,67 %	2.165.000.000	0,65 %	2.455.000.000	0,63 %	2.745.000.000	0,63 %	10.735.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	54,98 %	64,77 %	230.000.000	65,34 %	225.000.000	65,9 %	490.000.000	66,47 %	695.000.000	67,04 %	700.000.000	67,61 %	705.000.000	67,61 %	3.045.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	661.750.000	100 %	1.900.000.000	100 %	2.450.000.000	100 %	2.825.000.000	100 %	3.425.000.000	100	3.850.000.000	100 %	15.111.750.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 poin	2 poin	8.100.000.000	2,1 point	2.400.000.000	2,3 point	3.400.000.000	2,5 point	3.525.000.000	2,7 point	3.650.000.000	2,9 point	3.800.000.000	2,9 poin	24.875.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	44.27 %	46.15 %	0	47.98 %	433.980.050	49.75 %	500.000.000	51.47 %	550.000.000	53.14 %	600.000.000	54.76 %	650.000.000	54.76 %	2.733.980.050	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	100 %	100 %	0	100 %	681.357.550	100 %	500.000.000	100 %	525.000.000	100 %	550.000.000	100 %	575.000.000	100 %	2.831.357.550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang dibina	100 %	100 %	350.000.000	100 %	10.418.304.150	100 %	500.000.000	100 %	550.000.000	100 %	600.000.000	100 %	650.000.000	100 %	13.068.304.150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro Formal	14.2 %	19.7 %	582.683.150	24.8 %	3.003.028.706	29.5 %	1.453.000.000	33.8 %	1.595.000.000	37.7 %	1.705.000.000	41.2 %	1.815.000.000	41.2 %	10.153.711.856	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan wirausaha baru	52 %	50 %	0	36 %	5.792.915.700	28 %	750.000.000	24 %	775.000.000	20 %	800.000.000	18 %	825.000.000	18 %	8.942.915.700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Jumlah Investor	2.5 %	3 %	394.390.500	3 %	400.000.000	4 %	600.000.000	4 %	125.000.000	5 %	255.000.000	5 %	710.000.000	5 %	2.484.390.500	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	- Pameran	5 Pameran	190.320.900	5 Pameran	500.000.000	5 Pameran	500.000.000	6 Pameran	800.000.000	6 Pameran	860.000.000	6 Pameran	925.000.000	6 Pameran	3.775.320.900	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	55 Jenis Ijin	55 Jenis Ijin	337.750.000	55 Jenis Ijin	32.047.099.542	55 Jenis Ijin	1.750.000.000	55 Jenis Ijin	2.350.000.000	55 Jenis Ijin	2.980.000.000	55 Jenis Ijin	3.330.000.000	55 Jenis Ijin	42.794.849.542	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	6.08 %	10 %	317.436.000	12 %	851.127.000	14 %	650.000.000	16 %	695.000.000	18 %	700.000.000	20 %	750.000.000	20 %	3.963.563.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100 Persen	0 Persen	0	100 Perse n	150.000.000	100 Perse n	250.000.000	100 Perse n	250.000.000	100 Perse n	300.000.000	100 Perse n	350.000.000	100 Persen	1.300.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda;	20,84%;	20,89%	-	20,94%	450.000.000	20,99%	300.000.000	21,04%	350.000.000	21,09%	500.000.000	21,14%	500.000.000	21,14%	2.100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	22,22%	22,72%	2.692.541.000	23,50%	8.165.000.000	24,00%	11.020.000.00	24,50%	2.700.000.000	25,00%	3.470.000.000	25,50%	3.225.000.000	25,50%	31.272.541.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	10.52 %	15.74 %	7.735.000.000	26.31 %	126.758.691.350	31.57 %	9.328.000.000	42.10 %	9.926.000.000	47.36 %	9.900.000.000	65.78 %	10.220.000.000	65.78 %	173.867.691.350	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	16 %	16 %	585.000.000	24.00 %	11.910.000.000	32.00 %	1.300.000.000	36.00 %	1.800.000.000	40.00 %	1.900.000.000	50.00 %	3.041.000.000	50.00 %	20.536.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	13.33 %	13.33 %	0	18.33 %	800.000.000	23.33 %	450.000.000	28.33 %	150.000.000	33.33 %	604.000.000	38.33 %	350.000.000	38.33 %	2.354.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	21 %	21.05 %	507.459.000	21.10 %	500.000.000	21.15 %	516.500.000	21.20 %	516.500.000	21.25 %	516.500.000	21.75 %	516.500.000	21.75 %	3.073.459.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	550.000.000	100 %	561.000.000	100 %	572.220.000	100 %	583.664.400	100	2.182.724.451	100 %	4.549.608.851	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	30 %	30 %	50.000.000	50	100.000.000	70	300.000.000	80	350.000.000	90	400.000.000	100	450.000.000	100 %	1.650.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	20 %	30 %	2.525.000.000	30,5 %	3.439.865.022	31 %	1.824.820.000	31,5 %	1.859.316.400	32 %	1.894.502.728	32,5	1.930.392.783	32,5 %	13.473.896.933	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase sanggar seni yang dibina	25 %	0 %	0	35 %	399.999.800	40 %	406.000.000	45 %	412.120.000	50 %	418.362.400	55	424.729.648	55 %	2.061.211.848	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang terdokumentasikan	0 %	0 %	0	5 %	0	6 %	50.000.000	7 %	50.000.000	8 %	50.000.000	9	50.000.000	9 %	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola	45 %	0 %	0	0 %	0	45,5 %	730.000.000	46 %	630.000.000	46,5 %	630.000.000	47	630.000.000	47 %	2.620.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik	0 %	100 %	1.602.500	100 %	3.646.000.000	100 %	2.530.000.000	100 %	1.600.000.000	100 %	1.035.000.000	100	1.165.000.000	100 %	9.977.602.500	Sekretariat Daerah
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase kegiatan pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah yang dilaksanakan	0 %	0 %	0	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100	50.000.000	100 %	250.000.000	Sekretariat Daerah
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip	0 %	100 %	855,000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.219.000.000	100 %	870.000.000	100 %	725.000.000	100	750.000.000	100 %	4.764.000.855	Sekretariat Daerah
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0 %	0 %	-	100 %	100.000.000	0 %	0	100 %	550.000.000	100 %	550.000.000	100	550.000.000	100 %	1.750.000.000	Sekretariat Daerah
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	0 %	0 %	-	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	50.000.000	100	50.000.000	100 %	100.000.000	Sekretariat Daerah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	12 Bulan	12 Bulan	2.150.427.500	12 Bulan	4.545.204.400	12 Bulan	111.033.479.305	12 Bulan	116.585.153.270	12 Bulan	122.414.410.934	12 Bulan	128.535.131.480	12 Bulan	485.263.806.889	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase legalitas usaha perikanan budidaya, pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil, , tanda daftar pembudi daya ikan kecil dan Produksi perikanan budi daya	N/A Bulan	12 Bulan	1.742.517.500	12 Bulan	2.124.253.436	12 Bulan	5.745.900.808	12 Bulan	6.033.195.848	12 Bulan	6.334.855.640	12 Bulan	6.651.598.422	12 Bulan	28.632.321.654	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan dan Produksi pengolahan hasil usaha perikanan	N/A Kelompok	4 Kelomp ok	395.000.000	10 Kelomp ok	555.028.400	10 Kelom pok	2.047.529.820	10 Kelom pok	2.149.906.311	10 Kelom pok	2.257.401.627	10 Kelom pok	2.370.271.708	10 Kelom pok	9.775.137.865	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	979.264.000 R p	2,047,000, 000 Rp	1.420.845.000	2,149,350, 000 Rp	119.358.927.500	2,256,817, 500 Rp	57.895.000.000	2,369,658, 375 Rp	49.995.000.000	2,488,141, 294 Rp	32.444.984.500	2,612,548, 358 Rp	34.067.233.725	2,612,548, 358 Rp	295.181.990.725	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	3 %	3 %	50.000.000	5 %	60.000.000	7 %	175.000.000	9 %	175.000.000	11 %	175.000.000	13 %	183.750.000	0,13	818.750.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	-95,64 %	0 %	830.000.000	10 %	5.750.000.000	15 %	3.400.000.000	15 %	3.950.000.000	20 %	3.950.000.000	30	3.950.000.000	30	21.830.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya	-54,50 %	0 %	430.000.000	231,48 %	3.100.000.000	3.00 %	2.050.000.000	3.00 %	2.400.000.000	3.00 %	2.400.000.000	3.00 %	2.520.000.000	3.00 %	12.900.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	0 %	0 %	-	1.25 %	15.529.720.000	2.43 %	475.000.000	3.52 %	475.000.000	4.49 %	175.000.000	5.31 %	175.000.000	5.31 %	16.829.720.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	0.96%	0.41%	492.903.000	1.25 %	600.000.000	1.875 %	1.525.000.000	2.50 %	1.525.000.000	3.13 %	1.525.000.000	3.75 %	1.525.000.000	3.75 %	7.192.903.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	39 Kecamatan	39 Kecamatan	21.868.007.300	39 Kecamatan	157.100.526.650	39 Kecamatan	45.208.291.067	39 Kecamatan	47.468.705.620	39 Kecamatan	49.842.140.901	39 Kecamatan	52.334.247.946	39 Kecamatan	373.821.919.485	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)	0 Ha	50 Ha	35.502.329.959	0 Ha	105.201.600.000	205 Ha	84.465.234.000	210 Ha	100.415.643.019	215 Ha	104.684.487.669	215 Ha	109.613.683.453	220 Ha	539.882.978.100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (Keswan dan Veteriner)	2 Paket	2 Paket	43.806.300	9 Paket	1.030.000.000	9 Paket	1.676.500.000	9 Paket	1.760.325.000	9 Paket	1.848.341.250	9 Paket	1.940.758.313	9 Paket	8.299.730.863	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya Bencana Pertanian dan Tertanggulangnya bencana pertanian	1 Paket	0 Paket	0	2 Paket	400.000.000	2 Paket	820.000.000	2 Paket	861.000.000	2 Paket	904.050.000	2 Paket	949.252.500	2 Paket	3.934.302.500	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase izin usaha pertanian	N/A PBS	0 PBS	0	34 PBS	499.999.800	34 PBS	1.099.999.790	0 PBS	1.154.999.780	34 PBS	1.212.749.768	34 PBS	1.273.387.257	34 PBS	5.241.136.395	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani dan Terlaksananya penyuluhan pertanian	0 Kelompok	125 Kelo mpok	1.347.898.896	237 Kelo mpok	16.065.766.850	240 Kelo mpok	9.498.297.046	245 Kelo mpok	9.973.211.898	250 Kelo mpok	10.471.872.493	255 kelompok	11.255.931.743	255 Kelo mpok	58.612.978.926	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																	
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemenuhan kebijakan bidang energi baru terbarukan	0 %	100 %	42.386.665	100 %	80.000.000	100 %	88.000.000	100 %	96.800.000	100 %	106.480.000	100 %	117.128.000	100 %	530.794.665	Sekretariat Daerah
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana perdagangan yang mendukung aktifitas perdagangan	0 Pasar	1 Pasar	30.354.547.600	5 Pasar	141.830.000.000	5 Pasar	36.848.946.018	5 Pasar	39.636.846.116	5 Pasar	42.369.072.886	5 Pasar	45.163.950.375	5 Pasar	336.203.362.995	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	1 %	1 %	1.050.000.000	1 %	1.805.300.000	1 %	2.600.000.000	1 %	2.600.000.000	1 %	2.600.000.000	1 %	2.600.000.000	1 %	13.255.300.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	2 %	2 %	491.500.000	2 %	1.600.000.000	2 %	850.000.000	2 %	850.000.000	2 %	850.000.000	2 %	1.000.000.000	2 %	5.641.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera dan Ditera Ulang	8282 Alat UTTP	8696 Alat UTTP	215.600.000	9131 Alat UTTP	330.000.000	9587 Alat UTTP	400.000.000	10067 Alat UTTP	450.000.000	10570 Alat UTTP	500.000.000	11099 Alat UTTP	550.000.000	11099 Alat UTTP	2.445.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan formal	1535 Unit Usaha	1550 Unit Usaha	500.000.000	1566 Unit Usaha	1.356.000.000	1582 Unit Usaha	125.000.000	1597 Unit Usaha	200.000.000	1613 Unit Usaha	200.000.000	1629 Unit Usaha	200.000.000	1629 Unit Usaha	2.581.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah	1.2 %	1.3 %	2.800.000.00	1.4 %	2.185.000.000	1.5 %	1.550.000.000	1.6 %	1.300.000.000	1.7 %	1.350.000.000	1.8 %	950.000.000	1.8 %	10.135.000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM Formal	2 %	2.3 %	0	3.4 %	150.000.000	3.7 %	50.000.000	4 %	100.000.000	4.3 %	110.000.000	4.5 %	275.000.000	4.5 %	685.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terfasilitasinya pelayanan sistem informasi Industri	- IKM	- IKM	0	200 IKM	250.000.000	200 IKM	275.000.000	200 IKM	300.000.000	200 IKM	332.750.000	200 IKM	336.025.000	200 IKM	1.493.775.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	n/a orang	- orang	1.126.800	40 orang	565.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	3.626.126.800	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	n/a paket	- paket	0	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	1 paket	100.000.000	2 paket	200.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	800.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	0 %	100 %	37.967.550.000	100 %	38.302.550.000	100 %	39.277.550.000	100 %	39.090.050.000	100 %	39.543.800.000	100 %	40.042.925.000	100 %	234.224.425.000	Sekretariat Daerah
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0 %	100 %	4.035.000.000	100 %	5.102.877.300	100 %	6.076.142.330	100 %	7.497.633.863	100 %	9.061.274.549	100 %	10.781.279.304	100 %	42.554.207.346	Sekretariat Daerah
4 02	SEKRETARIAT DPRD																	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	71,3 %	80 %	16.586.818.644	84 %	19.719.157.141	96 %	35.518.974.141	96 %	35.518.974.141	96 %	35.518.974.141	96 %	35.518.974.141	96 %	178.381.872.349	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 01	PERENCANAAN																	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %	2.502.500.000	100 %	2.625.000.000	100 %	3.227.500.000	100 %	3.292.050.000	100 %	3.357.891.000	100 %	2.924.158.644	100 %	17.929.099.644	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	100 %	717.889.300	100 %	648.426.930	100 %	1.200.000.000	100 %	1.224.000.000	100 %	1.248.480.000	100 %	1.273.449.600	100 %	5.038.796.230	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	100 %	721.889.392	100 %	621.825.762	100 %	1.100.000.000	100 %	1.122.000.000	100 %	1.144.440.000	100 %	1.167.328.800	100 %	4.710.155.154	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		(RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)																
		Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A	100 %	1.041.000.000	100 %	1.088.000.000	100 %	1.209.760.000	100 %	1.233.955.200	100 %	1.258.634.304	100 %	1.283.806.990	100 %	5.831.349.504	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 02	KEUANGAN																	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	92.70 %	100 %	778.417.982.841	100 %	951.191.300.376	100 %	856.181.636.335	100 %	853.872.361.087	100 %	906.908.695.648	100 %	973.182.562.208	100 %	5.319.754.538.495	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	74 %	77 %	594.325.000	80 %	1.343.000.000	83 %	1.663.000.000	86 %	1.683.000.000	89 %	2.068.000.000	90 %	1.703.000.000	90 %	9.054.325.000	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	99.54 %	100 %	3.324.840.260	100 %	9.957.575.000	100 %	11.695.000.000	100 %	10.145.000.000	100 %	6.295.000.000	100 %	6.470.000.000	100 %	47.887.415.260	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5 03	KEPEGAWAIAN																	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	83,5 Poin	83,5 Poin	4.327.971.300	91 Poin	5.945.154.150	94 Poin	5.541.060.000	96,5 Poin	5.541.060.000	96,5 Poin	5.541.060.000	96,5 Poin	5.541.060.000	96,5 Poin	32.437.365.450	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi	80 Poin	82,5 Poin	1.755.232.700	97,5 Poin	3.070.000.000	102,5 Poin	3.208.000.000	132,5 Poin	3.100.000.000	132,5 Poin	3.140.000.000	135 Poin	3.264.141.000	135 Poin	18.047.141.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	116,5 Poin	119 Poin	81.346.600	123,5 Poin	620.000.000	123,5 Poin	705.000.000	128,5 Poin	695.000.000	128,5 Poin	710.000.000	133,5 Poin	750.000.000	133,5 Poin	17.537.373.700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	9,6 JP/Orang/Tahun	10 JP/Orang/Tahun	9.685.581.950	12 JP/Orang/Tahun	10.975.138.050	14 JP/Orang/Tahun	8.104.978.000	16 JP/Orang/Tahun	7.694.045.000	18 JP/Orang/Tahun	7.464.273.000	20 JP/Orang/Tahun	7.791.785.000	20 JP/Orang/Tahun	51.715.801.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0 %	100 %	1.452.378.639	100 %	2.016.500.000	100 %	2.056.830.000	100 %	2.097.966.600	100 %	2.139.925.932	100 %	1.637.314.850	100 %	11.400.916.021	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH																	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	00 %	100 %	945.314.300	100 %	1.189.845.730	100 %	1.143.830.303	100 %	1.258.213.333	100 %	1.384.034.667	100 %	1.522.438.133	100 %	7.443.676.466	Inspektorat Daerah
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	00 %	100 %	750.664.000	100 %	825.730.400	100 %	908.303.440	100 %	999.133.784	100 %	1.099.047.162	100 %	1.208.951.879	100 %	5.791.830.665	Inspektorat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 02																		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	544.200.000	Kecamatan Singaparna
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	71.000.000	80.50 Poin	71.000.000	80.85 Poin	72.500.000	81.20 Poin	74.000.000	81.55 Poin	75.500.000	85.74 Poin	75.500.000	85.74 Poin	439.500.000	Kecamatan Pancatengah
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggaraan	80.42 %	80.42 %	50.000.000	80.5 %	67.600.000	80.85 %	67.600.000	81.2 %	58.100.000	81.55 %	58.600.000	81.55 %	58.600.000	81.55 %	360.500.000	Kecamatan Mangunreja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan dan Pelayanan Publik																
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	66.900.000	80.50 Poin	67.300.000	80.85 Poin	99.300.000	81.20 Poin	102.800.000	81.55 Poin	105.300.000	81.95 Poin	105.300.000	81.95 Poin	546.900.000	Kecamatan Puspahiang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	87.051.450	100 %	87.950.000	100 %	88.950.000	100 %	89.950.000	100 %	90.950.000	100 %	90.950.000	100 %	535.801.450	Kecamatan Cigalontang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81 %	81 %	63.950.000	81.05 %	63.950.000	82 %	43.950.000	82.05 %	43.950.000	83 %	43.950.000	83 %	43.950.000	83 %	303.700.000	Kecamatan Leuwisari
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	80,09 Poin	81 Poin	61.600.000	81,05 Poin	61.600.000	82 Poin	63.100.000	82,05 Poin	64.600.000	83 Poin	66.100.000	83 Poin%	66.100.000	83,05 Poin	383.100.000	Kecamatan Sariwangi
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	64.500.000	100 %	64.500.000	100 %	39.500.000	100 %	130.000.000	100 %	195.000.000	100 %	195.000.000	100 %	688.500.000	Kecamatan Padakembang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	91.000.000	80.50 Poin	91.000.000	80.85 Poin	111.500.000	81.20 Poin	118.750.000	81.55 Poin	125.500.000	81.95 Poin	125.500.000	81.95 Poin	663.250.000	Kecamatan Cipatujah
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	95.058.000	80.50 Poin	114.950.000	80.85 Poin	116.500.000	81.20 Poin	118.500.000	81.55 Poin	122.500.000	81.55 Poin	122.500.000	81.95 Poin	690.008.000	Kecamatan Cikalong
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	464.400.000	Kecamatan Salawu
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81 %	81 %	63.950.000	81.05 %	63.950.000	82 %	51.000.000	82,05 %	52.000.000	83 %	53.000.000	83 %	53.000.000	83 %	336.900.000	Kecamatan Tanjungjaya
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80 Poin	81 Poin	67.750.000	81 Poin	67.750.000	82,05 Poin	69.750.000	82,85 Poin	71.750.000	83,4 Poin	73.750.000	83,4 poin	73.750.000	84,5 Poin	424.500.000	Kecamatan Parungponteng
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	65.000.000	80.50 Poin	65.000.000	80.85 Poin	67.000.000	81.20 Poin	69.000.000	81.55 Poin	71.000.000	81,55 poin	71.000.000	81.95 Poin	408.000.000	Kecamatan Taraju

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	85.500.000	80.50 Poin	67.450.000	80.85 Poi n	93.100.000	81.20 Poi n	96.600.000	81.55 Poi n	109.100.000	81,55 poin	109.100.000	81.95 Poi n	560.850.000	Kecamatan Bojonggambir
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80 Poin	81 Poin	98.350.000	81.73 Poin	50.932.200	82.76 Poi n	51.950.844	84.33 Poi n	52.989.861	85.32 Poi n	54.049.658	86.23 Poi n	54.049.658	86.23 Poi n	362.322.221	Kecamatan Sodonghilir
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ciawi	83,99 Poin	84,46 Poin	79.950.000	84,71 Poin	79.950.000	84,97 Poi n	95.450.000	85,22 Poi n	95.950.000	85,48 Poi n	96.450.000	85,48 poin	96.450.000	85,73 Poi n	544.200.000	Kecamatan Ciawi
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	78,03 POIN	78,30 POI N	63.500.000	78,50 POI N	70.000.000	79 POIN	104.750.000	79,50 POI N	125.250.000	79,60 POI N	145.750.000	79,60 poin	145.750.000	80,40 POI N	655.000.000	Kecamatan Sukaratu
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening	79,9 Poin	80,28 Poin	62.261.400	80,52 Poin	76.511.400	80,76 Poi n	78.023.400	81,00 Poi n	80.523.400	81,25 Poi n	83.023.400	81,25 poin	83.023.400	81,49 Poi n	463.366.400	Kecamatan Sukahening
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cisayong	83,99 Poin	84,46 Poin	73.600.000	84,71 Poin	73.600.000	84,97 Poi n	89.100.000	85,22 Poi n	90.100.000	85,48 Poi n	91.100.000	85,73 Poi n	91.100.000	85,73 Poi n	508.600.000	Kecamatan Cisayong
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerageung	83,99 Poin	84,46 Poin	77.000.400	84,71 Poin	77.000.000	84,97 Poi n	77.500.000	85,22 Poi n	78.000.000	85,48 Poi n	78.500.000	100 Poin	78.500.000	100 Poin	466.500.400	Kecamatan Pagerageung
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	84.700.000	100 %	85.200.000	100 %	88.500.000	100 %	90.000.000	100 %	96.000.000	100 %	96.000.000	100 %	540.400.000	Kecamatan Cikatomas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	65.700.000	100 %	90.700.000	100 %	92.700.000	100 %	94.700.000	100 %	96.700.000	100 %	96.700.000	100 %	537.200.000	Kecamatan Bantarkalong
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	79,9 Poin	80,28 Poin	60.300.000	80,52 Poin	95.684.900	80,76 Poi n	133.550.000	81 Poin	137.050.000	81,25 Poi n	140.550.000	81,49 Poi n	140.550.000	81,49 Poi n	707.684.900	Kecamatan Rajapolah
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	72.050.000	100 %	72.000.000	100 %	78.500.000	100 %	80.000.000	100 %	82.000.000	100 %	82.000.000	100 %	466.550.000	Kecamatan Salopa
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggaraan	100 %	100 %	72.400.000	100 %	72.900.000	100 %	72.900.000	100 %	74.600.000	100 %	76.600.000	100 %	76.600.000	100 %	446.000.000	Kecamatan Jatiwaras

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan dan Pelayanan Publik																
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	103.150.000	100 %	103.150.000	100 %	110.650.000	100 %	112.150.000	100 %	113.650.000	100 %	113.650.000	100 %	656.400.000	Kecamatan Karangnunggal
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten	83,99 Poin	84,46 Poin	67.349.000	84,71 Poin	60.554.050	84,97 Poin	90.250.000	85,22 Poin	104.250.000	85,48 Poin	113.750.000	85,48 poin	113.750.000	85,73 Poin	549.903.050	Kecamatan Kadipaten
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	69.900.000	100 %	59.900.000	100 %	62.400.000	100 %	64.900.000	100 %	67.400.000	100 %	67.400.000	100 %	391.900.000	Kecamatan Culamega
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	39.950.000	100 %	39.071.700	100 %	40.071.700	100 %	41.071.700	100 %	42.071.700	100 %	42.071.700	100 %	244.308.500	Kecamatan Cibalong
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangjaya	100 %	100 %	58.050.000	100 %	58.050.000	100 %	60.050.000	100 %	62.050.000	100 %	64.050.000	100 %	64.050.000	100 %	366.300.000	Kecamatan Karangjaya
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis	83,99 Poin	84,46 Poin	56.750.000	84,71 Poin	57.700.000	84,97 Poin	92.500.000	85,22 Poin	94.500.000	85,48 Poin	96.500.000	85,48 poin	96.500.000	85,73 Poin	494.450.000	Kecamatan Jamanis
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	69.050.000	100 %	90.700.000	100 %	98.500.000	100 %	100.500.000	100 %	102.500.000	100 %	102.500.000	100 %	563.750.000	Kecamatan Gunungtanjung
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	75.600.000	100 %	53.480.000	100 %	54.480.000	100 %	55.480.000	100 %	56.480.000	100 %	56.480.000	100 %	352.000.000	Kecamatan Cineam
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	64.250.000	100 %	42.130.000	100 %	43.630.000	100 %	45.130.000	100 %	46.630.000	100 %	46.630.000	100 %	288.400.000	Kecamatan Sukaresik
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	64.365.800	100 %	48.250.000	100 %	50.250.000	100 %	52.250.000	100 %	54.250.000	100 %	54.250.000	100 %	323.615.800	Kecamatan Sukarame
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	64.250.000	100 %	42.130.000	100 %	43.630.000	100 %	45.130.000	100 %	46.630.000	100 %		100 %	241.770.000	Kecamatan Manonjaya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	60.650.000	100 %	61.150.000	100 %	63.150.000	100 %	65.150.000	100 %	67.150.000	100 %	67.150.000	100 %	384.400.000	Kecamatan Bojongasih
7 01 03														0 %				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	100 %	16.500.000	100 %	17.250.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	90.250.000	Kecamatan Singaparna
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	18.18 %	0	27.3 %	11.000.000	27.3 %	11.000.000	27.3 %	11.000.000	27.3 %	11.000.000	27.3 %	44.000.000	Kecamatan Pancatengah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	100 %	30.000.000	100 %	30.500.000	100 %	31.000.000	100 %	32.200.000	100 %	144.200.000	Kecamatan Mangunreja
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	n/a %	0	14.3 %	60.000.000	14.3 %	73.300.000	14.3 %	86.600.000	14.3 %	86.600.000	14.3 %	306.500.000	Kecamatan Puspahiang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	30.750.000	100 %	31.250.000	100 %	31.750.000	100 %	32.250.000	100 %	32.750.000	100 %	32.750.000	100 %	191.500.000	Kecamatan Cigalontang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.750.000	100 %	31.250.000	100 %	31.750.000	100 %	31.250.000	100 %	31.250.000	100 %	186.250.000	Kecamatan Leuwisari
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	-	N/A %	-	Kecamatan Sariwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	100 %	100.000.000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	670.500.000	Kecamatan Padakembang
		Wilayan kecamatan sesuai Ketentuan																
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	30.76 %	0	30.76 %	13.000.000	30.76 %	13.000.000	30.76 %	13.000.000	30.76 %	13.000.000	30.76 %	52.000.000	Kecamatan Cikalong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	100 %	16.500.000	100 %	17.250.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	90.250.000	Kecamatan Salawu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.750.000	100 %	31.250.000	100 %	31.750.000	100 %	32.250.000	100 %	32.250.000	100 %	188.250.000	Kecamatan Tanjungjaya
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	N/A %	0	12.5 %	8.000.000	12.5 %	8.500.000	12.5 %	9.000.000	12.5 %	9.000.000	12.5 %	34.500.000	Kecamatan Parungponteng
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	N/A %	0	11.11 %	29.000.000	11.11 %	29.000.000	11.11 %	31.000.000	11.11 %	31.000.000	11.11 %	120.000.000	Kecamatan Taraju
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	n/a %	0	10 %	15.000.000	10 %	16.000.000	10 %	17.000.000	10 %	17.000.000	10 %	65.000.000	Kecamatan Bojonggambir
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	25 %	0	33 %	18.000.000	41.67 %	24.000.000	50 %	24.000.000	58.33 %	24.000.000	58.33 %	90.000.000	Kecamatan Sodonghilir
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	100 %	N/A %	0	12,5 %	0	25 %	26.000.000	25 %	26.500.000	25 %	27.000.000	25 %	27.000.000	25 %	106.500.000	Kecamatan Sukaratu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	100 %	6.998.800	100 %	6.998.800	100 %	7.498.800	100 %	7.998.800	100 %	8.498.800	100 %	8.498.800	100 %	46.492.800	Kecamatan Sukahening
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	10 %	0	20 %	25.000.000	20 %	25.500.000	20 %	26.000.000	20 %	26.000.000	20 %	102.500.000	Kecamatan Pagerageung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	7,69 %	0	15,38 %	25.000.000	15,38 %	25.500.000	15,38 %	26.000.000	15,38 %	26.000.000	15,38 %	102.500.000	Kecamatan Cisayong
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	n/a %	0	14.3 %	30.000.000	14.3 %	33.000.000	14.3 %	37.000.000	14.3 %	37.000.000	14.3 %	137.000.000	Kecamatan Cipatujah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	n/a %	0	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	27.000.000	100 %	106.000.000	Kecamatan Rajapolah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	25 %	0	25 %	26.000.000	25 %	26.000.000	25 %	27.000.000	25 %	27.000.000	25 %	106.000.000	Kecamatan Ciawi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	33,33 %	25.000.000	33,33 %	26.000.000	33,33 %	26.500.000	33,33 %	27.000.000	33,33 %	27.000.000	33,33 %	131.500.000	Kecamatan Kadipaten
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	16.000.000	100 %	16.500.000	100 %	17.000.000	100 %	17.000.000	100 %	66.500.000	Kecamatan Karangjaya
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	N/A %	0	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	27.000.000	100 %	106.000.000	Kecamatan Jamanis
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Gunungtanjung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	24.000.000	100 %	25.200.000	100 %	26.400.000	100 %	27.600.000	100 %	27.600.000	100 %	130.800.000	Kecamatan Cineam
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	28.000.000	100 %	29.400.000	100 %	30.800.000	100 %	32.200.000	100 %	32.200.000	100 %	152.600.000	Kecamatan Sukaresik
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Sukarame
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	28.000.000	100 %	29.400.000	100 %	30.800.000	100 %	32.200.000	100 %	32.200.000	100 %	152.600.000	Kecamatan Manonjaya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Karangnunggal
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Cikatomas
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Cibalong
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	19.000.000	100 %	64.100.000	Kecamatan Bantarkalong
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Bojongasih
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Culamega
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Salopa
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Jatiwaras
7 01 04																		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	66.000.000	100 %	75.000.000	100 %	81.000.000	100 %	85.000.000	100 %	85.500.000	100 %	85.500.000	100 %	478.000.000	Kecamatan Pancatengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	77.200.000	100 %	75.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	456.200.000	Kecamatan Singaparna
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	188.000.000	Kecamatan Mangunreja
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	81.000.000	100 %	91.000.000	100 %	91.000.000	100 %	91.000.000	100 %	91.000.000	100 %	91.000.000	100 %	536.000.000	Kecamatan Cigalontang
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	81.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	193.000.000	Kecamatan Leuwisari
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A %	100 %	76.000.000	100 %	76.500.000	100 %	81.000.000	100 %	83.400.000	100 %	85.600.000	100 %	85.600.000	100 %	488.100.000	Kecamatan Puspahiang
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	-	N/A %	152.000.000	Kecamatan Sariwangi
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	-	0 %	152.000.000	Kecamatan Padakembang
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	n/a %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	20.000.000	100 %	21.500.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	240.500.000	Kecamatan Cipatujah
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	75.500.000	100 %	108.900.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	324.400.000	Kecamatan Cikalong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	456.000.000	Kecamatan Salawu
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	81.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	193.000.000	Kecamatan Tanjungjaya
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	252.000.000	Kecamatan Parungponteng
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A %	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	88.500.000	100 %	89.000.000	100 %	89.500.000	100 %	89.500.000	100 %	506.500.000	Kecamatan Taraju
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	71.000.000	100 %	70.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.500.000	100 %	81.000.000	100 %	81.000.000	100 %	463.500.000	Kecamatan Bojonggambir
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	81.000.000	100 %	80.000.000	100 %	81.000.000	100 %	81.000.000	100 %	474.000.000	Kecamatan Sodonghilir
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Di Tindak Lanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	80.000.000	100 %	103.700.000	100 %	109.000.000	100 %	111.000.000	100 %	111.000.000	100 %	590.700.000	Kecamatan Sukaratu
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	74.994.150	100 %	74.994.150	100 %	74.994.150	100 %	75.494.150	100 %	75.994.150	100 %	75.994.150	100 %	452.464.900	Kecamatan Sukahening
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang di Tindak Lanjuti	100 %	100 %	75.629.800	100 %	75.000.000	100 %	85.000.000	100 %	86.000.000	100 %	87.000.000	100 %	87.000.000	100 %	495.629.800	Kecamatan Pagerageung
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	95.000.000	100 %	99.500.000	100 %	101.500.000	100 %	101.500.000	100 %	548.500.000	Kecamatan Cisarong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.500.000	100 %	76.500.000	100 %	77.000.000	100 %	77.500.000	100 %	77.500.000	100 %	461.000.000	Kecamatan Cikatomas
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	-	0 %	152.000.000	Kecamatan Bantarkalong
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.991.800	100 %	93.500.000	100 %	95.000.000	100 %	96.500.000	100 %	96.500.000	100 %	533.491.800	Kecamatan Rajapolah
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.000.000	100 %	460.000.000	Kecamatan Salopa
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	92.000.000	100 %	93.000.000	100 %	94.000.000	100 %	94.000.000	100 %	524.000.000	Kecamatan Ciawi
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	77.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.000.000	100 %	461.000.000	Kecamatan Jatiwaras
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	456.000.000	Kecamatan Karangnunggal
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	98.700.000	100 %	107.000.000	100 %	113.000.000	100 %	113.000.000	100 %	582.700.000	Kecamatan Kadipaten
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.500.000	100 %	77.000.000	100 %	77.500.000	100 %	77.500.000	100 %	460.500.000	Kecamatan Culamega

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	101.000.000	100 %	101.000.000	100 %	102.000.000	100 %	103.000.000	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	615.000.000	Kecamatan Cibalong
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	76.500.000	100 %	77.000.000	100 %	77.500.000	100 %	77.500.000	100 %	459.500.000	Kecamatan Karangjaya
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A %	100 %	76.000.000	100 %	76.500.000	100 %	89.000.000	100 %	89.900.000	100 %	90.100.000	100 %	90.100.000	100 %	511.600.000	Kecamatan Jamanis
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	75.000.000	100 %	77.200.000	100 %	78.000.000	100 %	78.500.000	100 %	79.000.000	100 %	79.000.000	100 %	466.700.000	Kecamatan Gunungtanjung
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	94.600.000	100 %	97.500.000	100 %	100.400.000	100 %	103.300.000	100 %	103.300.000	100 %	575.100.000	Kecamatan Cineam
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	80.000.000	100 %	82.000.000	100 %	84.000.000	100 %	86.000.000	100 %	86.000.000	100 %	494.000.000	Kecamatan Sukaresik
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	93.000.000	100 %	96.000.000	100 %	99.000.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	568.000.000	Kecamatan Sukarama
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.500.000	100 %	79.000.000	100 %	79.000.000	100 %	466.500.000	Kecamatan Manonjaya
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	77.000.000	100 %	78.000.000	100 %	79.000.000	100 %	79.000.000	100 %	465.000.000	Kecamatan Bojongasih
7 01 05																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.500.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	454.500.000	Kecamatan Pancatengah
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	483.600.000	Kecamatan Singaparna
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	483.600.000	Kecamatan Mangunreja
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	115.000.000	100 %	120.500.000	100 %	126.000.000	100 %	126.000.000	100 %	537.500.000	Kecamatan Cigalontang
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	102.000.000	100 %	103.000.000	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	463.000.000	Kecamatan Leuwisari
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	113.900.000	100 %	114.900.000	100 %	115.900.000	100 %	115.900.000	100 %	510.600.000	Kecamatan Sariwangi
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	150.000.000	100 %	250.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	1.150.000.000	Kecamatan Padakembang
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Cakupan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	0	100 %	123.500.000	100 %	127.500.000	100 %	131.500.000	100 %	131.500.000	100 %	539.000.000	Kecamatan Puspahiang
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	125.500.000	100 %	127.500.000	100 %	131.500.000	100 %	131.500.000	100 %	566.000.000	Kecamatan Cipatujah
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	111.400.000	100 %	111.900.000	100 %	112.400.000	100 %	112.400.000	100 %	498.100.000	Kecamatan Cikalong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	149.999.700	Kecamatan Salawu
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	102.000.000	100 %	103.000.000	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	463.000.000	Kecamatan Tanjungjaya
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.500.000	100 %	111.000.000	100 %	111.000.000	100 %	492.500.000	Kecamatan Parungponteng
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	48.000.000	100 %	48.500.000	100 %	49.000.000	100 %	49.000.000	100 %	244.500.000	Kecamatan Taraju
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	30.000.000	100 %	32.300.000	100 %	121.300.000	100 %	122.800.000	100 %	124.300.000	100 %	124.300.000	100 %	555.000.000	Kecamatan Bojongsambir
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	N/A %	100 %	15.890.000	100 %	25.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	57.000.000	100 %	57.000.000	100 %	264.890.000	Kecamatan Sodonghilir
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	120.000.000	100 %	126.500.000	100 %	133.000.000	100 %	133.000.000	100 %	567.500.000	Kecamatan Sukaratu
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	149.375.400	Kecamatan Sukahening
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di laksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	32.000.000	100 %	32.500.000	100 %	33.000.000	100 %	33.000.000	100 %	180.500.000	Kecamatan Pagerageung
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	111.000.000	100 %	113.500.000	100 %	116.000.000	100 %	116.000.000	100 %	506.500.000	Kecamatan Cisayong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penugasan Kepala Daerah																
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	34.600.000	100 %	35.500.000	100 %	36.400.000	100 %	37.300.000	100 %	37.300.000	100 %	206.100.000	Kecamatan Cikatomas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	108.400.000	100 %	109.400.000	100 %	110.400.000	100 %	110.400.000	100 %	488.600.000	Kecamatan Bantarkalong
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	32.000.000	100 %	111.000.000	100 %	113.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	511.000.000	Kecamatan Rajapolah
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	34.600.000	100 %	35.500.000	100 %	36.400.000	100 %	37.300.000	100 %	37.300.000	100 %	206.100.000	Kecamatan Salopa
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	36.000.000	100 %	37.000.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	199.000.000	Kecamatan Ciawi
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	27.000.000	100 %	155.000.000	Kecamatan Jatiwaras
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	150.000.000	Kecamatan Karangnunggal
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	111.000.000	100 %	113.500.000	100 %	116.000.000	100 %	116.000.000	100 %	506.500.000	Kecamatan Kadipaten
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.500.000	100 %	26.000.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	154.500.000	Kecamatan Culamega
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	28.000.000	100 %	28.000.000	100 %	159.000.000	Kecamatan Cibalong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.500.000	100 %	26.000.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	154.500.000	Kecamatan Karangjaya
7 01 05	PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	105.500.000	100 %	81.300.000	100 %	107.500.000	100 %	107.500.000	100 %	451.800.000	Kecamatan Jamanis
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	28.000.000	100 %	28.500.000	100 %	28.500.000	100 %	162.500.000	Kecamatan Gunungtanjung
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	41.600.000	100 %	43.000.000	100 %	44.400.000	100 %	45.800.000	100 %	45.800.000	100 %	245.600.000	Kecamatan Cineam
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	34.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	194.000.000	Kecamatan Sukaresik
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	28.000.000	100 %	28.500.000	100 %	28.500.000	100 %	162.500.000	Kecamatan Manonjaya
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	34.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	194.000.000	Kecamatan Sukarame
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	28.000.000	100 %	28.000.000	100 %	159.000.000	Kecamatan Bojongasih
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	101.500.000	100 %	102.500.000	100 %	103.500.000	100 %	108.400.000	100 %	465.900.000	Kecamatan Mangunreja
7 01 06																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	24.200.000	100 %	26.400.000	100 %	26.400.000	100 %	143.000.000	Kecamatan Pancatengah
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	80.000.000	Kecamatan Singaparna
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	12.000.000	100 %	13.000.000	100 %	19.750.000	100 %	16.500.000	100 %	21.850.000	100 %	21.850.000	100 %	104.950.000	Kecamatan Mangunreja
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	37.000.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	305.500.000	Kecamatan Cigalontang
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	14.000.000	100 %	19.000.000	100 %	20.750.000	100 %	17.500.000	100 %	17.850.000	100 %	17.850.000	100 %	106.950.000	Kecamatan Leuwisari
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	N/A %	100 %	16.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	56.000.000	Kecamatan Sariwangi
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	125.000.000	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	845.000.000	Kecamatan Padakembang
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	N/A %	100 %	8.000.000	100 %	12.000.000	100 %	16.000.000	100 %	17.200.000	100 %	18.800.000	100 %	18.800.000	100 %	90.800.000	Kecamatan Puspahiang
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan	n/a %	100 %	30.000.000	100 %	32.000.000	100 %	49.000.000	100 %	36.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.000.000	100 %	303.000.000	Kecamatan Cipatujah
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	26.000.000	100 %	54.900.000	100 %	30.000.000	100 %	30.500.000	100 %	31.000.000	100 %	31.000.000	100 %	203.400.000	Kecamatan Cikalong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undanganPersentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undanganPersentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	144.000.000	Kecamatan Salawu
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	100 %	20.750.000	100 %	17.500.000	100 %	22.850.000	100 %	22.850.000	100 %	111.950.000	Kecamatan Tanjungjaya
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	96.000.000	Kecamatan Parungponteng
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	N/A %	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	108.000.000	Kecamatan Taraju
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	16.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.500.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	138.500.000	Kecamatan Bojonggambir
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	21.110.000	100 %	18.185.000	100 %	23.000.000	100 %	28.250.000	100 %	34.500.000	100 %	34.500.000	100 %	159.545.000	Kecamatan Sodonghilir
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	20.000.000	100 %	45.000.000	100 %	60.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	291.000.000	Kecamatan Sukaratu
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	15.000.000	100 %	8.000.000	100 %	17.000.000	100 %	17.500.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	93.500.000	Kecamatan Sukahening
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang Undangan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	21.000.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	125.000.000	Kecamatan Pagerageung
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	84.000.000	100 %	55.000.000	100 %	106.000.000	100 %	106.000.000	100 %	403.000.000	Kecamatan Cisayong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	19.800.000	100 %	21.600.000	100 %	23.400.000	100 %	23.400.000	100 %	124.200.000	Kecamatan Cikatomas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	17.000.000	100 %	18.000.000	100 %	19.000.000	100 %	19.000.000	100 %	105.000.000	Kecamatan Bantarkalong
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	55.000.000	100 %	47.000.000	100 %	59.500.000	100 %	59.500.000	100 %	253.000.000	Kecamatan Rajapolah
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	19.800.000	100 %	21.600.000	100 %	23.400.000	100 %	23.400.000	100 %	124.200.000	Kecamatan Salopa
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	31.000.000	100 %	31.500.000	100 %	32.500.000	100 %	32.500.000	100 %	171.500.000	Kecamatan Ciawi
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.500.000	100 %	25.500.000	100 %	142.000.000	Kecamatan Jatiwaras
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	100 %	51.000.000	100 %	43.500.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	208.500.000	Kecamatan Kadipaten
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	15.500.000	100 %	21.000.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	109.500.000	Kecamatan Culamega
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	25.500.000	100 %	29.000.000	100 %	32.500.000	100 %	32.500.000	100 %	163.500.000	Kecamatan Cibalong
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	9.000.000	100 %	10.000.000	100 %	11.000.000	100 %	11.000.000	100 %	57.000.000	Kecamatan Karangjaya
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	N/A %	100 %	18.000.000	100 %	20.000.000	100 %	25.500.000	100 %	26.500.000	100 %	27.500.000	100 %	27.500.000	100 %	145.000.000	Kecamatan Jamanis

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	100 %	17.000.000	100 %	18.000.000	100 %	19.000.000	100 %	19.000.000	100 %	101.000.000	Kecamatan Gunungtanjung
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	60.000.000	100 %	67.000.000	100 %	79.000.000	100 %	81.000.000	100 %	81.000.000	100 %	388.000.000	Kecamatan Cineam
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	32.000.000	100 %	34.000.000	100 %	36.000.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	194.000.000	Kecamatan Sukaresik
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	45.000.000	100 %	46.000.000	100 %	47.700.000	100 %	49.400.000	100 %	51.100.000	100 %	51.100.000	100 %	290.300.000	Kecamatan Sukaramé
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.500.000	100 %	25.500.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	151.000.000	Kecamatan Manonjaya
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	100 %	23.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	125.000.000	Kecamatan Bojongasih
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	32.000.000	100 %	34.000.000	100 %	36.000.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	194.000.000	Kecamatan Karangnunggal
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	1.570.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	11.625.000.000	100 %	21.195.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya	100 %	100 %	1.652.217.000	100 %	6.132.217.000	100 %	27.075.173.000	100 %	27.075.173.000	100 %	9.575.173.000	100 %	75.450.000.000	100 %	146.959.953.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	100 %	100 %	4.720.000.000	100 %	5.080.350.000	100 %	8.270.000.000	100 %	8.270.000.000	100 %	8.270.000.000	100 %	37.725.000.000	100 %	72.335.350.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %	1.425.000.000	100 %	25.975.000.000	100 %	32.975.000.000	100 %	26.100.000.000	100 %	26.100.000.000	100 %	26.100.000.000	100 %	138.675.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	11.030.000.000	100 %	11.350.000.000	100 %	16.075.000.000	100 %	15.125.000.000	100 %	11.625.000.000	100 %	11.625.000.000	100 %	76.830.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	72,65 poin	72,85 poin	250.000.000	73 poin	310.000.000	73,2 poin	180.000.000	73,4 poin	189.000.000	73,6 poin	198.000.000	73,8 poin	207.000.000	73,8 poin	1.334.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Administrasi tepat waktu	100 %	100 %	33.000.184.010	100 %	35.205.117.337	100 %	37.224.293.051	100 %	40.508.511.198	100 %	44.074.351.160	100 %	48.314.295.125	100 %	238.326.751.881	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	100 %	100 %	4.155.000.000	100 %	5.007.360.000	100 %	11.200.000.000	100 %	11.685.000.000	100 %	12.155.000.000	100 %	12.615.000.000	100 %	56.817.360.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	78.95 Poin	73 Poin	824.506.111	75 Poin	5.446.806.737	75.5 Poin	5.743.187.411	76 Poin	5.838.096.782	76.5 Poin	6.038.096.782	77 Poin	6.283.096.782	77 Poin	30.173.790.605	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	85.63 Poin	85.20 Poin	578.501.390	85.80 Poin	1.811.975.050	86.00 Poin	2.335.957.500	86.20 Poin	2.540.375.375	86.30 Poin	2.730.014.144	86.40 Poin	2.984.884.851	86.40 Poin	12.981.708.310	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi SAKIP	60.57 Poin	63.60 Poin	22.443.974.907	67.10 Poin	24.060.185.146	67.16 Poin	31.981.490.718	70.85 Poin	34.140.389.254	70.99 Poin	36.407.232.717	74.96 poin	38.787.418.353	74.96 poin	187.820.691.095	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	72,02 %	72,22 %	23.136.880.365	72,42 %	22.177.413.096	72,62 %	22.650.361.358	72,82 %	23.111.368.585	73,02 %	23.580.595.956	73 %	24.058.207.876	73,32 %	138.714.827.236	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	82,46 %	82,56 %	3.538.041.750	82,66 %	5.724.101.000	82,86 %	3.460.000.000	83,06 %	3.720.000.000	83,26 %	4.005.000.000	83 %	4.295.000.000	83,46 %	24.742.142.750	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	78.98 Poin	82.93 Poin	1.761.951.150	83.32 Poin	3.629.254.970	83.72 Poin	2.742.054.104	84.11 Poin	2.879.156.809	84.51 Poin	3.023.114.649	84.90 poin	3.174.270.382	84.90 Poin	17.209.802.063	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	100 %	100 %	3.549.749.193	100 %	4.181.387.332	100 %	4.715.347.272	100 %	5.196.976.211	100 %	5.695.555.150	100 %	6.204.134.090	100 %	29.543.149.248	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71.5 Poin	72 Poin	9.736.731.322	72,5 Poin	10.710.404.454	73 Poin	11.781.444.900	73,5 Poin	12.959.589.390	74 Poin	14.255.548.329	74,5 Poin	19.809.716.148	74,5 Poin	79.253.434.543	Inspektorat Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	69,73 Poin	71,13 Poin	100.000.000	73,93 Poin	112.000.000	75 Poin	128.800.000	76,92 Poin	141.680.000	78,23 Poin	155.848.000	80,00 Poin	171.432.800	80,00 Poin	809.760.800	Satuan Polisi Pamong Praja
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	83,61 Poin	84,32 Poin	8.416.079.500	85,5 Poin	12.332.557.438	86,21 Poin	17.384.178.925	87 Poin	19.121.073.264	87,65 Poin	20.431.584.253	88,05 Poin	22.855.012.679	88,05 Poin	100.540.486.059	Satuan Polisi Pamong Praja
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Singaparna	N/A Poin	N/A Poin	1.626.285.594	59 (CC) Poin	1.652.769.323	60 (CC) Poin	1.692.633.258	61 (B) Poin	1.665.633.258	63 (B) Poin	1.665.633.258	63 Poin (B)	1.665.633.258	65 (B) Poin	9.968.587.949	Kecamatan Singaparna

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbangda	65,93 Poin	69,5 Poin	7.235.960.564	70,05 Poin	8.390.000.000	71 Poin	8.557.800.000	72 Poin	8.728.956.000	73 Poin	8.903.535.120	74 Poin	13.258.541.879	74 Poin	55.074.793.563	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pancatengah	N/A Poin	N/A Poin	1.216.608.555	59 (CC) Poin	1.501.614.270	60 (CC) Poin	1.720.316.555	61 (B) Poin	1.798.516.555	63 (B) Poin	1.801.216.555	63 Poin (B)	1.801.216.555	65 (B) Poin	9.839.489.045	Kecamatan Pancatengah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mangunreja	N/A Poin	N/A Poin	1.782.557.360	59 (CC) Poin	1.845.389.922	60 (CC) Poin	1.907.104.922	61 (B) Poin	1.928.589.922	63 (B) Poin	1.901.639.922	63 Poin (B)	1.901.639.922	65 (B) Poin	11.266.921.970	Kecamatan Mangunreja
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Puspahiang	N/A Poin	N/A Poin	1.656.231.102	59 (CC) Poin	1.444.623.402	60 (CC) Poin	1.605.218.864	61 (B) Poin	1.682.395.226	63 (B) Poin	1.760.471.588	63 Poin (B)	1.760.471.588	65 (B) Poin	9.909.411.770	Kecamatan Puspahiang
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cigalontang	N/A Poin	N/A Poin	1.775.536.942	59 (CC) Poin	1.972.600.000	60 (CC) Poin	1.931.600.000	61 (B) Poin	1.935.600.000	63 (B) Poin	1.939.600.000	63 Poin (B)	1.939.600.000	65 (B) Poin	11.494.536.942	Kecamatan Cigalontang
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Leuwisari	N/A Poin	N/A Poin	2.088.788.747	59 (CC) Poin	2.149.276.847	60 (CC) Poin	2.178.520.000	61 (B) Poin	2.160.092.000	63 (B) Poin	2.160.692.000	63 Poin (B)	2.160.692.000	65 (B) Poin	12.898.061.594	Kecamatan Leuwisari
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	N/A Poin	N/A Poin	1.700.510.127	59 (CC) Poin	1.812.564.446	60 (CC) Poin	1.854.964.446	61 (B) Poin	1.822.464.446	63 (B) Poin	1.824.964.446	63 Poin (B)	1.824.964.446	65 (B) Poin	10.840.432.357	Kecamatan Sariwangi
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Padakembang	N/A Poin	N/A Poin	1.696.324.017	59 (CC) Poin	1.696.324.017	60 (CC) Poin	1.707.579.189	61 (CC) Poin	1.982.427.191	63 (B) Poin	230.327.189	63 Poin (B)	230.327.189	65 (B) Poin	7.543.308.792	Kecamatan Padakembang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cipatujah	N/A Poin	N/A Poin	1.947.040.711	59 (CC) Poin	2.134.125.495	60 (CC) Poin	2.286.491.495	61 (B) Poin	2.409.391.495	63 (B) Poin	2.481.767.857	63 Poin (B)	2.481.767.857	65 (B) Poin	13.740.584.910	Kecamatan Cipatujah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cikalong	N/A Poin	N/A Poin	1.455.633.639	59 (CC) Poin	1.566.374.068	60 (CC) Poin	1.886.000.000	61 (B) Poin	1.889.500.000	63 (B) Poin	1.993.000.000	63 Poin (B)	1.993.000.000	65 (B) Poin	10.783.507.707	Kecamatan Cikalong
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70.08 Poin	76.00 Poin	127.729.900	80.00 Poin	230.000.000	81.00 Poin	253.000.000	82.00 Poin	278.300.000	83.00 Poin	306.130.000	84.00 Poin	336.743.000	84.00 Poin	1.531.902.900	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Salawu	N/A Poin	N/A Poin	1.341.941.861	59 (CC) Poin	1.341.941.861	60 (CC) Poin	1.473.941.861	61 (B) Poin	1.436.941.861	63 (B) Poin	1.436.941.861	63 Poin (B)	1.436.941.861	65 (B) Poin	8.468.651.166	Kecamatan Salawu
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Tanjungjaya	N/A Poin	N/A Poin	1.520.778.189	59 (CC) Poin	1.472.070.189	60 (CC) Poin	1.646.184.689	61 (B) Poin	1.558.940.189	63 (B) Poin	1.512.430.189	63 Poin (B)	1.512.430.189	65 (B) Poin	9.222.833.634	Kecamatan Tanjungjaya
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	85.83 Poin	86.00 Poin	104.454.089.643	86.50 Poin	216.291.890.825	86.75 Poin	215.243.101.395	86.80 Poin	217.770.978.022	87.00 Poin	218.626.642.312	81,35 poin	219.552.510.383	81,35 poin	1.191.939.212.580	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Parungponteng	N/A Poin	N/A Poin	0	59(CC) Poin	1.783.537.190	60(CC) Poin	2.430.683.117	61(B) Poin	2.535.358.068	63(B) Poin	2.643.399.266	63 Poin (B)	2.643.399.266	65(B) Poin	12.036.376.907	Kecamatan Parungponteng
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	N/A Poin	N/A Poin	1.635.288.844	59 (CC) Poin	1.724.340.727	60 (CC) Poin	1.811.330.727	61 (B) Poin	1.808.330.727	63 (B) Poin	1.810.830.727	63 Poin (B)	1.810.830.727	65 (B) Poin	10.600.952.479	Kecamatan Taraju
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bojonggambir	N/A Poin	n/a Poin	1.624.395.152	59 (CC) Poin	1.562.825.070	60 (CC) Poin	1.841.880.000	61 (B) Poin	1.849.880.000	63 (B) Poin	1.857.880.000	63 Poin (B)	1.857.880.000	65 (B) Poin	10.594.740.222	Kecamatan Bojonggambir

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Kecamatan	N/A Poin	N/A Poin	1.416.853.820	59 (CC) Poin	1.436.923.476	60 (CC) Poin	1.558.163.946	61 (B) Poin	1.594.367.225	63 (B) Poin	1.642.144.569	63 Poin (B)	1.642.144.569	65 (B) Poin	9.290.597.605	Kecamatan Sodonghilir
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Bappelitbangda	78,292 Poin	78,80 Poin	4.853.606.748	79,31 Poin	5.291.132.141	79,82 Poin	3.962.404.784	80,33 Poin	4.032.503.879	80,84 Poin	4.104.004.957	81,35 Poin	-	81,35 Poin	22.243.652.509	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	0 Poin	8 Poin	28.085.106.631	8 Poin	35.779.222.693	8 Poin	39.361.594.962	8 Poin	43.302.871.959	8 Poin	47.639.044.279	8 Poin	52.409.716.601	8 Poin	246.577.557.125	Sekretariat Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	0 Poin	85 Poin	39.418.192.888	85 Poin	39.063.186.033	85 Poin	43.242.004.636	85 Poin	47.968.805.100	85 Poin	53.037.323.110	85 Poin	58.650.568.546	85 Poin	281.380.080.313	Sekretariat Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Disdukcapil	77,16 Poin	76 Poin	9.266.675.542	76,5 Poin	12.369.934.303	77 Poin	14.224.963.415	77,5 Poin	14.269.706.265	78 Poin	15.020.342.805	78,50 Poin	6.995.490.200	78,50 Poin	72.147.112.530	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Disdukcapil	81,98 Poin	82 Poin	50.000.000	82,25 Poin	50.000.000	82,5 Poin	50.000.000	82,75 Poin	50.000.000	83 Poin	50.000.000	83,25 Poin	8.923.133.465	83,25 Poin	9.173.133.465	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,01 Poin	80,5 Poin	2.563.543.838	81 Poin	2.919.898.222	81,5 Poin	3.901.888.044	82 Poin	3.532.076.848	82,5 Poin	3.753.284.533	83 Poin	1.798.207.620	83 Poin	18.468.899.105	Inspektorat Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75,93 Poin	76,03 Poin	8.212.852.634	76,13 Poin	9.402.938.336	76,24 Poin	10.410.480.828	76,36 Poin	11.451.528.911	76,49 Poin	12.596.681.802	76,69 Poin	13.856.349.982	76,69 Poin	65.930.832.493	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	77 Poin	77 Poin	1.737.771.800	77,1 Poin	6.185.796.250	77,3 Poin	4.007.613.443	77,6 Poin	4.093.407.443	77,95 Poin	4.189.655.843	78,3 Poin	4.288.479.083	78,3 Poin	24.502.723.862	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	N/A Poin	N/A Poin	1.698.469.029	59 (CC) Poin	1.919.849.456	60 (CC) Poin	2.109.100.456	61 (B) Poin	2.116.100.456	63 (B) Poin	2.133.100.456	65 (B) Poin	2.133.100.456	65 (B) Poin	12.109.720.309	Kecamatan Sukaratu
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukahening	80 Poin	80,30 Poin	280.339.998	81,73 Poin	289.223.048	82,20 Poin	320.018.998	82,76 Poin	325.018.998	83,15 Poin	325.018.998	83,80 Poin	325.018.998	83,80 Poin	1.864.639.038	Kecamatan Sukahening
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cisayong	N/A Poin	N/A Poin	1.772.431.254	59 (CC) Poin	1.860.708.919	60 (CC) Poin	1.956.708.919	61 (B) Poin	1.990.208.919	63 (B) Poin	2.030.208.919	63 poin (B)	2.030.208.919	65 (B) Poin	11.640.475.849	Kecamatan Cisayong
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pagerageung	N/A Poin	N/A Poin	1.662.655.452	59 (CC) Poin	1.649.272.717	60 (CC) Poin	1.768.702.149	61 (B) Poin	1.787.051.413	63 (B) Poin	1.806.228.990	63 poin (B)	1.806.228.900	65 (B) Poin	10.480.139.621	Kecamatan Pagerageung
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	64,81 Poin	36,80 Poin	81.000.000	65 Poin	100.642.436	66 Poin	155.674.558	66 Poin	155.674.558	66 Poin	155.674.558	66 Poin	155.674.558	66 Poin	804.340.668	Sekretariat DPRD
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	77,28 Poin	78,30 Poin	47.713.279.427	78,30 Poin	48.765.771.301	80,30 Poin	53.109.734.424	80,30 Poin	53.109.734.424	80,30 Poin	53.109.734.424	80,30 Poin	53.109.734.424	80,30 Poin	308.917.988.424	Sekretariat DPRD
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cikatomas	NA Poin	N/A Poin	1.473.159.151	59 (CC) Poin	1.697.402.000	60 (CC) Poin	1.730.392.600	61 (B) Poin	1.741.637.600	63 (B) Poin	1.798.892.600	63 poin (B)	1.798.892.600	65 (B) Poin	10.240.376.551	Kecamatan Cikatomas
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bantarkalong	N/A Poin	N/A Poin	1.460.147.927	59 (CC) Poin	1.650.890.876	60 (CC) Poin	1.675.485.876	61 (B) Poin	1.682.485.876	63 (B) Poin	1.689.485.876	63 poin (B)	1.689.485.876	65 (B) Poin	9.847.982.307	Kecamatan Bantarkalong
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rajapolah	80 Poin	80,30 Poin	1.544.332.423	81,73 Poin	1.900.225.050	82,20 Poin	2.217.431.000	82,76 Poin	1.993.181.000	83,15 Poin	1.988.431.000	83,15 poin	1.988.431.000	83,80 Poin	11.632.031.473	Kecamatan Rajapolah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Salopa	N/A Poin	N/A Poin	1.647.437.727	59 (CC) Poin	1.791.425.900	60 (CC) Poin	1.681.772.600	61 (B) Poin	1.708.587.600	63 (B) Poin	1.765.842.600	63 poin (B)	1.765.842.600	65 (B) Poin	10.360.909.027	Kecamatan Salopa
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75.1 Poin	75.5 Poin	4.682.124.049	76 Poin	5.075.000.000	77.5 Poin	5.100.000.000	80 Poin	5.100.000.000	81 Poin	5.100.000.000	83 Poin	5.100.000.000	83 Poin	30.157.124.049	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	79 Poin	80 Poin	1.455.000.000	82 Poin	900.000.000	83.5 Poin	2.550.000.000	84 Poin	1.850.000.000	85 Poin	2.000.000.000	86 Poin	2.550.000.000	86 Poin	11.305.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jatiwaras	N/A Poin	N/A Poin	1.679.413.798	59 (CC) Poin	1.484.071.721	60 (CC) Poin	2.171.165.927	61 (B) Poin	2.184.303.754	63 (B) Poin	2.216.431.210	63 poin (B)	2.216.431.210	65 (B) Poin	11.951.817.620	Kecamatan Jatiwaras
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ciawi	N/A Poin	N/A Poin	1.798.683.192	59 (CC) Poin	2.030.457.112	60 (CC) Poin	2.067.532.557	61 (B) Poin	2.028.971.386	63 (B) Poin	2.108.952.120	63 poin (B)	2.108.952.120	65 (B) Poin	12.143.548.487	Kecamatan Ciawi
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangnunggal	N/A Poin	N/A Poin	1.692.479.582	59 (CC) Poin	2.084.172.057	60 (CC) Poin	2.316.894.475	61 (B) Poin	2.321.894.475	63 (B) Poin	2.326.894.475	63 poin (B)	2.326.894.475	65 (B) Poin	13.069.229.539	Kecamatan Karangnunggal
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten	N/A Poin	N/A Poin	1.499.060.898	59 (CC) Poin	1.548.573.298	60 (CC) Poin	1.636.033.927	61 (B) Poin	1.660.370.754	63 (B) Poin	1.654.502.910	63 poin (B)	1.654.502.910	65 (B) Poin	9.653.044.697	Kecamatan Kadipaten
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Culamega	N/A Poin	N/A Poin	1.514.308.090	59 (CC) Poin	1.607.585.253	60 (CC) Poin	1.612.085.253	61 (B) Poin	1.616.585.253	63 (B) Poin	1.621.085.253	63 poin (B)	1.621.085.253	65 (B) Poin	9.592.734.355	Kecamatan Culamega
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cibalong	N/A Poin	N/A Poin	1.834.950.275	59 (CC) Poin	2.035.045.472	60 (CC) Poin	2.426.273.150	61 (B) Poin	2.476.573.150	63 (B) Poin	2.527.665.150	63 poin (B)	2.527.665.150	65 (B) Poin	13.828.172.347	Kecamatan Cibalong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangjaya	N/A Poin	N/A Poin	1.323.846.450	59 (CC) Poin	1.466.598.796	60 (CC) Poin	1.471.285.384	61 (B) Poin	1.481.505.110	63 (B) Poin	1.499.997.159	63 poin (B)	1.499.997.159	65 (B) Poin	8.743.230.058	Kecamatan Karangjaya
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	N/A Poin	N/A Poin	1.808.658.685	59 (CC) Poin	1.862.722.432	60 (CC) Poin	2.123.036.132	61 (B) Poin	2.110.536.132	63 (BB) Poin	2.115.036.132	63 poin (B)	2.115.036.132	65 (B) Poin	12.135.025.645	Kecamatan Jamanis
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Gunungtanjung	N/A Poin	N/A Poin	1.556.026.034	59 (CC) Poin	1.556.375.034	60 (CC) Poin	1.573.642.000	61 (B) Poin	1.576.242.000	63 (B) Poin	1.579.342.000	63 poin (B)	1.579.342.000	65 (B) Poin	9.420.969.068	Kecamatan Gunungtanjung
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cineam	N/A Poin	N/A Poin	1.907.646.575	59 (CC) Poin	1.981.930.239	60 (CC) Poin	2.036.389.026	61 (B) Poin	2.091.197.377	63 (B) Poin	2.147.600.484	63 poin (B)	2.147.600.484	65 (B) Poin	12.312.364.185	Kecamatan Cineam
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukarame	N/A Poin	N/A Poin	1.654.603.434	59 (CC) Poin	1.812.850.239	60 (CC) Poin	1.764.137.387	61 (B) Poin	1.777.142.404	63 (B) Poin	1.801.069.903	63 poin (B)	1.801.069.903	65 (B) Poin	10.610.873.270	Kecamatan Sukarame
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukaresik	N/A Poin	N/A Poin	1.557.044.210	59 (CC) Poin	1.615.263.110	60 (CC) Poin	1.614.212.248	61 (B) Poin	1.648.008.889	63 (B) Poin	1.682.337.463	63 poin (B)	1.682.337.463	65 (B) Poin	9.799.203.383	Kecamatan Sukaresik
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Manonjaya	N/A Poin	N/A Poin	1.534.402.410	59 (CC) Poin	1.534.402.410	60 (CC) Poin	1.636.773.979	61 (B) Poin	1.622.588.924	63 (B) Poin	1.641.532.518	63 poin (B)	1.641.532.518	65 (B) Poin	9.611.232.759	Kecamatan Manonjaya
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bojongasih	N/A Poin	N/A Poin	1.486.503.408	59 (CC) Poin	1.742.902.524	60 (CC) Poin	1.773.525.856	61 (B) Poin	1.804.675.655	63 (B) Poin	1.836.362.449	63 poin (B)	1.836.362.449	65 (B) Poin	10.480.332.341	Kecamatan Bojongasih
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	74,23 Poin	74,33 Poin	910.776.411.352	74,43 Poin	1.034.492.547.082	74,53 Poin	1.137.985.101.845	74,63 Poin	1.251.822.612.246	74,73 Poin	1.376.972.372.428	74,83 Poin	1.514.642.110.556	74,83 Poin	7.226.691.155.509	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	78,02 Poin	78,07 Poin	1.942.606.546	78,12 Poin	7.211.423.113	78,17 Poin	8.097.165.424	78,22 Poin	7.237.176.750	78,27 Poin	7.809.080.218	78,32 Poin	8.279.056.342	78,32 Poin	40.576.508.393	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	100.000.000	BB Nilai	105.000.000	BB Nilai	137.150.000	BB Nilai	144.007.500	AA Nilai	151.207.875	AA Nilai	161.662.331	AA Nilai	799.027.706	Dinas Kesehatan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80 %	75 %	307.762.427.094	80 %	362.798.655.269	85 %	376.992.696.318	90 %	399.362.267.485	95 %	423.486.969.673	100 %	639.542.851.180	100 %	2.509.945.867.019	Dinas Kesehatan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80 Poin	81 Poin	2.202.851.000	81 Poin	4.252.300.580	82 Poin	3.037.710.400	82 Poin	2.853.531.440	83 Poin	2.952.534.584	83 Poin	3.050.888.042	83 Poin	18.349.816.046	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	76.39 Poin	79.46 Poin	150.000.000	79.66 Poin	167.203.650	79.76 Poin	150.000.000	79.86 Poin	150.000.000	80.00 Poin	150.000.000	80.10 Poin	150.000.000	80.10 Poin	917.203.650	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	Poin	6.043.678.062	80	11.027.634.820	80	8.945.966.617	81	8.862.440.617	82	9.060.654.820	83	9.134.654.820	83	53.075.029.756	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72 Poin	74 Poin	13.158.093.266	75 Poin	15.045.299.867	76 Poin	13.775.652.192	77 Poin	14.457.184.801	78 Poin	15.172.794.041	79 Poin	15.969.183.744	79 Poin	87.578.207.911	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PMD	00 Poin	00 Poin	0	55 Poin	3.890.821.407	57 Poin	4.010.000.000	59 Poin	4.021.000.000	61 Poin	4.047.050.000	63 Poin	4.249.402.500	63 Poin	20.218.273.907	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas PMD	00 Poin	00 Poin	0	76,61 Poin	598.506.900	77,61 Poin	2.720.581.050	78,61 Poin	2.959.557.750	79,01 Poin	3.161.037.200	79,60 Poin	3.319.089.060	79,60 Poin	12.758.771.960	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	63.23 Poin	68.5 Poin	5.221.050.231	69 Poin	7.336.535.616	69.5 Poin	7.410.812.984	70 Poin	8.061.618.017	70.5 Poin	8.456.948.918	71 Poin	8.872.046.364	71 Poin	45.359.012.130	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	78 Poin	78.5 Poin	1.447.350.297	79 Poin	2.350.000.000	79.5 Poin	1.652.499.550	80 Poin	1.662.249.521	80.5 Poin	1.892.193.951	81 Poin	1.902.337.270	81 Poin	10.906.630.589	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Fahmi, 2017:188). Menurut Torang (2014:74) “Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun kegiatan selesai dan berfungsi (Sedarmayanti, 2014:198). Ada beberapa syarat indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

- 1) Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
- 2) Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu: dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan sama.
- 3) Relevan, harus melalui aspek obyektif yang relevan.
- 4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil, manfaat dan dampak serta proses.
- 5) Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- 6) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu:

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.
2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah.

8.1 Indikator Makro Pembangunan

Tabel 8.1
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,67	65,90	66,19	66,45	66,71	66,97	67,23	67,23
2	Angka Kemiskinan	%	10,34	11,15	11,02	10,88	10,75	10,61	10,48	10,48
3	Angka Pengangguran	%	7,12	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,98	1-3	1-3	2-3	2-4	2-4	3-4	3-4
5	Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta	21,33	23,41	24,84	26,27	27,71	29,14	30,57	30,57
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	Poin	0,41	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

8.2 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa indikator kinerja utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD.

Penetapan Indikator Kinerja utama (IKU) Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 8.2 sebagai berikut:

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pendidikan	Poin	59,31	59,77	59,89	60,02	60,32	60,62	60,91	60,91
2	Indeks Kesehatan	Poin	76,11	76,42	76,51	76,83	77,14	77,45	77,75	77,75
3	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	66,68	68,04	68,04	68,07	68,08	68,08	68,12	68,12
4	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20,72	21,83	22,16	22,49	22,82	23,15	23,15
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,02	86,42	86,55	86,57	86,73	87,02	87,45	87,45
6	Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	525 (Menuju Madya)	550 (Menuju Madya)	575 (Menuju Madya)	595 (Menuju Madya)	615 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)
7	Nilai LPPD	Skor	3,31 (Sedang)	3,34 (Sedang)	3,36 (Sedang)	3,38 (Sedang)	3,40 (Sedang)	3,42 (Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)
8	Nilai SAKIP	Skor	B	62,37 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,9 Baik	79 Baik	80 Baik	80 Baik	80,15 Baik	80,30 Baik	80,50 Baik	80,50 Baik
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	59,06	66,48	67,50	68,50	69,50	70,50	71,50	71,50
11	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56,73	57	58	59	60	61	62	62
12	Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	45 (Inovatif)	47 (Inovatif)	49 (Inovatif)	51 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)
13	PDRB Per Kapita	Rp Juta	21.33	23.41	24.84	26.27	27.71	29.14	30.57	30.57

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
14	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	N/A	3	3	4	4	5	5	5

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

8.3 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya berikut target tahun 2021-2026 secara rinci disajikan pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
A.01	Pertumbuhan PDRB	%	-0,98	1-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.02	Laju inflasi	%	1.82	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.03	PDRB per kapita	Rp. Juta	21,33	23,41	24,84	26,27	27,71	29,14	30,57	30,57	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.04	Indeks Gini	Poin	0.41	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.05	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	89,66	88,85	88,98	89,12	89,25	89,39	89,52	89,52	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.06	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	10,34	11,15	11,02	10,88	10,75	10,61	10,48	10,48	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.07	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,67	65,9	66,19	66,45	66,71	66,97	67,23	67,23	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.08	Angka melek huruf	%	99,75	99,8	99,85	99,95	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
A.09	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,35	7,24	7,3	7,54	7,78	8,02	8,26	8,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
A.10	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,47	69,67	69,73	69,94	70,14	70,34	70,54	70,54	Dinas Kesehatan
A.11	Persentase balita gizi buruk	%	0,84	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,5	0,5	Dinas Kesehatan
A.12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,54	71,09	73,74	75,96	78,06	80,49	82,65	82,65	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.13	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.12%	6-7%	6-7%	6-7%	6-7%	6-7%	6-7%	6-7%	BPS Kabupaten Tasikmalaya
A.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,9	79	80	80	80,15	80,3	80,5	80.50	Sekretatiat Daerah
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A.15	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,51	9,55	10,7	10,8	10,91	11,01	11,1	11,10	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
A.16	Opini BPK atas Laporan Pengelola Keuangan Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
A.17	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	75,3	77,00	78,75	80,5	82,3	84,15	86	86,00	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.18	Penguatan cadangan pangan	Ton	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.19	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	37,81	37,60	37,79	38,01	38,28	38,63	38,90	38,90	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.20	Produksi sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Ton	1.155.222	1.274.184	1.279.999	1.286.438	1.293.508	1.301.255	1.319.251	1.319.251	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
A.21	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	0,22	0,21	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	Badan Pusat Statistik
A.22	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,18	18,03	17,93	17,89	17,85	17,82	17,79	17,79	Badan Pusat Statistik
A.23	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,61	7,76	7,91	8,06	8,21	8,36	8,51	8,51	Badan Pusat Statistik
A.24	Pertumbuhan Industri	%	16.448 Unit Usaha	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,2	1,2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
B. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
B.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	7.852	7.829	7.988	8.085	8.130	8.179	8.220	8.220	BPS Kabupaten Tasikmalaya
B.02	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BPR	%	73,76	78,91	81,88	81,99	84,13	86,52	87,69	87,69	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Pendidikan										
C.1.01.01	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,53	12,54	12,55	12,56	12,57	12,58	12,59	12,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.02	APK PAUD	%	75,69	76,69	79,6	79,6	79,6	79,6	80,6	80,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.03	APK SD	%	100,39	100.32	100.25	100.18	100.11	100.04	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.04	APM SD	%	93,65	93.99	95.75	97.51	99.27	100	100	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.05	APK SMP	%	108,09	106.74	105.39	104.04	102.69	101.34	100.00	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.06	APM SMP	%	90	90.81	91.62	92.43	93.24	94.05	94.86	94.86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.07	Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.08	Persentase PKBM yang meynelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	%	52,08%	57,08	62,08	67,08	72,08	77,08	82,08	82,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.09	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Literasi) memenuhi kompetisi minimum	%	57,72	57,7	58,2	58,7	59,2	59,7	60,2	60,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.10	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetisi minimum	%	26,5	26,75	27	27,25	27,5	27,75	28	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.11	Rasio Guru terhadap Siswa SD	Perbandingan	01:20	01:21	01:22	01:25	01:26	01:27	01:29	01:29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.1.01.12	Rasio Guru terhadap Siswa SMP	Perbandingan	01:16	01:17	01:19	01:20	01:22	01:23	01:24	01:24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.13	Persentase angka putus sekolah jenjang SD	%	0.00007	0.00006	0.00005	0.00004	0.00003	0.00002	0.00001	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.14	Persentase angka putus sekolah jenjang SMP	%	0.00019	0.00017	0.00015	0.00013	0.00011	0.00009	0.00007	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.15	Persentase siswa SD berasal dari PAUD	%	65	66	68	70	72	74	75	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.16	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3	3.1	3.25	3.5	3.7	4	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.17	Persentase Lulusan Pendidikan Keseneteraan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.18	Persentase Lulusan Pendidikan Kursus dan Keterampilan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.19	Persentase Pendidik berkualifikasi minimal S1 bersertifikat pendidik	Persen	51,18	53,18	55,18	57,18	59,18	61,18	63,18	63,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.20	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat kepala sekolah	Persen	91,66	92	95	98	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.21	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standard kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	99	99,22	99,44	99,66	99,88	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.22	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standard kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	82	82,06	82,12	82,18	82,24	82,3	82,36	82,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.1.01.23	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.24	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	98,49	99,33	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.25	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	%	99,92	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.1.01.26	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	95,09	96,2	97,31	98,42	99,53	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan										
C.1.02.01	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	5	5	4	4	3	3	2	2	Dinas Kesehatan
C.1.02.02	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran Hidup	Orang	75	100	95	90	85	80	75	75	Dinas Kesehatan
C.1.02.03	Prosentase Keluarga Sehat	%	60	65	69	73	76	78	80	80	Dinas Kesehatan
C.1.02.04	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Orang	4	4	3	3	2	2	1	1	Dinas Kesehatan
C.1.02.05	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.1.02.06	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran Hidup	Orang	5	4	4	3	3	2	2	2	Dinas Kesehatan
C.1.02.07	Prosentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	91,25	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.08	Prosentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	94,84	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.09	Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,69	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.10	Prosentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,6	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.11	Presentase anak pada pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	78,02	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.12	Presentase warga negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.13	Presentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	72,8	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.14	Prevalensi stunting	%	18,9	18	17	15,75	14	12,25	10,25	10,25	Dinas Kesehatan
C.1.02.15	Presentase Balita Gizi Buruk (BB/TB)	%	0,84	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,5	0,5	Dinas Kesehatan
C.1.02.16	Presentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.1.02.17	Prosentase Ibu hamil Kurang Gizi mendapatkan makanan tambahan padat gizi	%	85,8	86,8	87,8	88,8	89,8	90	90	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.18	Prosentase Balita Kurang Gizi mendapatkan makanan tambahan padat gizi	%	76,5	79,5	82,5	85,5	88,5	89,5	90	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.19	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	58,4	58,8	59,3	59,9	60,6	61,3	61,19	61,19	Dinas Kesehatan
C.1.02.20	Jumlah Kader posyandu, KPM, PKK Mampu konseling PMBA	Orang	84	252	252	252	252	252	252	1512	Dinas Kesehatan
C.1.02.21	Prosentase Ibu Hamil mengkonsumsi Tablet Tambah darah dan suplemen gizi	%	65	70	75	80	85	90	90	90	Dinas Kesehatan
C.1.02.22	Prosentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah darah dan suplemen gizi	%	63,4	63,7	64	64,3	64,6	65	65	65	Dinas Kesehatan
C.1.02.23	Prosentase Masyarakat konsumsi garam berodium	%	84,2	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.24	Prosentase Bayi mendapatkan Asi Eksklusif	%	73,4	74,7	76	77,3	78,6	80	80	80	Dinas Kesehatan
C.1.02.25	Prosentase Konvergensi penanganan stunting	%	73,4	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.26	Presentase orang penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.27	Presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan	%	99,34	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	pemeriksaan HIV sesuai standar										
C.1.02.28	Prosentase Penyakit Menular dan Tidak Menular	%		100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.29	Presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.30	Presentase penderita Diabet Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.31	Presentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan	%	80,07	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.32	Prosentase Desa Siaga Aktif	%	19,09	50	60	70	80	90	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.33	Prosentase kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50%	%	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	Dinas Kesehatan
C.1.02.34	Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah mencapai akses 100 %	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.35	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (1 : 30.000)		1/45.074	1/45.075	1/45.076	1/45.077	1/45.078	1/45.079	1/45.080	1/45.081	Dinas Kesehatan
C.1.02.36	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk (1 : 10.000)	Perbandingan	1/11.777	1/11.778	1/11.779	1/11.780	1/11.781	1/11.782	1/11.783	1/11.784	Dinas Kesehatan
C.1.02.37	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (1 : 100.000)	Perbandingan	0.11	1.11	2.11	3.11	4.11	5.11	6.11	7.11	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.1.02.38	Rasio Klinik per satuan penduduk	Perbandingan	1/28.601	1/28.602	1/28.603	1/28.604	1/28.605	1/28.606	1/28.607	1/28.608	Dinas Kesehatan
C.1.02.39	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D/RS Pratama Cikatomas	Gedung	1	0	1	1	1	1	1		Dinas Kesehatan
C.1.02.40	Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manonjya, Karangnunggal	Gedung	3	1	2	3	3	3	3		Dinas Kesehatan
C.1.02.41	Cakupan pembiayaan peserta JKN yang dibiayai pemerintah kabupaten Tasikmalaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.42	Cakupan pembiayaan kesehatan rujukan jamkesmas yang dibiayai pemerintah kabupaten Tasikmalaya	%	33,27	40	50	60	75	85	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.43	Cakupan pembiayaan jampersal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.44	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	%	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	Dinas Kesehatan
C.1.02.45	Prosentase Pemenuhan Obat dan Vaksin di Pelayanan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C.1.02.46	Hasil Penilaian SAKIP		BB	BB	BB	A	A	A	A	A	Dinas Kesehatan
C.1.02.47	Opini Audit Akuntan Publik Independent	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dinas Kesehatan
C.1.02.48	Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan profesional sesuai standar	%	92,59	93	94	95	96	97	98	98	Dinas Kesehatan
C.1.02.49	Cakupan Mutu Pelayanan	%	88,72	90	92	94	96	96	96	96	Dinas Kesehatan
C.1.02.50	Cakupan Mutu Pelayanan Keperawatan	%	82,96	84	85	86	88	90	90	90	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.1.02.51	Cakupan Mutu Penunjang Klinik	%	88,72	90	91	92	93	94	95	95	
C.1.02.52	Cakupan Mutu Penunjang Non Klinik	%	88,72	90	91	92	93	94	95	95	
C.1.02.53	Cakupan Alat dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	77	80	82	85	88	90	90	90	
C.1.02.54	Cakupan Pendayagunaan Fasilitas Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	%	77	79	81	83	85	87	90	90	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
C.1.03.01	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	68,39	69,04	69,51	69,99	70,45	70,92	71,39	71,39	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.02	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,481	0,496	0,511	0,525	0,54	0,555	0,569	0,569	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.03	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	%	46,94	47,31	51,04	56,27	61,5	66,73	71,96	71,96	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.04	Ketaatan terhadap RTRW	%	21,76	25,63	29,5	33,38	37,27	41,16	45,06	45,06	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.05	Persentase penduduk berakses air minum	%	65,11	65,42	65,92	66,42	66,92	67,42	67,92	67,92	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.03.06	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	48,66	48,89	49,34	49,81	50,27	50,73	51,19	51,19	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
C.1.04.01	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,2527	0,2528	0,2533	0,2537	0,2542	0,2547	0,2552	0,2552	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.1.04.02	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	%	52,06	52,14	52,2	52,39	52,57	52,75	52,94	52,94	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.1.05.01	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
C.1.05.02	Indeks Risiko Bencana	%	192,95	192,95	183,3	174,13	165,43	157,15	149,3	149,3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
C.1.05.03	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kebencanaan	%	0,42	0,48	0,56	0,64	0,73	0,84	0,85	0,85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial										
C.1.06.01	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	98,56	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.02	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial	%	0,56	0,54	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.03	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.1.06.04	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.05	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	68,97	66,51	66,73	67,41	67,65	68,3	70,62	70,62	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.06	Persentase PPKS yang termasuk dalam jenis layanan SPM yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.07	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.08	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	bencana daerah kabupaten/kota										Perlindungan Anak
C.1.06.9	Persentase PSKS aktif	%	85,5	85,5	87,25	91,5	92,25	95,00	95,00	95,00	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.10	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.11	Nilai SAKIP Dinas	Poin	67,14	72,65	72,72	73,01	73,16	73,31	73,6	73,6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.12	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%	0.00	2.05	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	21.21	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.1.06.13	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Ruta/KPM	120,562	120,562	122,973	125,433	127,941	130,5	133,11	133,11	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.14	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.15	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.1.06.16	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	%	6,06	6,06	5,94	5,83	5,71	5,6	5,49	5,49	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Tenaga Kerja										
C.2.01.03	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	23,85	27,08	27,23	27,38	27,52	27,67	27,81	27,81	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.04	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	2,08	2,92	3,75	4,58	5,42	6,25	7,08	7,08	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.05	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,54	71,09	73,74	75,96	78,06	80,49	82,65	82,65	Badan Pusat Statistik
C.2.01.06	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,12	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	Badan Pusat Statistik
C.2.01.07	Rasio penduduk yang bekerja	%	59,13	59,42	59,75	59,96	60,27	60,87	61,25	61,25	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.08	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.01.09	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	65	75	76	77	78	79	80	80	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
C.2.02.01	Persentase pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada Instansi Pemerintah	%	10,94	11,52	11,78	11,96	12,23	12,45	12,55	12,55	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Perlindungan Anak
C.2.02.02	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terfasilitasi	%	75	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.03	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	90.00%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.04	Persentase perempuan yang memperoleh akses dan layanan peningkatan kualitas keluarga	%	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.05	Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga yang terfasilitasi	%			75	80	80	80	80	80	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.06	Persentase ketersediaan data gender dan anak tingkat kabupaten	%		0	0	0	0	100	0	0	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.07	Persentase pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan non pemerintah	%	53,33	56,92	60,51	66,15	66,15	68,72	71,28	71,28	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.08	Persentase lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang terfasilitasi	%	65	65	65	75	75	80	80	80	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.09	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		64,13	64,18	64,23	64,28	64,32	64,37	64,42	64,42	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.02.10	Skor capaian KLA		505	525	550	575	595	615	625	625	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan										

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.2.03.01	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	75,3	77,00	78,75	80,5	82,3	84,15	86	86,00	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.2.03.02	Penguatan cadangan pangan	Ton	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
4	Pertanahan										
C.2.04.01	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Paket	0	1	4	1	1	1	1	6	Sekretariat Daerah
5	Lingkungan Hidup										
C.2.05.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,58	64,68	64,78	64,88	64,98	65,08	65,18	65,18	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
C.2.05.02	Persentase sampah yang terkelola	%	6,75	6,79	8,24	9,82	12,57	14,72	16,5	16,5	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
C.2.06.01	Persentase Rata – Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	75,58	81,25	86,15	89,8	93,45	95,85	98,25	98,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.02	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	97,54	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.03	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	38,41	50	65	75	85	90	95	95	Dinas Kependudukan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											dan Pencatatan Sipil
C.2.06.04	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95,06	97	97,5	98	98,5	99	99,5	99,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.2.06.05	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	10	25	40	55	70	85	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
C.2.07.01	Persentase penyelenggaraan penataan desa mandiri dan maju	%	19,66	23,65	26,21	29,06	32,76	34,47	35,9	35,9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C.2.07.02	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	3,42	3,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C.2.07.03	Persentase Posyandu Aktif	%	98,11	98,11	98,11	98,23	98,35	98,42	98,56	98,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
C.2.08.01	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,41	2,4	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,35	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.02	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.2.08.03	Prosentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	%	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	12	12	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.04	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	21	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.05	Prosentase pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.06	Jumlah Lembaga dan Pendidikan Institusi yang di bina	Lembaga	0	39	39	39	39	39	39	39	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.07	Prosentase Ketersediaan Data	%	100		100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Perlindungan Anak
C.2.08.08	Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB	Gedung	9	2	3	2	2	2	2	22	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.2.08.09	Prosentase Pemenuhan BKB Kit/Stunting	%	23	23	34	55	66	77	88	88	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Perhubungan										
C.2.09.01	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	79,59	80,05	80,43	80,81	81,2	81,58	81,96	81,96	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan
C.2.09.02	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	%	20,18	25	27	30	33	35	37	37	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika										
C.2.10.01	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2	2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	2,9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
C.2.10.02	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Level	-	II	II	II	III	III	IV	IV	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
C.2.10.03	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	35,23	40	50	60	70	75	80	80	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah										
C.2.11.01	Volume usaha koperasi	Rp	485.813.822.000	490.671.960.220	495.578.679.822	500.534.466.620	505.539.811.287	510.595.209.399	515.701.161.493	515.701.161.493	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.02	Persentase Usaha Mikro	%	99,71	99,73	99,75	99,77	99,79	99,8	99,81	99,81	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.03	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	0	0	2	4	6	8	10	10	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.04	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	84,968	91,765	99,107	107,035	115,598	124,846	134,834	145,62	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.05	Persentase Koperasi Sehat	%	44,27	46,15	47,98	49,75	51,47	53,14	54,76	54,76	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.2.11.06	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Usaha Mikro	3,915	7	9	11	13	15	17	17	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
12	Penanaman Modal										
C.2.12.01	Nilai realisasi penanaman modal	Rp (juta)	141.219,50	145.456	149.820	155.812	162.045	170.148	178.655	178.655	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.02	IKM Pelayanan Perizinan	skor	85,63	85,2	85,8	86	86,2	86,3	86,4	86,4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.03	Jumlah investor berskala	Investor	118	121	125	130	135	142	149	149	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	nasional (PMDN/PMA)										
C.2.12.04	Persentase Kenaikan nilai realisasi penanaman modal (%)	%	141.219,5 Rp (juta)	3	3	4	4	5	5	5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.2.12.05	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	118 investor	3	3	4	4	5	5	5	
13	Kepemudaan dan Olah Raga										
C.2.13.01	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0	39,64	40,5	41	41,5	42	42,5	42,5	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.02	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	51,78	52,28	52,5	53	53,5	54	54,5	54,5	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.03	Tingkat Prestasi Olahraga	Medali	3 medali	9 Medali	120 Medali	10 Medali	15 Medali	20 Medali	140 Medali	317 Medali	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.04	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	-	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	42,00	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga
C.2.13.05	Persentase wirausaha muda	%	20,84	20,89	20,94	20,99	21,04	21,09	21,14	21,14	Dinas Pariwisata Pemudaan Dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.2.13.06	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	22,22	22,72	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.07	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	21,27	21,05	21,1	21,15	21,2	21,25	21,75	21,75	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.08	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	10,52	15,74	26,31	31,57	42,1	47,36	65,78	65,78	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.09	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	16,00	16,00	24,00	32,00	36,00	40,00	50,00	50,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
C.2.13.10	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	13,33	13,33	18,33	23,33	28,33	33,33	38,33	38,33	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
14	Statistik										
C.2.14.01	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	71	71	79	88	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
15	Persandian										
C.2.15.01	cakupan tingkat keamanan informasi	%	30	30	50	70	80	90	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Perhubungan
16	Kebudayaan										
C.2.16.01	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Buah	1	1	1	2	2	3	3	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.02	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Buah	2	1	1	2	2	3	3	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.03	Jumlah even kesenian tradisional yang dilenggarakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.2.16.04	Jumlah ritual adat istiadat yang dikelola	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.05	Jumlah situs/cagar budaya	Cagar Budaya	42	42	42	43	43	43	44	44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C.2.16.06	Persentase pelestarian warisan budaya	Persen	18,18	19,68	21,18	22,68	24,18	25,68	26,18	26,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Perpustakaan										
C.2.17.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skor	64,17	64,5	64,55	64,7	64,85	64,95	65	65	Sekretariat Daerah
C.2.17.02	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	23,5	23,7	23,85	24	24,25	24,5	24,75	24,75	Sekretariat Daerah
C.2.17.03	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,372	0,391	0,409	0,431	0,453	0,475	0,491	0,491	Sekretariat Daerah
C.2.17.04	Presentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	0,235	0,246	0,251	0,262	0,271	0,284	0,293	0,293	Sekretariat Daerah
C.2.17.05	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Skor	0,00085	0,00085	0,00087	0,00089	0,00092	0,00095	0,00097	0,00097	Sekretariat Daerah
C.2.17.06	Jumlah pasyarakatatan gemar membaca di masyarakat	TMB	79 TBM	21 TBM	21 TBM	21 TBM	21 TBM	21 TBM	21 TBM	21 TBM	Sekretariat Daerah
C.2.17.07	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	Paket	0	0	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
C.2.17.08	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Koleksi	0	0	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah
18	Kearsipan										

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.2.18.01	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	Persen	49.2	52.38	10.17 (6/59)	13.55 (8/59)	16.94 (10/59)	20.33 (12/59)	23.72 (14/59)	23.72 (14/59)	Sekretariat Daerah
C.2.18.02	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	54,12	53,5	30,08	31,78	35,97	38,91	41,86	41,86	
C.2.18.03	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	40	33,33	38,33	40	55	60	81,66	81,66	Sekretariat Daerah
C.2.18.04	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	49,2	52,38	10,17% (6/59)	8/59 (13,55%)	10/59 (16,94%)	12/59 (20,33%)	14/59 (23,72%)	14/59 (23,72%)	Sekretariat Daerah
3. Urusan Pemerintahan Pilihan											
1	Kelautan dan Perikanan										
C.3.01.03	Produksi perikanan	Ton	69.169,51	76.271,72	77.797,15	80.131,06	83.336,31	87.503,12	92.753,31	92.753,31	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.04	Konsumsi ikan	ton	30,5	31,5	32	32,5	33	35,5	34	34	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.3.01.05	Cakupan bina kelompok nelayan	kel	90	91	95	100	105	110	115	115	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.06	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	1770,21	1772,47	1774,75	1778,8	1813,56	1849,21	1885,98	1885,98	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.07	Nilai tukar nelayan	indeks	112	112	112	112	112	112	112	112	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.01.08	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	ton	70.710,00	77.984,00	79.543,68	81.929,99	85.207,19	89.467,55	94.835,60	94.835,60	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
2	Pariwisata										
C.3.02.01	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	5.911.302,824	6.121.720.501	6.305.650.000	6.494.819.000	6.689.664.000	7.091.043.000	7.445.595.000	7.516.506.470	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.02	Persentase peningkatan keanekaragaman produk ekonomi kreatif	%	0,96	0,41	1,26	2,5	3,65	4,7	5,61	5,61	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.03	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	658,17	450,34	1,492,793	1,537,577	1,583,705	1,631,216	1,680,152	1,680,152	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.04	Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata dan Kawasan Pariwisata Yang Telah Dikembangkan	Unit	8	8	8	8	8	8	8	8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.05	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	Rupiah	979.264.000	2.047.000.000	2.149.350.000	2.256.817.500	2.369.658.375	2.488.141.294	2.612.548.358	2.612.548.358	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.06	Tingkat hunian akomodasi	%	3	5	7	9	11	13	15	15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.3.02.07	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang terdaftar	%	4	5	5	5	6	6	6	6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.08	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	0	0	3,57	5,36	7,14	8,93	10,71	10,71	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.09	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	%	0	0,21	1,25	1,87	2,5	3,12	3,75	3,75	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.10	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	134 orang	2 orang	10	15	15	20	30	30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
C.3.02.11	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	658.036 orang	590.906 orang	5	3	3	5	10	10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Pertanian										
C.3.03.01	Persentase izin usaha pertanian	rekomendasi	1	1	2	3	4	5	6	6	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.03.02	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	1.304.465	1.304.465	1.317.813	1.332.090	1.346.923	1.362.377	1.378.401	1.378.401	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan
C.3.03.03	Meningkatnya penyuluhan pertanian	%	52,96	53,22	54,02	54,88	55,82	56,82	57,90	57,90	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.04	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Ton	970.205	972.146	974.576	977.500	980.921	984.845	989.277	989.277	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.05	Meningkatnya Produksi Hortikultura	Ton	73.718	190.058	192.035	194.032	196.050	198.089	200.149	200.149	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.06	Meningkatnya Produksi perkebunan	Ton	44.223	44.233	44.896	45.592	46.322	47.123	47.948	47.948	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.3.03.07	Meningkatnya Produksi peternakan	Ton	67.076	67.747	68.492	69.314	70.215	71.198	81.878	81.878	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.08	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	%	2	2	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,40	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
C.3.03.09	Meningkatnya Produksi Perikanan	Ton	70.710,00	77.984,00	79.543,68	81.929,99	85.207,19	89.467,55	94.835,60	94.835,60	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
4	Energi dan Sumber Daya Mineral										
C.3.04.01	Persentase perizinan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5	Perdagangan										
C.3.05.01	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.05.02	PDRB Sektor Perdagangan	Rp juta	6.807.282	7.144.880	7.499.266	7.871.230	8.261.643	8.671.420	9.101.523	9.101.523	BPS
C.3.05.03	Ekspor Bersih	\$	2,658,628.37	2.711.800,94	2.766.036,96	2.821.357,70	2.877.784,85	2.935.340,55	2.994.047,36	2.994.047,36	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.05.04	Perdagangan										
C.3.05.05	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	%	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.05.06	Cakupan pelayanan Tera dan tera ulang alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap lainnya (UTTP)	Unit	8.282	8.696	9.131	9.587	10.067	10.57	11.099	11.099	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
6	Perindustrian										
C.3.06.01	Pertumbuhan Industri	%	16.448 Unit Usaha	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,2	1,2	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.3.06.02	PDRB Sektor Industri	%	2.851.225	3.003.520	3.153.696	3.311.381	3.476.950	3.650.797	3.833.337	3.833.337	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.06.03	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	2,61	2,58	2,82	3,29	3,76	4,23	4,7	4,7	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
C.3.06.04	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
7	Transmigrasi										
C.3.07.01	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	KK		5	5	5	5	5	5	30	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
C.3.07.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket		-	2	2	-	2		6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4. Unsur Penunjang											
1	Sekretariat Daerah										
C.4.01.01	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretriati Daerah
C.4.01.02	Level kematangan/ maturitas pengadaan barang dan jasa	Level	N/A	N/A	5	6	7	8	9	9	Sekretriati Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.4.01.03	Persentase bahan kebijakan umum lingkup pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
C.4.01.04	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
C.4.01.05	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD										
C.4.02.01	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
5. Unsur Pendukung											
1	Perencanaan										
C.5.01.02	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Point	23,45	23,75	24,05	24,35	24,65	24,95	25,25	25,25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Keuangan										
C.5.02.01	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.5.02.02	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77	80	83	86	89	90	90	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.03	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30	5,30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.04	Persentase PAD	%	8,51	9,55	10,7	10,8	10,91	11,01	11,1	11,1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.05	terhadap pendapatan										
C.5.02.06	Persentase SILPA	%	3,19	2,94	2,69	2,44	2,19	1,94	1,69	1,69	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.07	terhadap APBD										
C.5.02.08	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.09	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	57,62	58,62	59	60	61	62	63	63	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.10	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	4,89	4,79	4,69	4,59	4,49	4,39	4,29	4,29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.11	Rasio PAD	%	0,82	0,89	1,16	1,24	1,32	1,41	1,51	1,51	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.12	Opini Laporan Keuangan	Interpretasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Pendapatan Daerah
C.5.02.13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	13,84	13,74	13,64	13,54	13,44	13,34	13,24	13,24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	8,21	8,11	8,01	7,91	7,81	7,71	7,61	7,51	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.15	Manajemen Aset		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,1	2,03	2,03	1,67	1,52	1,38	1,26	1,26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.17	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	0,82	0,89	1,16	1,24	1,32	1,41	1,51	1,51	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
C.5.02.18	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	0,0019	0,0023	0,0024	0,0025	0,0027	0,0028	0,003	0,003	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
C.5.03.01	Indeks Sistem Merit	Poin	280	285	312	320	357,5	357,5	365	365	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Penelitian dan Pengembangan										

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
C.5.04.01	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Kurang Inovatif	45 (Inovatif)	47 (Inovatif)	49 (Inovatif)	51 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	Badan Perncanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
C.5.04.02	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perncanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
6. Unsur Pengawasan											
1	Pengawasan										
C.6.01.01	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	81,75	82	83	84	85	86	87	87	Inspektorat Daerah
C.6.01.02	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	2	2	3	3	3	3	4	4	Inspektorat Daerah

Sumber : Bappeda Hasil Analisis 2021

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang berisi penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Jawa Barat 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dokumen RPJMD ini telah melalui tahapan sesuai dengan amanat ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, program pembangunan, upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana di bawah ini.

9.1. Pedoman Transisi

Guna menjamin konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dimasa transisi, maka dirumuskan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, sebelum ditetapkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 maka untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Kesembilan tentang Penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, pada Pasal 147 Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan pembangunan Daerah provinsi, kemudian RKPD Tahun 2022 menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, bahwa periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Mengacu pada ketentuan tersebut bahwa RKPD Tahun 2021 merupakan tahun terakhir RPJMD Tahun 2016-2021 dan tahun pertama RPJMD Tahun 2021-2026. Sehubungan dengan hal tersebut maka RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian dengan substansi RPJMD Tahun 2021-2026. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara pemetaan dan sinkronisasi target-target dan program pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2021 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dan dilakukan pada saat perubahan RKPD Tahun 2021.
3. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 akan berakhir pada tahun 2026, sedangkan periode Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru menetapkan bahwa pada tahun 2024 akan

diadakan Pemilihan Kepala Daerah (serentak) bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), maka diperlukan kepastian hukum dan acuan terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi tersebut sampai dengan adanya ketentuan terbaru yang menyatakan bahwa setelah tahun 2024 harus mengacu pada RPJMD yang baru.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan mengarahkan semua potensi dan sumberdaya;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD tahun 2021-2026, melakukan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar segera menyusun Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

5. Perangkat Daerah (PD) yang mengampu fungsi perencanaan daerah dibawah kepemimpinan Sekretariat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
6. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
7. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

RPJMD KAB. TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026